WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Walikota Balikpapan.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-Perangkat Daerah adalah rencana kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

RKPD Tahun 2018 dipergunakan sebagai:
a. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018; dan
b. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja-Perangkat Daerah Tahun 2018.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2018 memuat:
a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
b. program prioritas pembangunan Daerah; dan
c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.

(2) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

BAB	I	Pendahuluan
BAB	II	Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
BAB	III	Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah Tahun 2018
BAB	IV	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
BAB	V	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018
BAB	VI	Penutup

(3) Rincian lebih lanjut mengenai RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan RKPD Tahun 2018 dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Pasal 5

RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diubah dalam hal terjadi:
a. perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
b. penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD; dan
c. terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru pada RPJMD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 16 Juni 2018

WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 19 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2017 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE
NIP. 196108061990031004

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya. Salah satu dokumen perencanaan pambangunan daerah yang wajib disusun tersebut adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang, Pemerintah Kota Balikpapan telah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021. RPJPD Kota Balikpapan 2005-2025 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013, sedangkan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 telah ditetapkan pula melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016.

RKPD Kota Balikpapan adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta RKPD Provinsi. Secara substansi, RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan indikatif dan prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat maupun daerah ataupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Lebih lanjut, penjabaran substansi dalam RKPD dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:

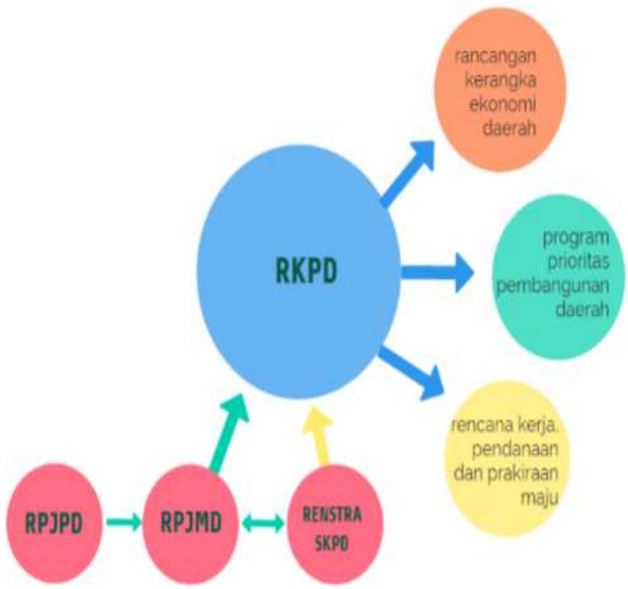

Gambar 1.1 Penjabaran Substansi RKPD

Visi pembangunan 5 (lima) tahun yang tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021 adalah:

"MEWUJUDKAN BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI, DAN BERKELANJUTAN MENUJU MADINATUL IMAN"

Sesuai dengan visi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021, RKPD Tahun 2018 merupakan tahun kedua perencanaan pembangunan lima tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Fokus pembangunan pada tahun 2018 yang merupakan tema pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2018 adalah "Peningkatan Infrastruktur Daerah yang mendukung Sektor Jasa, Industri dan Perdagangan Berwawasan Lingkungan".

Seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kota Balikpapan tahun 2018 diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan lima tahun yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2016-2021 serta pencapaian tema pembangunan tahun 2018. Selain itu, penyusunan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2018 juga mengacu pada pelaksanaan agenda pembangunan nasional (NAWA CITA) yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RKP Nasional Tahun 2018

serta program prioritas Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018.

Penyusunan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2018 dilakukan dengan menerapkan pendekatan politik, teknokratik, *top - down* dan *bottom - up*, serta partisipatif. Pendekatan politik dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 dilakukan dengan cara mengedepankan proses politik di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pada prinsipnya pendekatan politik memandang bahwa proses penyusunan rencana harus mengedepankan kehendak dan kepentingan rakyat pemilih yang sudah memberikan hak pilihnya kepada organisasi politik dan Kepala Daerah berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan. Selain itu, pendekatan politik juga dilakukan melalui pelibatan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) dan sinkronisasi atas hasil reses Anggota DPRD Kota Balikpapan.

Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 pada prinsipnya mengedepankan penggunaan metoda dan kerangka berpikir ilmiah dan sistematik dalam melakukan analisis masalah, menyusun perkiraan ekonomi makro dan menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan. Pendekatan teknokratik dilakukan melalui forum diskusi dan konsultasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pejabat fungsional perencana, tenaga ahli dari lembaga/institusi dan perguruan tinggi; serta staf perencana dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Pendekatan *top - down* dilakukan dengan mengacu pada agenda dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam dalam RPJMN 2015-2019 serta prioritas Provinsi Kalimantan Timur pada RPJMD Provinsi Kaltim Tahun 2013-2018. Pendekatan bottom - up dilakukan dengan memperhatikan usulan dari kelurahan dan kecamatan melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kota.

Pendekatan partisipastif dilakukan dengan mengembangkan forum konsultasi publik yang melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah tahun 2018.

Penyusunan RKPD Tahun 2018 juga mempertimbangkan pendekatan berbasis kewilayahan sesuai dengan permasalahan dan potensi setiap kelurahan dan kecamatan terutama dalam pengembangan sistem administrasi pemerintahan dan pusat-pusat pengembangan kawasan. Dengan menerapkan

seluruh pendekatan perencanaan tersebut, RKPD Kota Balikpapan Tahun 2018 diharapkan menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Selain disusun dengan beberapa pendekatan seperti dijelaskan diatas RKPD Kota Balikpapan Tahun 2018 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. persiapan penyusunan RKPD;
b. penyusunan rancangan awal RKPD;
c. penyusunan rancangan RKPD;
d. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RKPD;
e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
f. penetapan RKPD.

Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Setelah rancangan awal RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja Perangkat Daerah dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja Perangkat Daerah serta untuk mengharmoniskan dan mensinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Pada tataran praktis, sebagian kebijakan diwujudkan atau nyata terlihat dari program dan kegiatan yang diagendakan pada tahun 2018, yang secara implisit disebutkan dalam pernyataan tentang kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun rencana maupun jabaran program dan kegiatan prioritas yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung rencana pembangunan suatu daerah.

Tahap selanjutnya adalah Verifikasi dan Integrasi Program dan Kegiatan Prioritas, dengan tujuan pokok adalah menyangkut kesamaan materi antara program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sama dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas tiap Perangkat Daerah, termasuk informasi tentang indikator kinerja, selain itu juga memastikan agar program dan kegiatan prioritas telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Renja Perangkat Daerah terkait.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2005 – 2025;

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013 – 2018;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 – 2036;
16. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012–2032;
17. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan 2005–2025; dan
18. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kota Balikpapan Tahun 2018 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD Tahun 2018 merupakan bagian dari penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. Dokumen RKPD Tahun 2018 menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Balikpapan tahun 2018.

Hubungan dokumen RKPD Kota Balikpapan Tahun 2018 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan pada Gambar 1.2 sebagai berikut :

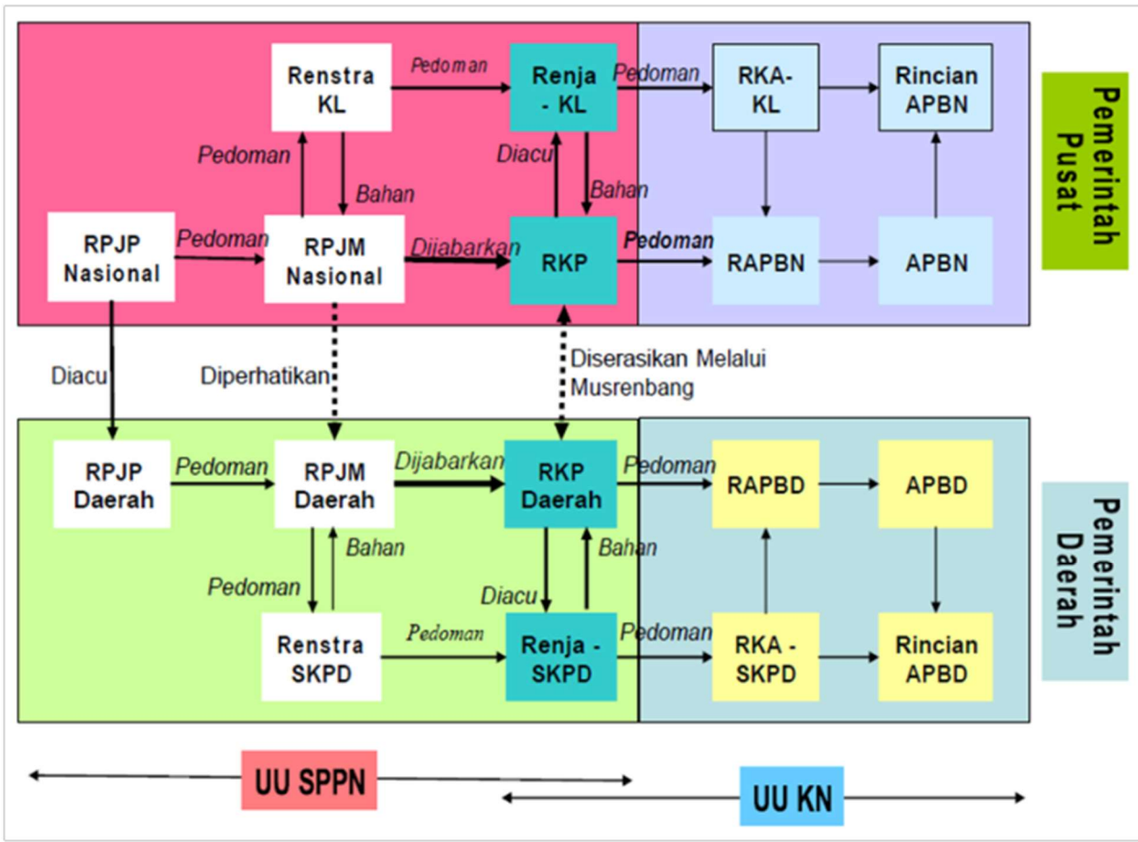

Gambar 1.2 Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah

Pada praktiknya, penyusunan RKPD 2018 juga disusun dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional dan provinsi. Penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019 serta RKPD Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan penjabaran RPJMD Provinsi Kaltim Tahun 2013-2018.

Dengan proses dan substansi materi yang lengkap dan proses yang sistematis, RKPD diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dokumen RKPD juga akan menjadi dasar penyusunan dokumen KUA dan PPAS. Dokumen KUA dan PPAS merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah tahun 2018 serta dasar penyusunan RAPBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2018. Dengan demikian, dokumen RKPD ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan APBD Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2017.

1.3.1. RKP Nasional 2018 dan RKPD Kota Balikpapan 2018

Dokumen RKPD Kota Balikpapan Tahun 2018 merupakan masukan bagi penyusunan prioritas RKP Tahun 2018 terutama menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas program dan kegiatan, serta kerangka pendanaan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).

Keterkaitan RKPD Tahun 2018 dan RKP Tahun 2018 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional Nawa Cita yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2015-2019 terutama dalam perwujudan:

Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;

Cita 2 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;

Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan

Cita 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;

Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;

Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan

Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Penyusunan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2018 juga memperhatikan arah kebijakan kementerian/lembaga yang tercantum dalam Renstra Kementerian/Lembaga sebagai penjabaran RPJMN Tahun 2015-2019. Dengan demikian, dokumen RKPD Kota Balikpapan Tahun 2018 merupakan dokumen yang integratif, komprehensif, sinergis, dan konstruktif dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

1.3.2. RKPD Provinsi Kalimantan Timur 2018 dan RKPD Kota Balikpapan 2018

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014. Berdasarkan RPJMD tersebut pembangunan Kota Balikpapan memperhatikan Arah Kebijakan Pembangunan diantaranya:

a. Menjabarkan program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD ke dalam RKPD Tahun 2018, dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD tahun 2016 dan mengacu Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 bagi Kabupaten/Kota;
b. Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, tahun 2017 merupakan Tahun kelima dari tahapan Mewujudkan Kalimantan Timur sejahtera yang merata dan berkeadilan berbasis agro industri dan energi ramah lingkungan dengan tema pembangunan Penguatan Ekonomi Masyarakat Menuju Kesejahteraan Yang Adil dan Merata.

1.3.2. RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021 dan RKPD Kota Balikpapan 2018

Dokumen RKPD Kota Balikpapan Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 untuk mewujudkan visi:

"MEWUJUDKAN BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI, DAN BERKELANJUTAN MENUJU MADINATUL IMAN"

dan 5 (lima) misi, yaitu:

1) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;
2) Mewujudkan kota layak huni yang berwawasan lingkungan;
3) Meningkatkan infrastruktur kota yang representatif;
4) Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif;
5) Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

Arah Pembangunan Tahun 2018 yang tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021 adalah “Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Mendukung Sektor Jasa, Industri dan Perdagangan Berwawasan Lingkungan”. Tema tersebut bermakna bahwa pembangunan Kota Balikpapan pada tahun 2018 akan lebih terfokus pada peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur kota sebagai wujud penguatan fungsi Kota Balikpapan sebagai

kota jasa, industri dan perdagangan dengan tetap mengedepankan konsep pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika RKPD Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

PERATURAN WALIKOTA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RKPD agar substansi pada bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Berisi Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2016 yang menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH TAHUN 2018

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2016 dan perkiraan tahun 2017, Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018, serta Arah Kebijakan Keuangan Daerah yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2016 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagimasyarakat.

BAB VI PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2018 diperlukan sinergisitas yang mantap di jajaran Pemerintah Kota Balikpapan, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD Tahun 2018 Kota Balikpapan ini adalah memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam menjabarkan perencanaan pembangunan tahun 2018 untuk mewujudkan capaian visi dan misi Wali Kota Balikpapan.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen RKPD Tahun 2018, yaitu:

a. Menyelaraskan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018 dalam upaya menjawab kebutuhan ril masyarakat Kota Balikpapan;
b. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS),dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018;
c. Merupakan landasan evaluasi untuk menetapkan program dan kegiatan daerah serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya; dan
d. Penjabaran RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah tahun kedua (Tahun 2018).

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kota Balikpapan merupakan salah satu kota di Provinsi Kalimantan Timur. Sejarah Kota Balikpapan tidak bisa dipisahkan dengan Minyak yaitu lebih tepatnya dengan sumur minyak Mathilda, sumur pengeboran perdana pada tanggal 10 Februari 1897 di kaki gunung Komendur di sisi timur Teluk Balikpapan. Penamaan sumur minyak ini berasal dari nama anak JH Menten dan Firma Samuel and Co sebagai pemenang hak konsesi pengeboran di yang ditunjuk pemerintah Hindia Belanda yang telah mengontrak Balikpapan dari Kesultanan Kutai.

Seiring dengan berkembangnya waktu Balikpapan telah berkembang menjadi "Kota Minyak" dengan besarnya produksi minyak sebesar 260 ribu barel per hari. Perkembangan industri minyak inilah yang telah membangun Balikpapan menjadi kota industri. Namun saat ini Balikpapan tidak lagi menjadi Kota Minyak yang berorientasi pada pengeboran melainkan pada jasa pengolahan minyak yang telah mengolah minyak mentah dari sekitar Balikpapan, yaitu Sepinggan, Handil, Bekapai, Sanga-sanga, Tarakan, Bunyu dan Tanjung serta minyak mentah yang diimpor dari negara lain.

Gambar 2.1
Posisi Strategis Kota Balikpapan

Sumber : RTRW Kota Balikpapan 2012-2032

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

a. Geografi

1) Letak, Luas dan Batas Wilayah

Secara administratif luas keseluruhan Kota Balikpapan menurut RTRW Tahun 2012-2032 adalah 81.495 Ha, yang terdiri dari luas daratan 50.330,57 Ha dan luas lautan 31.164,03 Ha. Secara geografis Kota Balikpapan terletak pada posisi 116,5º Bujur Timur dan 117,0 º Bujur Timur serta diantara 1,0 º Lintang Selatan dan 1,5 º Lintang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Dati II Samarinda dan Balikpapan dalam Wilayah Provinsi Dati I Kalimantan Timur, Kota Balikpapan terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tujuh Kelurahan dalam wilayah Kota Balikpapan dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan, secara administratif wilayah Kota Balikpapan terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) Kelurahan.

Gambar 2.2
Peta Wilayah Administrasi Kelurahan Kota Balikpapan

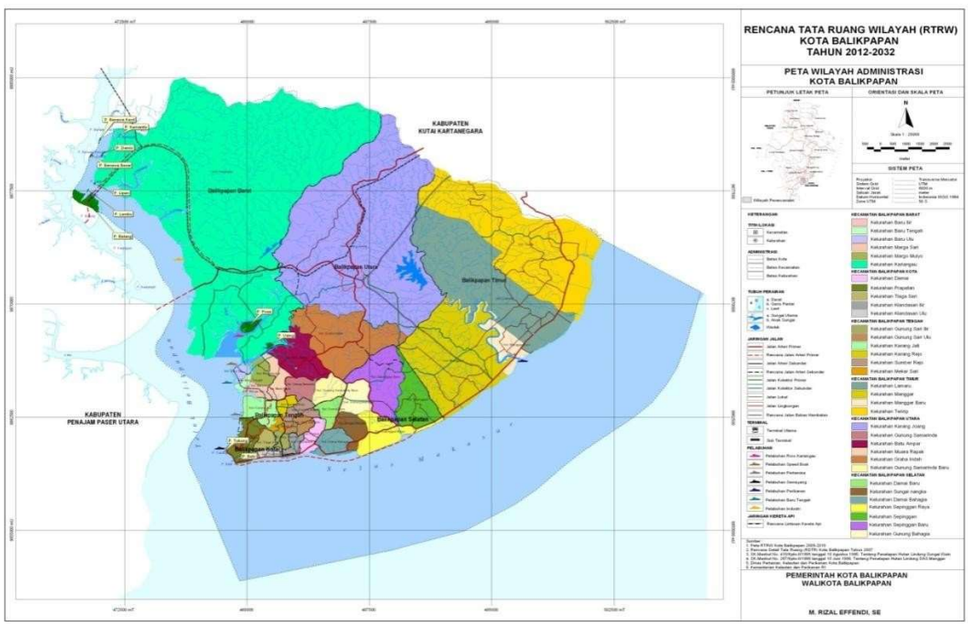

Sumber : RTRW Kota Balikpapan 2012-2032

2) Topografi

Secara umum Kota Balikpapan berada pada ketinggian 0 sampai 100 meter di atas permukaan laut. Klasifikasi terbesar yaitu berada pada ketinggian 20-100 mdpl dengan luas 20.090,57 ha atau 51,66 % dari luas wilayah, ketinggian >10-20 mdpl seluas 17.260 ha atau 34,17% dari luas wilayah dan ketinggian 0-10 mdpl seluas 6.980 Ha atau 13 % dari luas wilayah. Berikut tabel luas wilayah Kota Balikpapan dirinci menurut topografi (ketinggian).

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Topografi (Ketinggian)

No	Ketinggian mdpl	Luas Wilayah	
		(Ha)	*(%)*
1.	0-	6.980,00	13,86
2.	>10-20	17.260,00	34,29
3.	>20-100	26.090,57	51,85
Jumlah		**50.330,57**	**100,00**

Sumber: RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

Secara morfologis Kota Balikpapan terdiri dari 85% kawasan perbukitan dengan jenis tanah podsolik merah kuning yang memiliki karakter topsoil tipis, struktur tanah mudah tererosi. Sedangkan 15% lainnya merupakan daerah dataran yang terletak di sepanjang pantai timur dan selatan wilayah Kota Balikpapan dengan jenis tanah umumnya adalah alluvial.

Dari sisi topografis sebagian besar wilayah Kota Balikpapan berada pada kemiringan lereng antara 15-40% yaitu seluas seluas 21.305,57 Ha atau 42,33% dari luas wilayah keseluruhan. Tabel 2.2 berikut ini menunjukkan rincian luas wilayah Kota Balikpapan berdasarkan kelerengan.

Tabel 2.2
Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Kelerengan

No	Kelas Lereng	Luas Wilayah	
	(%)	*(Ha)*	*(%)*
1	0-2	7.050,00	14.
2	> 2-15	3.325,00	6.6
3	> 15-40	21.305,57	42.
4	> 40	18.650,00	37.
Jumlah		**50.330,57**	**100,00**

Sumber: RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

Untuk mengetahui kondisi kelerengan Kota Balikpapan berikut merupakan visualisasi dari kondisi kelerengan Kota Balikpapan dalam bentuk peta kelerengan (gambar 2.3).

Gambar 2.3 Peta Kelerengan Kota Balikpapan

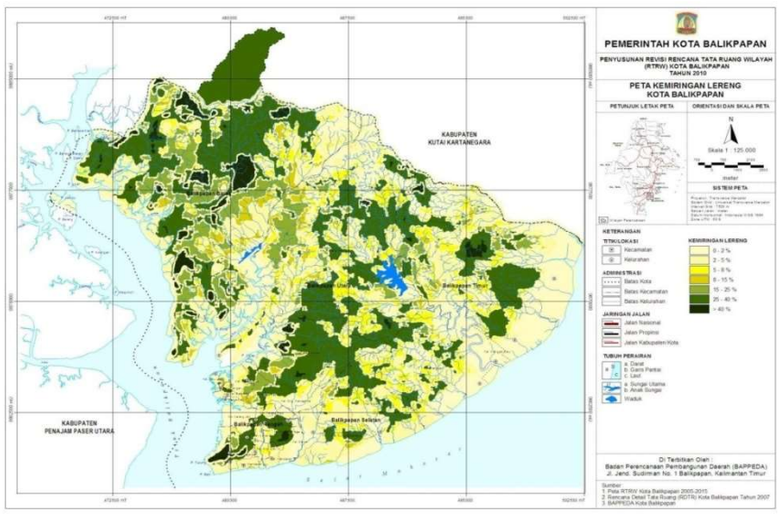

Sumber: RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

3) Geologi

Jenis tanah yang ada di Kota Balikpapan terbagi menjadi 5 (lima) jenis yang diantaranya adalah aluvial, marin, fluvio marin, volkan, tektonik/ struktural. Adapun di bawah ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai masing-masing jenis tanah yang ada di Kota Balikpapan.

- Tanah pada *Group Aluvial*

Berdasarkan bentuk tanah, satuan tanah ini merupakan dataran aluvial yang dominan (50-75%), terjadi pada kelerengan 1-3% dengan bahan induk "Aluvium".

- Tanah pada Group Marin

Bentukan lahannya berupa dataran pasang surut lumpur, mempunyai kelerengan < 1% dengan bahan induk aluvium. Jenis tanah ini umumnya terdapat disekitar Sungai Wain Besar dan Somber.

- Tanah pada Group Fluvio Marin

Ada 2 (jenis tanah) pada group ini yaitu:

1. Bentukan lahannya berupa dataran estuarin sepanjang muara sungai/pantai dengan kelerengan < 1% dan bahan induk aluvium. Tanah ini umumnya terdapat di kanan kiri sepanjang Sungai Manggar Besar.
2. Bentukan lahannya berupa dataran fluvio marin dengan kelerengan < 1% dan bahan induknya adalah aluvium. Jenis tanah ini terdapat di sepanjang pantai yang menghadap Selat Makassar.

- Tanah pada Group Volkan

Bentukan lahannya berupa bahan induk volkan. Tanah pada group volkan setara dengan regosol. Tanah ini berada di pantai di Balikpapan Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara.

- Tanah pada Group Tektonik/ Struktural

Pada tanah group tektonik, jenis tanah di bagi menjadi menjadi 5 jenis, yaitu:

1. Bentukan lahannya berupa dataran tektonik berombak agak tertoreh dengan bentuk relief berombak berkisar antara 3-8% dan bahan induknya batu liat dan batu pasir. Lokasi penyebarannya adalah di pusat kota tepatnya Kecamatan Balikpapan Selatan, Tengah dan Barat yang berbatasan langsung dengan Teluk Balikpapan.
2. Bentukan lahannya berupa dataran tektonik bergelombang, agak tertoreh dan relief bergelombang berkisar antara 8-15%. Bahan induk batu liat dan batu gamping. Penyebarannya meliputi Kecamatan Balikpapan Utara seperti di Kelurahan Muara Rapak, Kelurahan Gunung Samarinda, Kelurahan Batu Ampar dan Kelurahan Karang Joang.
3. Bentukan lahannya berupa dataran bergelombang cukup tertoreh dengan relief bergelombang 15-30% dan bahan induknya berupa batuliat dan batupasir. Penyebarannya disekitar Bangun Reksa, Karang Joang dan Manggar.
4. Bentukan lahannya berupa dataran tektonik bergelombang cukup tertoreh dengan relief berbukit kecil (15-30%) dengan bahan induk batuliat dan batupasir. Penyebarannya terutama di Kecamatan Balikpapan Barat dan sebagian kecil di Balikpapan Utara.
5. Bentukan lahannya berupa perbukitan paralel lipatan, sangat tertoreh dengan relief berbukit 15-30% dan bahan induknya berupa batu liat, batu pasir dan batu gamping. Penyebarannya di Karang Joang Km 15. Karena bahan induknya, adalah batu liat dan batu gamping maupun batupasir yang dominan, maka jenis tanah ini setara dengan jenis tanah Podsolik Merah Kuning.

Gambar 2.4 Peta Jenis Tanah Kota Balikpapan

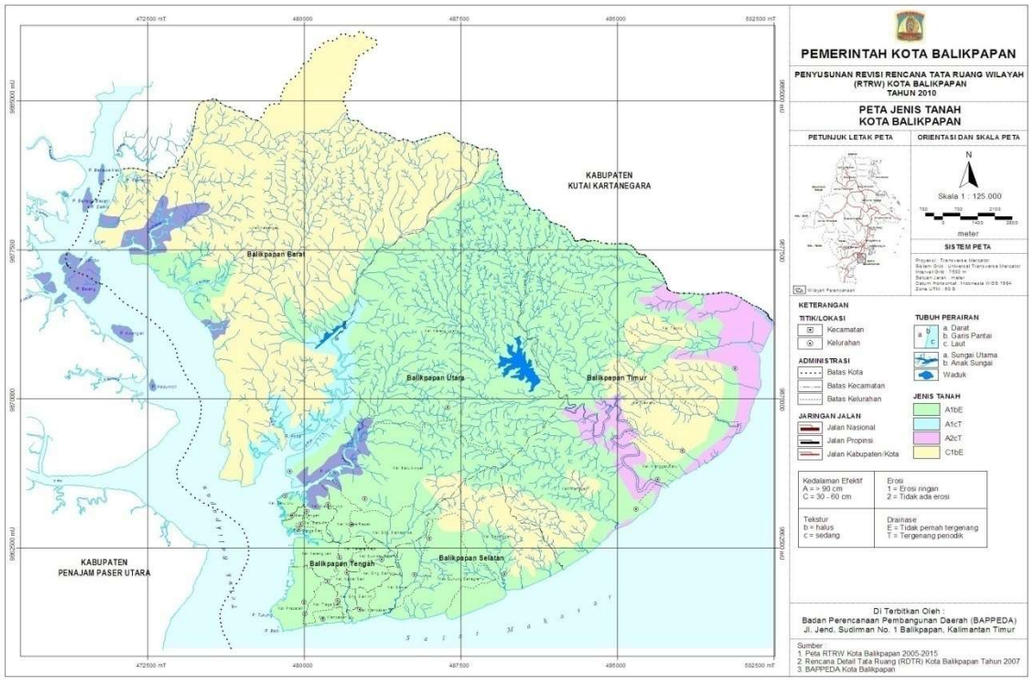

Sumber: RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

Struktur geologi yang dijumpai di Kota Balikpapan adalah lipatan yaitu antiklin. Sumbu antiklin ini memanjang dari barat daya ke arah timur laut melewati Kecamatan Balikpapan Tengah, Balikpapan Selatan dan Balikpapan Timur. Selain struktur antiklin di daerah Kota Balipapan juga dijumpai sejumlah patahan/sesar. Dipermukaan agak susah menentukan sesar karena tingkat pelapukan yang cukup tinggi serta litologi yang bersifat mudah lepas-lepas, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Chevron pada tahun 2006-2010.

Gambar 2.5
Peta Geologi Kota Balikpapan

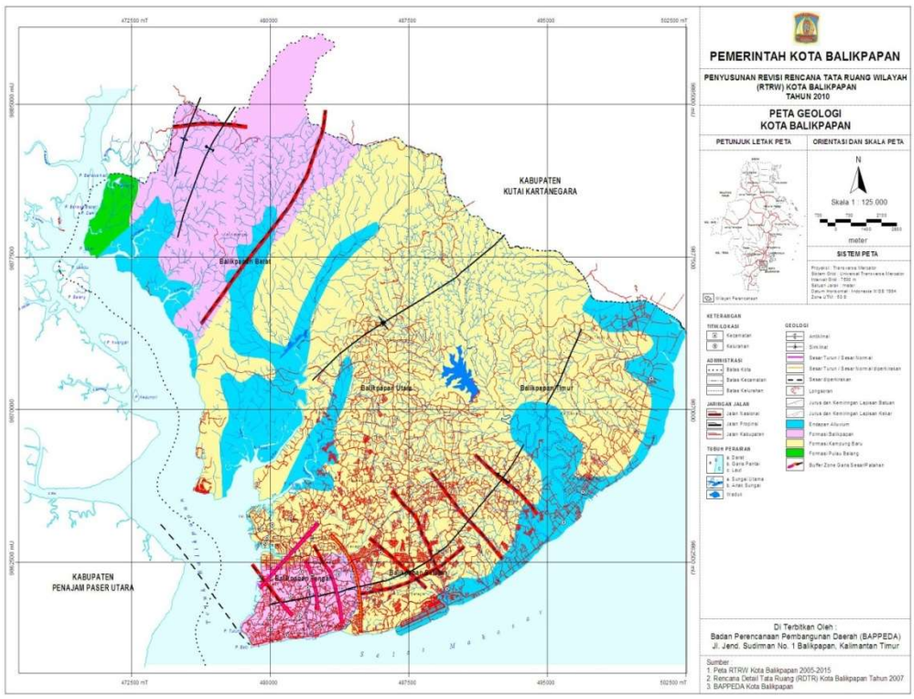

Sumber: RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut maka potensi bahan galian yang ada di Kota Balikpapan dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu potensi mineral non logam dan potensi batubara. Potensi mineral non logam yang ada di Balikpapan adalah batupasir kuarsa dan batulempung. Lokasi keterdapatan potensi mineral non logam terdapat di 4 (empat) wilayah kecamatan di Kota Balikpapan (Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan Timur, Balikpapan Utara dan Balikpapan Barat) memiliki pola sebagai berikut:

- Berada pada lahan dengan bentuk relief/morfologi berupa perbukitan.
- Jenis bahan galian batu lempung meliputi Kecamatan Balipapan Utara (Kelurahan Batu Ampar) dan Kecamatan Balikpapan Timur (Kelurahan Lamaru)
- Jenis bahan galian pasir kuarsa meliputi Kecamatan Balikpapan Timur (Kelurahan Lamaru)

Adapun keterdapatan potensi batubara meliputi wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan Timur dan Balikpapan Barat.

4) Kondisi Hidrologi

Potensi hidrologi yang terdapat di Kota Balikpapan meliputi air tanah dan air permukaan (sungai). Potensi air tanah di Kota Balikpapan termasuk

dalam klasifikasi cukup baik. Sesuai dengan kondisi topografi dan fisiografi wilayah yang berbukit, menyebabkan pola aliran air tanah yang terbentuk mengalir dari arah wilayah bagian utara menuju ke arah wilayah bagian selatan kota. Adanya keterbatasan penyediaan air bersih PDAM menyebabkan banyak penduduk yang memanfaatkan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Potensi air permukaan dapat dilihat dari banyaknya sungai-sungai besar di Kota Balikpapan, sebagai berikut:

Tabel 2.5
Daftar Sungai Besar di Kota Balikpapan

No	Nama Sungai	Panjang (m)
1	S. Wain	11.200
2	S. Somber	7.100
3	S. Klandasan Kecil	3.800
4	S. Klandasan Besar / Ampal	4.900
5.	S. Sepinggan	5.600
6.	S. Batakan Kecil	5.100
7.	S. Batakan Besar	9.500
8.	S. Manggar Kecil	7.200
9.	S. Manggar Besar	19.400
10.	S. Lamaru	2.300
11.	S. Ajiraden	2.100
12.	S. Teritip	4.200
13.	S. Selok Api	6.700

Sumber: Masterplan Drainase Kota Balikpapan

Selain sungai-sungai besar, juga terdapat sungai-sungai kecil yang jumlahnya mencapai 24 sungai. Berdasarkan peta Hidrogeologi Lembar Balikpapan, Kota Balikpapan secara umum dapat dilihat dari komposisi litologi batuan dan kelulusannya serta keterdapatan air tanah dan produktivitas akuifer. Berdasarkan kondisi tersebut, Kota Balikpapan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Komposisi Litologi Batuan dan Kelulusannya.

Berdasarkan komposisi litologi dan kelulusannya Kota Balikpapan seluruhnya masuk dalam kategori batu pasir, batu lempung pasiran, serpih dan konglomerat dengan sisipan napsi, batubara dan batu gamping.

- Keterdapatan Air Tanah dan Produktivitas Akuifer.

Berdasarkan keterdapatan air tanah dan produktivitas akuifer, Kota Balikpapan dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori besar, yaitu:

1. Akuifer dengan aliran melalui celahan dan ruang antar butir, yaitu:
   - Akuifer produktif sedang dengan penyebaran luas

     Akuifer dengan keterusan beragam, muka air tanah umumnya kurang dari 3 meter di bawah muka tanah setempat, debit air umumnya kurang dari 10 liter/detik. Akuifer ini umumnya tersebar di Kecamatan

Balikpapan Utara, sebagian kecil dari Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan Tengah dan di bagian selatan dari, Kecamatan Balikpapan Selatan

- Setempat, Akuifer produktif

  Akuifer dengan keterusan sangat beragam, umumnya muka air tanahnya dalam, di beberapa tempat mata air dengan debit kurang dari 2 liter/detik. Akuifer ini pada umumnya terdapat di Kecamatan Balikpapan Timur, sebagian Kecamatan Balikpapan Selatan dan Tengah.

2. Akuifer bercelah atau jarang, produktif kecil dan daerah air tanah langka, yaitu:

   Akuifer produktif kecil, Akuifer ini umumnya keterusan rendah, setempat air tanah dangkal dalam jumlah terbatas dapat diperoleh di lembah-lembah dan zona pelapukan batuan padu. Akuifer ini pada umumnya terdapat di Kecamatan Balikpapan Barat, sebagian kecil di Kecamatan Balikpapan Utara, Barat dan Timur.

Balikpapan termasuk dalam Wialyah Sungai Strategis Nasional Mahakam yang terdiri dari 32 Daerah Aliran Sungai (DAS). Adapun DAS di Wilayah Kota Balikpapan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.6.
Nama DAS di wilayah Kota Balikpapan

No	Nama DAS	Luas (ha)
1	Kemantis	285,95
2	Beruang	297,89
3	Tempadung	3.305,29
4	Sanrumukti	71,62
5	Beranga	998,05
6	Tengah	311,99
7	Seluk Pudak	174,94
8	Teluk Waru	218,71
9	Keminting	1.046,25
10	Tanjung Batu	102,58
11	Getah	408,99
12	Wain	11.527,36
13	Manggar Besar	9.242,58
14	Somber	4.142,26
15	Pandansari	996,86
16	Telagasari	207,09
17	Gunung Dubs	52,67
18	Klandasan Kecil	878,71
19	Kalndasan Besar	2.640,25
20	Saluran I	1.406,81

21	Saluran II	176,69
22	Sepinggan	1.827,00
23	Sepinggan Kecil	224,33
24	Batakan	289,99
25	Batangan Kecil	889,65
26	Manggar Kecil	1.921,58
27	Lamaru	511,03
28	Aji raden	1.366,40
29	Selok Api	2.425,98
30	Teritip	1.759,39
31	Teritip Tengah	517,94
32	Baru	103,16
	Total	**50.330**

Sumber: Masterplan Drainase Kota Balikpapan

5) Kondisi Klimatologi

- Iklim

Kota Balikpapan beriklim tropis, mempunyai musim yang hampir sama dengan wilayah yang ada di Kalimantan Timur pada umumnya, yaitu adanya musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Mei sampai bulan Oktober, sedang musim penghujan terjadi pada bulan November sampai dengan bulan April. Keadaan ini terus berlangsung setiap tahun yang diselingi dengan musim peralihan (pancaroba) pada bulan-bulan tertentu. Selain itu, karena letaknya di daerah katulistiwa maka iklim di Kalimantan Timur juga dipengaruhi oleh angin Muson, yaitu angin Muson barat November - April dan Angin Muson Timur Mei - Oktober.

- Suhu dan Kelembaban

Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dan pantai. Secara umurn Kota Balikpapan beriklim panas dengan suhu udara sepanjang tahun berkisar dari 21,7 – 34,7°C. Selain itu, sebagai daerah beriklim tropis, Kota Balikpapan mempunyai kelembaban udara relatif tinggi dengan rata-rata berkisar antara 82-91%.

- Curah hujan dan angin

Curah hujan di Kota Balikpapan sangat beragam menurut bulan. Rata-Rata curah hujan tertinggi dan terendah selama tahun 2009 yang tercatat pada stasiun meteorologi Kota Balikpapan masing-masing sebesar 64,4 mm dan sebesar 338,0 mm. Keadaan angin di Kota Balikpapan pada tahun 2009 yang dipantau dari Stasiun Meteorologi dan Geofisika Kota Balikpapan, menunjukkan bahwa kecepatan angin berkisar antara 4 sampai 6 knot. Kecepatan angin paling tinggi 6 knot terjadi pada bulan Juli sedang

terendah 4 knot terjadi pada bulan Maret, April, Oktober, November dan Desember.

Tabel 2.7.
Rata-Rata Suhu, Kelembaban, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Suhu Udara (^{0}C)					
	Maksimum	27,7	34,8	27,9	34,7	35,0
	Minimum	26,4	22,5	26,8	22,0	22,3
2.	Kelembaban Udara (%)	87,5	87,5	85,0	82,0	81,75
3.	Tekanan Udara (mb)	1.009,9	1.010,4	1.010,4	1.011,0	1.011,7
4.	Kecepatan Angin (knot)	5,4	5,0	4,5	5,4	4,00
5.	Curah Hujan (mm/th)	239,0	257,6	278,4	217,1	195,95
6.	Penyinaran Matahari (%)	51	62,5	49,0	45,2	53,11

Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka, 2012-2016

- Kondisi Oceanografi

Kota Balikpapan merupakan kota pesisir yang mempunyai pantai yang panjang. Berdasarkan RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032, kawasan pesisir direncanakan sebagai kawasan pariwisata, kawasan perikanan, dan kawasan perlindungan mangrove. Selain itu, juga akan dilakukan pengembangan *Waterfront City* melalui pembangunan *Coastal Area.* Prinsip utama pengembangan kawasan *Coastal Area* adalah membangun sekaligus melindungi lingkungan kawasan pinggir pantai serta mengelola penggunaan lahan (*land use*) yang lebih baik.

Berdasarkan kondisi geografis Pantai Balikpapan terletak diantara Selat Makasar dengan panjang *fatch* yang cukup besar, hal ini memungkinkan terjadinya gelombang angin yang cukup besar terutama yang ditimbulkan angin dari timur sampai dengan selatan. Berdasarkan data angin yang telah dihimpun dari Badan Meteorologi dan Geofisika Balikpapan, bahwa angin pada umumnya terbesar dan tersering adalah dari arah tenggara.

Sementara posisi pantai Balikpapan membentang ke arah Timur Laut-Barat Daya, sehingga berdasarkan kondisi di atas maka pembangkitan gelombang akibat angin akan digunakan hitungan dengan pengertian *Fully Developed Sea* (FDS) bila terhadap data angin dari arah selatan sampai dengan arah timur.

Sedangkan kondisi Bathimetri pantai Balikpapan secara umum rata-rata Bathimetri pantai Kota Balikpapan dapat digolongkan landai, kelandaiannya antara pantai di Kelurahan Prapatan ke arah timur sampai di

pantai Kelurahan Lamaru menunjukkan keadaan yang sama yaitu landai sekitar 2% sampai dengan 4%. Sedangkan pada bagian barat yaitu di kawasan Teluk Balikpapan memiliki kedalaman yang cukup sehingga berpontensi dalam pengembangan kawasan pelabuhan.

6) Penggunaan Lahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2032 rencana komposisi penggunaan lahan pola ruang (darat dan laut) yang direncanakan untuk Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

NO.	PEMANFAATAN LAHAN	2012-2032		KETERANGAN
		LUAS (Ha)	%	
I.	**KAWASAN LINDUNG**			
A.	**Kawasan Hutan Lindung**	**19,194.08**	**22.66**	
1	Kawasan Hutan Lindung	14,781.80		
2	Perluasan HLSW	1,402.39		
3	Buffer Zone Hutan Lindung	3,009.89		
B.	**Kawasan Perlindungan Bawahan**	**920.25**	**1.09**	
1	Kawasan Resepan Air			
C.	**Kawasan Perlindungan Setempat**	**6,531.18**	**7.71**	
1	Kawasan Waduk dan Embung	1,914.22		
2	Kawasan Sempadan Waduk dan Embung	1,254.59		
3	Kawasan Sungai	672.39		
4	Kawasan Sempadan Sungai	144.48		
5	Kawasan Sempadan Pantai	317.76		
6	Kawasan Sempadan Jalan Tol	229.69		
7	Kawasan Hutan Bakau	1,871.67		
8	Kawasan Buffer Zone (Peternakan, TPA, Sub Pusat Kota 2, KIKS)	126.40		
D.	**Kawasan RTH Kota**	**529.78**	**0.63**	
1	Kawasan Hutan Kota	226.53		
2	Kawasan RTH Kota (Makam, Lapangan, Taman)	303.26		
E.	**Kawasan Suaka Alam, Pedestrian Alam dan Cagar Budaya**	**345.98**	**0.41**	
1	Kawasan Agro Wisata	67.84		
2	Kawasan Kebun Raya	254.76		
3	Kawasan Wanawisata	19.16		
4	Kawasan Penangkaran Buaya	4.22		
F.	**Kawasan Jalur Migrasi Satwa**	**196.50**	**0.23**	

1	Kawasan Jalur Migrasi Satwa	196.50		
G.	**Kawasan Konservasi Pesisir dan Laut**	**6,222.30**	**7.35**	**Wil. Pesisir dan Laut**
1	Konservasi Pulau – Pulau Kecil	303.19		Wil. Pesisir dan Laut
2	Daerah Perlindungan Mangrove & Laut (DPML)	61.04		Wil. Pesisir dan Laut
3	Daerah Rawan Ranjau	5,727.25		Wil. Pesisir dan Laut
4	Zona Terlarang	114.82		Wil. Pesisir dan Laut
5	Terumbu Karang dan Padang Lamun	16.00		Wil. Pesisir dan Laut
	TOTAL KAW. LINDUNG	**33,940.07**	**40.08**	
II.	**KAWASAN BUDIDAYA**			
A.	**Kawasan Peruntukan Pertanian**	**3,531.36**	**4.17**	
1	Kawasan Pertanian Tanaman Hortikultura	1.251.67		
2	Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	145.45		
3	Kawasan Perkebunan	2,076.17		
4	Kawasan Peternakan	58.06		
B.	**Kawasan Peruntukan Perikanan**	**16,663.55**	**19.68**	
1	Kawasan Perikanan Darat	582.19		
2	Kawasan Minapolitan	190.56		
3	Kawasan Perikanan Budidaya Laut	3,178.48		Wil. Pesisir dan Laut
4	Kawasan Perikanan Tangkap	12,712.32		Wil. Pesisir dan Laut
C.	**Kawasan Peruntukan Perumahan**		**12.87**	
	Kawasan Perumahan	10,902.02		
D.	**Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa**	**2,523.58**	**2.98**	
	Kawasan Perdagangan dan Jasa	2,523.58		
E.	**Kawasan Peruntukan Perkantoran**	**56.14**	**0.07**	
	Kawasan Perkantoran	56.14		
F.	**Kawasan Peruntukan Industri**	**5,107.86**	**6.03**	
	Industri Besar	4,705.33		
	Industri Sedang	379.33		
	Industri Kecil	23.21		
G.	**Kawasan Peruntukan Pariwisata**	**449.40**	**0.53**	
	Kawasan Pariwisata	449.40		
H.	**Kaw. Peruntukan Pertahanan dan Keamanan**	**264.47**	**0.31**	
	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	264.47		
I.	**Kawasan Peruntukan Pelayanan Umum**	**10,821.83**	**12.78**	
1	Kawasan Bandara	372.05		
2	Kawasan Pelabuhan	31.45		
3	Kawasan Terminal	9.40		

4	Kawasan Alur Kapal	10,142.87		Wil. Pesisir dan Laut
5	Kawasan Fasilitas Pemerintah	215.49		
6	Kawasan TPA	18.17		
7	RSUD	0.93		
8	Kawasan Masjid Agung Balikpapan	0.94		
9	Kawasan Gereja	1.22		
10	Kawasan Dome	4.87		
11	Kawasan Stadion Olahraga	24.45		
J.	**Kawasan Pendidikan**	**426.56**	**0.50**	
	Kawasan ITK	340.73		
	Kawasan PONPES Syarif Hidayatullah	85.83		
	TOTAL KAW. BUDIDAYA	**50,746.76**	**59.92**	
	TOTAL	**84,686.84**	**100.00**	

7) Potensi Pengembangan Wilayah

Sebagaimana Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Tahun 2008 – 2028, Kota Balikpapan merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Pusat Kegiatan Nasional (PKN) tersebut adalah Kawasan Perkotaan Balikpapan – Tenggarong – Samarinda – Bontang. Kota Balikpapan memiliki peran penting skala nasional sebagai simpul transportasi laut dan udara nasional serta menjadi pusat produksi minyak yang diarahkan untuk memberikan suplai bagi cadangan bahan bakar minyak (BBM) di kawasan Kalimantan dan wilayah lain di Indonesia. Kota Balikpapan juga merupakan bagian kawasan andalan Kawasan Bontang – Samarinda –Tenggarong, Balikpapan Penajam dan sekitarnya (Bonsamtebajam) dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Samarinda, Sanga Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036, Kota Balikpapan berperan sebagai Kota Primer yaitu pusat yang melayani wilayah Provinsi Kalimantan Timur, wilayah Kalimantan bagian utara dengan wilayah internasional dan wilayah Kalimantan bagian timur dengan wilayah nasional dengan fungsi sebagai Pusat pemerintahan kota, Pusat perdagangan regional, Pusat industri, Pusat transportasi udara internasional, dan Pusat pengolahan migas. Arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2032 guna menjadikan Kota Balikpapan sebagai kota jasa yang dinamis, selaras dan hijau guna mendukung fungsinya sebagai Pusat Pertumbuhan Nasional, maka sistem pusat kegiatan Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

i. Pusat Pelayanan Kota (PPK)

Pengembangan Pusat Pelayanan Kota Balikpapan adalah meliputi kawasan Pusat Kota Balikpapan di Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Selatan. Kawasan Pusat Kota ini mempunyai fungsi sebagai kawasan pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa skala kota.

ii. Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK)

Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota Balikpapan meliputi rencana Pusat Kota Ke-2 Karang Joang di Kelurahan Karangjoang, Kecamatan Balikpapan Utara dan rencana Pusat Kota Ke-3/Kota Perdesaan Teritip di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur.

Kawasan Pusat Kota ke-2 Karang Joang berpusat di Kelurahan Karangjoang, Kecamatan Balikpapan Utara, melayani Kelurahan Muara Rapak, Kelurahan Batu Ampar dan Kelurahan Gunung Samarinda. Sub PPK ini mempunyai fungsi sebagai kawasan perdagangan jasa dan perkantoran dengan skala pelayanan bagian wilayah kota, pusat pelayanan kesehatan skala kota, dan pusat pelayanan transportasi.
Sedangkan sub PPK Pusat Kota ke-3/Kota Perdesaan mempunyai pusat di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur dengan wilayah pelayanan Kelurahan Manggar, Kelurahan Manggar Baru dan Kelurahan Lamaru dengan fungsi sebagai pusat pengembangan agro.

iii. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Pusat pelayanan lingkungan di Kota Balikpapan berada di ibukota kecamatan atau kelurahan yang potensial meliputi:

1. Kelurahan Margasari, melayani Kelurahan Baru Ulu, Kelurahan Baru Ilir, Kelurahan Margomulyo dan Kelurahan Baru Tengah di Kecamatan Balikpapan Barat dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala bagian wilayah kota;
2. Kelurahan Klandasan Ulu, melayani Kelurahan Klandasan Ilir, Kelurahan Prapatan, Kelurahan Telagasari, Kelurahan Damai di Kecamatan Balikpapan Kota, Kelurahan Sepinggan dan Kelurahan Gunung Bahagia di Kecamatan Balikpapan Selatan dengan fungsi sebagai kawasan perdagangan, jasa dan perkantoran skala kota;

3. Kelurahan Gunungsari Ilir, melayani Kelurahan Gunungsari Ulu, Kelurahan Karangrejo, Kelurahan Karangjati, Kelurahan Sumber rejo, dan Kelurahan Mekarsari di Kecamatan Balikpapan Tengah dengan fungsi sebagai kawasan perdagangan jasa dan perumahan skala bagian wilayah kota;
4. Kelurahan Manggar di Kecamatan Balikpapan Timur, melayani Kelurahan Manggar dan Kelurahan Manggar Baru dengan fungsi sebagai kawasan industri skala bagian wilayah kota;
5. Kelurahan Lamaru di Kecamatan Balikpapan Timur, melayani Kelurahan Teritip dan Kelurahan Lamaru dengan fungsi sebagai kawasan perumahan skala bagian wilayah kota; dan
6. Kelurahan Batu Ampar, melayani Kelurahan Muara Rapak, Kelurahan Batu Ampar dan Kelurahan Gunung Samarinda dengan fungsi sebagai kawasan perdagangan jasa dan perumahan skala bagian wilayah kota.

iv. Potensi sektor Industri

Menurut RTRW Kota Balikpapan tahun 2012 – 2032, kegiatan perindustrian yang membentuk kawasan dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: wilayah industri, kawasan industri, dan kawasan berikat. Selain ketiga jenis kawasan industri tersebut, terdapat juga kegiatan industri yang secara ketat mensyaratkan dekat dengan bahan baku utama. Kawasan rencana peruntukan industri di Kota Balikpapan terbagi atas:

1. Kawasan Industri Besar;
2. Kawasan Industri Sedang; dan
3. Kawasan Industri Kecil.

Kawasan peruntukan industri besar dengan luas kurang lebih 4.170 Ha terdapat di Kecamatan Balikpapan Barat (Kelurahan Margomulyo, Kelurahan Margasari dan Kelurahan Kariangau), Kecamatan Balikpapan Utara (Kelurahan Muara Rapak), Kecamatan Balikpapan Kota (Kelurahan Prapatan), dan di Kecamatan Balikpapan Tengah (Kelurahan Karang Jati).

Kawasan peruntukan industri menengah dengan luas kurang lebih 918 Ha terdapat di Kecamatan Balikpapan Timur (Kelurahan Manggar), Kecamatan Balikpapan Selatan (Kelurahan Sepinggan), Kecamatan Balikpapan Utara (Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Graha Indah,

Kelurahan Muara Rapak dan Kelurahan Karang Joang), dan di Kecamatan Balikpapan Barat (Kelurahan Margomulyo).

Kawasan peruntukan industri kecil/mikro terdapat di Kecamatan Balikpapan Barat (Kelurahan Margomulyo), Kecamatan Balikpapan Utara (Kelurahan Karang Joang), dan di Kecamatan Balikpapan Timur (Kelurahan Manggar, Kelurahan Manggar Baru, Kelurahan Lamaru dan Kelurahan Teritip).

Potensi kawasan industri Kota Balikpapan didukung oleh letak strategis yang berada pada ALKI II dan merupakan pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur serta wilayah Indonesia Bagian Timur. Dengan posisi tersebut Kota Balikpapan memiliki keunggulan kompetitif yakni sebagai alur lalu lintas kapal laut yang cukup padat sehingga potensial untuk mengembangkan industri maritim seperti: *shipdocking* (dok perbaikan kapal), *sparepart* dibidang marine, *supply base* dan sebagainya. Untuk mendukung potensi kawasan industri diatas dalam hal pemenuhan tenaga kerja, di Kota Balikpapan telah berdiri beberapa perguruan tinggi baik swasta maupun negeri, antara lain Institut Teknologi Kalimantan (ITK), Politeknik Negeri Balikpapan, UNIBA, UNTRI, STIKOM, STT Migas, dan lain sebagainya.

v. Potensi sektor Jasa dan Perdagangan

Sektor Jasa dan Perdagangan beberapa tahun belakangan ini memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Balikpapan yang sangat signifikan dan menunjukkan bahwa sektor ini berkembang cukup baik. Perkembangan ini didukung dengan adanya fasilitas Bandara Udara Aji Muhammad Sultan Sulaiman Sepinggan, Pelabuhan Laut Semayang, Kilang Minyak Pertamina, Kawasan Industri Kariangau (KIK) yang dilengkapi pelabuhan peti kemas dan rencana pembangunan costal area sehingga lebih memacu perkembangan sektor jasa dan perdagangan.

Potensi ini harus ditangkap dengan lebih baik lagi oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Sebagaimana kita ketahui Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi penghasil batubara yang cukup besar. Banyak perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur yang membutuhkan dukungan jasa penyediaan *sparepart* alat berat (seperti spare part “bulldozer, wheel

loader, dump truck", dll) dan jasa *supporting* lainnya. Selama ini kebutuhan tersebut masih harus didatangkan dari luar Kalimantan Timur, bahkan dari Singapura.

Potensi lainnya adalah pembangunan pergudangan dan "*stockpiles/stockyards*" untuk penyimpanan barang dan bahan makanan bagi keperluan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur dan kapal-kapal yang bongkar muat serta penyediaan jasa pelayanan air bersih untuk keperluan kapal-kapal yang bongkar muat dan singgah di pelabuhan Balikpapan juga perlu ditangkap dengan baik.

vi. Potensi sektor Pariwisata

Topografi Kota Balikpapan yang didominasi perbukitan dengan tutupan hutan yang cukup luas, menjadikan kota ini sebagai tempat potensial untuk wisata Hutan lindung dan kawasan Cagar Alam. Selain itu kota Balikpapan yang dikelilingi laut, juga menjadi objek yang menyajikan suguhan berbagai wisata pantai. Hal ini bila dikelola dengan baik maka akan menjadi sektor penting dalam mendukung perekonomian Kota Balikpapan. Pantai-pantai yang terkenal di Balikpapan seperti: Pantai Melawai, Pantai Lamaru, Pantai Manggar, Pantai Kemala dan lain-lain.

Pariwisata yang menonjol di Kota Balikpapan dapat digolongkan menjadi 2 obyek, yaitu pariwisata alam dan pariwisata buatan, dimana jumlah pariwisata buatan lebih banyak dibandingkan dengan pariwisata alam. Mengingat adanya keanekaragaman baik wisata alam dan wisata buatan tersebut, meningkatkan *tren* kunjungan wisatawan ke Kota Balikpapan setiap tahunnya baik dari wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Tempat wisata favorit untuk dikunjungi adalah Pasar Inpres Kebun Sayur, Monpera dan Pantai Manggar.

b. Demografi

Penduduk Kota Balikpapan cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Jumlah pendatang selama tahun 2016 sebanyak 29.201 jiwa. Salah satu penyebab terjadinya peningkatan penduduk tersebut adalah adanya urbanisasi yaitu perpindahan penduduk yang datang ke Kota Balikpapan.

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab utama arus urbanisasi tersebut. Jika dilihat Balikpapan adalah sebuah kota yang sedang dan mulai

berkembang baik dalam bidang pembangunan fisik maupun pembangunan ekonominya. Dengan semakin tumbuhnya perekonomian terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah, kota ini terus menerus dibanjiri oleh pendatang dari berbagai daerah.

Penduduk pada tahun 2016 berjumlah 762.492 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 1514,99 jiwa/km2. Jumlah kepala keluarga sebanyak 259.185 kepala keluarga dengan jumlah penduduk laki-laki 396.813 jiwa dan perempuan 365.679 jiwa.

Grafik 2.1

Jumlah Penduduk Per Kecamatan

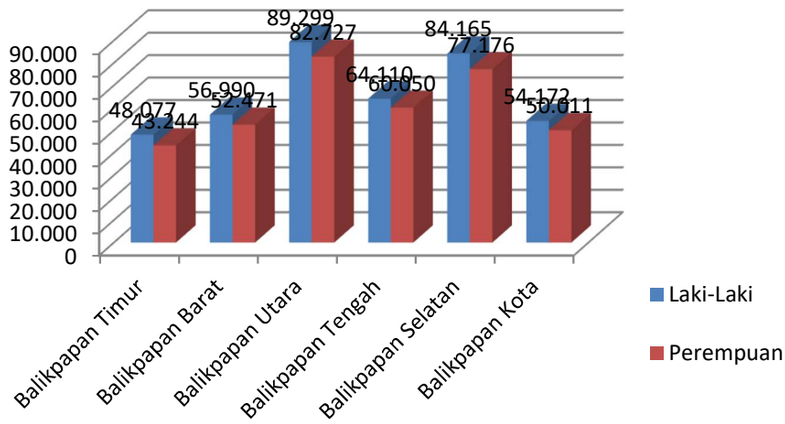

Sumber : Disdukcapil 2016

Seperti diketahui bahwa Kota Balikpapan sebagian besar wilayahnya berbatasan dengan lautan. Kepadatan penduduk yang ditentukan disini tanpa memilah terlebih dahulu menurut daerah yang tidak memungkinkan untuk dihuni. Hal ini dilakukan karena belum diketahui secara pasti berapa wilayah daratan dan lautan untuk setiap kecamatan dan kelurahan. Meskipun secara keseluruhan diketahui bahwa 503,3 Km2 (75,87%) wilayah Kota Balikpapan adalah daratan dan 160,1 Km2 (24,13%) adalah lautan.

Dengan luas wilayah 503,3 Km2 dan jumlah penduduk pada tahun 2016 sebanyak 762.492 jiwa, maka kepadatan penduduk Kota Balikpapan secara keseluruhan adalah 1.514,99 jiwa/Km2, artinya pada setiap kilometer persegi wilayah Kota Balikpapan dihuni oleh 1.514 sampai 1.515 orang penduduk.

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan tabel kepadatan penduduk di setiap wilayah Kecamatan/Kelurahan.

Tabel 2.8
Kepadatan Penduduk Kecamatan/Kelurahan Tahun 2016

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH (Km²)	KEPADATAN PENDUDUK
01.	**Balikpapan Timur**		**91.321**	**137,14**	**665,90**
1		Manggar	42.186	35,25	1.196,77
2		Lamaru	12.184	48,55	250,96
3		Teritip	16.371	49,51	330,66
4		Manggar Baru	20.580	3,83	5.373,37
02.	**Balikpapan Barat**		**109.461**	**179,93**	**608,37**
1		Baru Ilir	22.487	0,58	38.770,69
2		Baru Tengah	26.056	0,57	45.680,22
3		Baru Ulu	25.162	0,95	26.353,16
4		Kariangau	5.854	175,32	33,39
5		Margo Mulyo	16.025	1,84	8.709,24
6		Marga Sari	13.877	0,66	21.025,76
03.	**Balikpapan Utara**		**172.026**	**132,15**	**1.301,75**
1		Batu Ampar	37.062	10,55	3.511,99
2		Gunung Samarinda	24.616	2,70	9.106,92
3		Karang Joang	25.308	93,09	271,87
4		Muara Rapak	35.354	3,52	10.043,75
5		Gunung Samarinda Baru	11.229	3,03	3.705,94
6		Graha Indah	38.457	19,25	1.997,35
04.	**Balikpapan Tengah**		**124.160**	**11,05**	**11.236,20**
1		Gunung Sari Ulu	17.192	1,82	9.446,15
2		Gunung Sari Ilir	25.984	1,14	22.792,98
3		Karang Rejo	27.943	1,20	23.285,83
4		Karang Jati	15.288	3,41	4.483,28
5		Mekar Sari	15.029	1,28	11.741,41
6		Sumber Rejo	22.724	2,20	10.329,09
05.	**Balikpapan Selatan**		**161.341**	**37,78**	**4.270,99**
1		Sepinggan	34.767	7,81	4.450,46
2		Gunung Bahagia	23.738	3,73	6.364,08
3		Sepinggan Baru	30.836	10,61	2.906,31
4		Sepinggan Raya	18.752	6,58	2.849,85
5		Sungai Nangka	20.566	3,20	6.418,85
6		Damai Baru	9.829	2,14	4.592,99
7		Damai Bahagia	22.853	3,70	6.176,49
06.	**Balikpapan Kota**		**104.183**	**10,20**	**10.214,02**
1		Prapatan	15.037	3,14	4.788,85
2		Telaga Sari	21.036	2,53	8.314,62
3		Klandasan Ulu	17.257	0,89	19.389,89
4		Klandasan Ilir	28.666	1,43	20.046,15
5		Damai	22.187	2,21	10.039,37
Total			**762.492**	**503,30**	**1.514,99**

Sumber : Disdukcapil 2016

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama di dalam pembangunan. Pemerintah di dalam setiap implementasi kebijakan selalu menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Salah satu kebijakan pusat yang diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi

masyarakat daerah dalam mencapai kesejahteraan bersama adalah dengan otonomi daerah. Melalui desentralisasi, daerah diberikan keleluasaan untuk membangun dan memprakarsai pembangunan daerahnya sendiri, dan juga lebih mendekatkan kesejahteraan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengupayakan pembangunan atas dukungan keterlibatan masyarakat di daerah dan juga meningkatkan potensi yang dimiliki daerah untuk kepentingan masyarakat. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat menjadi kata kunci pelaksanaan otonomi daerah. Sehubungan dengan otonomi daerah tersebut merupakan kebijakan desentralisasi yang telah dilaksanakan Pemerintah provinsi, Kabupaten dan Kota. Desentralisasi tersebut memberikan ruang bagi daerah untuk menyusun strategi pembangunan daerah yang lebih baik agar kesejahteraan masyarakat dapat dicapai.

Keberhasilan pembangunan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari capaian kinerja pemerintah berdasarkan perkembangan makro ekonomi yang dipublikasikan per tiap tahun oleh Badan Pusat Statistik yang berada di tiap daerah, dalam hal ini Kota Balikpapan. Adapun perkembangan makro ekonomi di Kota Balikpapan yang memiliki keterkaitan terhadap capaian kinerja pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan sosial dengan penjelasan sebagai berikut.

1) Pertumbuhan Ekonomi

Kualitas perkembangan pembangunan suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dengan tingkat pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Walaupun begitu, pertumbuhan ekonomi bukanlah merupakan tujuan akhir dari pembangunan. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam pembangunan adalah kesejahteraan rakyat seluas-luasnya.

Perkembangan laju pertumbuhan PDRB di Kota Balikpapan selama 6 (enam) tahun terakhir (tahun 2011–2016) menunjukkan peningkatan Laju pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 3,58%. Berdasarkan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi tersebut berikut penjelasan LPE berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan

(ADHK) pada masa bakti Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode Balikpapan tahun 2011-2016.

Pada tahun 2011 LPE PDRB Kota Balikpapan sebesar 4,60% dan LPE PDRB meningkat pada tahun 2012 Kota Balikpapan 5,57 %. Namun pada tahun 2013 LPE PDRB mengalami perlambatan menjadi 3,60 % dipengaruhi oleh menurunnya PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada kategori lapangan usaha : 1) Pengadaan Listrik dan Gas Penyediaan LPE menurun 11,99%; 2) Jasa lainnya LPE menurun sebesar 6,70%; 3) Akomodasi dan Makan Minum LPE menurun sebesar 6,64% dan 4) Pertambangan dan Penggalian LPE menurun sebesar 5%.

Pada tahun 2014 LPE PDRB meningkat sebesar 1,06% dari LPE PDRB tahun 2013 menjadi 4,66%, peningkatan LPE tersebut disebabkan oleh meningkatnya LPE PDRB Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas dengan menyumbang LPE sebesar 16,66% dan Lapangan Usaha Jasa lainnya yang menyumbang LPE sebesar 6,21%.

Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan atau penurunan LPE sebesar 3,35% dari LPE PDRB tahun 2014. Penurunan LPE PDRB sebesar 3,35% tersebut menghasilkan LPE PDRB tahun 2015 mencapai 1,31 %. Terjadinya penurunan disebabkan oleh menurunnya LPE PDRB Lapangan usaha pada 12 kategori, adapun kategori yang memberikan pengaruh besar terhadap penurunan LPE PDRB tahun 2015 adalah jasa perusahaan dengan penurunan sebesar 8,14%, Informasi dan Komunikasi dengan penurunan sebesar 5,68%, dan Jasa Pendidikan dengan penurunan sebesar 8,14% serta 9 lapangan usaha yang menyumbang penurunan antara interval 0,09% - 4,83%.

Pada tahun 2016 berdasarkan LPE PDRB Kota Balikpapan mengalami perlambatan kembali dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1,56%, hal ini terjadi dikarenakan menurunnya kinerja di 17 kategori usaha pada PDRB ADHK dan masih berpengaruhnya ekonomi global dan penurunan komoditas sektor pertambangan yang merupakan motor penggerak utama.

Berdasarkan penjelasan diatas, berikut ini tergambar Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Kota Balikpapan pada tahun 2011-2016 sebagi berikut:

Grafik 2.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011-2016

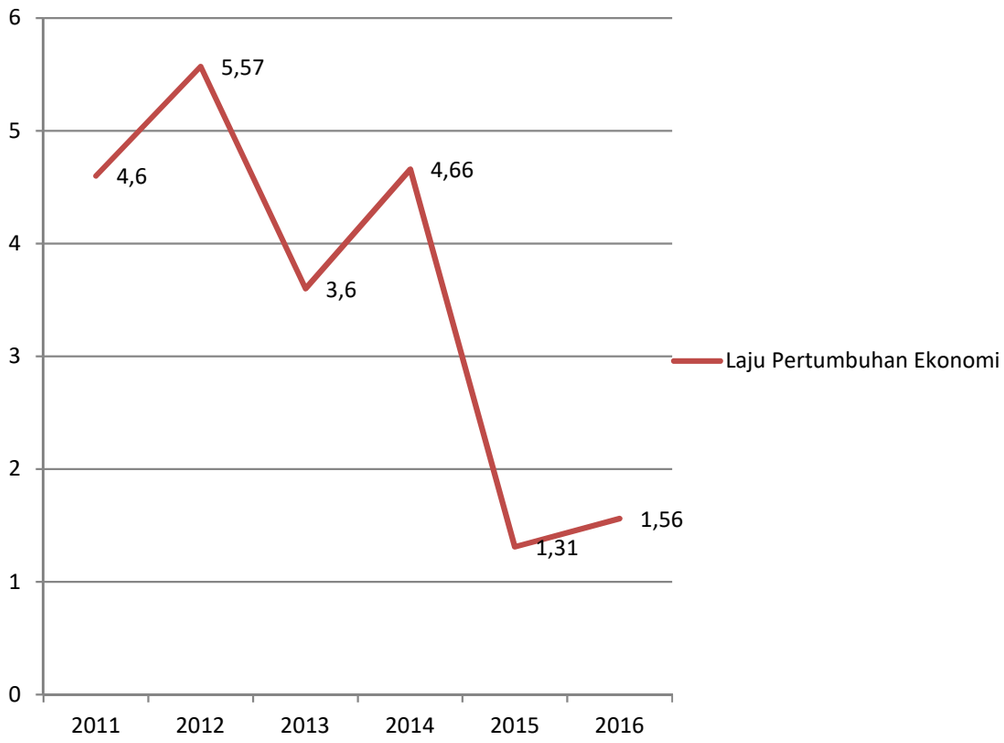

Sumber : BPS Balikpapan dan Bank Indonesia

Sejalan dengan gambar grafik 2.2. Adapun tren peningkatan Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 disajikan pada grafik berikut ini.

Grafik. 2.3
Indikator Makro Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Konstan

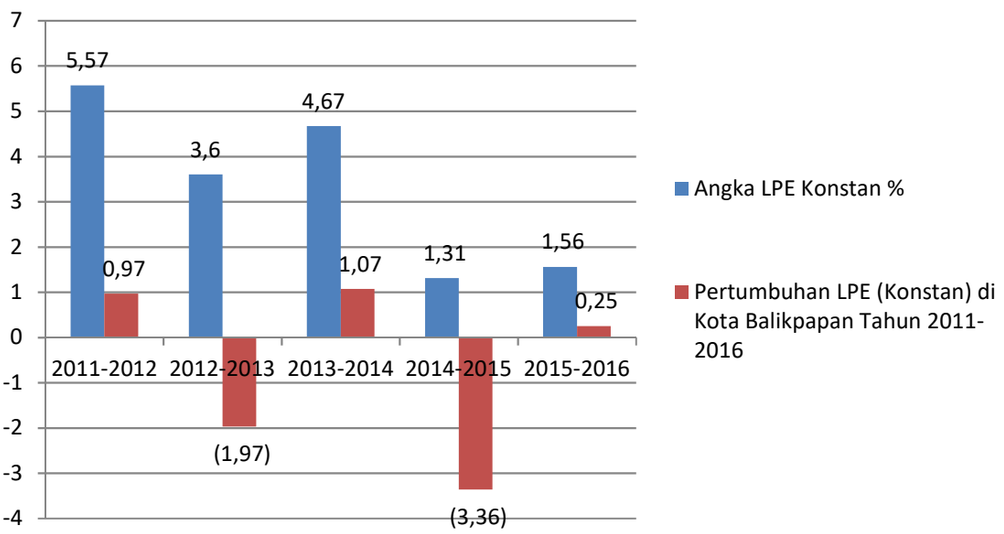

Sumber : BPS dan Bappeda Litbang

2) Laju Inflasi

Inflasi merupakan persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga, sebagai suatu indikator yang menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga dan dapat dipakai sebagai salah satu informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi mikro atau makro, baik fiskal maupun moneter.

Inflasi di Kota Balikpapan pada tahun 2016 adalah sebesar 4,13% lebih rendah dari tahun 2015 yang sebesar 6,26%. Dimana masih diatas inflasi Provinsi Kalimantan Timur sebesar 3,39% dan inflasi Nasional sebesar 3,03%. Kelompok bahan makanan, perumahan dan transportasi masih menjadi pemberi andil terbesar bagi inflasi di Kota Balikpapan. Kondisi khusus yang memicu inflasi ini adalah keterbatasan pasokan pangan dimana ±95% pasokan kebutuhan pangan masih didatangkan dari luar Kota Balikpapan, selain dipengaruhi oleh harga produksi barang itu sendiri, juga sangat dipengaruhi oleh biaya distribusi barang, infrastruktur bongkar muat di pelabuhan dan kondisi cuaca.

Tabel 2.9
Laju Inflasi Tahun 2010 – 2016

Bulan	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Januari	1,07	1,59	1,94	1,09	1,32	1,69	-0,21
Februari	1,91	2,05	1,85	1,64	1,14	2,42	0,28
Maret	2,55	2,38	2,11	2,52	1,04	1,69	0,25
April	2,82	2,84	2,66	2,64	1,83	1,36	-0,16
Mei	2,94	3,15	2,70	2,79	2,16	2,13	-0,02
Juni	3,33	4,58	2,96	3,56	2,66	3,38	1,72
Juli	6,21	6,45	4,48	7,44	3,29	5,49	2,76
Agustus	7,19	6,72	6,41	8,84	3,90	5,25	2,57
September	7,61	6,65	5,87	7,39	4,44	5,11	2,79
Oktober	6,66	6,49	5,48	7,52	3,93	6,03	2,71
November	6,61	6,17	5,40	7,16	5,00	5,46	2,71
Desember	7,38	6,45	6,41	8,56	7,43	6,26	4,13

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kota Balikpapan

Berdasarkan tabel diatas, adapun perbandingan laju inflasi di Kota Balikpapan pada tahun 2010-2016 tergambar pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.4
Perbandingan Laju Inflasi tahun 2010-2016 di Kota Balikpapan

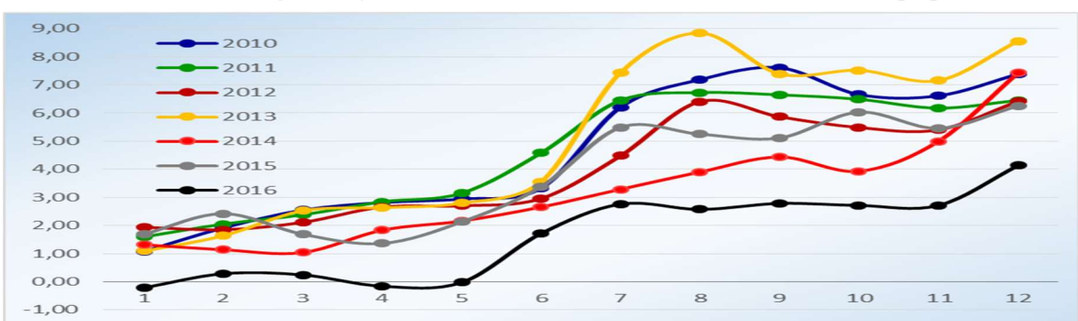

Sumber : BPS dan Bappeda Litbang

Untuk mengendalikan inflasi tersebut Pemerintah Kota melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Balikpapan telah melakukan upaya melalui kebijakan dan program pemerintah kota yaitu:

1. ASN Peduli Inflasi (telah di *launching* pada HUT Kota Balikpapan pada tanggal 10 Februari 2017).
2. Perusahaan Peduli Inflasi (telah di *launching* pada HUT Kota Balikpapan pada tanggal 10 Februari 2017) yang merupakan program forum komunikasi CSR Kota Balikpapan.
3. Program Sejuta Cabe, yaitu pembagian tanaman cabe ke masyarakat (telah di *launching* pada HUT Kota Balikpapan pada tanggal 10 Februari 2017).
4. Melanjutkan Sekolah Peduli Inflasi ke tingkat SMP dan pesantren (telah di *launching*/*Kick Off* pada tanggal 18 Maret 2017).
5. Membuka Kios Penyeimbang/Kios TPID dimana kios tersebut berada di dua pasar tradisional yaitu Pasar Klandasan dan Pasar Pandan Sari telah dianggarkan pada APBD tahun 2017.
6. Menambah jumlah Rumah Pangan Kita baik dari segi jumlah kios maupun jenis komoditas yang dijual.
7. Melanjutkan Kegiatan Operasi Pasar sewaktu-waktu khusus untuk berasdan komoditas lainnya.
8. Klaster Bawang Merah, sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan harga pangan bawang merah.
9. TPID akan memasukkan operator bandara, yaitu Angkasa Pura, dalam tim teknis TPID, mengingat dampak tarif angkutan udara menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi *seasonal* pada momen hari raya.
10. Melakukan pendataan harga di pasar setiap hari serta penyampaian informasi harga melalui PIHPS dan *Web site* sahabat.co.
11. Kerjasama daerah pemasok antara pelaku usaha dengan pelaku usaha, pelaku usaha dengan pemerintah daerah.
12. Pembangunan Terminal Barang dan Pergudangan.
13. Pembangunan *container base* di Kawasan Industri Kariangau (KIK) dan pelabuhan khusus untuk pangan strategis.
14. Difungsikannya Pelabuhan Feri Somber (Balikpapan-Mamuju).
15. Pengembangan Jaringan gas rumah tangga.

3) Indeks Gini

Pemerataan hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Secara logika, jurang pemisah (gap) yang semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin berarti kemiskinan semakin meluas dan sebaliknya. Dengan demikian orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan antara lain dengan Indeks Gini atau Gini Ratio. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan adalah G<0,30 berarti ketimpangan rendah, 0,30 ≤ G ≤ 0,50 berarti ketimpangan sedang dan G > 0,50 berarti ketimpangan tinggi.

Secara visual nilai Gini Rasio dapat dilihat berdasarkan kurva Lorenz, yaitu kurva dua dimensi yang memetakan distribusi penduduk dan distribusi pendapatan. Pada kurva Lorenz, distribusi pendapatan akan semakin timpang jika bentuk kurvanya semakin cembung ke bawah dan sebaliknya akan semakin merata jika garis lengkungnya mendekati garis diagonal. Menurut kritera bank dunia yang membagi kelas pendapatan penduduk menjadi 3 kelompok, yaitu 40% penduduk dengan pendapatan terendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah, dan 20% penduduk dengan pendapatan tinggi. Tingkat kemiskinan digolongkan parah jika 40% penduduk berpendapatan terendah menerima kurang dari 12% dari total pendapatan, digolongkan sedang jika 40% penduduk dengan pendapatan terendah menerima 12%-17% dari total pendapatan, dan digolongkan rendah jika 40% penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17% dari total pengeluaran.

Gambar 2.5
Kurva Lorenz dari Distribusi Pendapatan Kota Balikpapan 2015

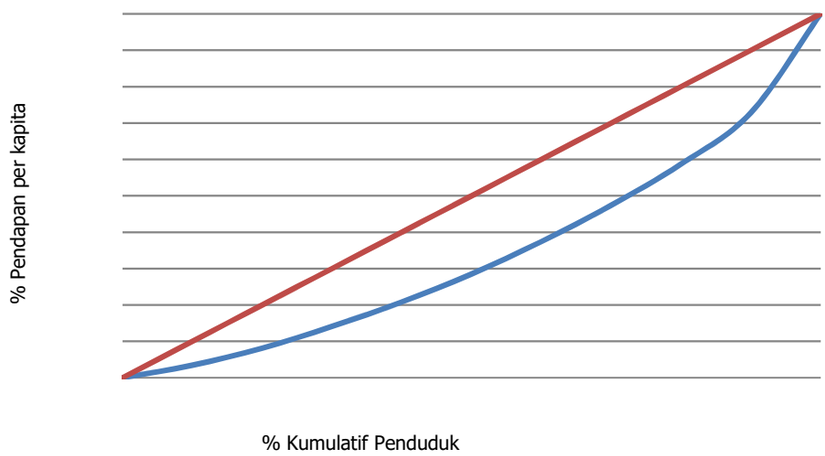

Sumber : BPS Kota Balikpapan

Gini Ratio Kota Balikpapan tahun 2016 tercatat sebesar 0,34 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masih tergolong sedang. Demikian pula jika dilihat dari distribusi pendapatan menurut kriteria Bank Dunia, 40% penduduk dengan pendapatan terendah di Kota Balikpapan menikmati 20,80% dari total pengeluaran, menunjukkan tingkat kemiskinan yang tergolong rendah.

Tabel 2.12.
Distribusi Pendapatan dan Gini Ratio di Kota Balikpapan Tahun 2011-2016

Kelas Pendapatan	2011	2012	2013	2014	2015*	2016*
40% Rendah	20,43	19,48	20,84	20,07	20,80	20,80
40% Sedang	36,74	34,59	39,71	36,49	37,95	37,95
20% Tinggi	42,83	45,93	39,46	43,44	41,25	41,25
Gini Ratio	**0,33**	**0,36**	**0,30**	**0,34**	**0,34**	**0,34**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, 2016

b. Fokus Kesejahteraan Sosial

IPM

Dalam perspektif UNDP, pembangunan manusia (*human development*) dirumuskan sebagai perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging the choices of people*), yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah "perluasan pilihan" dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut (UNDP, 1990). "Perluasan pilihan" hanya mungkin dapat direalisasikan jika penduduk paling tidak memiliki: peluang berumur panjang dan sehat, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan yang produktif. Dengan kata lain, tingkat pemenuhan ketiga unsur tersebut sudah dapat merefleksikan, secara minimal, tingkat keberhasilan pembangunan manusia suatu wilayah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh

UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR).

Pada saat yang sama pembangunan manusia dapat dilihat juga sebagai pembangunan (*formation*) kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan dan keterampilan sekaligus sebagai pemanfaatan (*utilization*) kemampuan/keterampilan mereka tersebut. Konsep pembangunan di atas jauh lebih luas pengertiannya dibandingkan konsep pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan (*economic growth*), kebutuhan dasar (*basic needs*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), atau pengembangan sumber daya manusia (*human resource development*).

Paradigma pembangunan manusia UNDP mengandung empat komponen utama:

- Produktivitas (*productivity*)
  Manusia harus berkemampuan untuk meningkatkan produktivitasnya dan berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan dan lapangan kerja.
- Pemerataan (*equity*)
  Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapuskan sehingga semua orang dapat berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan dari peluang yang tersedia.
- Kesinambungan (*sustainability*)
  Akses terhadap peluang/kesempatan harus tersedia bukan hanya untuk generasi sekarang tapi juga untuk generasi yang akan datang. Semua bentuk sumber daya manusia, sumber daya alam yang dapat diperbarui.
- Pemberdayaan (*empowerment*)
  Pembangunan harus dilakukan untuk semua orang, bukannya semata-mata dilakukan untuk sebagian orang. Semua orang harus berpartisipasi penuh untuk proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Pembangunan manusia dapat juga dilihat dari sisi pelaku atau sasaran yang ingin dicapai. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) disebutkan bahwa manusia adalah sebagai subjek sekaligus objek pembangunan, maka seharusnya pembangunan ditujukan atau bertitik berat pada pembangunan manusia itu sendiri. Dengan demikian harus ada perubahan pandangan yang dulunya pembangunan di Indonesia hanya dilihat

dari peningkatan bidang ekonomi semata, digeser ke arah pembangunan manusia melalui strategi pemberdayaan masyarakat. Dalam kaitan ini UNDP melihat pembangunan manusia sebagai semacam model pembangunan tentang penduduk berupa investasi dibidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial lainnya; untuk penduduk berupa penciptaan peluang kerja melalui perluasan ekonomi dalam negeri; oleh penduduk berupa upaya pemberdayaan penduduk dalam menentukan harkat dan martabat manusia dengan partisipasi dalam proses politik dan pembangunan.

Agar konsep pembangunan manusia dapat dengan mudah diterjemahkan ke dalam pembuatan kebijakan, pembangunan manusia harus dapat diukur dan dipantau dengan mudah. Sebagai alat untuk mengukur/pengontrol pembangunan manusia yang telah dilakukan, sejak tahun 1990 United Nations (PBB) memperkenalkan suatu model untuk melihat pemberdayaan manusia melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia.

Pembangunan Manusia di Kota Balikpapan terus mengalami perbaikan, terlihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia yang terus meningkat dari tahun 2010 – 2015. IPM Kota Balikpapan naik 2,63 poin dalam jangka waktu enam tahun (lihat gambar 3.1). Capaian peningkatan IPM ini menunjukkan indikasi positif bahwa kualitas manusia di Kota Balikpapan yang dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi juga semakin baik.

Grafik. 2.6
Tren IPM Kota Balikpapan 2010-2015

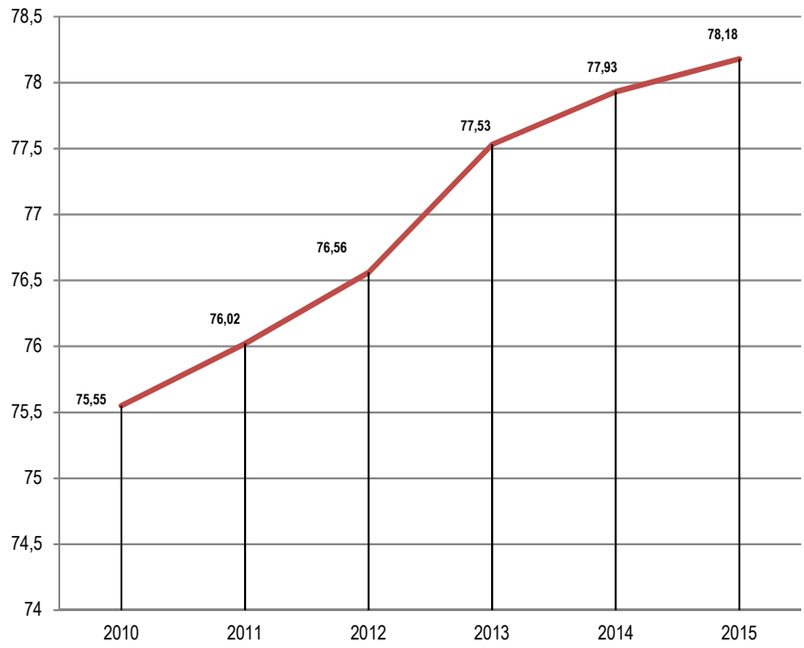

Sumber : Balikpapan dalam Angka 2015

1) Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

Tinggi rendahnya pendidikan merupakan cerminan dari kualitas penduduk, oleh karena itu pendidikan dapat dijadikan ciri kualitas suatu bangsa dan kualitas pembangunan serta merupakan ukuran dari derajat kepekaan penduduk terhadap pembangunan baik sebagai pelaku pembangunan maupun sebagai objek pembangunan.

Aspek pendidikan pada IPM dicerminkan oleh Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Capaian RLS/MYS mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2011 sebesar 10,16 tahun 2012 sebesar 10.29, tahun 2013 sebesar 10.39, tahun 2014 sebesar 10.41, tahun 2015 sebesar 10.44 dan pada tahun 2016 sebesar 10.54. Hal tersebut menunjukan pertumbuhan uang positif dan merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia di Kota Balikpapan, secara rata-rata penduduk di Kota Balikpapan telah mengenyam pendidikan hingga SMA. Sementara capaian HLS/EYS meningkat dari 12,27 tahun pada tahun 2011 menjadi 13,59 tahun pada tahun 2016. Hal tersebut menunjukan bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA.

Grafik. 2.7.
Indikator Pendidikan Kota Balikpapan, 2010-2015

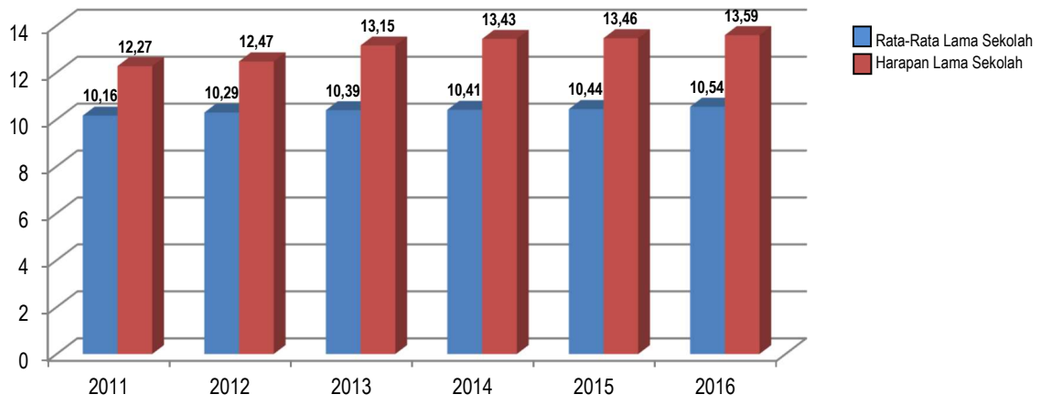

Sumber : Balikpapan dalam Angka 2015

2) Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup menggambarkan derajat kesehatan penduduk. Angka ini dipengaruhi oleh beberapa variabel yang diidentifikasi sangat erat kaitannya dengan masalah kesehatan penduduk. Agar tercipta derajat kesehatan yang lebih baik, maka beberapa variabel yang memiliki hubungan terhadap angka harapan hidup perlu lebih diperhatikan, seperti persentase penolong persalinan medis, jumlah dokter, persentase angka kesakitan, keadaan lingkungan perumahan dan penyediaan air bersih.

Grafik. 2.8
Angka Harapan Hidup Kota Balikpapan 2010-2015

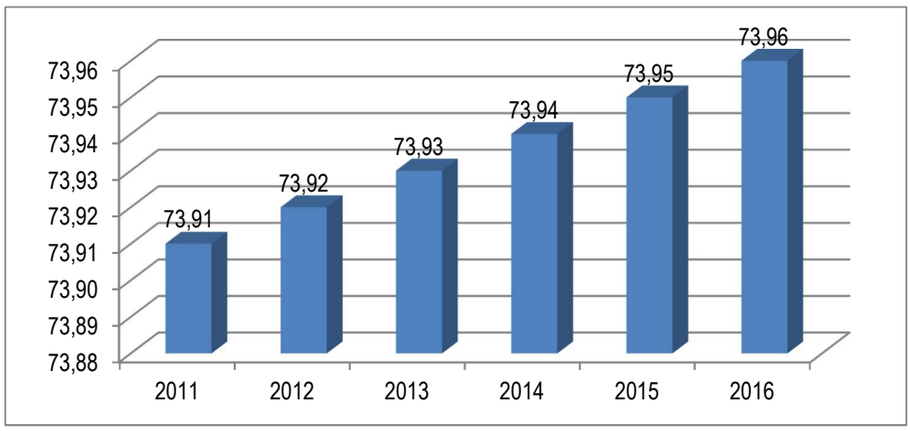

Sumber : Balikpapan dalam Angka 2015

Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Balikpapan yang merepresentasikan bahwa aspek kesehatan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 terus mengalami peningkatan. Semakin meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) di Kota Balikpapan mengindikasikan bahwa derajat kesehatan masyarakat di Balikpapan semakin membaik karena AHH merupakan salah satu tolok ukur derajat kesehatan masyarakat.

3) Pengeluaran Per Kapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga berkaitan erat dengan kemampuan konsumsi dan daya beli masyarakat pada skala rumah tangga. Semakin tinggi angka konsumsi rumah tangga (RT), maka secara umum kemampuan ekonomi masyarakat juga mengindikasikan perkembangan yang positif. Konsumsi rumah tangga ini dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa kelompok konsumsi, diantaranya adalah konsumsi makanan dan non makanan. Dengan adanya pengelompokan pengeluaran tersebut, maka dapat diidentifikasi perkembangan karakteristik pengeluaran masyarakat selama ini.

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah dsb), dibuat untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar pangan. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita merupakan persentase konsumsi RT untuk non pangan, yaitu proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran.

Tabel 2.12

Perkembangan Pengeluaran Perkapita Rumah Tangga Kota Balikpapan
Tahun 2010-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
1.	Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan kelompok non makanan	667.415	731.017	740.255	902.035	863.838	1.040.336
2.	Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Kelompok Makanan	456.369	550.409	589.405	586.750	637.826	762.623
3.	Rata-rata Pengeluaran Sebulan	1.123.784	1.281.426	1.329.660	1.488.785	1.501.664	1.802.959

Sumber: Data diolah, Balikpapan Dalam Angka 2015.

Berdasarkan diatas menunjukan peningkatan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2015. Peningkatan Pengeluaran Perkapita Rumah

Tangga di Kota Balikpapan diproyeksikan sejumlah Rp1.802.959 atau mengalami peningkatan terhadap tahun 2015 sebesar 16,71%. Peningkatan pengeluaran tersebut dipengaruhi oleh peningkatan PDRB Perkapita Kota Balikpapan, artinya peningkatan memiliki hubungan kasualitas satu arah antara pendapatan dan pengeluaran rumah tangga pada tahun 2016. Terkait peningkatan tersebut tergambar pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.9
Nilai Pengeluaran Perkapita Rumah Tangga Tahun 2011-2016

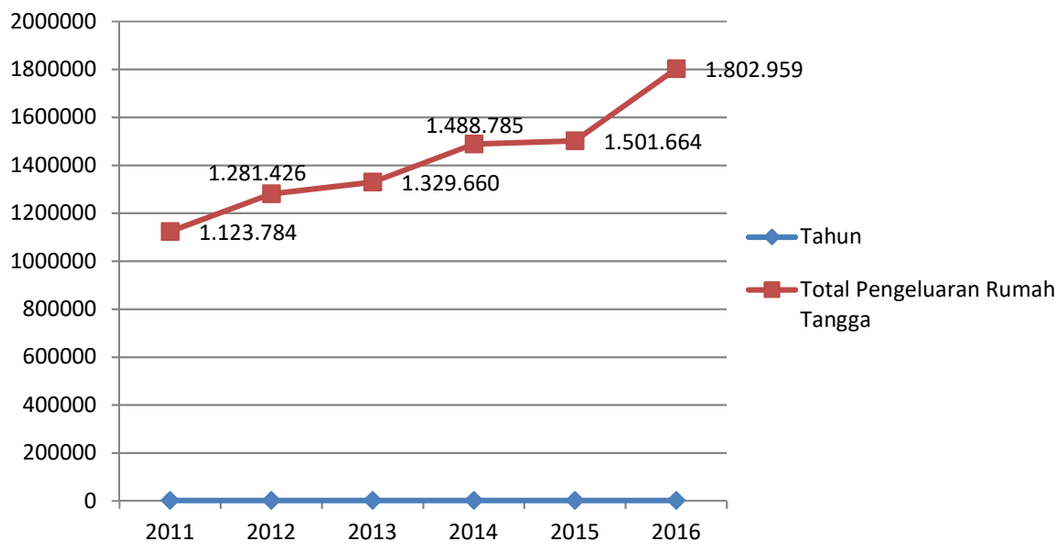

Sumber :

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

a. Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan di Kota Balikpapan diarahkan untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat, mewujudkan pendidikan yang kompetitif dalam menghadapi perubahan, meningkatkan standar kualitas layanan pendidikan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Pemerintah Kota/ Kabupaten mengelola memiliki kewenangan atas pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan usia dini, dan pendidikan non formal. Sedangkan kewenangan atas pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan kejuruan merupakan Pemerintah Provinsi.

- Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar di Kota Balikpapan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 terus mengalami peningkatan, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.15. berikut ini.

Tabel 2.13
Angka Partisipasi Kasar Kota Balikpapan

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	SD	103,31	100,26	111,52	110,24	109,80
2.	SMP	103,01	95,45	82,41	84,71	92,56
3.	SMA/SMK	70,39	83,19	96,14	107,32	95,76

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur

Grafik 2.9
Angka Partisipasi Kasar Kota Balikpapan

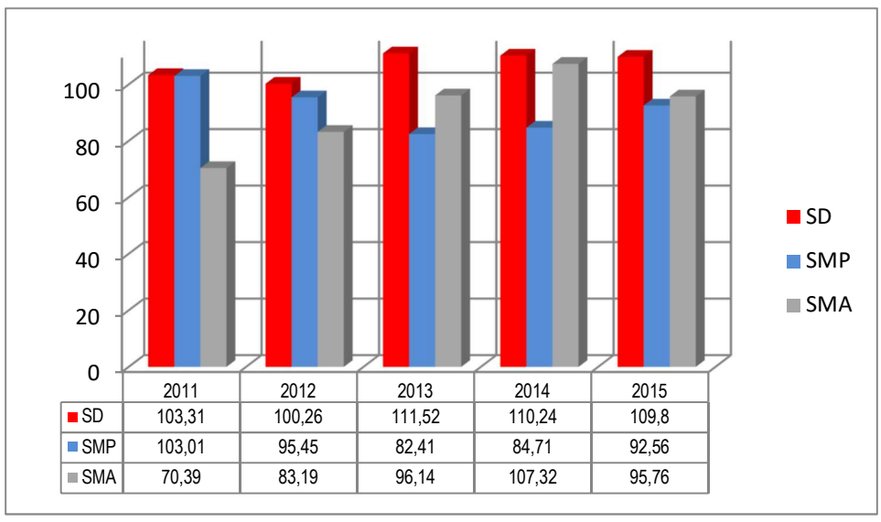

Sumber :

Tingkat pendidikan sekolah dasar SD/MI, APK menunjukkan angka cenderung meningkat. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan menjadi 109,80. Untuk peningkatan APK SD/MI Kota Balikpapan masih harus bekerja keras terutama pada tahun 2016 melalui berbagai program dan kegiatan terutama peningkatan akses layanan pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar untuk SMP/MTs Kota Balikpapan pada tahun 2013-2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 APK SMP/MTs adalah 82,41. Pada tahun 2015, APK SMP/MTs meningkat menjadi 92,56. Angka Partisipasi Kasar untuk SMA/SMK/MA Kota Balikpapan pada tahun 2011-2015 mengalami peningkatan yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2011 APK SMA/SMK/MA adalah 70,39, dan pada tahun 2015, meningkat menjadi 95,76.

- Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk pada usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Tabel. 2.14
Angka Partisipasi Murni Kota Balikpapan Tahun 2011-2015

Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
SD	90,87	93,99	98,14	98,13	97,52
SMP	74,66	78,29	75,46	76,14	76,97
SMA/K	52,51	60,88	65,92	75,16	67,81

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan timur.

Di Kota Balikpapan, APM SD/MI pada tahun 2015 sebesar 97,52. Partisipasi sekolah penduduk usia di SMP dan SLTA lebih rendah dibandingkan dengan SD, masing-masing 76,97 dan 67,81.

APM SMP/Sederajat tahun 2013 sebesar 75,46 meningkat menjadi 76,14 pada tahun 2014, dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 76,97. Sedangkan untuk APM tingkat pendidikan SMA/SMK/MA mengalami kondisi yang fluktuatif dan meningkat dari tahun 2013 sebesar 65,92 meningkat menjadi 75,16 di tahun 2014 dan mengalami penurunan sebesar 67,81 pada tahun 2015.

Tabel 2.15
Rekapitulasi Jumlah Sekolah Dasar Negeri dan Swasta

Kota Balikpapan

No	KECAMATAN	SD		SD Total	MI		MI Total	Grand Total
		N	S		N	S		
1	Kec. Balikpapan Selatan	15	12	27		4	4	31
2	Kec. Balikpapan Timur	21	2	23	1	4	5	28
3	Kec. Balikpapan Utara	33	5	38		4	4	42
4	Kec. Balikpapan Tengah	30	6	36		4	4	40
5	Kec. Balikpapan Barat	22	4	26		1	1	27
6	Kec. Balikpapan Kota	15	12	27		2	2	29
Grand Total		**136**	**41**	**177**	**1**	**19**	**20**	**197**

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

Tabel 2.16
Rekapitulasi Jumlah Sekolah Menengah Pertama/Sederajat Negeri dan Swasta Kota Balikpapan

No	KECAMATAN	MTs		MTs Total	SMP		SMP Total	Grand Total
		N	S		N	S		
1	Kec. Balikpapan Selatan				4	10	14	14
2	Kec. Balikpapan Timur	1	3	4	3	1	4	8
3	Kec. Balikpapan Utara	1	4	5	6	7	13	18
4	Kec. Balikpapan Tengah		2	2	2	7	9	11
5	Kec. Balikpapan Barat		1	1	4	6	10	11
6	Kec. Balikpapan Kota				3	7	10	10
	Grand Total	2	10	12	#	38	60	72

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjelaskan bahwa profesi guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik tersebut diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat, sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Persyaratan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas belajar mengajar.

Grafik 2.10
Kualifikasi Guru Tingkat SD, SMP dan SMA/K

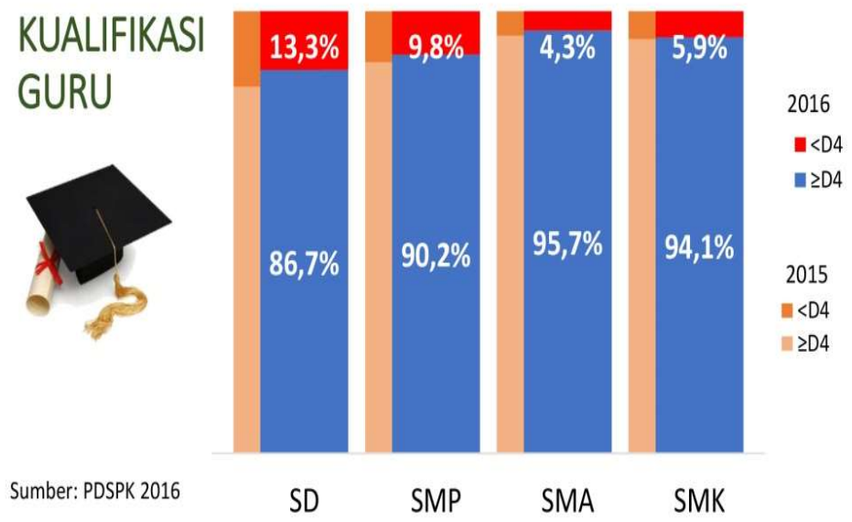

2) Kesehatan

Pembangunan kesehatan berperan penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar dapat mencapai derajat kesehatan yang lebih baik sehingga tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan kesehatan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

- Sarana Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Balikpapan meliputi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Pelayanan kesehatan di tingkat dasar dilaksanakan oleh Puskesmas dan jajarannya. Puskesmas merupakan unit fungsional pelayanan kesehatan terdepan sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan upaya penyuluhan, pencegahan dan penanganan kasus-kasus penyakit di wilayah kerjanya, secara terpadu dan terkoordinasi.

Tabel. 2.17
Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Tahun 2016

No	Nama Puskesmas	Jenis		Akreditasi					Puskesmas Pembantu	Polinkes/ Poskesdes
		TT	Non TT	Blm Akreditasi	Akreditasi Dasar	Akreditasi Madya	Akreditasi Utama	Akreditasi Paripurna		
1	Teritip						x		2	0
2	Lamaru			x						1

3	Perawatan Manggar Baru	10			x				1	0
4	Manggar			x						0
5	Perawatan Sepinggan Baru	10			x				1	3
6	Gunung Bahagia				x					0
7	Damai						x			0
8	Perawatan Klandasan Ilir	10				X				0
9	Prapatan				x					0
10	Telaga Sari			x						0
11	Gunung Sari Ilir			x						0
12	Gunung Sari Ulu			x						0
13	Perawatan Mekar Sari	10		x						0
14	Karang Jati			x						0
15	Karang Rejo			x						0
16	Sumber Rejo			x						0
17	Muara Rapak			x						0
18	Gunung Samarinda					X				0
19	Batu Ampar			x					3	0
20	Perawatan Karang Joang	10			x				5	1
21	Margomulyo			x						0
22	Sidomulyo			x						0
23	Baru Ilir				x					0
24	Margasari			x						0
25	Baru Tengah						x		1	0
26	Perawatan Baru Ulu	10			x					0
27	Perawatan Kariangau	10			x				1	1
Jumlah		70		14	8	2	3		14	6

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2017

Upaya kesehatan yang dilakukan di level masyarakat adalah Posyandu. Keberadaan posyandu di masyarakat merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Posyandu sebagai garda terdepan pembangunan kesehatan `memiliki fungsi dalam memberikan informasi dan pelayanan kesehatan dasar khususnya untuk ibu, bayi, dan balita. Keberadaan posyandu diharapkan dapat memacu tingkat kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak serta perbaikan gizi. Penguatan partisipasi masyarakat di lini bawah melalui posyandu sangat berperan dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKBA), dengan sasaran pelayan KIA, Imunisasi, pemeliharaan gizi masyarakat, dan pencegahan serta penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan.

Tabel. 2.18
Jumlah Rumah Sakit di Balikpapan

No	Nama RS	Jenis		Klasifikasi			
		Umum	Khusus	A	B	C	D
1	RS Dr. R. Hardjanto	x				X	
2	RS Bhayangkara	x					X

3	RS Dr. Kanujoso Djatiwibowo	x		X			
4	RS Restu Ibu	x				X	
5	RS Pertamina Balikpapan	x				X	
6	RS Balikpapan Baru	x					X
7	RS Umum Daerah	x				X	
8	RS Siloam	x			X		
9	RS TNI AU	x					X
10	RS Smec		x			X	
11	RS Khusus Bersalin Sayang Ibu		x		X		
12	RS Ibu dan Anak Permata Hati		x			X	
13	RS Ibu dan Anak Asih		x			X	
14	RS Bersalin Kasih Bunda		x			X	

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Balikpapan 2017

Untuk menilai tingkat keberhasilan atau memberikan gambaran tentang keadaan pelayanan di rumah sakit biasanya dilihat dari berbagai segi diantaranya tingkat pemanfaatan, mutu pelayanan, dan tingkat efisiensi pelayanan. Salah satu indikator yang mewakili kinerja pelayanan rumah sakit adalah *Bed Occupancy Rate Turn Over Internal (TOI).*

- Tenaga Kesehatan

Ketersediaan tenaga di sarana kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit pada umumnya sudah baik. Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk di Kota Balikpapan sudah mencukupi apabila dilihat dari ketersediaan tenaga kesehatan, akan tetapi bila dilihat dari distribusi tenaga kesehatan di Kota Balikpapan masih belum terpenuhi sesuai kebutuhan.

Tabel. 2.19
Jumlah Tenaga Kesehatan

No	Jenis tenaga	Jumlah	Keterangan
1	Dokter Umum	94	PNS dan NON PNS
2	Dokter Gigi	42	
3	Perawat	142	
4	Perawat Gigi	24	
5	Bidan	144	
6	Tenaga Kefarmasian	42	
7	Apoteker	12	
8	Kesehatan Masyarakat	11	
9	Kesehatan Lingkungan	22	
10	Gizi	25	
11	Analis Kesehatan	25	

Sumber : Dinas kesehatan

- Pelayanan kesehatan Ibu dan anak

a) Pelayanan kesehatan ibu

Keberhasilan pelayanan kesehatan ibu ditunjukkan melalui indikator kunjungan pelayanan antenatal ibu hamil. Upaya kesehatan juga menyasar pada pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak dapat terlihat dari proporsi persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan serta pemeriksaan pada saat hamil.

Pemeriksaan ibu hamil bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu melalui deteksi dini permasalahan kehamilan untuk mencegah komplikasi kehamilan dan kelahiran.

Tabel. 2.20
Data Kehamilan

No	Indikator	2013	2014	2015	2016
1	Kasus Kematian	10	14	9	9
2	Kunjungan Ibu Hamil K1	12,346	12,221	13,410	13,679
3	Kunjungan Ibu Hamil K4	11,984	11,898	12,747	13,357
4	Persalinan di Tolong Tenaga Kesehatan	11,313	11,265	12,464	12,636
5	Pemberian FE 1 pada Ibu Hamil	12,124	12,093	13,127	13,679
6	Pemberian FE 3 pada Ibu Hamil	11,936	11,722	12,611	13,275

Sumber : Dinas Kesehatan

Grafik 2.11
Kasus Kematian

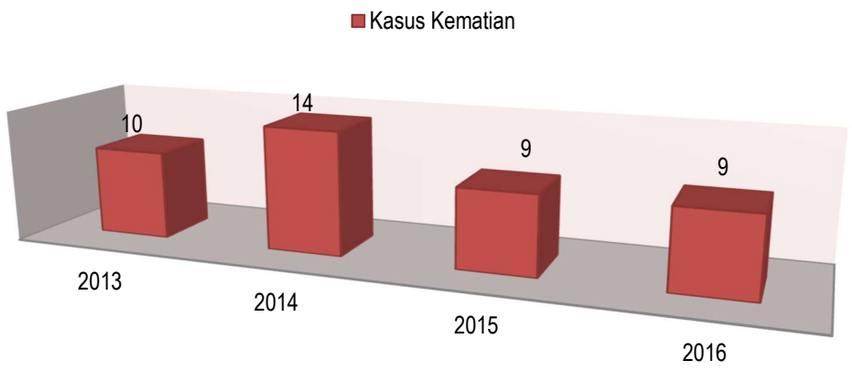

Sumber : Dinas Kesehatan

Grafik. 2.12
Persalinan di Tolong Tenaga Kesehatan

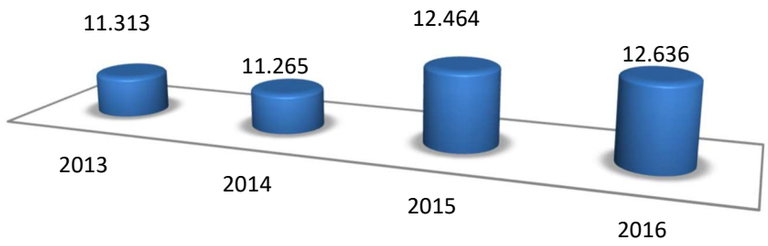

Sumber : Dinas Kesehatan

b) Pelayanan Kesehatan Bayi

Indikator yang menggambarkan keberhasilan pelayanan kesehatan bayi adalah cakupan kunjungan neonatal. Kunjungan neonatal bertujuan untuk meningkatkan akses neonatus terhadap pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin bila terdapat kelainan pada bayi atau bayi mengalami masalah kesehatan sehingga menekan angka kematian bayi.

Indikator yang digunakan adalah Kunjungan Neonatus 1 (KN-1) dan Kunjungan Neonatus Lanjutan (KN-L).

Tabel. 2.21
Cakupan Kunjungan Neonatal Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, dan Puskesmas
Kota Balikpapan Tahun 2015

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH LAHIR HIDUP			KUNJUNGAN NEONATAL 1 KALI (KN1)						KUNJUNGAN NEONATAL 3 KALI (KN LENGKAP)					
						L		P		L + P		L		P		L + P	
			L	P	L + P	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1	Balikpapan Timur	Teritip	134	130	264	132	98.5	124	95.4	256	97.0	132	98.5	124	95.4	256	97.0
2	Balikpapan Timur	Lamaru	94	93	187	92	97.9	90	96.8	182	97.3	92	97.9	90	96.8	182	97.3
3	Balikpapan Timur	Perawatan Manggar Baru	173	161	334	171	98.8	162	100.6	333	99.7	169	97.7	160	99.4	329	98.5
4	Balikpapan Timur	Manggar	340	317	657	355	104.4	290	91.5	645	98.2	352	103.5	287	90.5	639	97.3
5	Balikpapan Selatan	Perawatan Sepinggan Baru	660	644	1,304	665	100.8	618	96.0	1,283	98.4	665	100.8	614	95.3	1,279	98.1
6	Balikpapan Selatan	Gunung Bahagia	372	362	734	356	95.7	374	103.3	730	99.5	356	95.7	374	103.3	730	99.5
7	Balikpapan Kota	Damai	466	445	911	429	92.1	421	94.6	850	93.3	428	91.8	421	94.6	849	93.2
8	Balikpapan Kota	Perawatan Klandasan Ilir	401	389	790	360	89.8	436	112.1	796	100.8	359	89.5	436	112.1	795	100.6
9	Balikpapan Kota	Prapatan	133	129	262	135	101.5	130	100.8	265	101.1	140	105.3	129	100.0	269	102.7
10	Balikpapan Kota	Telagasari	178	173	351	174	97.8	166	96.0	340	96.9	174	97.8	166	96.0	340	96.9
11	Balikpapan Tengah	Gunung Sari Ulu	147	143	290	149	101.4	131	91.6	280	96.6	141	95.9	133	93.0	274	94.5
12	Balikpapan Tengah	Gunung Sari Ilir	225	221	446	238	105.8	211	95.5	449	100.7	238	105.8	211	95.5	449	100.7
13	Balikpapan Tengah	Perawatan Mekar Sari	128	129	257	133	103.9	124	96.1	257	100.0	132	103.1	124	96.1	256	99.6
14	Balikpapan Tengah	Karang Jati	133	130	263	148	111.3	117	90.0	265	100.8	156	117.3	125	96.2	281	106.8
15	Balikpapan Tengah	Karang Rejo	241	239	480	227	94.2	222	92.9	449	93.5	217	90.0	200	83.7	417	86.9
16	Balikpapan Tengah	Sumber Rejo	194	188	382	193	99.5	212	112.8	405	106.0	193	99.5	193	102.7	386	101.0

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH LAHIR HIDUP			KUNJUNGAN NEONATAL 1 KALI (KN1)						KUNJUNGAN NEONATAL 3 KALI (KN LENGKAP)					
						L		P		L + P		L		P		L + P	
			L	P	L + P	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
17	Balikpapan Utara	Muara Rapak	303	298	601	298	98.3	318	106.7	616	102.5	296	97.7	313	105.0	609	101.3
18	Balikpapan Utara	Gunung Samarinda	294	291	585	300	102.0	290	99.7	590	100.9	305	103.7	284	97.6	589	100.7
19	Balikpapan Utara	Batu Ampar	597	576	1,173	605	101.3	583	101.2	1,188	101.3	550	92.1	529	91.8	1,079	92.0
20	Balikpapan Utara	Perawatan Karang Joang	200	190	390	201	100.5	188	98.95	389	99.74	197	98.5	187	98.42	384	98.46
21	Balikpapan Barat	Margo Mulyo	80	78	158	80	100.0	84	107.7	164	103.8	80	100.0	84	107.7	164	103.8
22	Balikpapan Barat	Sidomulyo	59	57	116	68	115.3	47	82.5	115	99.1	68	115.3	47	82.5	115	99.1
23	Balikpapan Barat	Baru Ilir	203	194	397	203	100.0	192	99.0	395	99.5	203	100.0	192	99.0	395	99.5
24	Balikpapan Barat	Marga Sari	119	118	237	110	92.4	119	100.8	229	96.6	110	92.4	118	100.0	228	96.2
25	Balikpapan Barat	Baru Tengah	222	215	437	235	105.9	218	101.4	453	103.7	234	105.4	219	101.9	453	103.7
26	Balikpapan Barat	Perawatan Baru Ulu	214	205	419	213	99.5	189	92.2	402	95.9	210	98.1	186	90.7	396	94.5
27	Balikpapan Barat	Perawatan Kariangau	46	42	88	46	100.0	44	104.8	90	102.3	46	100.0	44	104.8	90	102.3
JUMLAH (KAB/KOTA)			6,356	6,157	12,513	6,316	99.4	6,100	99.1	12,416	99.2	6,243	98.2	5,990	97.3	12,233	97.8

Sumber :Dinas Kesehatan

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Sub Urusan Sumber Daya Air

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, Daerah Irigasi Yang Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten/Kota di Kota Balikpapan terdapat 2 (dua) daerah irigasi yaitu daerah irigasi Balikpapan Utara seluas 25 Ha dan daerah irigasi Gunung Binjai seluas 325 Ha. Khusus daerah irigasi Gunung Binjai memiliki luas area tanam seluas 150 Ha dengan indeks pertanaman 100% serta produksi 3,5 ton/Ha/panen dengan rincian kondisi sebagai berikut:

Grafik 2.13
Kondisi Jaringan Irigasi (Ha)

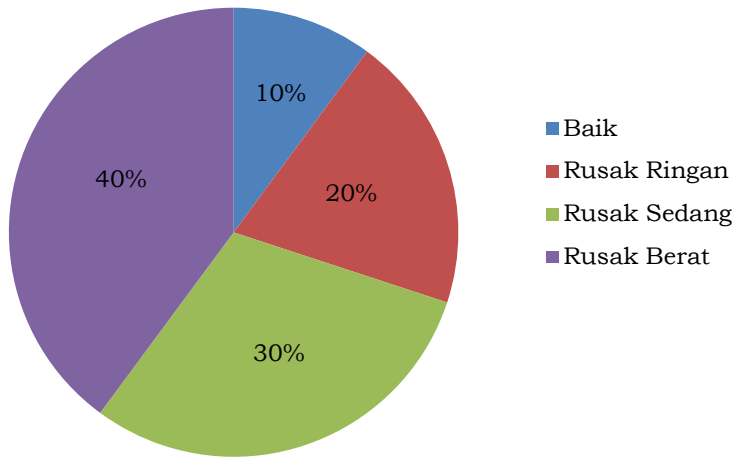

Sumber :Rencana Induk Penyediaan Air Minum Kota Balikpapan Tahun 2015

Salah satu permasasalahan dalam penyediaan air minum di Kota Balikpapan adalah mengenai ketersediaan air baku. Sumber air baku saat ini terdiri air permukaan yang sebagian besar disediakan oleh Waduk Manggar. Adapun sumber air baku lainnya berasal dari sungai-sungai kecil dan beberapa sumur yang tersebar di beberapa lokasi sebagai berikut:

Tabel 2.22
Tabel Sumber Air Baku Eksisting

No	Sumber Air Baku	Kapasiitas (lt/det)			Keterangan
		Maks.	Min	Rata2	
1	Waduk Manggar	1.100	750	850	- Memasok air baku ke IPA Kp. Damai (400 lt/dt) dan IPA Baku Ampar (500 lt/dt)
2	S.Klandasan	-	-	-	- Tidak dimanfaatkan karena kuantitas dan kualitas air sangat menurun
3	S.KelokApi	7	0	5	- MemasokkeIPAGn.Tembak(5lt/dt). - Padamusimkemarautidakdapat dimanfaatkan karenakualitasnyasangat menurun.

No	Sumber Air Baku	Kapasiitas (lt/det)			Keterangan
		Maks.	Min	Rata2	
					- Alternatifsumberair baku IPAgn.Tembakdarisumurbordanrencana WadukTeritip
4	Sumur Bor Gunung Sari	54	-	54	- Memasok air baku ke IPA Gunung Sari (60 lt/dt dan 50 lt/dt). Dari 5 unit SB,beroperasi hanya 4 unit SD dan dengan temperatur air tinggi - IPA Gunung Sari mendapat pasokan air baku dari SB Telagasari dan SB Martadinata (Mekarsari)
5	Sumur Bor Tegalasari	49	-	49	- Sb Telagasari I dan SB Telagasari II dioperasikan terus menerus untuk memasok air baku ke IPA Gunung Sari.
6	Sumur Bor Batu Ampar	-	-	-	- Tidak dioperasikan (SB rusak)
7	Sumur BorTeritip	40	-	36	- Memasok air baku ke IPA Teritip (40 lt/dt dan 25 lt/dt) - Total SB terdiri dari 14 unit, namun hanya 6 unit yang beroperasi karena - kuantitasnya yang menurun (kecil) dan rusak.
8	Sumur Bor Kp.Damai	55	-	49	- Sebagai tambahan air baku ke IPA kampung Damai (400 lt/dt). - Terdisi dari 6 unit SB sebagai alternatif sumber air baku pengganti air S. Klandasan.
9	Sumur Bor Manggar	-	-	-	- Terdiri dari 2 unit SB, 1 unit rusak dan unit lainnya tidak beroperasi

Sumber: Rencana Induk Penyediaan Air Minum Kota Balikpapan Tahun 2015

Berdasarkan Rencana Induk Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kota Balikpapan Tahun 2015, kebutuhan air baku di Kota Balikpapan pada tahun 2019 mencapai 1.600 liter/detik. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan sumber-sumber air baku di Kota Balikpapan yang diantaranya adalah melalui pembangunan waduk/embung, pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional ataupun pengolahan air laut menjadi air minum (desalinasi). Untuk jangka menengah, dalam rangka memenuhi kebutuhan air baku tersebut sedang dilaksanakan pembangunan SPAM Teritip dengan kapasitas 2x200 liter/detik yang sumber air bakunya berasal dari Waduk Teritip kapasitas 250 liter/detik dan Embung Aji Raden kapasitas 150 liter/detik.

- Sub Urusan Air Minum

Pengelolaan air minum di Kota Balikpapan yang saat ini sebagian besar dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Balikpapan, dimana hingga tahun 2016 cakupan pelayanan PDAM Kota Balikpapan telah mencapai 76,50%. Penurunan cakupan pelayanan jika dibandingkan tahun 2015 adalah karena peningkatan kebutuhan tidak diiringi oleh pengembangan

pelayanan akibat terbatasnya sumber air baku di Kota Balikpapan. Peningkatan cakupan pelayanan ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Balikpapan dikarenakan pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah harus seimbang dengan perluasan jaringan distribusi air minum perpipaan PDAM. Adapun perkembangan pelayanan air bersih jaringan perpipaan Kota Balikpapan sebagai berikut:

Tabel 2.23
Perkembangan Pelayanan Air Minum Perpipaan Kota Balikpapan

NO	ITEM	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah penduduk (Jiwa)	514.681	539.817	637.448	669.685	706.414	736.807	762.492
2.	Jumlah pelanggan(SR)	75.544	80.199	83.484	87.750	89.912	93.279	95.781
3.	Cakupan pelayanan (%)	69,36%	77,43%	80,56%	80,44%	77,79%	77,29%	76,50%
4.	Kapasitas produksi (l/det)	1.039	1.116	1.193,28	1.143,01	1.141,29	1.189,79	1.147,20
5.	Panjang perpipaan (m)	1.020.149	1.073.590	1.105.712	1.187.122	1.220.945	1.258.464	1.308.767
6.	Prosentase Kehilangan Air (%)	30,93	32,48	31,21	27,04	26,58	29,08	30,46

Sumber: PDAM Kota Balikpapan Tahun 2016

Adapun layanan air minum perpipaan non PDAM dan air minum non perpipaan masing-masing mencapai 12%. Layanan air minum perpipaan non PDAM merupakan jaringan air minum yang disediakan oleh pihak lain berbentuk jaringan perpipaan baik yang bersumber dari air permukaan maupun air bawah tanah. Sebagian besar air minum perpipaan non PDAM dilaksanakan oleh perumahan formal dan perumahan karyawan sektor Minyak dan Gas di Kota Balikpapan. Adapun layanan air minum non perpipaan adalah air minum yang disediakan tanpa menggunakan jaringan pipa air minum baik yang bersumber dari air permukaan, air tanah/sumur gali dan air hujan.

- Sub Urusan Persampahan

Pengelolaan sampah di Kota Balikpapan saat ini dikelola TPA Manggar dengan sistem sanitary landfill. Luas TPA Sampah Manggar adalah seluas 44,8 Ha yang dibagi menjadi 4 zona. Hingga saat ini telah dioperasikan sebanyak 3 zona yaitu zona I, II dan III. Zona I seluas 2,6 Ha dibangun pada tahun 1997/1998 berasal dari dana KUDP dan Zona II seluas 3,0 Ha dibangun pada tahun 2007/2008 berasal dari dana APBD Kota Balikpapan

saat ini kapasitas yang tersedia telah penuh. Sedangkan Zona III seluas 2,4 Ha yang dibangun pada tahun 2011-2012 dengan sumber dana APBN hingga saat ini kapasitas yang tersedia juga hampir penuh, sehingga telah dilakukan pengembangan di Zona IV seluas 8,4 ha yang pelaksanaan dan pembiayaannya oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp 165 Miliar melalui kontrak tahun jamak (Multiyears) Tahun 2016-2018.

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, maka jumlah sampah yang masuk ke TPA Sampah Manggar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini terlihat pada tahun 2011 jumlah sampah yang masuk ke TPA Sampah Manggar sebesar 289,48 ton/hari dan terus meningkat hingga tahun 2015 yang mencapai 370,55 ton/hari. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Balikpapan melakukan berbagai program dan upaya untuk mengurangi volume sampah melalui pengelolaan sampah dari sumber pada program 3R. Program pengurangan volume sampah ke TPA dilakukan melalui pengembangan bank sampah, pembangunan rumah kompos, pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan penerapan material recovery facility (MRF) serta mendorong pemilahan sampah dari sumber yang bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Melalui upaya ini, pada tahun 2016, volume sampah yang masuk ke TPA Sampah Manggar menurun menjadi 358,00 ton/hari.

Grafik 2.14
Volume Sampah ke TPAS Manggar

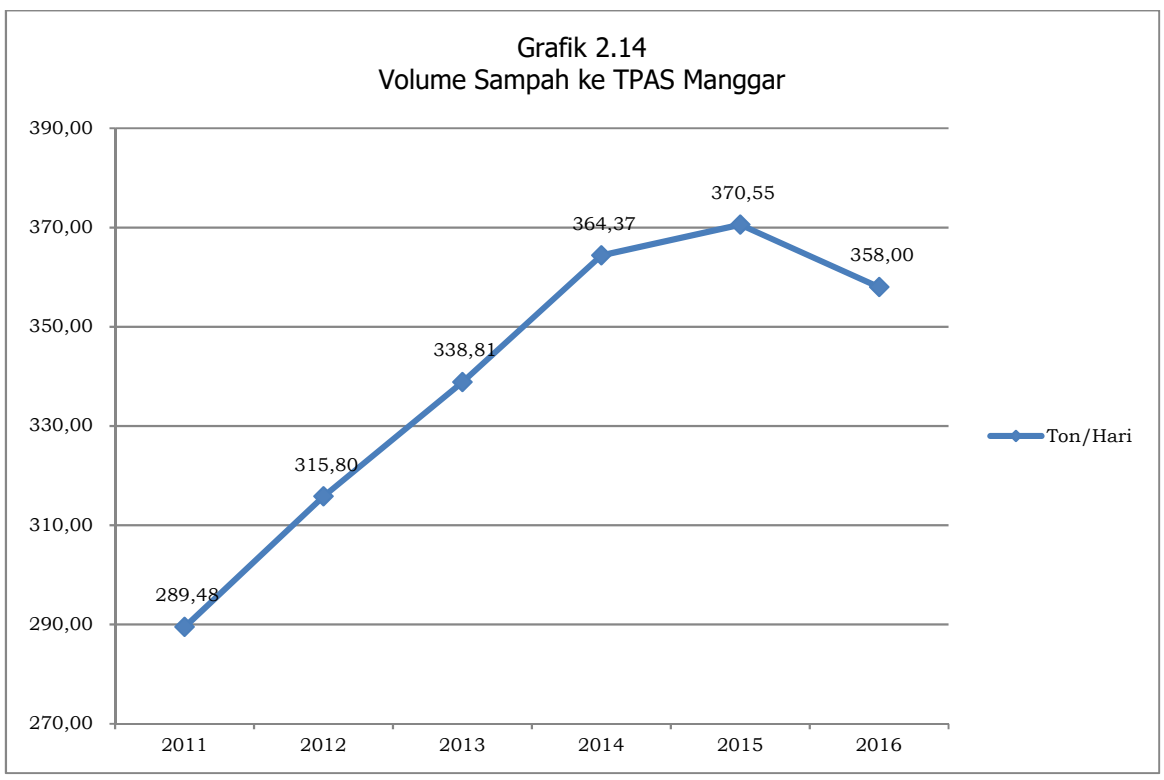

- Sub Urusan Air Limbah

Peningkatan sarana dan prasana air limbah adalah dalam upaya untuk tersedianya fasilitas pembuangan air limbah yang baik dan meningkatkan lingkungan permukiman yang bersih, sehat dan nyaman menuju Universal Access Tahun 2019. Sarana dan prasarana air limbah di Kota Balikpapan terbagi menjadi beberapa sistem yaitu sistem terpusat dan sistem setempat. Fasilitas pengelolaan air limbah terpusat yang ada di Kota Balikpapan adalah IPAL skala kawasan di Kelurahan Margasari yang melayani 1.308 Sambungan Rumah (SR). Untuk meningkatkan layanan IPAL Margasari, maka dilakukan penambahan jumlah sambungan rumah pada tahun 2016 melalui program hibah air limbah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan SAIIG sebanyak 538 SR dan melalui Dana Alokasi Khusus sebanyak 204 SR.

Sebelum tersambungnya jaringan yang dibangun dengan sumber dana hibah SAIIG, air limbah yang masuk ke IPAL Margasari berdasarkan catatan flow meter adalah sebesar 216 m3/hari sehingga idle capacity yang ada sebesar 584 m3/hari (idle capacity 70% dari kapasitas 800 m3/hari). Hal ini terjadi karena banyaknya sambungan pipa jaringan air limbah yang tidak dalam kondisi baik.

Selain IPAL Kawasan, pengelolaan limbah terpusat juga dilakukan melalui sistem IPAL Komunal dengan sambungan rumah 10-50 SR yang telah dibangun sejak tahun 2006 melalui Program Sanimas, SLBM maupun DAK Sanitasi yang dilakukan pengelolaan secara swadaya oleh masyarakat. Adapun data lokasi IPAL Komunal di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.24
IPAL Komunal di Kota Balikpapan

No.	Tahun	Program	Lokasi Kegiatan	Jumlah Sambungan	Sistem	Nama Pelaksana/ KSM
1	2006	SANIMAS	RT 05 Kel.Klandasan Ulu Kec.Balikpapan Selatan	67 SR	IPAL Komunal + Perpipaan	Pada Idi Pada Elo
2	2006	SANIMAS	RT 73 Kel. Batu Ampar Kec.Balikpapan Utara	62 SR	MCK ++	Hendriks
3	2007	Sanitasi Kota	RT 62 Kel.Gunung Bahagia Kec.Balikpapan Selatan	30 SR	IPAL Komunal + Perpipaan	Kontraktor
4	2008	Sanitasi Kota	RT 61 Kel.Gunung Bahagia Kec.Balikpapan Selatan	39 SR	IPAL Komunal + Perpipaan	Kontraktor
5	2010	SLBM DAK	RT 32 Kel. Klandasan Ilir Kec.Balikpapan Selatan	60 SR	IPAL Komunal + Perpipaan	Al Hikmat
6	2010	SLBM DAK	RT 18 Kel. Margo	50 SR	IPAL Komunal +	Maju

No.	Tahun	Program	Lokasi Kegiatan	Jumlah Sambungan	Sistem	Nama Pelaksana/ KSM
			Mulyo Kec.Balikpapan Barat		Perpipaan	Bersama
7	2010	SLBM DAK	RT 26 Kel. Margo Mulyo Kec.Balikpapan Barat	20 KK	MCK +	Tirta Guna
8	2011	SANIMAS REGULER	RT 40 Kel.Margo Mulyo Kec.Balikpapan Barat	50 SR	IPAL Komunal + Perpipaan	Mangrove Mandiri II
9	2011	SANIMAS REGULER	RT 25 Kel.Margo Mulyo Kec.Balikpapan Barat	15 KK	MCK +	Sendang Makmur
10	2011	SANIMAS REGULER	RT 19 Kel.Damai Kec.Balikpapan Selatan	50 SR	IPAL Komunal + Perpipaan	Sumber Damai
11	2011	SANIMAS REGULER	RT 61 Kel. Sepinggan Kec.Balikpapan Selatan	50 SR	IPAL Komunal + Perpipaan	Beriman
12	2012	SLBM DAK	Rt. 061 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan	65 SR	IPAL Komunal + Perpipaan	Bahagia Bersama
13	2012	SLBM DAK	Rt. 01 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara	60 SR	IPAL Komunal + Perpipaan	Somber Jaya
14	2012	SLBM DAK	Rt. 028 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat	60 SR	IPAL Komunal + Perpipaan	Margo Lestari
15	2012	SANIMAS	Rt. 062 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan	56 SR	IPAL Komunal + Perpipaan	Bahagia sejahtera
16	2012	SANIMAS	Rt. 025 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur	50 SR	IPAL Komunal + Perpipaan	Batakan
17	2013	SANIMAS	Rt.01 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan	70 SR	IPAL Komunal + Perpipaan	Kusuma
18	2013	SANIMAS	Rt.23 Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan	75 SR	IPAL Komunal + Perpipaan	Rezeky
19	2013	SANIMAS	Rt. 19 Kel. Damai Kec. Balikpapan Kota	58 SR	IPAL Komunal + Perpipaan	Damai Kota
20	2013	SANIMAS	Rt. 13 Kel. Damai Baru Kec. Balikpapan Selatan	65 SR	IPAL Komunal + Perpipaan	Sumber Damai Baru
21	2013	SANIMAS	Rt. 24 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat	55 SR	IPAL Komunal + Perpipaan	Mandiri
22	2013	SLBM DAK	Rt. 38 Kel. Gn. Samarinda Kec. Balikpapan Utara	50 SR	IPAL Komunal + Perpipaan	Gurinda 38
23	2013	SLBM DAK	Rt. 23 Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan	70 SR	IPAL Komunal + Perpipaan	Abadi
24	2013	SLBM DAK	Rt. 10 Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan	70 SR	IPAL Komunal + Perpipaan	Tunas Harapan
25	2013	SLBM DAK	Rt. 25 Kel. Manggar Kec Balikpapan Timur	45 SR	IPAL Komunal + Perpipaan	Mawar Merah
26	2014	SANIMAS	Rt. 10 Kel. Sungai Nangka Kec.	65 SR	IPAL Komunal + Perpipaan	Harapan Baru

No.	Tahun	Program	Lokasi Kegiatan	Jumlah Sambungan	Sistem	Nama Pelaksana/ KSM
			Balikpapan Selatan			
27	2015	SANIMAS	Rt.01 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan	60 SR	IPAL Komunal + Perpipaan	Kusuma II
28	2015	SANIMAS	Rt.46 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan	40 SR	IPAL Komunal + Perpipaan	Sejahtera
29	2015	SANIMAS	Rt.17 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan	35 SR	IPAL Komunal + Perpipaan	Prona
30	2016	DAK Sanitasi	Rt.01 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan	9 SR	IPAL Komunal + Perpipaan	Kusuma III
31	2016	DAK Sanitasi	Rt.01 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan	7 SR	IPAL Komunal + Perpipaan	Kusuma III

Sumber :

Adapun persentase rumah tangga yang telah memiliki akses jamban keluarga/jamban bersama dan yang telah sesuai dengan persyaratan teknis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.25
Persentase Kelayakan Sarana Air Limbah Domestik Kota Balikpapan Tahun 2016

No	Kelurahan	Persentase Masyarakat memiliki akses jamban keluarga/jamban bersama (5 KK/jamban) (%)	Persentase Jamban keluarga/jamban bersama sesuai persyaratan teknis (memiliki kloset leher angsa yang terhubung dengan septic-tank) (%)	Saluran pembuangan air limbah rumah tangga terpisah dengan saluran drainase lingkungan (%)
1	Baru Ulu	93%	66%	21%
2	Baru Tengah	88%	73%	9%
3	Margasari	78%	90%	63%
4	Baru Ilir	99%	98%	0%
5	Kariangau	88%	79%	0%
6	Margo Mulyo	98%	95%	8%
7	Damai	100%	93%	18%
8	Prapatan	100%	100%	0%
9	Telagasari	100%	98%	0%
10	Klandasan Ulu	94%	86%	10%
11	Klandasan Ilir	100%	88%	7%
12	Gunung Bahagia	100%	100%	0%
13	Sepinggan	75%	97%	10%
14	Sepinggan Baru	92%	96%	31%
15	Sepinggan Raya	87%	94%	6%
16	Sungai Nangka	89%	96%	6%
17	Damai Baru	91%	100%	0%
18	Damai Bahagia	88%	100%	13%
19	GSU	100%	97%	13%
20	GSI	100%	97%	7%
21	Mekarsari	97%	87%	17%
22	Karang Rejo	100%	96%	0%
23	Sumber Rejo	99%	99%	8%

No	Kelurahan	Persentase Masyarakat memiliki akses jamban keluarga/jamban bersama (5 KK/jamban) (%)	Persentase Jamban keluarga/jamban bersama sesuai persyaratan teknis (memiliki kloset leher angsa yang terhubung dengan septic-tank) (%)	Saluran pembuangan air limbah rumah tangga terpisah dengan saluran drainase lingkungan (%)
24	Karang Jati	95%	84%	5%
25	Manggar	92%	87%	6%
26	Manggar Baru	98%	86%	18%
27	Lamaru	100%	100%	0%
28	Teritip	97%	89%	13%
29	Gunung Samarinda	100%	100%	0%
30	Batu Ampar	100%	97%	14%
31	Muara Rapak	99%	86%	13%
32	Karang Joang	88%	88%	0%
33	Gunung Samarinda baru	99%	90%	57%
34	Graha Indah	100%	87%	46%
Total		95%	92%	12%

Sumber: Baseline 100-0-100 KOTAKU per Oktober 2016, Tahun 2016

- Sub Urusan Drainase

Sistem drainase Kota Balikpapan dibagi menjadi 6 (enam) wilayah yaitu wilayah Balikpapan Barat dengan total panjang sungai 22.341 m, wilayah Sungai Wain dengan panjang sistem drainase 23.428 m, wilayah somber yang mempunyai panjang 36.022 m, wilayah Balikpapan selatan yang dilayani dengan sungai-sungai kecil yang mempunyai outflow langsung ke Selat Makasar dengan total panjang drainase 110.869 m, wilayah manggar mempunyai panjang drainase 9.232 m dan wilayah Balikpapan Timur 23.981 m.

Secara morfologis Kota Balikpapan terdiri dari kawasan perbukitan yang bergelombang +/-85% dan +/-15% merupakan daerah dataran yang terletak di sepanjang pantai timur dan selatan wilayah Kota Balikpapan yang berpotensi terhadap banjir. Dengan kondisi yang berbukit-bukit maka diperlukan pengelolaan drainase yang cukup baik di Kota Balikpapan. Namun, kondisi drainase pada umumnya masih kotor oleh sampah dan sedimen sehingga seringkali terjadi penyumbatan pada daerah tertentu dan menyebabkan genangan jika hujan. Upaya pengelolaan drainase di Kota Balikpapan selama ini mengacu pada Masterplan Drainase Kota Balikpapan yang telah mengatur mengenai rencana dimensi drainase dan rencana pembangunan bendungan pengendali (bendali) banjir di beberapa titik.

Pada tahun 2015 titik banjir di Kota Balikpapan adalah sebanyak 51 titik yang tersebar di kawasan Balikpapan Utara, Balikpapan Barat, Balikpapan Kota, Balikpapan Selatan, Balikpapan Tengah dan Balikpapan

Timur. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, titik banjir Kota Balikpapan pada tahun 2016 telah dilakukan penanganan banjir di 4 titik, namun titik banjir pada tahun 2016 menjadi sebanyak 52 titik banjir, karena terdapat 5 titik banjir baru.

- Sub Urusan Jalan

Dalam rangka mendukung konektivitas antar wilayah dalam rangka pengembangan pertumbuhan ekonomi Daerah, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan memegang peranan yang sangat penting. Total Panjang Jalan Kota adalah sepanjang 501,18 km sesuai Keputusan Walikota Balikpapan Nomor: 188.45-415/2016 tentang Penetapan Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota Balikpapan. Dari tabel 2.26. memperlihatkan bahwa panjang jalan Kota Balikpapan dalam kondisi baik menunjukkan prosentasenya terus mengalami kenaikan. Pada akhir tahun 2016, jalan kondisi baik adalah sepanjang 410,84 km atau sebesar 81,97% yang meningkat jika dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Berikut ini data Kondisi Jalan Kota hingga akhir tahun 2016 berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan.

Tabel 2.26
Panjang Jalan Kota Menurut Keadaan (dalam Km), Tahun 2011-2016

	2012		2013		2014		2015		2016	
	km	%	km	%	km	%	km	%	km	%
Baik	380,87	77,51	395,19	79,07	396,58	79,13	396,58	79,13	410,84	81,97
Sedang	94,38	19,21	85,93	17,19	85,93	17,15	85,93	17,15	74,62	14,89
Rusak	13,17	2,68	18,66	3,73	18,66	3,72	18,66	3,72	4,57	0,91
Rusak Berat	2,94	0,60	-	0,00	-	0,00	-	0,00	11,15	2,23
TOTAL	**491,36**	**100,00**	**499,78**	**100,00**	**501,18**	**100,00**	**501,18**	**100,00**	**501,18**	**100,00**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2016

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif. Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan

terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

- Sub Urusan Perumahan

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 - 15 hektar merupakan tanggung jawab dari pemerintah provinsi. Sebagaimana target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2021, bidang perumahan menargetkan untuk mengurangi rumah tidak layak huni khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Rumah layak huni menjadi salah satu indikator yang mengukur kondisi perumahan pada fokus urusan wajib. Rumah layak huni adalah rumah yang dapat menyediakan ruang yang cukup bagi penghuninya dan dapat melindungi mereka dari cuaca dingin, lembab, panas, hujan, angin, atau ancaman-ancaman bagi kesehatan, bahaya fisik bangunan, dan vektor penyakit. Rumah layak huni di Kota Balikpapan yang telah dilakukan peningkatan kualitas pada tahun 2011-2016 adalah sebanyak 390 unit yang terdiri dari 311 unit dari pembiayaan APBD Provinsi Kalimantan Timur dan 79 unit dari pembiayaan APBD Kota Balikpapan. Adapun rincian setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

Grafik 2.15
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2011-2016

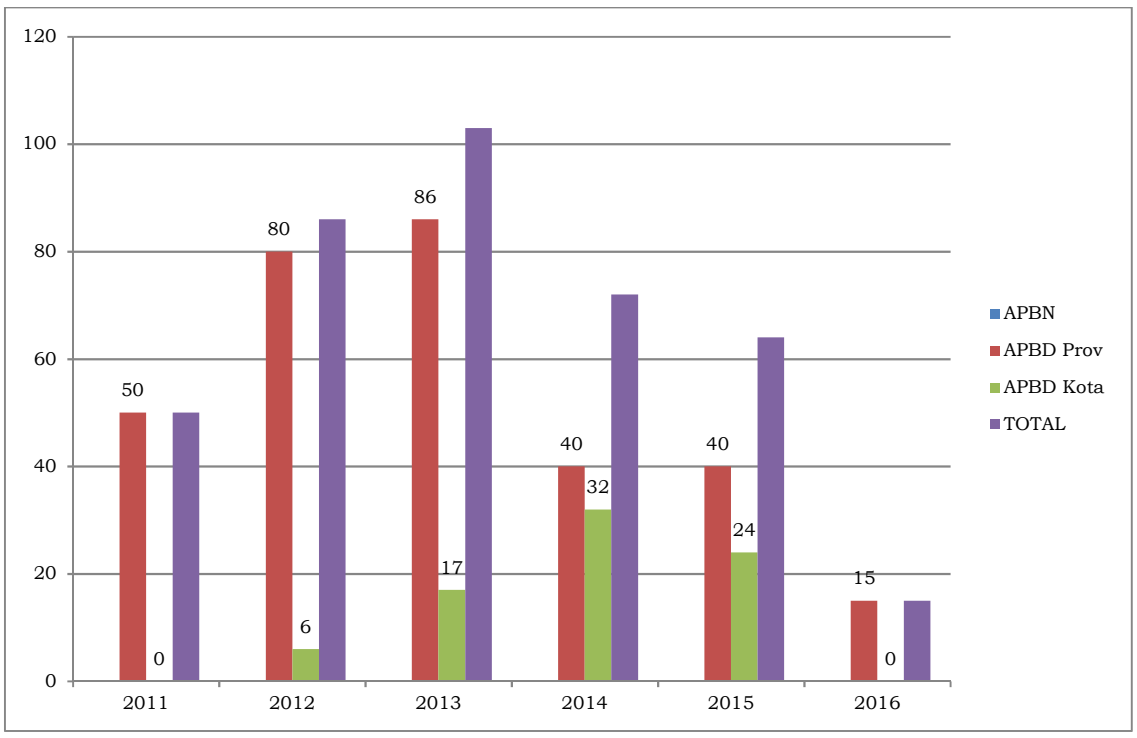

Sumber : Dinas Tata Kota dan Perumahan Tahun 2015

Berdasarkan hasil pendataan Dinas Tata Kota dan Perumahan Tahun 2015, jumlah rumah tidak layak huni di Kota Balikpapan sebanyak 1.075 Unit. Pada tahun 2016 dilaksanakan kegiatan pembangunan rumah tidak layak huni oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 15 unit, sehingga pada akhir tahun 2016, jumlah rumah tidak layak huni menjadi 1.060 unit.

Tabel 2.27
Jumlah Rumah di Kota Balikpapan Tahun 2013

No.	Kecamatan	Kelurahan	Jenis Rumah		Total
			Formal	Swadaya	
1.	Balikpapan Utara	Muara Rapak	173	5.040	5.213
2.	Balikpapan Barat	Baru Ulu	0	3.338	3.338
		Baru Tengah	0	3.194	3.194
		Margomulyo	63	2.532	2.595
		Margasari	600	1.997	2.597
3.	Balikpapan Selatan	Sepinggan	1.260	4.760	6.020
4.	Balikpapan Tengah	Karang Jati	56	3.511	3.567
5.	Balikpapan Kota	Klandasan Ulu	0	2.442	2.442
		Damai	181	4.511	4.692
		Telagasari	66	3.204	3.270
6.	Balikpapan Timur	Manggar	1.503	4.225	5.728
		Manggar Baru	461	1.711	2.172

Sumber : RP3KP Kota Balikpapan, 2014

Analisis backlog perumahan (kesenjangan antara ketersediaan perumahan dengan jumlah penduduk) dilakukan dengan membandingkan jumlah KK dengan jumlah rumah pada kondisi eksisting. Secara faktual terdapat penduduk yang tidak tercatat di pendataan catatan sipil, yaitu penduduk pendatang yang bekerja di Kota Balikpapan. Dengan pertimbangan tersebut, maka perhitungan KK ditambah 30% dan jumlahnya dikurangi dengan perumahan eksisting. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diketahui bahwa total backlog perumahan di Kota Balikpapan sebesar 131.853 unit.

- Sub Urusan Kawasan Permukiman

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha serta pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota. Sebagai dasar acuan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan

permukiman kumuh, maka telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-667/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Balikpapan, yang meliputi 12 (dua belas) lokasi kawasan permukiman kumuh sebagai berikut:

Tabel 2.28
Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Balikpapan

No.	Lokasi		Luas Kawasan (Ha)
1.	Balikpapan Utara	Muara Rapak	27,88
2.	Balikpapan Barat	Baru Ulu	17,73
		Baru Tengah	22,51
		Margomulyo	40,89
		Margasari	22,06
3.	Balikpapan Selatan	Sepinggan Raya	37,38
4.	Balikpapan Tengah	Karang Jati	12,52
5.	Balikpapan Kota	Klandasan Ulu	4,52
		Damai	9,36
		Telagasari	8,66
6.	Balikpapan Timur	Manggar	28,05
		Manggar Baru	50,64
	TOTAL		**282,20**

Sumber: RKPKP Kota Balikpapan Tahun 2015

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan pembangunan infrastruktur permukiman kumuh yang dilaksanakan di Kawasan Kumuh Muara Rapak melalui pembiayaan APBN dan pendampingan APBD Kota Balikpapan. Adapun infrastruktur yang dibangun antara lain adalah pekerjaan jalan lingkungan, pembangunan septic tank komunal, pembangunan jembatan, perbaikan drainase serta pengadaan beautifikasi lingkungan seperti pot bunga, bak sampah, penerangan jalan dan lainnya. Selain itu, kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman kumuh juga dilaksanakan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang pada tahun 2016 dilaksanakan di 10 (sepuluh) Kelurahan.

5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban sampai dengan tahun 2015 relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap oleh aparatur pemerintah. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan keamanan dan

ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya.

6) Sosial

- Penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial anak, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan penyandang disabilitas

Penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial anak di Kota Balikpapan meliputi: anak terlantar (Antar), anak balita terlantar (ABT), anak jalanan (Anjal), anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), anak berhadapan dengan hukum (ABH), dan anak korban penyalahgunaan NAPZA. Adapun permasalahan yang cukup menonjol adalah meningkatnya jumlah anak jalanan dari 214 (dua ratus empat belas) anak yang terdata pada tahun 2015 menjadi 400 (empat ratus) anak yang terdata pada tahun 2016.

Penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan tuna sosial meliputi: tuna susila, penderita gangguan jiwa/psikotik, orang terlantar yang memerlukan rekomendasi kesehatan, gelandangan dan pengemis, orang yang dipekerjakan tidak sesuai dengan kesepakatan. Adapun permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah belum tersedianya panti rehabilitasi sosial terpadu sebagai prasarana penunjang pelayanan, mengingat beragamnya PMKS yang harus mendapatkan penanganan.

Lanjut usia terlantar adalah lanjut usia yang mengalami keterlantaran, tidak potensial, tidak memiliki dana pensiun, aset, atau tabungan yang cukup sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Terkait dengan penanganannya, perlu diperhatikan ketersediaan panti jompo/wredha yang dikelola Dinas Sosial, sebab selama ini panti yang terdapat di Kota Balikpapan adalah panti yang dikelola oleh masyarakat melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial, dan diperuntukkan bagi lanjut usia yang potensial.

Pelayanan terhadap penyandang disabilitas di Kota Balikpapan masih sangat kurang dari 926 (sembilan ratus dua puluh enam) disabilitas yang terdata pada tahun 2015-2016, hanya 11 (sebelas) orang saja yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat melalui program Asistensi Sosial Penderita Disabilitas Berat (ASPDB). ASPDB adalah bantuan langsung kepada penyandang disabilitas berat berupa uang tunai sebesar

Rp300.000,00 per orang per bulan. Adapun tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari penyandang disabilitas berat, yang meliputi: kebutuhan sandang, pangan, air bersih, perawatan sehari-hari, dan untuk menumbuhkan kepedulian keluarga maupun masyarakat dalam melakukan perawatan dan bimbingan sosial bagi penyandang disabilitas berat agar hak-haknya dapat terpenuhi. Terkait permasalahan pelayanan terhadap penyandang disabilitas, Dinas Sosial perlu meningkatkan upaya-upaya pembinaan penyandang disabilitas secara umum, baik melalui pelatihan keterampilan maupun bimbingan mental sosial (Bimtalsos).

Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Balikpapan dijelaskan Tabel dibawah ini:

Tabel 2.29
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Balikpapan

NO	PMKS	JUMLAH 2015	JUMLAH 2016
1	Anak Jalanan	214	400
2	Anak Berhadapan Hukum	68	35
3	Anak Terlantar	3.493	3.493
4	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	15	37
5	Anak Balita Terlantar	479	479
6	Tuna Susila	14	4
7	Penderita Gangguan Jiwa/Psikotik	190	125
8	Lanjut Usia Terlantar	1.699	1.699
9	Anak Korban NAPZA	12	12
10	Orang Terlantar yang memerlukan rekomendasi kesehatan	611	177
11	Gelandangan dan Pengemis	23	3
12	Orang yang dipekerjakan tidak sesuai dengan kesepakatan	238	93
13	Penyandang Disabilitas	926	926
14	Fakir Miskin Penerima Bantuan Iuran	94.033	93.475
15	Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	50	50
16	Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	50	25
17	Warga Bekas Binaan Lembaga Pemasyarakatan (WBLP)	25	25
18	Orang dengan HIV/AIDS	25	25
19	Korban Bencana	375	204
	JUMLAH	102.540	101.287

Sumber :Disnakersos Kota Balikpapan, 2016.

Berdasarkan data PMKS di atas dapat dijelaskan bahwa jenis PMKS Kota Balikpapan sebanyak 19 macam dengan jumlah sebanyak 102.540 jiwa pada tahun 2015, dan 101.287 jiwa pada tahun 2016, atau terjadi penurunan sebanyak 1,2 %.

- Perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial miskin

Permasalahan pelayanan terhadap PMKS miskin terutama adalah verifikasi dan validasi data sasaran PMKS miskin yang akan menerima bantuan iuran. Verifikasi dan validasi sangat penting sebagai upaya pengendalian dan pengawasan pelaksanaannya, mengingat data sasaran saat ini merupakan data yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial, sehingga untuk akurasi implementasinya di lapangan dapat dipertanggungjawabkan.

Data PMKS miskin yang tercakup dalam program penanggulangan kemiskinan Kota Balikpapan dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.30
Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Balikpapan

NO	PROGRAM	JUMLAH
1	Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Kota Balikpapan	10.403 JIWA
3	Penerima Bantuan Iuran (Kartu Indonesia Sehat (KIS)- JKN PBI APBN)	93.475 JIWA
4	Program Keluarga Harapan (PKH)	3.727KK
5	RASKIN/RASTRA	10.625 KK

Sumber :Disnakersos Kota Balikpapan, 2016

- Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan sosial yang dalam pelaksanaannya menggunakan partisipasi masyarakat dengan menggali potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perlu ditingkatkan. Adapun data PSKS Kota Balikpapan dijelaskan pada tabel 2.31 di bawah ini:

Tabel 2.31
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kota Balikpapan

NO	PSKS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pekerja Sosial Masyarakat	34	Orang
2	Karang Taruna Kelurahan	40	Lembaga
3	Pengurus Karang Taruna Kecamatan	-	
4	LKS Anak	30	Lembaga
5	LKS Lanjut Usia	3	Lembaga
6	Organisasi Sosial	19	Lembaga
7	Tagana	110	Orang
8	Askesos	2	Lembaga

9	WKSBM	-	
10	TKSK	6	Orang
	JUMLAH	244	

Sumber :Disnakersos Kota Balikpapan, 2016.

b. Fokus Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan SDM yang berkualitas, khususnya pada aspek human capital dalam pembangunan baik daerah maupun nasional. Pembangunan ketenagakerjaan juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan ini akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah karena tenaga kerja menjadi salah satu faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas perekonomian.

Pembangunan pada sektor ini tidak bisa dilaksanakan secara sektoral mengingat banyak variabel yang terlibat, sehingga diperlukan perencanaan yang terarah, berkesinambungan dan bersifat lintas sektoral. Perencanaan pembangunan pada sektor ini tidak cukup hanya dilaksanakan oleh pemerintah, akan tetapi perlu melibatkan seluruh stakeholders, baik pengusaha, tenaga kerja, maupun masyarakat. Harapannya, hubungan yang sinergis antara pemerintah, pengusaha, tenaga kerja dan masyarakat dapat mendorong iklim kenagakerjaan yang baik sehingga berdampak positif kepada masyarakat.

Berikut ini akan diuraikan kondisi umum terkini pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan di Kota Balikpapan:

- Penduduk usia Kerja

Konsep Ketenagakerjaan berdasarkan ILO (International Labor Organization) membagai penduduk usia kerja (15 tahun keatas) berdasarkan aktivitas utama menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dari komponennya ankatan kerja dibagi menjadi dua yaitu, angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang tidak bekerja (pengangguran terbuka).

Pertumbuhan angkatan kerja memiliki arah yang sama dengan pertumbuhan penduduk, tetapi pertumbuhan penciptaan kesempatan kerja baru lebih lambat. Hal ini menyebabkan tidak semua angkatan kerja mampu terserap oleh pasar tenaga kerja karena ketidakseimbangan antara *supply dan demand* tenaga kerja sehingga terjadilah pengangguran.

Jumlah penduduk usia kerja (PUK) atau penduduk berumur 15 tahun ke atas di kota Balikpapan periode 2013-2016, cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan sakernas PUK di Kota Balikpapan pada tahun 2013 adalah sebesar 435.520 dan pada tahun 2015 *(pendataan bulan Agustus 2015)* sebesar 452.260.

Data Sakernas pada tahun 2012-2016 menunjukkan bahwa penduduk usia kerja yang tergolong angkatan kerja mempunyai proporsi mencapai lebih dari 65 persen setiap tahunnya dimana dari jumlah angkatan kerja ini lebih dari 90 persennya merupakan angkatan kerja yang bekerja sehingga menghasilkan penganggur terbuka yang jumlahnya relatif kecil. Sedangkan kelompok penduduk bukan usia kerja memberikan proporsi berkisar 30 persen dari penduduk usia kerja. Hal ini mengindikasikan cukup banyak penduduk usia kerja yang memilih untuk tidak bekerja. Kelompok ini didominasi oleh kelompok yang memilih untuk mengalokasikan sebagian besar waktunya demi mengurus rumah tangganya. Sebagian besar anggota kelompok bukan angkatan kerja ini memang cenderung tidak menghasilkan pendapatan nominal dan mungkin dianggap sebagai kelompok yang tidak produktif.

Tabel. 2.32
Perkembangan Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Keatas)

No	JENIS KEGIATAN	2013	2014	2015
1	Penduduk Usia Kerja	435.520	446.466	452.260
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur			
	15-19	30,41	29,18	24,86
	20-24	69,72	71,51	68,31
	25-29	72,22	72,11	79,10
	30-34	74,79	73,89	76,79
	35-39	71,46	73,34	72,43
	40-44	75,06	78,18	67,60
	45-49	73,76	75,66	66,56
	50-54	78,55	78,79	70,97
	55-59	54,35	66,47	56,45
	60-64	50,44	50,75	40,94
	65+	27,03	27,28	10,12

No	JENIS KEGIATAN	2013	2014	2015
3	Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)	7,87	7,56	5,95
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,63	66,12	62,50
Sumber : BPS, Sakernas 2015				

Jumlah penduduk usia kerja usia kerja (PUK) atau penduduk 15 tahun ke atas di Kota Balikpapan pada Agustus 2015 diperkirakan mencapai 452.260 orang. Ditinjau dari aspek gender, jumlah penduduk usia kerja laki-laki tercatat sebanyak 233.699 orang dan untuk perempuan 218.561 orang.

Grafik. 2.16
Penduduk Usia kerja kota Balikpapan per jenis kelamin 2015

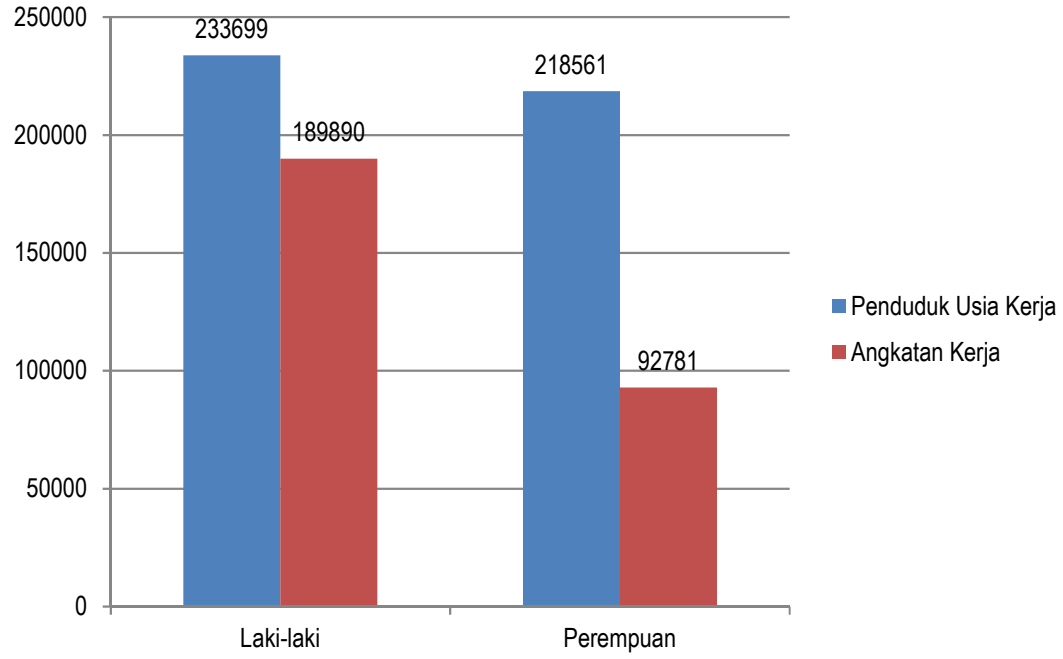

Sumber : BPS, Sakernas 2015

Penduduk usia kerja menurut tingkat pendidikan pada tahun 2013 - 2015 di Kota Balikpapan sebagian besar masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan maksimum sekolah dasar. Pada tahun 2013 PUK berpendidikan maksimum sekolah dasar jumlahnya mencapai 106.021 orang. Pada tahun 2014 jumlah ini berhasil ditekan menjadi 93.634 orang dan pada tahun 2015 menunjukkan penurunan yang cukup berarti menjadi 87.336 orang.

Tabel. 2.33
Penduduk Usia kerja kota Balikpapan perjenis kelamin 2015

Tingkat Pendidikan	2013	2014	2015
Maksimum SD	106.021	93.634	87.336
SMTP	91.713	96.183	83.713
SMTA UMUM	105.452	111.605	110.569
SMTA KEJURUAN	85.397	92.866	96.043
DIPLOMA	12.619	16.368	23.951
UNIVERSITAS	34.318	35.81	50.648
JUMLAH	**435.520**	**446.466**	**452.260**

Sumber : BPS Sakernas 2013-2015

- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka antara jumlah penganggur terbuka dengan jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah penduduk usia produktif yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Ketiadaan pekerjaan itu menurut BPS bisa karena sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta telah diterima bekerja namun belum mulai bekerja.

TPT bisa digunakan untuk memantau serta mengevaluasi perkembangan angka pengangguran karena TPT merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Perkembangan angka pengangguran terbuka di Kota Balikpapan pada Agustus tahun 2013 hingga Agustus 2015 menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2013 TPT Kota Balikpapan sebesar 7,87 persen, pada tahun 2014 sebesar 7,56 persen dan pada tahun 2015 sebesar 5,95 persen.

Tabel. 2.34
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	2013	2014	2015
Laki-laki	7,68	7,25	6,42
Perempuan	8,25	8,14	5,00
Jumlah	7,87	7,56	5,95

Sumber : BPS Kota Balikpapan

2) Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan adalah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Pemberdayaan perempuan sebagai sumber daya insani, potensi yang dimiliki perempuan dalam hal kuantitas maupun kualitas tidak dibawah laki-laki. Namun kenyataannya masih dijumpai bahwa status perempuan dan peranan perempuan dalam masyarakat masih bersifat subordinatif dan belum sebagai mitra sejajar dengan laki-laki.

Dalam pencapaian sasaran pembangunan pemberdayaan perempuan masih dirasa perlu terus dilaksanakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kemampuan dan peran serta kaum perempuan dalam mengisi pembangunan antara lain 1) Sosialisasi/advokasi Pengarusutamaan Gender perlu dilanjutkan secara berkesinambungan untuk membangun kesepakatan pembangunan pemberdayaan perempuan antara pemerintah, swasta dan anggota masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender disegala bidang dan sektor. 2) Meningkatkan koordinasi antara lembaga-lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan baik dalam bentuk program, proyek maupun kegiatan rutin. 3) Pelaksanaan Pelatihan/ Pendidikan analisa gender, agar dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang gender serta meningkatkan kemampuan untuk mengarusutamakan isu gender ke dalam kebijakan program/ perencanaan pembangunan. 4) Mengupayakan keterlibatan kaum perempuan dalam setiap proses dan pengambilan keputusan.

- Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Interpretasi angka IPG adalah Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna.

Dalam rentang waktu 2011-2015 Indeks Pembangunan Gender di Kota Balikpapan menunjukkan peningkatan dan makin mendekati nilai 100. Bahkan di tahun 2014 IPG Kota Balikpapan (90,05) tertinggi untuk wilayah se Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Di tahun 2015, Balikpapan tetap mencatat IPG tertinggi untuk wilayah Kalimantan Timur yakni 89,97.

Peningkatan IPG setiap tahunnya menunjukkan bahwa program-program pemerintah yang berpedoman pada pengarusutamaan gender, sudah memberikan hasil yang positif terhadap peningkatan kapabilitas dasar perempuan Indonesia. Hal ini terlihat dari pencapaian IPG pada kurun waktu tersebut telah mampu mengurangi jarak (gap) secara nyata dalam pencapaian kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan. Namun demikian, perlu dilakukan upaya yang maksimal sehingga kesetaraan antara laki-laki dan perempuan terwujud secara nyata.

Tabel 2.35
Perkembangan IPG Provinsi Kalimantan Timur 2011 - 2015

Kode	Provinsi / Kabupaten	IPG				
		2011	2012	2013	2014	2015
6400	**KALIMANTAN TIMUR**	83,18	84,33	84,69	84,75	85,07
6401	Pasir	66,44	66,86	67,82	68,58	68,66
6402	Kutai Barat	78,28	80,91	82,87	83,01	82,51
6403	Kutai	73,29	74,92	76,13	76,92	77,22
6404	Kutai Timur	72,64	73,54	74,17	74,90	74,93
6405	Berau	83,49	85,76	86,27	87,23	87,37
6409	Penajam Paser Utara	82,05	82,87	84,71	85,97	86,26
6411	Mahakam Ulu			76,65	78,04	78,33
6471	Kota Balikpapan	86,22	86,72	87,14	90,05	89,97
6472	Kota Samarinda	87,82	88,03	88,71	89,26	89,43
6474	Kota Bontang	82,17	84,25	85,47	86,31	85,85

Sumber :

- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Indeks Pemberdayaan Gender Kota Balikpapan pada kurun waktu 2012 – 2014 mengalami penurunan sebesar 1,11 poin dari 68,94 di tahun 2012 menjadi 67,83 ditahun 2013, dan menurun lagi di tahun 2014 menjadi 65,82. Pada tahun 2015 IDG Kota Balikpapan mengalami kenaikan 0.47 poin menjadi 62,29.

Tabel 2.36 Indeks Pemberdayaan Gender Kota Balikpapan
Tahun 2012 – 2015

Tahun	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	IDG
2015	17,78	46,74	25,86	66,29
2014	17,78	39,92	24,28	65,82
2013	22,22	46,39	24,10	67,83
2012	24,44	45,42	23,92	68,94

Sumber : BPS (data diolah)

Grafik 2.17
Perkembangan IDG Kota Balikpapan Tahun 2012 - 2015

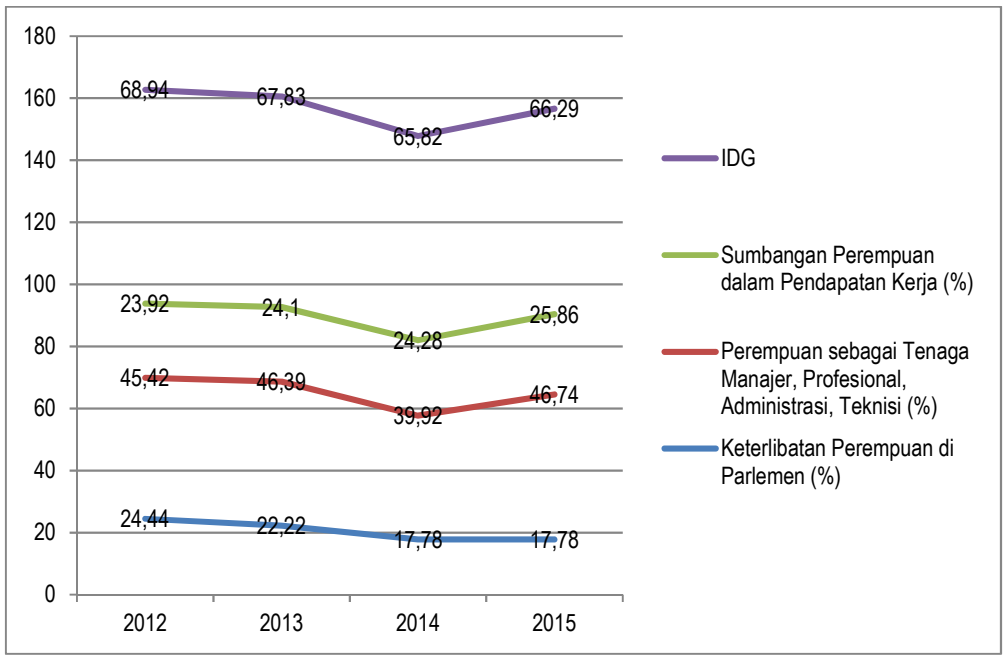

Sumber :Sumber : BPS (data diolah)

Bila dilihat dari komponen pembentuk IDG yaitu keterwakilan perempuan dalam politik, partisipasi perempuan di dunia kerja, maupun sumbangan perempuan dalam hal pendapatan kerja, yang masih perlu mendapat perhatian untuk lebih didorong capaiannya adalah jumlah perempuan yang menjadi anggota legislatif. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena sejak tahun 2012 mengalami penurunan sampai pada tahun 2014 dan 2015 sebesar 17,78%.

- *Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Pemerintah Lembaga Legislatif*

Tabel 2.37
Anggota dan Unsur Pimpinan DPRD Kota Balikpapan Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2015

No	Unsur Pimpinan DPRD	Anggota		Jumlah
		L	P	
1	Ketua	1	-	**1**
2	Wakil Ketua	3	-	**3**
3	Komisi I Bidang Pemerintah	6	3	**9**
4	Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan	8	2	**10**
5	Komisi III Bidang Pembangunan	13	-	**13**
6	Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat	6	3	**9**
	Jumlah	**37**	**8**	**45**

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

Grafik 2.18
Persentase Jumlah Anggota DPRD Kota Balikpapan Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2015

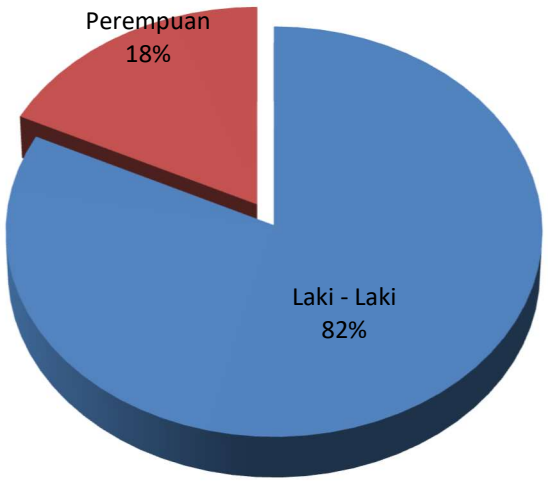

Sumber :Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

Tabel dan grafik di atas menunjukkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sudah menunjukkan kemajuan yakni (18%) walaupun sampai saat ini kuota yang diberikan (30%) belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh perempuan, ada banyak faktor yang mempengaruhi, seperti kesempatan yang belum banyak diberikan kepada perempuan serta rendahnya motivasi internal perempuan untuk terjun ke politik.

Tabel 2.38
Jumlah PNS dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Menurut Golongan
dan Jenis Kelamin Tahun 2015

NO	Golongan	2013/2014			2014/2015		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	I	195	16	211	149	11	160
2	II	825	458	1 286	873	521	1 394
3	III	885	1 588	2 473	931	1 728	2 659

4	IV	764	1 394	2 158	743	1 327	2 070
JUMLAH		2 669	3 456	6 125	2 696	3 587	6 283

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan

- Pemenuhan Hak Sipil Anak atas Akte Kelahiran

Pemerintah Kota telah berupaya untuk meningkat cakupan kepemilikan akta kelahiran anak melalui program three in one dimana setiap ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan mendapatkan akta kelahiran.

Tabel 2.39
Jumlah Anak Memiliki Akta Kelahiran Kota Balikpapan

No	Anak Memiliki Akta Kelahiran	Jumlah			
		2012	2013	2014	2015
1	Laki-laki	55.278	63.170	65.636	73.624
2	Perempuan	51.553	59.189	61.531	68.852
Total		**106.831**	**122.359**	**127.167**	**142.476**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2016

- Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Tabel 2.40
Jumlah Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Yang Terlapor di P2TP2A
Tahun 2015

Bulan	0-17 tahun		18-24 tahun		25+ tahun		Jumlah Korban		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	
Januari	0	0	0	1	2	2	2	3	5
Februari	1	3	0	0	0	5	1	8	9
Maret	3	2	0	1	1	1	4	4	8
April	1	4	1	1	0	2	2	7	9
Mei	0	2	0	0	0	4	0	6	6
Juni	2	1	0	0	2	1	4	2	6
Juli	0	2	0	1	0	4	0	7	7
Agustus	6	4	0	0	0	1	6	5	11
September	2	3	0	1	1	9	3	13	16
Oktober	0	10	0	0	0	3	0	13	13
November	3	9	0	0	0	5	3	14	17
Desember	0	9	0	1	0	8	0	18	18
Total	**18**	**49**	**1**	**6**	**6**	**45**	**25**	**100**	**125**

Sumber: P2TP2A Kota Balikpapan

Berdasarkan pada tabel di atas hingga bulan September 2015 di Kota Balikpapan pada tahun 2015 korban kekerasan yang menimpa perempuan dan anak sebanyak 77 jiwa, dimana 55 jiwa merupakan kaum perempuan atau sebesar 71,43 % dan sisanya adalah laki-laki. Jika dilihat dari kelompok umur maka jumlah korban kekerasan sebanyak 36 jiwa adalah usia 0-17 tahun, 6 jiwa usia 18-24 tahun dan di usia 25 tahun keatas yaitu sebanyak 35 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa usia anak-anak dan remaja serta jenis kelamin perempuan masih sangat rentan menjadi korban dalam kekerasan, baik itu kekerasan dalam bentuk fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi dan lain sebagainya.

Oleh sebab itu melalui pemerintah diharapkan untuk dapat mengupayakan Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) dalam bentuk kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum untuk kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Disamping itu Pemerintah juga mempunyai anggaran yang responsif dalam penanganan gender dan memfasilitasi organisasi sosial yang bergerak atau beraktifitas disekitar pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.

3) Pangan

Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan terwujud bila dua kondisi terpenuhi yaitu : (1) setiap saat tersedia pangan yang cukup (baik jumlah maupun mutu), aman, merata dan terjangkau dan (2) setiap rumah tangga, setiap saat, mampu mengkonsumsi pangan yang cukup, aman, bergizi dan sesuai pilihannya, untuk menjalani hidup sehat dan produktif.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada akhir tahun 2016, bahwa jumlah penduduk Kota Balikpapan mencapai 762.495 jiwa. Terkait dengan jumlah tersebut, laju pertumbuhan penduduk (r) terhitung dari tahun 2006 sampai dengan 2016 adalah sebesar 3,47. Artinya Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2006-2016 atau dalam satu dekade (10 tahun) mengalami pertumbuhan sebesar

3,47%. Terkait dengan jumlah penduduk tersebut, bahwa untuk memenuhi ketersediaan pangan di Kota Balikpapan tergantung pada daerah penghasil pangan. Ketersediaan pangan di Kota Balikpapan ± 90% berasal dari luar daerah sehingga ketahanan pangan merupakan hal penting bagi kerja Pemerintah Kota untuk selalu dapat menjaga dan mempertahankan ketersediaan pangan bagi masyarakat di Kota Balikpapan.

Pelayanan Umum Urusan Ketahanan Pangan merupakan urusan yang sangat strategis yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Balikpapan. Capaian kinerja urusan ketahanan pangan di Kota Balikpapan sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari sudah adanya regulasi berupa Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-239/2010 tentang Susunan Personil Dewan Ketahanan Pangan Kota Balikpapan. Sedangkan untuk ketersediaan pangan utama semula hanya 1,80% pada tahun 2011 telah meningkat menjadi 23,01% pada tahun 2015. Untuk jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 2.41
Capaian kinerja urusan Ketahanan Pangan Kota Balikpapan 2010 - 2015

Indikator Kinerja	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Regulasi ketahanan pangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Ketersediaan pangan utama (%)		1,80			28,40	23,01

Sumber: LPPD Tahun 2010 - 2015

Keberhasilan pembangunan dalam hal ketahanan pangan dapat dilihat dari aspek ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Dalam Standar Pelayanan Bidang Ketahanan Pangan, ditetapkan jenis pelayanan dasar yaitu : ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan serta penanganan kerawanan pangan. Dalam upaya menjaga ketersediaan dan cadangan pangan, perlu memperhatikan produksi komoditas pangan.

Jenis komoditas pangan yang diproduksi di Kota Balikpapan adalah padi, dengan volume produksi pada tahun 2016 sebesar 539 ton, menurun 13,76 persen dibandingkan dengan volume produksi padi tahun 2015 yaitu sebesar 625 ton. Untuk produksi palawija pada tahun 2016 sebesar 11.115 ton, mengalami penurunan sebesar 1.393 ton (11,14%) dibandingkan dengan volume produksi palawija tahun 2015 sebesar 12.508 ton.

4) Pertanahan

Capaian kinerja sektor pertanahan dapat terlihat dari pelayanan kepada masyarakat terkait pengurusan dokumen pertanahan.

Peninjauan lokasi, pengukuran dan penertiban IMTN pada tahun 2016 adalah 5275 bidang tanah, mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2015 yaitu 2000 bidang tanah. Persentase penyelesaian kasus tanah negara juga mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 50 % dari total kasus, menjadi 78 % di tahun 2016.

Kinerja pengadaan lahan penyediaan dan pengolahan air baku, yaitu kegiatan pembebasan lahan waduk Teritip (Tahap II), pembebasan lahan Aji Raden dan pembebasan lahan waduk Wain sedang proses di tahun 2017.

Adapun permasalahan terkait belum maksimalnya kinerja pengadaan lahan adalah sebagai berikut:

- Belum ditetapkannya luas lahan prioritas pembebasan di dalam area kegiatan pembangunan waduk Sungai Wain.
- Terdapat hambatan dalam proses surat menyurat kepemilikan tanah yang akan dibebaskan.
- Belum selesainya proses pelimpahan berkas dari BPN Kaltim pada beberapa kegiatan.

Tabel 2.42
Capaian kinerja urusan Ketahanan Pangan Kota Balikpapan 2010 – 2015

Indikator Kinerja	Satuan	2015	2016
Peninjauan lokasi, pengukuran dan penertiban IMTN	Bidang tanah	2000	5275
Penyelesaian kasus tanah Negara	%	50	78
Pengadaan lahan penyediaan dan pengolahan air baku	Ha	-	-

Sumber :

5) Lingkungan Hidup

Sesuai data yang tersedia, sebagaimana tabel 2.43 kinerja urusan lingkungan hidup di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

Untuk penanganan sampah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 memperlihatkan kinerja yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah volume sampah yang masuk ke TPA Tahun 2014 sebanyak 132.994,07

ton. Tahun 2015 meningkat menjadi 135.415,00 ton dan tahun 2016 volume sampah yang masuk ke TPA adalah 122.640,00 ton.

Jumlah kegiatan usaha yang telah memiliki izin lingkungan berupa Amdal, UKL-UPL atau SPPL mengalami peningkatan, di tahun 2013 yaitu 97 izin lingkungan dan tahun 2014 tercatat 155 izin lingkungan. Jumlah yang sama juga tercatat di tahun 2015. Berikutnya adalah jumlah badan usaha yang telah memiliki sertifikasi hijau juga mengalami peningkatan. Di tahun 2013 berjumlah 16 badan usaha, di tahun 2014 sebanyak 18 badan usaha dan di tahun 2015 tercatat 20 badan usaha memiliki sertifikasi hijau. Untuk selengkapnya lihat tabel 2.43.

Tabel. 2.43
Capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Volume sampah yang masuk ke TPA Manggar.	Ton	115.266,87	123.664,87	132.994,07	135.415,00	122.640,00
Jumlah kegiatan usaha yang memiliki izin lingkungan.	Izin	102	97	155	155	
Jumlah badan usaha yang memiliki sertifikasi hijau	Sertifikat	12	16	18	20	

Sumber :

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 berimplikasi pada kewenangan penyelenggaraan administrasi kependudukan terutama dalam hal pendanaan. Semenjak diberlakukannya Undang-Undang yang baru tersebut, pendanaan untuk administrasi kependudukan baik Provinsi dan Kabupaten/Kota dianggarkan dalam APBN dimulai dari APBN-P 2014. Namun demikian sebelum APBN-P tersedia, pendanaannya tetap menggunakan APBD. Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional.

Hasil kinerja dari urusan administrasi dan kependudukan tersebut dalam proses selanjutnya dapat dijadikan sebagai basis data untuk penyediaan pelayanan dasar, khususnya pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat. Dalam implementasi yang lebih luas, data administrasi kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan kebijakan di sektor lain seperti bidang politik, sosial dan ekonomi.

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanganan kependudukan di Kota Balikpapan adalah Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kegiatan ini merupakan kesatuan dari beberapa kegiatan administrasi kependudukan sebelumnya yaitu Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu, implementasi sistem administrasi kependudukan yang dimulai dari pembangunan, updating dan pemeliharaan, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan, pemberian bimbingan dan supervisi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, koordinasi data kependudukan orang asing berupa Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), pengelolaan dan penyelesaian data kependudukan Kota Balikpapan tidak terlepas dari database kependudukan secara provinsi maupun nasional sehingga diperlukan koordinasi pengawasan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Dokumen Kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian wajib dimiliki oleh penduduk Indonesia. Dokumen kependudukan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara perdata bagi pemiliknya. Misalnya akta kelahiran, menunjukkan hubungan perdata dari pemilik akta dengan orang tuanya, akta kematian juga menunjukkan hubungan perdata dengan ahi waris, demikian pula akta-akta yang lain. Kepemilikan dokumen ini selain mempunyai kekuatan legal, juga dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan sosial dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara bagi pemerintah, kepemilikan dokumen kependudukan bermanfaat dalam melakukan kegiatan pengadministrasian penduduk berdasarkan hak legalnya serta, memperkuat database penduduk serta pelayanan publik.

- Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh keluarga. Kartu keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. Untuk menghindari kepala keluarga ganda, maka perempuan

bisa menjadi kepala keluarga karena status perkawinannya janda maupun karena menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat dari seorang laki-laki, sedangkan suaminya menjadi kepala keluarga hanya di salah satu istri, sesuai kesepakatan di dalam keluarga tersebut.

Seorang kepala keluarga bertanggung jawab terhadap anggota keluarga. Kartu Keluarga (KK) merupakan kartu identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, status kegiatan, status pekerjaan, status kecacatan dan lain sebagainya.

Tabel 2.44 menunjukkan jumlah keluarga dan jumlah keluarga yang telah memiliki Kartu Keluarga SIAK di Kota Balikpapan. Dari 258.060 keluarga ternyata 258.060 keluarga yang memiliki Kartu Keluarga SIAK. Dengan kata lain pada tahun 2016, seluruh keluarga di Kota Balikpapan sudah mempunyai Kartu Keluarga SIAK.

Tabel 2.44
Persentase Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga SIAK Kota Balikpapan
Tahun 2016

No	Kecamatan	n Keluarga	n Keluarga Yang Memiliki KK SIAK	n Keluarga Yang Tidak Memiliki KK SIAK	% Keluarga Yang Memiliki KK SIAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Balikpapan Timur	30.010	30.010	0	100%
2	Balikpapan Barat	36.344	36.344	0	100%
3	Balikpapan Utara	56.657	56.657	0	100%
4	Balikpapan Tengah	43.009	43.009	0	100%
5	Balikpapan Selatan	55.239	55.239	0	100%
6	Balikpapan Kota	36.801	36.801	0	100%
T O T A L		**258.060**	**258.060**	**0**	**100%**

Sumber : Database SIAK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2016

- Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

Kartu Tanda Penduduk merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang berumur di bawah 17 tahun tetapi sudah menikah/kawin atau sudah pernah menikah/kawin, dalam profil ini disebut penduduk wajib KTP. Dengan memiliki KTP penduduk

dapat dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya; misalnya urusan perbankan, mengurus sertifikat tanah, mengurus perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Tabel 2.45 menyajikan jumlah dan proporsi penduduk menurut kepemilikan KTP Elektronik.

Tabel. 2.45
Jumlah dan Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk
di Kota Balikpapan Tahun 2016

No	Kecamatan	Wajib KTP			Penduduk Yang Melakukan Perekaman KTP Elektronik			Pddk Memiliki KTP El	% Kepemilikan KTP
		L	P	L+P	L	P	L+P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)
1	Balikpapan Timur	33.608	29.933	63.541	27.830	24.787	52.617	36.021	56,69
2	Balikpapan Barat	40.384	36.919	77.303	35.126	32.113	67.239	54.055	69,93
3	Balikpapan Utara	62.345	57.712	120.057	50.203	46.472	96.675	89.366	74,44
4	Balikpapan Tengah	46.325	43.484	89.809	40.390	37.913	78.303	66.955	74,55
5	Balikpapan Selatan	59.384	53.876	113.260	47.885	43.443	91.328	105.393	93,05
6	Balikpapan Kota	39.822	36.736	76.558	34.764	32.070	66.834	35.555	46,44
TOTAL		**281.868**	**258.660**	**540.528**	**236.198**	**216.798**	**452.996**	**387.345**	**71,66**

Sumber : Database SIAK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2016

Tabel. 2.45 menampilkan kepemilikan KTP penduduk Kota Balikpapan. Menurut tabel 2.45 dapat diketahui bahwa dari 540,528 jiwa wajib KTP, 71,66% atau sebanyak 387,345 jiwa diantaranya sudah memiliki KTP Elektronik. Sedangkan untuk KTP Elektronik (KTP-EL) yang mulai dilaksanakan pada tahun 2012 di Balikpapan dari 452.996 jiwa yang sudah melakukan perekaman KTP-EL, 387.345 jiwa sudah mendapatkan KTP-EL atau 94,38% penduduk Balikpapan yang telah merekam telah menerima KTP-Elektronik.

- Kepemilikan Akta

Akta merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia. Akta merupakan pengakuan Negara atas status keperdataan seseorang baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungannya dengan pelayanan legal lainnya. Akta-akta yang dimaksud meliputi akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian. Data mengenai akta kematian belum dapat diperoleh sehingga belum disajikan dalam profil ini. Hal tersebut disebabkan karena:

a) Belum/kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya akta kematian untuk mengurus hak-hak keperdataan seperti masalah warisan, utang piutang dan lainnya.
b) Masyarakat menganggap sudah cukup dengan menggunakan Surat kematian dari Kelurahan dalam mengurus masalah yang dihadapinya.

Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan bukti legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya. Jika seorang ibu melahirkan tanpa ayah atau status perkawinannya tidak terdaftar, maka dalam akta kelahiran hanya akan dicantumkan nama ibunya, sehingga dalam hal ini si anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Akta kelahiran penting untuk dimiliki oleh seorang anak karena digunakan pada saat mengurus pendidikan atau mengurus dokumen lainnya seperti paspor.

Tabel 2.46 Rekapitulasi Akta Kelahiran
Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah		
		L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Balikpapan Timur	1.139	1.071	2.210
2	Balikpapan Barat	1.349	1.296	2.645
3	Balikpapan Utara	1.934	1.913	3.847
4	Balikpapan Tengah	1.325	1.340	2.665
5	Balikpapan Selatan	1.808	1.779	3.587
6	Balikpapan Kota	1.081	1.018	2.099
T O T A L		**8.636**	**8.417**	**17.053**

Sumber : Database SIAK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2016

Akta Perkawinan

Akta Perkawinan merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan. Akta perkawinan memberikan kekuatan hukum atas ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat didalamnya.

Tabel 2.47
Rekapitulasi Akta Perkawinan Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah		
		L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Balikpapan Timur	37	36	73
2	Balikpapan Barat	28	31	59
3	Balikpapan Utara	88	89	177
4	Balikpapan Tengah	101	100	201
5	Balikpapan Selatan	84	89	173
6	Balikpapan Kota	70	63	133
T O T A L		**408**	**408**	**816**

Sumber : Database SIAK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2016

Akta Perceraian

Akta Perceraian merupakan dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh penduduk yang berstatus cerai hidup.

Tabel 2.48
Rekapitulasi Akta Perceraian Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah		
		L	P	L+P
1	Balikpapan Timur	3	3	6
2	Balikpapan Barat	2	4	6
3	Balikpapan Utara	6	7	13
4	Balikpapan Tengah	14	13	27
5	Balikpapan Selatan	10	8	18
6	Balikpapan Kota	11	9	20
T O T A L		**46**	**44**	**90**

Sumber : Database SIAK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2016

Akta Kematian

Pelayanan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan selama tahun 2016 sebanyak 3.998 jiwa. Persentase Kepemilikan Akta Kematian semakin meningkat karena mulai muncul kesadaran penduduk atau keluarga yang melaporkan kematian di lingkungannya.

Tabel 2.49
Rekapitulasi Akta Kematian Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah		
		L	P	L+P
1	Balikpapan Timur	268	162	430
2	Balikpapan Barat	421	268	689
3	Balikpapan Utara	523	360	883
4	Balikpapan Tengah	442	343	785
5	Balikpapan Selatan	364	235	599
6	Balikpapan Kota	383	229	612
T O T A L		**2.401**	**1.597**	**3.998**

Sumber : Database SIAK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2016

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat memegang peranan penting dalam proses pembangunan secara keseluruhan. Konsep pemberdayaan masyarakat memerlukan partisipasi masyarakat secara langsung mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program karena pemberdayaan masyarakat merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu, upaya meningkatkan pemberdayaan lebih berfokus pada aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas pengembangan lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif, serta pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna. Bentuk partisipasi masyarakat diantaranya diwujudkan melalui lembaga pemberdayaan masyarakat baik di bidang pemerintahan, ekonomi, maupun kesejahteraan keluarga.

Kota Balikpapan memiliki 4 (empat) lembaga pemberdayaan masyarakat, baik yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan program pembangunan dari kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Keempat lembaga tersebut antara lain : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM).

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat di bidang pemerintahan. Jumlah LPM tersebar dan berkantor di masing-masing

Kelurahan yang ada di Kota Balikpapan. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan dan bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.

Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) adalah lembaga pemberdayaan masyarakat yang dibentuk pada tahun 1999 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dalam rangka pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). LKM Kota Balikpapan dibentuk pada tahun 2009 sejak Program PNPM Mandiri Perkotaan digulirkan di Kota Balikpapan. LKM dibentuk melalui kesadaran masyarakat untuk menggali kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan dalam kandungan adat istiadat sebagai modal sosial kehidupan masyarakat. Awal mula dibentuk LKM merupakan lembaga yang diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam bidang infrastruktur lingkungan permukiman, sosial dan ekonomi serta membantu mengentaskan kemiskinan melalui Unit Pengelola Keuangan yang mendorong jiwa wirausaha masyarakat miskin secara berkelompok.

Tabel 2.50
Data Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Balikpapan Tahun 2016

No	Nama Lembaga	Jumlah	
		Kecamatan	Kelurahan (lembaga)
1	LPM	6 (Koordinator)	34
2	PKK	6 (Lembaga)	34
3	Karang Taruna	6 (Forum)	34
4	LKM	-	34

Sumber :BPMPPKB Kota Balikpapan

Selain kelembagaan pemberdayaan masyarakat, indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembinaan pemberdayaan masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, dan infrastruktur di wilayah permukiman. Hal ini terlihat dari kenaikan yang cukup signifikan swadaya masyarakat dalam kegiatan sosial, budaya, keagamaan, kebersihan lingkungan dan pembangunan infrastruktur permukiman berupa barang dan

jasa maupun dana selama kurun waktu 2011 – 2016, sebagaimana grafik berikut ini.

Grafik 2.20
Jumlah Swadaya Masyarakat

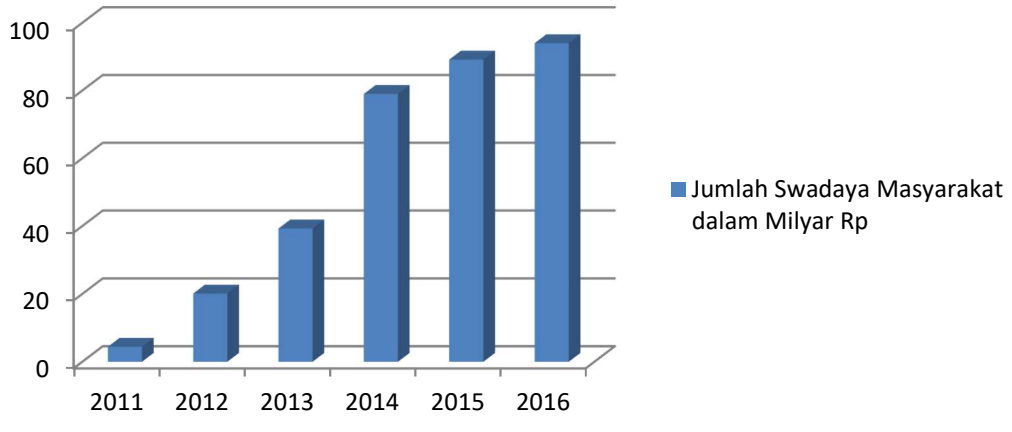

Sumber :BPMPPKB Kota Balikpapan

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jumlah Pasangan Usia Subur di Kota Balikpapan, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan bertambahnya pernikahan dan mutasi pada kelompok ini. Pada tahun 2015 tercatat terdapat 110.803 pasangan usia subur dimana 68,46 persen diantaranya memiliki kesadaran untuk mengikuti program pengaturan kelahiran melalui program keluarga berencana (KB) dengan cara menjadi akseptor KB aktif. Dilihat dari sudut pandang capaian kepesertaan PUS terhadap program keluarga berencana, wilayah kecamatan Balikpapan Utara merupakan wilayah dengan capaian tertinggi yaitu 79,80%, Sedangkan wilayah dengan capaian terendah adalah Balikpapan Timur dimana persentase PUS yang menjadi akseptor KB aktif 58,77%.

Tabel 2.51
Pasangan Usia Subur dan Akseptor KB Kota Balikpapan Tahun 2015

Kecamatan	PUS	%	Akseptor Aktif	% PUS yang berKB aktif
Balikpapan Utara	18.054	16,29	14.407	79,80
Balikpapan Selatan	12.761	11,52	9.247	72,46
Balikpapan Kota	24.355	21,98	16.674	68,46
Balikpapan Timur	18.747	16,92	1. 017	54,24
Balikpapan Barat	16.402	14,80	11 .884	72,45
Balikpapan Tengah	20.484	18,49	12 .625	61,63
Jumlah	**110.803**	**100,00**	**75.854**	**68,46**

Sumber :BPMPPKB Kota Balikpapan

Tabel 2.52
Banyaknya Posyandu dan Kader KB Aktif Menurut Kecamatan, Tahun 2015

No	Kecamatan	Posyandu	Kader Aktif
1	Balikpapan Utara	343	873
2	Balikpapan Selatan	232	551
3	Balikpapan Kota	218	991
4	Balikpapan Timur	144	440
5	Balikpapan Barat	235	866
6	Balikpapan Tengah	317	950
Kota Balikpapan		**1.489**	**4.671**

Sumber :BPMPPKB Kota Balikpapan

Grafik 2.21 Pasangan Usia Subur (PUS) dan Akseptor KB Tahun 2015

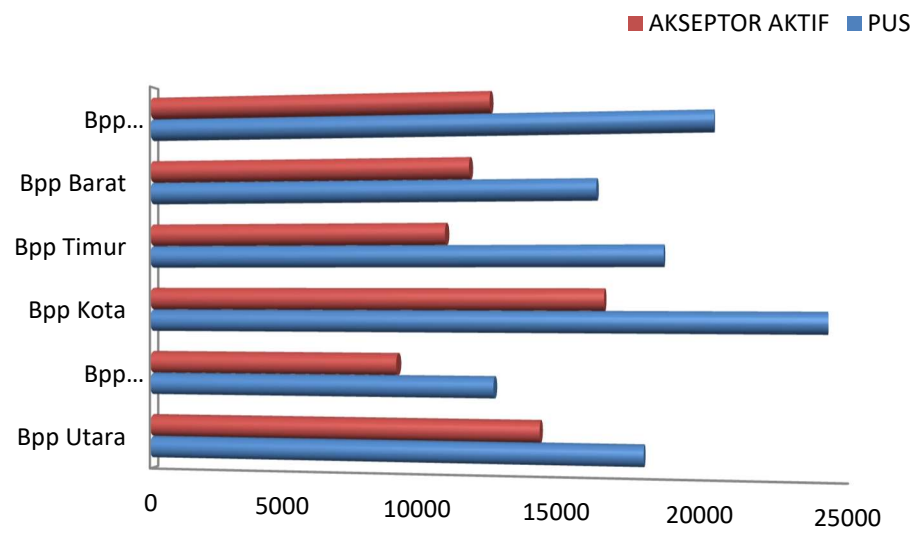

Sumber :

Ditinjau dari jenis/cara KB yang dipergunakan oleh PUS yang ada di Kota Balikpapan, lebih dari 95 persen merupakan partisipasi yang dilakukan oleh pihak perempuan melalui berbagai jenis cara dan yang dominan adalah melalui suntik yang mencapai 47,71%, menggunakan PIL sebanyak 27,60%, dan menggunakan IUD sebanyak 17,16%. Sementara partisipasi laki-laki terhadap kepesertaan Keluarga Berencana masih sangat terbatas yaitu hanya sebanyak 0,35% yang utama melalui penggunaan karet KB sebagai alat kontrasepsi utama.

Tabel 2.53
Jumlah Akseptor KB Aktif Menurut Kecamatan di Kota Balikpapan Tahun 2015

Kecamatan	Jenis Konstrasepsi							
	IUD	MOP	PIL	Susuk	Suntik	Kondom	MOW	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Balikpapan Utara	3 620	56	4 353	44	7 896	698	7	16 674
Balikpapan Selatan	1 837	17	4 948	315	6 786	443	61	14 407
Balikpapan Timur	771	34	2 664	502	4 658	530	88	9 247
Balikpapan Barat	1 469	34	3 597	28	6 333	421	2	11 884
Balikpapan Tengah	2 807	79	2 493	125	4 247	1 213	53	11 017
Balikpapan Kota	2 509	47	2 878	145	6 270	635	141	12 625
Kota Balikpapan	13 013	267	20 933	1 159	36 190	3 940	352	75 854

Sumber :BPMPPKB Kota Balikpapan

Dari keseluruhan Akseptor KB, maka metode suntik KB menjadi pilihan yang paling diminati sebesar 48%, diikuti oleh pengguna PIL KB sebesar 28%, IUD sebesar 17% dan kondom 5%, sementara sisanya adalah pengguna IUD dan metode KB lainnya, sebagaimana digambarkan grafik dibawah ini.

Grafik 2.22
Akseptor KB di Kota Balikpapan menurut Jenis Alat/Metode KB yang Dipergunakan Tahun 2015

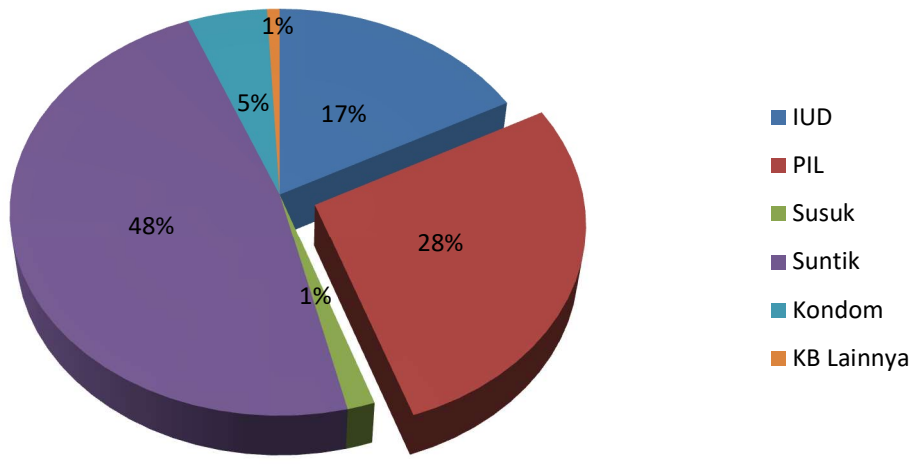

Sumber :BPMPPKB Kota Balikpapan

9) Perhubungan

Sektor perhubungan sangat berperan dalam mendukung mobilitas pergerakan orang dan/atau barang baik dalam wilayah maupun antar

wilayah. Pergerakan orang dan/atau barang tersebut merupakan wujud dari adanya interaksi antar masyarakat, baik selaku pribadi maupun kelompok/golongan. Untuk mendukung mobilitas orang/barang harus difasilitasi dengan adanya ketersediaan layanan angkutan yang memadai baik untuk orang dan/atau barang. Selain mengenai ketersediaan layanan angkutan, sektor perhubungan erat kaitannya dengan upaya untuk mewujudkan perilaku berkendara dan kondisi lalu-lintas yang aman dan nyaman.

Sesuai RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021, sektor perhubungan merupakan salah satu dalam misi ke-3 yaitu menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas dengan sasaran pembangunan untuk mewujudkan infrastruktur yang handal. Infrastruktur yang berkualitas merupakan infrastruktur untuk semua baik pengguna infrastruktur maupun dalam rangka pemerataan kewilayahan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan aksesibilitas Kota Balikpapan melalui pembangunan transportasi berkelanjutan yaitu mendorong penggunaan transportasi bukan kendaraan bermotor (non motorized vehicle) seperti jalur pejalan kaki dan jalur sepeda serta mendorong penggunaan transportasi massal.

Guna mendorong hal tersebut, maka Pemerintah Kota Balikpapan telah berupaya menciptakan sebuah kawasan di Jl. Jenderal Sudirman yang ramah pejalan kaki dengan dilengkapi trotoar yang nyaman, jalur sepeda serta fasilitas Gedung Parkir Klandasan. Gedung Parkir Klandasan dibangun tahun 2014-2016 mulai dioperasikan pada tanggal 9 Februari 2017 bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kawasan tertib lalu lintas dan kawasan bebas on street parking di Jl. Jenderal Sudirman.

Tabel 2.54.
Jumlah Fasilitas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Kota Balikpapan

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Angkutan Kota	1958	1945	1922	1922	1809	1807
Jumlah Koridor SAUM	0	0	1 (Pelabuhan Ferry Kariangau – Terminal Batu Ampar)	1 (Pelabuhan Ferry Kariangau – Terminal Batu Ampar)	1 (Pelabuhan Ferry Kariangau – Terminal Batu Ampar)	1 (Pelabuhan Ferry Kariangau – Terminal Batu Ampar)
Jumlah Halte SAUM	0	0	4	14	14	14
Jumlah Rambu	1603	1779	1855	2098	2195	2191

Jumlah ATCS	14	14	14	14	15	15
Panjang Jalur Sepeda	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4500
Jumlah Zebra Cross	4500	4500	4500	4500	4500	259
Jumlah Pita Penggaduh	258	258	258	258	258	24

Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2016

Berdasarkan data Direktorat Lalu-Lintas Polda Kalimantan Timur, jumlah kendaraan bermotor di Kota Balikpapan pada Tahun 2011 mencapai 405.355 unit, sedangkan pada tahun 2015 mencapai 534.858 unit atau dengan rata-rata pertumbuhan per tahun 7,99% dengan didominasi oleh kendaraan kendaraan roda 2 (dua) dan kendaraan pribadi mobil penumpang. Pertumbuhan yang sangat cepat ini memerlukan skenario transportasi yang baik, cepat dan tepat, karena bila tidak maka akan terjadi kemacetan lalu-lintas di jalan-jalan Kota Balikpapan seperti kota-kota besar lainnya.

Tabel 2.55
Jumlah Kendaraan Kota Balikpapan

No	Jenis Kendaraan	Jumlah (Unit)				
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Sepeda motor	304.580	328.773	358.416	389.499	411.169
2.	Mobil Penumpang					
	a.Umum	2.510	3.831	8.025	8.175	9.011
	b. Pribadi	45.775	48.470	46.952	45.018	47.205
	c. Pemerintah				5.107	5.127
3.	Mobil Barang					
	a.Umum	3.498	3.872	6.038	6.699	7.177
	b. Pribadi	34.465	36.734	31.616	32.540	33.444
	c. Pemerintah				4.594	5.594
4.	Bus Besar					
	a.Umum	146	148			
	b. Pribadi	839	851			
	c. Pemerintah					
5.	Bus Sedang					
	a.Umum	407	473	874	874	880
	b. Pribadi	12.227	12.555	12.747	12.851	13.211
	c. Pemerintah				640	640
6.	Bus Kecil	19	19			
	a.Umum	136	136			
	b.Bukan umum					
7.	Kendaraan Roda Tiga					

No	Jenis Kendaraan	Jumlah (Unit)				
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
	a.Umum	156	191	582	656	780
	b. Pribadi	597	719	359	282	290
	c. Pemerintah					330
	Jumlah Total	**405.355**	**436.772**	**465.609**	**507.265**	**534.858**

Sumber: Samsat Balikpapan Tahun 2016

Selain rencana pengembangan SAUM, transportasi umum di Kota Balikpapan juga ditunjang oleh keberadaan angkutan kota yang hingga tahun 2015 berjumlah 1.809 unit sesuai dengan data izin trayek yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan. Angkutan kota tersebut melayani simpul-simpul wilayah di Kota Balikpapan yaitu Balikpapan Utara, Balikpapan Selatan/Kota, Balikpapan Barat dan Balikpapan Timur. Adapun rute trayek angkutan kota Balikpapan dan jumlah izin trayeknya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.56.
Rute Trayek Angkutan Kota Balikpapan

Nomor Trayek	Rute Trayek	Warna
1	RSS Damai III - Terminal Batu Ampar - Karang Anyar - Kampung Baru PP Dapat melayani jurusan : Somber, Inpres IV, Gunung Pipa, Gunung IV, Asrama Bukit, Kebun Sayur	Orange
2	Terminal Batu Ampar - Muara Rapak - Karang Jati - Gunung Sari - Jl. Mayjen Sutoyo - Jl. D.I. Panjaitan - Jl. Sungai Ampal - Balikpapan Baru PP Dapat melayani jurusan : Somber, Jl. Gunung Samarinda III, Jl. Dr. Sutomo, Jl. P. Antasari, Jl. S.Parman	Abu-abu
2A	Terminal Damai - Jl. MT. Haryono - Perumahan Balikpapan Baru / RSS Damai III - RSS Damai Beriman / Korpri - Terminal Batu Ampar PP Dapat melayani jurusan : SMUN 4, Psr. Sepinggan, Komp. Praja Bakti / Pemda, Perumahan Taman Sari Bukit Mutiara, Sumber Rejo, Gunung Guntur	Hijau Muda
3	Terminal Batu Ampar - Rapak - Gunung Sari - Klandasan - Pelabuhan PP Dapat melayani jurusan : Somber, Gunung samarinda, Sumber Rejo, Karang Rejo, Karang Jati, Jl. P. Antasari, Jl. S. Parman, Martadinata, Jl. Kapt. P. Tendean, Sentosa, Prapatan	Biru Muda
5	Terminal Kampung Baru - Kebun Sayur - Karang Anyar - Rapak - Gunung Sari - Pasar Baru - Terminal Damai PP Dapat melayani jurusan : Gunung IV, Gunung Pipa, Karang Rejo, Jl. P. Antasari, Jl. S. Parman, Jl. Mayjen Sutoyo	Kuning Tua
6	Terminal Kampung Baru - Karang Anyar - Pelabuhan Semayang - Klandasan - Terminal Damai PP Dapat melayani jurusan : Jl. Kapt. P. Tendean, Jl. A. Fadilah, Gunung Sari, Antasari, Pasar Baru	Biru Tua
7	Terminal Damai - Sepinggan - Batakan - Manggar - Gunung Tembak PP Dapat melayani jurusan : Psr. Sepinggan dan Perumahan Sosial	Hijau Tua
8	Terminal Batu Ampar - Km.24 (Karang Joang) PP	Cream

Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2016

Tabel. 2. 57
Data Kendaraan Bermotor yang Uji Menurut Jenis dan Sifat Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan (UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor)

No.	Jenis Kendaraan		Jumlah (unit).					
			Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
I	**Mobil Penumpang Umum**		4.378	4.460	4.380	4.308	4.314	4.125
II	**Mobil Bus**							
	1.	*Mobil Bus JBB s/d 2500 Kg.*						
	A.	Umum.	-	-	-	2	-	-
	B.	Bukan Umum.	103	276	276	231	289	276
	2.	*Mobil Bus JBB diatas 2500 Kg.*						
	A.	Umum.	194	170	199	229	153	170
	B.	Bukan Umum.	988	1.405	1.635	1.209	1.417	1.405
III	**Mobil Barang**							
	1.	*Mobil Barang JBB s/d 2500 Kg.*						
	A.	Umum.	-	-	-			
	B.	Bukan Umum.	10.475	14.835	14.850	14.157	14.991	14.835
	2.	*Mobil Barang JBB diatas 2500 Kg.*						
	A.	Umum.	393	531	630	575	517	531
	B.	Bukan Umum.	23.258	23.373	29.608	31.386	27.586	23.373
IV	**Kendaraan Khusus**							
	1.	*Kend. Khusus JBB s/d 2500 Kg.*						
	A.	Umum.	-	-	-	-	-	-
	B.	Bukan Umum.	361	-	-	3	-	1
	2.	*Kend. Khusus JBB diatas 2500 Kg.*	-					
	A.	Umum.	47	-	-	-	-	-
	B.	Bukan Umum.	1.665	1	5	2	-	-
V	**Kereta**							
	1.	*Tempel*						
	A.	Umum.	-	3	-	-	-	-
	B.	Bukan Umum.	54	52	83	92	111	140
	2.	*Gandeng*						
	A.	Umum.	-	-	-	-	-	-
	B.	Bukan Umum.	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2016

10) Komunikasi dan Informatika

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah dibentuk Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai perangkat daerah yang tugas dan fungsinya mendukung misi ke-5 RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 yaitu mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik dengan sasaran meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan melaksanakan integrasi sistem dalam portal e-government dan penggunaan database bersama. Adapun strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan hal tersebut adalah melalui peningkatan kualitas pelayanan informasi publik

berbasis teknologi informasi komunikasi, melakukan pengendalian keamanan data dan informasi layanan (aplikasi, data, jaringan, perangkat keras) serta pengembanganan dan pengelolaan e- government.

Informasi mempunyai peranan yang sangat penting bagi sebuah pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saat ini dalam era informasi, pemerintah dituntut untuk memberikan informasi yang cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sehingga pengelolaan informasi dalam pemerintahan menjadi sangat krusial. Untuk itu pemerintah perlu untuk mengetahui, mengembangkan dan menjaga saluran informasi yang dimiliki, agar kewajiban pemerintah untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat dilaksanakan, tetapi juga menjaganya agar informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah Kota Balikpapan, saat ini sudah memiliki saluran informasi yang resmi yaitu melalui portal http://balikpapan.go.id. Selain itu berbagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan juga mempunyai berbagai saluran informasi melalui website instansi masing-masing. Selain portal resmi, Pemerintah Kota Balikpapan juga memiliki beberapa saluran informasi lainnya berupa media sosial untuk membangun interaksi bersama warganya. Media sosial tersebut yaitu, Fanpage Facebook http://www.facebook.com/pemkotbpn, instagram pemkot_balikpapan, twitter @PemkotBPN, layanan SMS dan Whatsapp 08115440542 dan Aplikasi berbasis andorid Digital Government Info Balikpapan. Selain media sosial, Pemerintah Kota Balikpapan juga memiliki Balikpapan 112, yaitu sebuah nomor tunggal panggilan darurat yang dapat dimanfaatkan oleh warga saat terjadi keadaan darurat, seperti kebakaran, bantuan evakuasi medis, dan tindakan kejahatan. Beberapa saluran informasi ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota Balikpapan untuk menghasilkan informasi yang lebih cepat dan akurat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

11) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi dilakukan melalui prinsip pengembangan ekonomi yang seimbang dengan menerapkan konsep *pro poor, pro job, pro growth dan pro environment* dengan memperhatikan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam upaya mengurangi ketimpangan ekonomi masyarakat Kota Balikpapan, diperlukan keberpihakan pada usaha mikro kecil dan menengah termasuk pedagang informal baik

melalui kebijakan maupun penyediaan fasilitas dan modal kerja. Indikator pembangunan urusan koperasi dan usaha mikro menengah antara lain adalah peningkatan jumlah koperasi dan penambahan jumlah usaha kecil menengah di Kota Balikpapan.

- Koperasi

Koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa Indonesia telah dicetuskan oleh Bung Hatta namun perkembangannya baik usaha maupun jumlahnya masih kurang menggembirakan, khususnya Kota Balikpapan dan Indonesia pada umumnya.

Perkembangan jumlah koperasi aktif dan tidak aktif, terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.58
Perkembangan Koperasi di Kota Balikpapan dari Tahun 2013 - 2016

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Koperasi	Unit	533	538	540	544
2	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	410	417	420	421
3	Jumlah Koperasi Tidak Aktif	Unit	123	121	120	123

Sumber : Disperindagkop, 2016

Dapat diinformasikan bahwa terjadi peningkatan jumlah koperasi aktif dari tahun 2013 sebanyak 410 unit menjadi 421 unit di tahun 2016 atau mengalami peningkatan sebanyak 11 unit koperasi. Peningkatan tersebut salah satunya disebabkan karena adanya kegiatan bimbingan dan pelatihan teknis kepada pengurus/pengawas/pengelola koperasi pada setiap tahunnya rata-rata sebanyak 60 orang. Dengan adanya bimbingan dan pelatihan koperasi di Kota Balikpapan mampu meningkatkan mutunya menjadi koperasi aktif dan sehat.

Koperasi di Kota Balikpapan terdiri dari 25 kelompok antara lain: KUD 5 unit, Koperasi Peternakan 1 unit, Koperasi Nelayan 8 unit, Kopti 1 unit, Kopinkra 1 unit, Koppantren 8 unit, Kopkar 101 unit, Koperasi Angkatan Darat 19 unit, Koperasi Angkatan Laut 1 unit, Koperasi Angkatan Udara 2 unit, Koperasi Kepolisian 7 unit, Kop. Serba Usaha 208 unit, Koperasi Pasar 6 unit, Koperasi Simpan Pinjam 18 unit, Koperasi Angkutan Darat 2 unit, Koperasi Angkutan Laut 2 unit, Koperasi Pegawai Negeri 69 unit, Koperasi

Wanita 19 unit, Koperasi Veteran 1 unit, Koperasi Wredatama 1 unit, Koperasi Pepabri 1 unit, Koperasi Mahasiswa 2 unit, Koperasi Pemuda 1 unit, Koperasi Lainnya 54 unit, dan Koperasi Sekunder 2 unit.

Prestasi dibidang koperasi pada tahun 2013 Kota Balikpapan dikukuhkan sebagai Kota Penggerak Koperasi Peringkat Paramadhana Madya Koperasi selanjutnya pada tahun 2014 Terbaik III Bidang Koperasi dari Gubernur Kalimanatan Timur dalam rangka HUT Provinsi Kalimanatan Timur ke 57 dan tahun 2015 Walikota Balikpapan dikukuhkan sebagai Tokoh penggerak Koperasi.

- Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Krisis ekonomi yang telah lalu menyebabkan jatuhnya perekonomian nasional. Tidak sedikit usaha-usaha skala besar pada berbagai sektor termasuk industri, perdagangan, dan jasa yang mengalami stagnasi bahkan sampai terhenti aktifitasnya pada tahun 1998. Namun, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat bertahan dan menjadi pemulih perekonomian di tengah keterpurukan akibat krisis moneter pada berbagai sektor ekonomi. Kegiatan UMKM merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UMKM menjadi salah satu pilihan wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif. UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan persyaratan tertentu, seperti tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan) pekerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana. UMKM masih memegang peranan penting dalam perbaikan perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha, segi penciptaan lapangan kerja, maupun dari segi pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB).

UMKM mempunyai peranan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Keberadaan sektor UMKM bukan hanya dianggap sebagai tempat penampungan sementara bagi para pekerja yang belum masuk ke sektor formal, tetapi juga sebagai motor pertumbuhan aktivitas ekonomi. Hal ini dikarenakan jumlah penyerapan tenaga kerjanya yang demikian besar. Untuk mendukung roda perekonomian, kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada UMKM.

Perkembangan data jumlah UMKM di Kota Balikpapan dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 2.59
Perkembangan UMKM Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Unit Usaha					
Mikro	5,064	10,153	13,640	16,530	17,482
Kecil	310	704	1,187	1,495	16,691
Menengah	10	91	224	246	6,278
Jumlah	**5,384**	**10,948**	**15,051**	**19,710**	**40,451**
Tenaga Kerja (Orang)					
Mikro	8,060	16,253	23,024	28,086	25,927
Kecil	1,028	2,548	3,734	4,471	81,143
Menengah	111	354	746	977	49,556
Jumlah	**9,199**	**19,155**	**27,504**	**33,534**	**156,626**
Omzet (Rp,-)					
Mikro	347,513,645,000	615,099,068,000	804,026,599,000	944,693,409,000	21,105,515,682,963
Kecil	133,188,001,000	362,362,606,000	48,721,178,000	3,464,757,819,000	5,640,066,978,620
Menengah	39,218,000	2,054,237,853,000	2,126,746,609,000	38,762,146,609	5,316,053,042,948
Jumlah	**480,740,864,000**	**3,031,699,527,000**	**2,979,494,386,000**	**4,448,213,374,609**	**32,061,635,704,531**

Sumber : Disperindagkop, 2016

Berdasarkan tabel tersebut, Perkembangan jumlah UMKM di Kota Balikpapan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2016 khususnya terhadap UMKM kategori unit usaha Kecil maupun Menengah, hal tersebut sejalan dengan adanya berbagai kegiatan pelatihan serta bantuan sarana usaha bagi para wirausaha.

12) Penanaman Modal

Dalam hal urusan peningkatan penanaman modal, terutama untuk meningkatkan arus investasi modal, Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan perbaikan dalam hal pelayanan perizinan usaha melalui pelayanan perizinan satu pintu (*one gate service*) melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT). Perizinan usaha yang melalui DPMPT pada kegiatan peningkatan iklim dan kerjasama investasi di bidang penanaman modal dengan capaian 134 unit usaha dengan nilai investasi sebesar Rp. 24,5 triliun dari 100 unit usaha yang ditargetkan atau nilai investasi yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 20 triliun per tahun.

Tabel 2.60
Data Investasi Kota Balikpapan Tahun 2011-2016

Tahun	Total			
	Investasi (juta)	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Luas Lahan
2011	9,210,749	92	6,240	528.1633
2012	4,538,029	122	12,212	1,329.6546
2013	26,384,111	118	14,036	1,909.1294
2014	11,929,417	169	9,780	1,225.9996

Tahun	Total			
	Investasi (juta)	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Luas Lahan
2011	9,210,749	92	6,240	528.1633
2012	4,538,029	122	12,212	1,329.6546
2013	26,384,111	118	14,036	1,909.1294
2014	11,929,417	169	9,780	1,225.9996
2015	36,246,487	163	8,771	1,422.0127
2016*	24,598,068	134	29.037	2,075.9987

2015	36,246,487	163	8,771	1,422.0127
2016*	24,598,068	134	29.037	2,075.9987

Sumber : Data Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT)

Investasi di Kota Balikpapan di dominasi oleh PMDN/investasi swasta nasional, baik dari sisi nilai investasi maupun penyerapan tenaga kerja investasi tersebut dan posisi kedua diduduki oleh PMA. Untuk lebih jelasnya data investasi PMA dan PMDN/swasta nasional baik dari sisi nilai investasi, unit usaha, penyerapan tenaga kerja dan luas lahan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.61
Data Investasi PMA dan PMDN Kota Balikpapan Tahun 2011-2016

Tahun	PMA			PMDN/Swasta Nasional			
	Investasi (juta)	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Investasi (juta)	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Luas Lahan
2011	2,057,654	42	659	7,153,095	50	5,581	528.1633
2012	1,490,887	30	602	3,047,142	92	11,610	1,329.6546
2013	4,346,100,	28	1,038	22,038,011	99	12,998	1,909.1294
2014	1,133,105	3	14	10,796,312	166	9,766	1,225.9996
2015	4,441,046	-	-	31,805,440	163	8,771	1,422.0127
2016		-	-	24,598,068	134	29.037	2,075.9987

Sumber : Data Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT)

Jika dilihat dari pertumbuhan dan sharenya tehadap keseluruhan investasi di Kota Balikpapan, share terbesar diduduki oleh PMDN/swasta nasional dan selanjutnya investasi PMA. Sementara dilihat dari pertumbuhan investasi, investasi yang dilakukan oleh PMDN/swasta nasional dan PMA relative berfluktuatif (turun naik).

Kebijakan Umum Pengembangan Perekonomian Daerah diarahkan kepada penguatan struktur ekonomi Balikpapan pada masa yang akan datang agar tidak lagi tergantung pada industri Migas dan penguatan ekonomi yang berbasis kepada kegiatan ekonomi kerakyatan dalam rangka memecahkan masalah jangka pendek yaitu pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja. Upaya pencapaian sasaran investasi di Kota Balikpapan sangat terkait dengan penyediaan infrastruktur kota Balikpapan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan prasarana dasar bagi warga masyarakat seperti, jalan, pemukiman, air bersih, kebersihan kota, dan drainase kota. Demikian pula halnya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota cukup banyak kegiatan yang telah dilakukan, namun masih menimbulkan berbagai persoalan akibat adanya aktifitas masyarakat dalam pembangunan khususnya pengolahan lahan yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah lingkungan hidup yang baik. Oleh karena itu upaya pengembangan infrastruktur perkotaan dan kualitas lingkungan hidup perlu terus dilakukan seiring dengan perkembangan kota dan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan infrastruktur dan kualitas lingkungan hidup yang baik.

Sarana dan Prasarana Daerah yang terpenting dalam simpul distribusi lalu lintas perekonomian suatu daerah adalah prasarana jalan karena berfungsi menunjang kelancaran arus barang dan jasa. Model transportasi di Kota Balikpapan meliputi transportasi darat, laut dan udara. Transportasi darat untuk melayani kebutuhan masyarakat yang menghubungkan pusat kota dengan seluruh wilayah Balikpapan, yang meliputi angkutan dalam kota dan antar kota di wilayah sekitar Balikpapan. Alat angkutan laut untuk melayani penyeberangan yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kota dan Kabupaten lain.

Minat investor asing (PMA) di Kota Balikpapan relatif masih rendah dari tahun 2011 – 2016 hanya sejumlah 140 unit usaha atau rata-rata 23 unit usaha/per tahun. Hal ini berbeda dengan rencana investasi yang dilakukan PMDN/Swasta Nasional dari tahun 2011 – 2016 berjumlah 585 unit usaha atau 98 unit usaha/per tahun. Upaya-upaya untuk meningkatkan investasi oleh Pemerintah Kota Balikpapan antara lain dengan melakukan kegiatan promosi investasi baik di dalam negeri maupun keluar negeri dan kegiatan temu usaha dengan para pengusaha asing/nasional serta mempermudah perizinan.

Dalam rangka mempermudah perizinan, upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan salah satunya melakukan pelayanan perizinan yang terintegrasi secara online. Sistem ini mampu untuk mengetahui berkas perizinan sampai dimana dan apa masalahnya, sehingga konsumen tidak harus berulang-ulang datang ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) untuk mengetahui kapan perizinannya selesai. Saat ini terdapat 35 perizinan dan pada tahun 2015 pelayanan perizinan yang sudah terintegrasi secara online sebanyak 2 perizinan, dan pada tahun 2016 akan meningkat menjadi 4 perizinan.

Di Kota Balikpapan terdapat 8 (delapan) kelompok kegiatan investasi berdasarkan Jenis Usaha, adapun kelompok kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.61
Kelompok Kegiatan Investasi berdasarkan Jenis Usaha

KELOMPOK KEGIATAN	JENIS USAHA
Prasarana Wilayah	Perumahan, Sarana Olah Raga,Mess Karyawan, Taman, Jalan, Jembatan, Coastal Road
Pariwisata	Hotel, Apartemen,Villa, Taman Rekrasi, Museum
Perdagangan	Pasar Induk, Kantor, Mall, Penampungan Oli, Ruko, Mall, Supplier Barang (*Spare Part*Alat Berat), SPBU, SPBG
Kesehatan	Rumah Sakit, Klinik, Rumah Bersalin, Apotik
Industri	Workshop, Pabrik, Bengkel, Percetakan, Galangan Kapal, Industri Pengolahan, Industri Aneka, *Stock Pile*, Kawasan Industri Kariangau (KIK)
Pertanian	Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pusat Niaga Nelayan Terpadu
Telekomunikasi	Tower, *Roof Top, Monopole*
Sumber Daya Energi	Pembangkit Listrik

Sumber : DPMPT Kota Balikpapan

13) Kepemudaan dan Olah Raga

Kepemudaan dan olahraga memiliki keterkaitan yang erat dan saling menunjang. Dengan pemuda yang sehat jasmani dan rohani akan menjadi modal utama sebagai pelopor dan penggerak roda pembangunan.

Jumlah organisasi pemuda yang ada di Kota Balikpapan di tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 adalah sebanyak 73 organisasi. Jumlah ini lebih baik dari tahun 2012 yang baru tercatat 58 organisasi. Untuk kegiatan kepemudaan jumlahnya adalah 6 kegiatan di tahun 2013, 5 kegiatan di tahun 2014 dan 6 kegiatan di tahun 2015.

Jumlah kegiatan olahraga di tahun 2013 dan tahun adalah 2014 adalah 165 kegiatan dari berbagai cabang olahraga, sedangkan di tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 163 kegiatan olahraga, menyesuaikan dengan even tingkat nasional. Untuk jumlah organisasi olahraga yang ada di Kota Balikpapan hingga tahun 2015 tercatat 46 organisasi olahraga.

Tabel 2.62
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah raga

Indikator Kinerja	Satuan	2012	2013	2014	2015
Jumlah organisasi pemuda	organisasi	58	73	73	73
Jumlah kegiatan kepemudaan	Kegiatan	6	6	5	6
Jumlah organisasi olahraga	organisasi	45	46	46	46
Jumlah kegiatan olahraga	Kegiatan	165	165	165	163

Sumber : Disporabudpar 2015

14) Statistik

Statistik berkualitas dan dapat diandalkan merupakan bagian yang sangat penting dalam proses perumusan suatu kebijakan. Data statistik tersebut harus terdokumentasi secara memadai yang selanjutnya dapat diolah menjadi informasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Informasi yang dihasilkan dari pengolahan data tersebut harus memenuhi kriteria antara lain akurat, dapat dipercaya, lengkap, dapat diakses, tersedia tepat waktu dan mudah dimengerti. Dokumen-dokumen statistik ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan, diantaranya PDRB, IPM, Suseda, KBDA, Indeks Gini Rasio, Input Output, IKM dan IHK. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai ketersediaan dokumen statistik di Kota Balikpapan selama kurun waktu tahun 2011 – 2016.

Tabel 2.63
Ketersediaan Dokumen Statistik di Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016

No	Uraian	2011		2012		2013		2014		2015		2016	
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
1	PDRB	√		√		√		√		√		√	
2	IPM	√		√		√		√		√		√	
3	Suseda												
4	KBDA												
5	Indeks Gini Rasio	√		√		√		√		√		√	
6	Input Output	√		√		√		√		√		√	
7	IKM	√		√		√		√		√		√	

Sumber : Bappeda Litbang Kota Balikpapan

15) Persandian

Penyelenggaraan Pengamanan Persandian sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan sistem persandian negara. Pada Pemerintah Daerah, masalah persandian sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, masuk menjadi salah urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, salah satunya adalah mengenai persandian. Pembagian urusan pemerintahan untuk bidang persandian sebagaimana termuat dalam Lampiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah, terkait dengan kewenangan pertama yaitu penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Adapun layanan yang perlu dilakukan yaitu terkait dengan melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JIK) dengan menggunakan persandian yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan/atau nir-sangkal.

Selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perubahan lingkungan strategik persandian, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kegiatan persandian mengalami banyak perubahan. Pengembangan tersebut meliputi aspek pemanfaatan persandian di lingkungan instansi pemerintah, pengembangan organisasi, dan pengembangan teknologi persandian yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Komunikasi Persandian dalam membantu meningkatkan fungsi pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan berjalan sesuai dengan perkembangan kemampuan teknologi informasi komunikasi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Dalam era teknologi informasi modern dikenal internet dan komputer yang mampu meningkatkan fungsi pelayanan publik, karena mampu mentransmisikan secara elektronis (komunikasi elektronis) segala bentuk data informasi secara cepat, tepat, efektif efsien serta *convenient* (nyaman dan gampang). Pelayanan publik yang didukung oleh kegiatan komunikasi persandian akan mampu menghasilkan data yang autentik, utuh, dan terbebas dari ancaman kebocoran atau kerusakan informasi.

Pengelolaan persandian di pemerintah daerah akan meningkatkan pengamanan data dan membantu fungsi pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, terhadap ancaman berupa interupsi, intersepsi, modifikasi, serta fabrikasi data dan informasi. Pengaturan persandian di pemerintah daerah di antaranya mengatur masalah tata kelola persandian baik di pusat maupun di daerah, koordinasi persandian, penetapan informasi berklasifkasi, standar pengamanan sistem dan jaringan sandi, serta kualifkasi Sumber Daya Manusia sandi. Tujuan kegiatan persandian diarahkan untuk menjaga kerahasiaan (confdentiality), keutuhan (integrity), keaslian (authentication), dan tidak ada pengingkaran (non repudiation) informasi yang disandikan. Kebijakan keamanan dan pengamanan informasi harusnya berada dalam suatu tatanan sistem yang terintegrasi dan terkoordinasi dari mata rantai kebijakan pemerintahan.

16) Kebudayaan

Kebudayaan sebagai mainstream di segala bidang telah menjadi spirit pembangunan di Kota Balikpapan. Sejumlah kemajuan kebudayaan baik yang sifatnya kebendaan maupun bukan kebendaan di berbagai sektor telah dihasilkan. Kemajuan kebudayaan terus berpacu dengan dinamika perkotaan dan masyarakatnya yang terus diuji ketahanan budayanya oleh arus perubahan. Membangun kebudayaan berarti merajut nilai-nilai luhur warisan masa lalu yang dipadukan dengan masa kini dan masa mendatang. Perpaduan yang harmonis antara representasi masa klasik, masa sekarang, dan masa lalu akan menghasilkan perkembangan pergerakan budaya di Kota Balikpapan. Sejak dimulainya pendataan cagar budaya di Kota Balikpapan terdapat 111 cagar budaya yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

17) Perpustakaan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan menjelaskan dasar penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia, pada umumnya yaitu bahwa Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran dan kemitraan. Sementara itu Pasal 7 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat. Sebagai sebuah sistem pengelolaan dokumentasi dan rekaman atas berbagai pemikiran, pengalaman, pengetahuan, dan

gagasan manusia, perpustakaan memiliki andil besar dalam melestarikan hasil karya manusia, baik berupa karya cetak maupun karya rekam lainnya untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas dari satu generasi ke generasi berikutnya.

18) Kearsipan

Arsip sebagai sebuah aset bangsa harus dilestarikan agar generasi bangsa Indonesia dari tahun ke tahun dapat memanfaatkannya sebagai sumber informasi jati diri bangsa. Arsip harus diatur, ditata atau disusun secara sistematis dan logis agar dapat dilestarikan dan mudah ditelusuri.

Pengaturan/penataan/penyusunan arsip tentu harus berpedoman pada aturan atau kaidah kearsipan agar arsip yang disimpan dapat terjaga utuh baik fisik maupun informasinya. Pengelolaan arsip yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah tata kelola kearsipan dan pelestarian warisan budaya akan menghasilkan banyak manfaat bagi pemerintah, organisasi dan masyarakat. Ketersediaan arsip secara utuh, otentik, dan terpercaya, pada setiap kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah akan memberikan dukungan nyata bagi pelaksanaan reformasi birokrasi utamanya untuk kemanfaatan penilaian kinerja, pertanggungjawaban kinerja, pelayanan publik, serta penyediaan alat bukti bagi kepentingan lain.

c. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan

Kegiatan perikanan darat (budidaya air tawar atau kolam dan budidaya air payau atau tambak) dan perikanan laut (penangkapan) merupakan jenis kegiatan yang terdapat dalam sub sektor perikanan. Kecuali perikanan laut (penangkapan), potensi perikanan darat (budidaya air tawar atau kolam) dijumpai hampir di semua kecamatan yang ada. Sementara perikanan darat yang lain yaitu budidaya air payau (tambak) dapat dijumpai di Kecamatan Balikpapan Timur, terutama di Kelurahan Manggar, Lamaru dan Teritip. Sementara perikanan laut (penangkapan) lokasinya terbatas pada empat kecamatan yaitu Kecamatan Balikpapan Timur, Balikpapan Selatan, Balikpapan Kota dan Balikpapan Barat, hal ini terkait dengan lokasi kecamatan yang berdekatan dengan laut.

Pada tahun 2016, produksi budidaya ikan mencapai 223,16 ton, Angka ini mengalami penurunan (15,57%) jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang produksinya mencapai 264,30 ton, Sedangkan untuk produksi

budidaya rumput laut pada tahun 2016 sebesar 787,35 ton, mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 68,55% dibandingkan pada tahun 2015 sebesar 2.503,45 ton. Produksi perikanan darat (budidaya air tawar dan air payau) dan perikanan laut (penangkapan) juga terus mengalami penurunan beberapa tahun terakhir. Urusan kelautan dan perikanan yang berhasil pada tahun 2016, antara lain meningkatnya jumlah produksi ikan tangkap menjadi 4.480 ton.

Terlaksananya penyusunan perencanaan pengembangan dan penyusunan naskah akademis rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (RZWP3K). Telah dibuatnya sistem perizinan kapal perikanan < 30 GT (Gross Ton) dan sistem tanda daftar usaha perikanan secara online.

2) Pariwisata

Objek wisata yang ada di Kota Balikpapan sampai dengan tahun 2016 berjumlah 26 objek diantaranya adalah pantai Melawai, pantai Lamaru, Pantai Segara Sari Manggar, Pantai Kemala, penangkaran buaya Teritip, Mangrove center, Kebun Raya Balikpapan, KWPLH Km. 23, Pusat oleh-oleh Pasar Inpres Kebun Sayur dan lainnya.

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara pada tahun 2013 adalah sebesar 2,23 juta orang, mengalami peningkatan menjadi 2,54 juta orang di tahun 2014. Di tahun 2015 mengalami penurunan menjadi sebesar 2,22 juta orang dan sedikit meningkat di tahun 2016 sebesar 2,25 juta orang. Hal ini sedikit banyak dipengaruhi oleh belum membaiknya pertumbuhan ekonomi periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2016.

Walaupun jumlah kunjungan wisatawan mengalami fluktuasi, namun kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Balikpapan selalu mengalami peningkatan dari tahun 2012 yang tercatat sebesar 966,27 Milyar rupiah menjadi sebesar 1,25 trilyun rupiah di tahun 2015. Hal ini ditunjang oleh peningkatan dari sub sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum.

Gambar 2.64
Capaian kinerja sektor pariwisata tahun 2012 – 2015

Indikator Kinerja	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Kunjungan wisata	orang	2.277.082	2.238.962	2.546.143	2.226.363	2,253,943
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Juta Rp	966,274.2	1,050,372.3	1,145,895.7	1,259,633.8	-

Sumber : Disporapar dan BPS Kota Balikpapan

Pencapaian kinerja sektor pariwisata ditunjang oleh peran aktif seluruh stakeholder terkait dan program/kegiatan pemerintah kota untuk pengembangan destinasi wisata melalui pembangunan, pemeliharaan/perbaikan/renovasi dan promosi pariwisata antara lain sebagai berikut:

- Pengembangan desa wisata alam di kelurahan Teritip;
- Pengembangan wisata bahari/wisata minapolitan;
- Pelestarian cagar budaya;
- Pengembangan fasilitas wisata alam mangrove center;
- Pengembangan Kebun Raya Balikpapan.

Jumlah unit usaha perhotelan mengalami peningkatan di tahun 2016 sejumlah 75 buah dari sebelumnya di tahun 2015 sejumlah 74 buah.

Tabel 2.65
Jumlah Hotel di Kota Balikpapan tahun 2015 – 2016

NO	KLASIFIKASI HOTEL	TAHUN 2015	TAHUN 2016
1	BINTANG 5	3	3
2	BINTANG 4	8	9
3	BINTANG 3	16	16
4	BINTANG 2	4	4
5	BINTANG 1	4	4
6	MELATI	39	39
	TOTAL	**74**	**75**

3) Pertanian

Lahan pertanian di Kota Balikpapan semakin berkurang luasnya, yang disebabkan karena semakin banyak konversi lahan pertanian menjadi fungsi lain yang dapat memberi nilai ekonomis lebih tinggi. Dengan kondisi tersebut, maka sektor pertanian di Kota Balikpapan dituntut untuk memberikan nilai ekonomis yang tinggi, disamping nilai ekonomis dan nilai estetis.

Pada tahun 2016, lahan tanam sawah di Kota Balikpapan seluas 116 ha dan lahan tanam padi ladang seluas 156 ha. Untuk luasan panen pada lahan tanam sawah sebesar 63 ha dengan produksi 266 ton sedangkan luasan panen lahan tanam padi ladang sebesar 121 ha dengan produksi 273 ton.

Ditinjau dari perkembangan luas tanam sawah di Kota Balikpapan pada tahun 2016 menunjukan peningkatan dari 99 ha menjadi 116 ha. Sedangan perkembangan luas tanam sawah ladang di Kota Balikpapan pada tahun 2016 menunjukan penurunan dari 263 ha menjadi 156 ha. Hal ini terdeskripsi pada tabel sebagai berikut.

Tabel. 2.66
Luas Tanam, Panen dan Produksi Tahun 2011 – 2016 Kota Balikpapan

No	Tahun	Padi Sawah			Padi Ladang		
		Tanam dan Tanaman (Ha)	Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Tanam dan Tanaman (Ha)	Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	2011	223	223	653	76	76	326
2	2012	184	184	805	157	157	492
3	2013	45	45	201	196	196	682
4	2014	24	22	72	423	280	724
5	2015	99	61	256	263	143	369
6	2016	116	63	266	156	121	273

Sumber : Data Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

4) Perdagangan

Pelayanan di bidang perdagangan dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan kepada para pelaku bisnis terutama pengusaha mikro, kecil dan menengah. Selain itu juga telah dilakukan pembangunan fasilitas-fasilitas perdagangan seperti pembangunan lokasi binaan dan penataan pasar tradisional.

Selain itu, kegiatan urusan perdagangan ini tetap mempertahankan jumlah Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan. Realisasi ekspor produk-produk pada Kota Balikpapan tahun 2016 mencapai $ 2.219,043 juta dan Realisasi Impor produk-produk pada Kota Balikpapan tahun 2016 mencapai $ 203,36 juta. Terkait capaian realiasi tahun 2016 tersebut menunjukan kenaikan dari tahun 2015 baik untuk realisasi ekspor dan impor. Persentase kenaikan realisasi ekspor pada tahun 2016 sebesar 31,80% sedangkan kenaikan realisasi impor pada tahun 2016 sebesar 97,30%. Adapun perkembangan realisasi nilai produk ekspor dan impor di Kota Balikpapan Pada Tahun 2011-2016 tergambar pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.67
Realisasi Ekspor dan Impor Kota Balikpapan tahun 2011-2016

No	Tahun	Realisasi Ekspor ($)	Realisasi Impor ($)
1	2011	3,231,619,799.88	20,194,109.24
2	2012	2,432,122,342.87	9,100,798.07
3	2013	2,226,248,222.69	21,084,427.55
4	2014	1,820,545,406.28	9,959,327.50
5	2015	1,513,326,496.08	5,487,227.92
6	2016	2,219,042,847.11	20,334,870.53

Sumber : Dinas Perdagangan

Kota Balikpapan memiliki jumlah pasar sebanyak 9 pasar yang tersebar di Balikpapan Barat, Balikpapan Selatan, Balikpapan Kota dan Balikpapan Timur. Pasar merupakan aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai fasilitas umum bagi masyarakat kota, yang terdiri dari : Pasar Kampung Baru Tengah, Pasar Inpres Kebun Sayur, Pasar Pandan Sari, Pasar Inpres Klandasan I dan II, Pasar Damai Balikpapan Permai, Pasar Sepinggan dan Pasar Teritip.

5) Perindustrian

Urusan Perindustrian baik pertumbuhan dan perkembangan IKM serta kawasan industri merupakan salah satu urusan yang memiliki peran yang strategis dalam perekonomian Kota Balikpapan. Oleh karena itu bidang perindustrian melakukan upaya dengan memberikan pelayanan semaksimal mungkin untuk para pelaku usaha berupa pelatihan, magang, sosialisasi, promosi dengan mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan pameran bagi IKM, serta penambahan kawasan yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian Kota Balikpapan. Dan meningkatnya jumlah industri yang berbasis teknologi tinggi dan ramah lingkungan, bertambahnya jumlah sentra industri dengan infrastruktur dan sesuai peruntukan.

Selain itu urusan perindustrian juga telah mampu berkinerja cukup baik dengan indikator bertambahnya jumlah Sentra Industri dengan infrastruktur dan sesuai peruntukan di lokasi Somber (SIKS) dan Teritip (SIHKP).

Tabel 2.68
Perkembangan Sektor Perindustrian Kota Balikpapan Tahun 2011 - 2016

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Unit Usaha						
Industri Kecil	611	614	614	614	617	618
Indu Industri Menengah	128	132	134	134	135	137
Industri Besar	120	122	125	126	127	128
Jumlah	**859**	**868**	**873**	**874**	**879**	**883**
Tenaga Kerja (Orang)						
Industri Kecil	3,958	3,967	4,309	3,967	3,987	3,991
Indu Industri Menengah	2,250	2,325	2,373	2,356	2,364	2,373
Industri Besar	6,569	6,681	6,829	6,837	6,867	6,887
Jumlah	**12,777**	**12,973**	**13,511**	**13,160**	**13,218**	**13,251**
Investasi (Rp,-)						
Industri Kecil	74,001,810,360	74,362,053,371	74,362,053,371	74,180,501,371	74,739,401,571	74,926,401,571
Indu Industri Menengah	59,371,689,579	60,649,237,239	61,340,836,349	61,340,836,349	61,586,523,849	62,147,962,690
Industri Besar	525,017,518,880	548,615,449,792	576,715,215,041	578,667,864,041	583,626,364,041	588,667,364,041
Jumlah	**658,391,018,819**	**683,626,740,402**	**712,418,104,761**	**714,189,201,761**	**719,952,286,461**	**725,741,728,302**

3.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Tingkat daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu parameter dalam konsep kota berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu kota, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Variabel-variabel yang diukur dalam pengukuran tingkat daya saing pada penelitian ini adalah variabel perekonomian daerah, variable infrastruktur dan sumber daya alam, serta variabel sumber daya kebijakan (fungsi kawasan strategis, struktur wilayah dan sektor unggulan) masing-masing kabupaten/kota. Kelembagaan atau birokrasi juga turut memegang peranan penting dalam tingkat daya saing daerah. Pemerintah sebagai fasilitator dan regulator dalam pelaksanaan kegiatanekonomi berdampak pada berbagai kebijakan birokrasi dan peraturan yang dibuat.

Dengan demikian untuk meningkatkan daya saing daerah yang bersumber dari ekonomi daerah perlu dikembangkan sentra-sentra ekonomi daerah yang didesain dengan standar internasional. Kesiapan pemerintah daerah secara sungguh-sungguh dalam menata pengembangan kelembagaan, mempertajam kebijakan pemerintah daerah, memperkuat sumber daya manusia aparatur (birokrasi) dan masyarakat daerah, hingga pemberdayaan ekonomi daerah secara menyeluruh merupakan kunci dalam pembangunan ekonomi yang memiliki daya saing tinggi pada era globalisasi. Dalam konteks demikian maka mesin penggerak pertumbuhan ekonomi daerah tidak bisa semata mengandalkan instrumen fiskal pemerintah (*government spending*) dan konsumsi rumah tangga, tetapi juga harus bersumber dari investasi. Sustainabilitas dan kualitas pertumbuhan ekonomi terhadap penciptaan kesempatan kerja tentu lebih terjamin jika sumber pertumbuhan bertumpu kepada kegiatan produktif yang melibatkan mobilisasi faktor input besar

melalui investasi, dimana investasi hanya akan datang dan berkembang jika didukung secara kuat oleh lingkungan berusaha yang kondusif dan kompetitif.

Guna mendukung lingkungan berusaha yang kondusif dan kompetitif maka diperlukan kemudahan bagi para investor untuk memulai berusaha di kota Balikpapan. Berdasarkan laporan Doing Business Indonsia 2012, Kota Balikpapan menempati urutan ke -7 dalam indikator kemudahan mendirikan usaha dari 20 kota di Indonesia yang telah disurvei. Sementara berdasarkan data KPPOD tahun 2016 terdapat 10 kota di Indonesia yang telah disurvei dengan indikator kemudahan memulai berusaha sebagai berikut:

Indikator	Jakarta	Surabaya	Bandung	Pontianak	Denpasar	Palembang	Manado	Medan	Makasar	Balikpapan
Prosedur	9	8	12	8	10	11	9	10	12	9
Waktu (hari)	17,5	8,5	13,5	15	25	23	11	17	24,5	14
Biaya (Juta Rupiah)	5,0	8,0	7,4	5,2	8,3	6,4	8,6	6,6	8,4	9,3
Biaya (%perkapita)	11,2	17,9	16,5	11,7	18,7	14,3	19,3	14,8	18,9	20,9
Modal Minimum (Juta Rupiah)	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0

3.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Penelaahan daya saing daerah dari aspek kemampuan ekonomi daerah berupaya melihat kapasitas ekonomi daerah untuk menambah daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada di Kota Balikpapan dan yang akan masuk, yang pada gilirannya diharapkan dapat menciptakan multiflier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Indikator kemampuan ekonomi daerah secara makro ekonomi selain diukur dengan pendapatan perkapita juga tingkat pemerataan atau ketimpangan distribusi atas pendapatan tersebut.

Guna keperluan yang lebih luas pada skala mikro, untuk mendapatkan angka distribusi pendapatan biasanya dilakukan dengan pendekatan pengeluaran dengan asumsi bahwa hubungan antara pengeluaran dan pendapatan berbanding lurus atau dengan kata lain bahwa besarnya pengeluaran mengikuti besarnya pendapatan secara proporsional. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa data pendapatan secara mikro sangat sulit diperoleh dan cenderung rendah tingkat akurasinya sedangkan data pengeluaran relatif lebih mudah diperoleh dan tingkat akurasinya lebih baik serta lebih banyak analisis dapat dilakukan pada data pengeluaran khususnya yang berkaitan dengan pengeluaran untuk konsumsi, sehingga yang menjadi fokus telaahan kemampuan ekonomi daerah adalah pengeluaran rata-rata perkapita konsumsi rumah tangga menurut kelompok makanan dan kelompok bukan makanan dan nilai tukar produksi daerah (untuk daerah rural atau kabupaten biasanya diukur dengan nilai tukar petani). Namun karena Kota Balikpapan bukan merupakan sentra produksi pertanian sehingga data statistik untuk NTP tidak dihitung di tingkat kota, sehingga focus telaahan adalah melalui kontribusi sector pertanian terhadap pembentukan PDRB Kota Balikpapan.

Pengeluaran perkapita konsumsi rumah tangga

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih.

Sementara itu pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah dsb), dibuat untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar pangan. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita merupakan persentase

konsumsi RT untuk non pangan, yaitu proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran. Berikut tabel pengeluaran perkapita rumah tangga dari tahun 2010 – 2015

Tahun	Jenis Pengeluaran				Total
	Makanan		Bukan Makanan		
	Jumlah	%	Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2010	579.289	54,10	449.644	45,90	1.028.933
2011	456.369	40,61	667.415	59,39	1.123.784
2012	550.409	42,95	731.017	57,05	1.281.426
2013	589.405	44,33	740.255	55,67	1.329.660
2014	586.750	39,41	902.035	60,59	1.488.785
2015	637.826	42,47	863.838	57,53	1.501.664

Sumber : BPS Kota Balikpapan

Dari tabel di atas terlihat bahwa pola pengeluaran konsumsi masyarakat menggambarkan ciri khas wilayah perkotaan yang relatif sejahtera, yaitu pengeluaran untuk konsumsi non makanan pada tahin 2015 lebih dominan yakni sebesar 57,53% dibandingkan dengan pengeluaran untuk konsumsi makanan yang sebesar 42,47%. Komposisi pengeluaran untuk konsumsi makanan ini juga menunjukkan pergeseran ke arah gaya hidup masyarakat modern yang menginginkan segala sesuatunya lebih praktis, dimana sepertiga dari pengeluaran untuk makanan adalah berupa konsumsi makanan jadi dan terlihat bahwa rata-rata pengeluaran sebulan per kapita dari tahun ke tahun dalam kurun waktu 5 tahun mengalami kenaikan sekitar 7,96%. Kenaikan yang cenderung tinggi ini diharapkan dapat memberi gambaran positif untuk daya saing Kota Balikpapan.

Pertanian Daerah

Pemerintah Kota Balikpapan melakukan pengembangan pertanian melalui intensifikasi dan diversifikasi pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah dan perluasan produksi dengan memanfaatkan potensi geografis wilayah dan sumber daya manusia yang terintegrasi dan sinergis dalam sektor pertanian. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan Tahun 2012-2032, kawasan peruntukan pertanian terdapat di Kelurahan Manggar, Kelurahan Lamaru, dan Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur seluas kurang lebih 325 ha yang meliputi kawasan sawah lestari seluas 130 ha dan kawasan potensi pertanian seluas 195 ha. Kawasan peruntukan pertanian tanaman hortikultura terdapat di sebagian Kelurahan Manggar, Kelurahan Lamaru, dan Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur dengan luas 1,591 ha. Kawasan peruntukan perkebunan terdapat di sebagian Kelurahan Manggar, Kelurahan Lamaru, dan Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur seluas 2.045 ha. Kawasan peruntukan peternakan di sebagian Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur dengan luas kurang lebih 100 ha.

Pada tahun 2015 Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi terhadap PDRB sebesar 1,00 persen. Lapangan usaha perikanan merupakan penyumbang terbesar terhadap Kategori Usaha Pertanian yaitu tercatat sebesar 38,93 persen dari seluruh nilai tambah pertanian. Pertumbuhan ekonomi Lapangan Usaha ini mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2014, dengan pertumbuhan yang semakin menurun. Pada tahun 2015, pertumbuhan terbesar pada lapangan usaha ini berada pada sub lapangan usaha peternakan dengan besar pertumbuhan 4,19 persen. Selanjutnya diikuti oleh sub lapangan usaha tanaman hortikultura sebesar 3,39 persen. Lapangan usaha lainnya pada kategori ii juga tumbuh positif, kecuali tanaman pangan yang mengalami kontraksi sebesar -0,67 persen.

3.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fokus kedua yang dibahas dari aspek daya saing daerah adalah fokus fasilitas wilayah/infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu fasilitas yang sangat diperlukan dalam meningkatkan daya saing daerah. Sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen

pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan.

1) Aksesibilitas Daerah

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kota Balikpapan merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai Simpul Transportasi Laut Nasional, Simpul Transportasi Udara Nasional, Kawasan Andalan, dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang dilengkapi dengan pengembangan jaringan jalan bebas hambatan dari Balikpapan – Samarinda. Pada lingkup regional dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur, Kota Balikpapan berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Primer dan sebagai pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Bandar Udara Sepinggan yang berdasarkan Tatanan Kebandaraudaraan Nasional berperan sebagai pusat pengumpul primer saat ini melayani penerbangan domestik dan internasional. Meskipun pada beberapa tahun terakhir pertumbuhan penumpang di Bandara Udara Sepinggan mengalami pertumbuhan yang tidak siginifikan yang dipengaruhi oleh melemahnya perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tabel berikut:

Penerbangan	2012	2013	2014	2015	2016
Internasional	103.115	107.556	102.858	73.229	76.985
Domestik	6.517.635	7.087.303	7.598.630	7.301.288	7.441.452
Total	6.620.750	7.194.859	7.701.216	7.374.517	7.518.437

Jalan merupakan prasarana yang mempunyai peranan sangat penting dalam hal distribusi ekonomi dan mendukung aktivitas kegiatan serta beperan menghubungkan seluruh wilayah dari yang berskala lokal, regional maupun Nasional. Secara spasial, jalan merupakan kebutuhan dan sangat menentukan dalam pembentuk struktur ruang kota yang diakibatkan oleh tersebarnya pola tata ruang (spasial separation), dengan kata lain selalu dibutuhkan dalam proses perpindahan atau perjalanan. Jalan di Kota Balikpapan sepanjang 657.653 meter berdasarkan fungsi jalan diantaranya : (1) Jalan Arteri Primer sepanjang 93.740 meter; (2) Jalan Arteri

Sekunder sepanjang 5.119 meter; (3) Jalan Kolektor Primer 2 sepanjang 31.998 meter; (4) Jalan Kolektor Sekunder sepanjang 85.628 meter; (5) Jalan Lokal Sekunder sepanjang 441.169 meter. Jalan di Kota Balikpapan yang terdiri dari Jalan Negara, Jalan Provinsi dan Jalan Kota telah menghubungkan antar simpul-simpul transportasi yaitu Pelabuhan Semayang, Pelabuhan Kampung Baru, Pelabuhan Bandara Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Pelabuhan Penyeberangan Ferry Kariangau, Pelabuhan Peti Kemas Kariangau dan Terminal Bus Batu Ampar. Selain itu, jalan-jalan tersebut juga telah menghubungkan antar pusat kegiatan lingkungan di Kota Balikpapan. Panjang jalan tersebut melayani jumlah kendaraan sebanyak 1379.35 smp/jam pada 2 arah kendaraan, baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi atau dengan pelayanan kendaraan per 5000 meter atau 5 kilometer panjang jalan.

2) Ketataan Terhadap Rencana Tata Ruang

Berdasarkan hasil analisis foto udara wilayah Kota Balikpapan Tahun 2014, data penggunaan lahan didominasi oleh penggunaan lahan hutan, perkebunan, lahan kering, lahan non pertanian. Penggunaan lahan hutan di Kota Balikpapan seluas 22.754 Ha atau sekitar 45,21% dari luas daratan Kota Balikpapan. Kawasan hutan tersebar di seluruh Kota Balikpapan terutama di wilayah Kecamatan (Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Timur dan sebagian berada di wilayah Kecamatan Balikppan Selatan, Kecamatan Kota dan Kecamatan Balikpapan Tengah. Sedangkan penggunaan lahan berupa berupa perkebunan/kebun seluas 10.493 Ha atau sekitar 20,84% dari luas daratan Kota Balikpapan tersebar paling luas di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Timur. Untuk wilayah terbangun berupa lahan non pertanian dan tempat kegiatan/lahan kering di Kota Balikpapan adalah seluas 17.785 Ha atau sekitar 35,34% dari luas daratan Kota Balikpapan. Untuk lebih jelasnya luas wilayah menurut penggunaan lahan utama di Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.69

Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama

No.	Kecamatan	Luas Lahan Non Pertanian (Ha)	Luas Lahan Sawah (Ha)	Luas Lahan Kering (Ha)	Luas Lahan Perkebunan (Ha)	Luas Lahan Hutan (Ha)	Luas Lahan Badan Air (Ha)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Balikpapan Barat	558.67	22.07	2,132.89	715.63	14,414.99	464.21
2	Balikpapan Kota	447.51	0.00	219.19	425.47	150.11	34.97
3	Balikpapan Selatan	1,461.46	2.59	634.93	1,375.18	312.03	59.36
4	Balikpapan Tengah	431.08	3.44	21.04	388.63	129.79	8.14
5	Balikpapan Timur	2,197.54	170.58	3,327.31	3,354.03	3,476.19	613.44
6	Balikpapan Utara	993.65	33.72	3,360.02	4,234.33	4,270.06	388.03
Total		**6,089.93**	**232.40**	**9,695.39**	**10,493.27**	**22,753.18**	**1,568.16**

Sumber : Bappeda Kota Balikpapan - data SLHD 2016

Berdasarkan hasil Review RTRW Kota Balikpapan Tahun 2016, secara keseluruhan rencana pola ruang Kota Balikpapan saat ini masih terbilang baik, yaitu dengan penilaian pengkajian kesesuaian sekitar 85% artinya masih terdapat bentuk simpangan pola ruang yang perlu disesuaikan mengikuti perkembangan kota saat ini. Adapun penjelasan rincinya antara lain:

a. Terjadi perubahan guna lahan antara Rencana Pola Ruang RTRW dengan Guna Lahan Eksisting Tahun 2016 sebesar 12% dari total luas Kota Balikpapan atau sekitar 6.285,56 Ha;
b. Kesesuaian guna lahan eksisting Tahun 2016 dengan Rencana Pola Ruang RTRW seluas 46.032,06 Ha atau sekitar 85% dari total luas Kota Balikpapan;
c. Terdapat guna lahan tanah kosong yang belum diolah sesuai dengan program rencana pola ruang seluas 2.090,91 Ha atau seluas 4% dari total luas Kota Balikpapan;

Penilaian kesesuaian rencana pola ruang dan tutupan lahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.70

Penilaian Kesesuaian Rencana Pola Ruang dan Tutupan Lahan

Penilaian Kesesuaian	Kawasan Lindung		Kawasan Budidaya		Total Rencana Pola Ruang	
	Luas	%	Luas	%	Luas	%
Tidak sesuai	2.617,86	9,67	3.667,70	13,42	6.285,56	**12%**
Sesuai	24.242,60	89,52	21.789,46	79,73	46.032,06	**85%**
Belum dilaksanakan	218,80	0,81	1.872,11	6,85	2.090,91	**4%**

Sumber : Bappeda Kota Balikpapan-Hasil Analisa Tahun 2016

Ketidaksesuaian pemanfaatan merupakan penyimpangan terhadap pola ruang yang telah direncanakan, sedangkan belum sesuai merupakan pola ruang yang belum dilaksanakan atau diwujudkan baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat.

3) Ketersediaan Air Bersih

Kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kota Balikpapan dipenuhi dari beberapa sumber yaitu jaringan perpipaan yang dikelola PDAM, PT.Pertamina dan kawasan perumahan tertentu, hidrant umum yang dikelola PDAM, mobil tangki yang dikelola swasta, sumur dalam, sumur dangkal dan air hujan. Sumber air baku saat ini sangat tergantung pada Waduk Manggar untuk pelayanan seluruh warga kota dan Waduk Pertamina di kawasan Hutan Lindung Sungai Wain untuk memenuhi kebutuhan operasional kilang dan perumahan PT.Pertamina.

Jumlah kebutuhan air minum Kota Balikpapan tahun 2017 adalah sebesar 1.750 liter/detik dengan kapasitas produksi PDAM sebesar 1.220 liter/detik sehingga masih mengalami defisit sebesar 530 liter/detik. Jika dibandingkan dengan kapasitas produksi saat ini, maka untuk memenuhi kebutuhan air sampai dengan tahun 2021 yang diproyeksikan mencapai 2.254 liter/detik, sehingga membutuhkan tambahan kapasitas sistem sebesar 1.034 liter/detik. Untuk jangka menengah, untuk memenuhi kebutuhan air baku tersebut pembangunan Waduk Teritip dan Embung Aji Raden beserta instalasi pengolahannya harus dipercepat. Jika kedua waduk tersebut terbangun maka akan menghasilkan air baku dengan kapasitas 400 liter/detik.

4) Ketersediaan Daya Listrik

Energi listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang diperlukan bagi kebutuhan aktivitas baik hunian, jasa, perdagangan, industri, transportasi dan sebagainya. Listrik sebagai kebutuhan dasar kota ini di sediakan oleh PLN sebagai penyedia listrik resmi dari pemerintah. Listrik Kota Balikpapan merupakan interkoneksi Sistem Mahakam yang melayani Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang dan Tenggarong dengan daya mampu 425 MW dan daya puncak 419 MW. Untuk mengantisipasi kebutuhan listrik di

masa yang akan datang maka diperlukan pembangunan pembangkit-pembangkit listrik baru pada Sistem Mahakam akibat tumbuh dan berkembangnya wilayah-wilayah pemukiman dan tempat usaha baru di Kota Balikpapan beberapa tahun yang akan datang.

5) Prasarana Lingkungan (Sanitasi, Drainase, Persampahan)

Guna mendukung pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan secara individu atau komunal, maka telah dibangun Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang berlokasi di TPA Manggar Kota Balikpapan. IPLT Kota Balikpapan dibangun pada tahun 2014 dan 2015 melalui pembiayaan APBD Provinsi Kalimantan Timur dan diserahkelolakan ke Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2016. Kapasitas desain IPLT Kota Balikpapan adalah sebesar 20 m3/hari dengan system terbangun Solid Seperate Chamber, Kolam Anaerobik, Kolam Fakultatif, Kolam Maturasi dan Sludge Drying Bed. IPLT dioperasionalkan oleh PDAM Kota Balikpapan dan direncanakan untuk melayani program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) dan Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (LLTTT). Pada periode April 2017-Juli 2017 telah melayani 142 penyedotan yang equivalen dengan 429 m3 atau 4 m3/hari.

Terdapat 86 (delapan puluh enam) saluran atau sungai yang langsung bermuara di Teluk Balikpapan atau di Selat Makasar yang melayani pamatusan Kota Balikpapan. Tidak ada saluran primer drainase buatan yang dibuat khusus untuk mengalirkan air pematusan dan air buangan keluar daerah perkotaan. Semua saluran primer drainase yang ada sekarang merupakan saluran alam yang disesuaikan untuk kebutuhan saluran drainase. Sistem drainase Kota Balikpapan dibagi menjadi 6 (enam) wilayah yaitu wilayah Balikpapan Barat dengan total panjang sungai 22.341 m, wilayah Sungai Wain dengan panjang sistem drainase 23.428 m, wilayah somber yang mempunyai panjang 36.022 m, wilayah Balikpapan selatan yang dilayani dengan sungai-sungai kecil yang mempunyai outflow langsung ke Selat Makasar dengan total panjang drainase 110.869 m, wilayah manggar mempunyai panjang drainase 9.232 m dan wilayah Balikpapan Timur 23.981 m. Namun, kondisi

drainase pada umumnya masih kotor oleh sampah dan sedimen sehingga seringkali terjadi penyumbatan pada daerah tertentu dan menyebabkan genangan jika hujan. Pengelolaan sampah secara garis besar saat ini dilayani TPA Manggar dengan sistem sanitary landfill. Jumlah sampah terangkut ke TPA tiap hari rata-rata mencapai 350 ton/hari dan pada tahun 2017 telah berhasil mengurangi produksi sampah sebesar 1,3 % atau 4,55 ton/hari melalui program 3R. Untuk pengembangan TPA saat ini sedang dilakukan pembangunan zona V, VI, VII dan VIII seluas 10 Ha yang diperkirakan akan mampu melayani hingga 20 (dua puluh) tahun kedepan. Program pengurangan timbulan sampah dilakukan melalui pengembangan dan memacu program 3R dengan pengembangan bank sampah, pembangunan rumah kompos, pembangunan Tempat Pengolahan SampahTerpadu (TPST) dan penerapan material recovery facility (MRF) serta mendorong pemilahan sampah dari sumber yang bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA).

6) Ketersediaan Fasilitas Bank/Non Bank dan Hotel

Fasilitas bank dan non bank diukur dengan jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya, serta jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah serta sebagai salah satu komponen yang menyumbang pendapatan asli

daerah Kota Balikpapan. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel. Berikut data jumlah hotel di Kota Balikpapan Tahun 2010 – 2014.

3.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Para investor yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti pertumbuhan ekonomi, situasi politik, keamanan hingga kemudahan perizinan dalam mendirikan maupun pengembangan usaha. Investor akan berminat berinvestasi pada suatu daerah jika didukung dengan regulasi yang baik. Regulasi tersebut diantaranya adalah adanya kemudahaan perizinan serta pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan tingkat biaya yang kompetitif. Kemudahan perizinan adalah proses pengurusan perizinan yang terkait dengan persoalan investasi. Selain itu situasi yang kondusif bagi investasi juga perlu diperhatikan agar stabil.

Peraturan Daerah Kota Balikpapan yang mendukung iklim usaha, antara lain:

1. Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan;
2. Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Izin Reklame;
3. Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi;
4. Perda Nomor 11 tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal; dan
5. Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung.

Di Kota Balikpapan sampai dengan tahun 2015 terdapat 11 macam Pajak Daerah yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan Retribusi Daerah terdapat 18 macam, yang

terdiri dari : Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksanaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Aktivitas investasi perlu didukung dengan kondusifitas kota. Salah satu indikator kondusifitas kota dapat dilihat dari kemampuan Pemerintah Kota dalam mengatasi penyampaian aspirasi masyarakat yang disampaikan secara terbuka melalui kegiatan demonstrasi massa. Apabila tidak dikelola dengan baik, kegiatan demonstrasi tersebut menjadi faktor penghambat iklim investasi. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, terdapat aktifitas demonstrasi massa yang bersifat damai, sehingga tetap terjaga kondusifitas Kota. Tahun 2015 terjadi sebanyak 17 kali kegiatan demonstrasi, sedangkan pada tahun 2016 sampai dengan bulan September sebanyak 9 kali. Terjaganya kondusifitas di Kota Balikpapan didukung pula oleh adanya Markas Kodam VI Tanjung Pura dan Markas Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang juga sebagai faktor kompetitif untuk menarik minat investasi, dilihat dari keamanan berinvestasi. Berkenaan dengan indikator iklim berinvestasi salah satunya yaitu proses perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2016. Hal ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota sebagai proses alir manajemen kepemerintahan yang dilaksanakan tiap tahun anggaran berjalan. Evaluasi RKPD 2016 tersebut dimotori oleh Bappeda Litbang dengan melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Balikpapan dalam melaksanakan evaluasi dari hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2016 yang terbagi dalam 2 semester pada tahun

anggaran tersebut. Tujuan evaluasi RKPD Tahun 2016 untuk mengetahui tingkat capaian kinerja program/kegiatan pada tahun 2016 terhadap capaiaan kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD.

Hasil pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2016, telah diverifikasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Beberapa hal yang diverfikasi antara lain adalah:

- Pagu indikatif program dalam Renstra SKPD dan RPJMD mengingat adanya perbedaan total pagu indikatif Program dalam Renstra SKPD dan RPJMD.
- Pengisian format evaluasi Renja SKPD yang belum sesuai dengan tata cara yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2016.
- Konsistensi jumlah, indikator, pagu dan target outcome program, serta jumlah, indikator, pagu dan target kinerja (output) kegiatan.

Hasil pengendalian dan evaluasi merupakan hasil kerja oleh seluruh SKPD bersama-sama dengan Bappeda, sehingga hasil evaluasi RKPD sampai dengan akhir Tahun 2016 diharapkan lebih baik dan telah sesuai dengan dokumen yang ada, sehingga hasil yang diperoleh dapat dijadikan sebagai dasar masukan rencana kerja pembangunan daerah Kota Balikpapan tahun selanjutnya.

2.2.1. Maksud dan Tujuan Evaluasi Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2016

Maksud dan tujuan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2016 adalah:

- Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan anggaran RKPD Kota Balikpapan sampai dengan Semester II Tahun 2016.
- Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan anggaran RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 sampai dengan Semester II Tahun 2016.
- Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam penyusunan APBD Tahun 2017.
- Mengidentifikasi kendala dan permasalahan yang berpengaruh dalam pelaksanaan RPJMD, RENSTRA SKPD, dan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.
- Mendukung terwujudnya 23 sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016, khususnya

terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

2.2.2. Kegunaan Evaluasi Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2016

Hasil evaluasi RKPD Kota Balikpapan sampai dengan akhir Tahun 2016 digunakan sebagai:

- Indikator penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Indikator penilaian kinerja satuan kerja perangkat daerah; dan
- Bahan penilaian pencapaian rencana aksi program dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

2.2.3. Ruang Lingkup Evaluasi Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2016

Ruang lingkup pengendalian dan evaluasi hasil RKPD Tahun 2016 adalah:

- Memastikan kesesuaian program/kegiatan, indikator, target, dan pagu antara RKPD 2016 dan APBD 2016.
- Menilai capaian target kinerja RKPD untuk memastikan bahwa target kinerja RKPD Tahun 2016 telah dicapai untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011 - 2016.

2.2.4. Muatan Evaluasi Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2016

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016, laporan evaluasi hasil RKPD paling sedikit memuat:

- Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah;
- Perbandingan antara program dan kegiatan, target dan dana dalam RKPD dan APBD;
- Capaian target kinerja dan penyerapan dana program/kegiatan RKPD;
- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan;
- Kesimpulan dan Rekomendasi; dan
- Formulir evaluasi hasil RKPD Tahun 2016.

2.2.5. Sumber Data Evaluasi Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2016

Sehubungan hal tersebut, maka sumber data dalam pelaksanaan evaluasi hasil RKPD Tahun 2016 adalah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016, Peraturan Daerah

Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, hasil evaluasi Renja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, dan laporan Penyerapan Anggaran Kota Balikpapan Tahun 2016.

2.2.6. Penjabaran Program RPJMD Ke dalam RKPD Tahun 2016

Prioritas pembangunan daerah merupakan agenda pembangunan tahunan pemerintah daerah yang secara langsung terkait dalam pencapaian RPJMD melalui rencana program dan kegiatan. Hal ini merupakan jawaban terhadap sasaran pembangunan daerah yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas.

Kriteria yang digunakan dalam penyusunan prioritas RKPD Kota Balikpapan Tahun 2016, adalah sebagai berikut:

- Merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2011 dalam mencapai Visi dan Misi Walikota melalui tahapan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam arah kebijakan tahun 2016;
- Mendukung kebijakan pemerintah pusat yaitu pro poor, pro job, pro growth dan pro environment;
- Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi untuk penyelesaian target-target pembangunan nasional dan provinsi;
- Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak yang faktual dihadapi pada tahun 2016;
- Pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.

Prioritas pembangunan dalam penyusunan program pembangunan disesuaikan dengan isu strategis yang dihadapi pada tahun 2015, yaitu:

Tabel 2.71
Program Prioritas Pembangunan RKPD Berdasarkan Penjabaran RPJMD Tahun 2016

No	Program Prioritas Pembangunan	Isu Strategis	Sasaran Pembangunan
1.	Peningkatan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan Pelayanan Pendidikan	1. Peningkatan prasarana dan sarana pendukung pendidikan
		2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang menyeluruh	2. Penambahan dan pemerataan jumlah tenaga pendidikan
		3. Peningkatan Pelayanan	3. Peningkatan prasarana dan sarana pendukung

		Infrastruktur	kesehatan
			4. Penambahan dan Pemerataan jumlaht tenaga medis
			5. Pencegahan penyebaran penyakit menular.
			6. Peningkatan infrastruktur bidang pengairan.
			7. Peningkatan infrastruktur bidang cipta karya
			8. Peningkatan infrastruktur bidang bina marga.
2.	Pengendalian banjir	4. Pengurangan titik banjir	9. Peningkatan dan pembangunan drainase
			10. Normalisasi daerah aliran sungai
3.	Pengembangan Pelayanan Air Minum	5. Kurangnya ketersedian air baku minuman (ketersediaan air baku adalah 1186 ltr/hari sedangkan kebutuhan adalah 1588 ltr/hari	11. Kelanjutan pembangunan waduk
			12. Pemeliharaan waduk manggar
			13. Peningkatan sarana dan prasaran air bersih
4.	Pengembangan Pelayanan Air Limbah	6. Terbatasnya pelayanan air limbah (tahun 2013 SR IPAL sebanyak 1384 SR)	14. Peningkatan sarana dan prasarana air limbah
5.	Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	7. Pengembangan sistem pelayanan perizinan	15. Peningkatan kualitas pelayanan public
		8. Perwujudan investasi yang mengarah keungulan lokal	16. Peningkatan nilai investasi
6.	Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	9. Perkuatan basis ekonomi kerakyatan dengan optimalisasi segenap potensi	17. Peningkatan koperasi Aktif Peningkatan produk unggulan daerah
7.	Peningkatan Ketahanan Pangan	10. Ketersediaan dan keterjangkauan sembilan bahan pokok	18. Kerjasama antar daerah pemasok bahan pangan

Sumber : Dokumen RKPD tahun 2016, Bappeda Kota Balikpapan

Berdasarkan tabel Program Prioritas Pembangunan Kota Balikpapan tahun 2016 yang telah dituangkan pada RKPD Tahun 2016 adalah merupakan hasil penjabaran RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 yang terdiri atas : 7 Program Prioritas, 10 Isu Strategis, dan 18 Sasaran Pembangunan. Penentuan Program Prioritas, Isu Strategis dan Sasaran Pembangunan tersebut merupakan pekerjaan utama pemerintah Kota Balikpapan pada Tahun 2016 dalam menyelesaikan sejumlah permasalahan kota yang belum terselesaikan serta isu-isu pelayanan yang membutuhkan

perhatian khusus pemerintah Kota Balikpapan agar dapat dituntaskan sampai dengan akhir pelaksanaan RKPD Tahun 2016.

2.2.7. Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2016

Berdasarkan isu strategis tersebut, maka RKPD Kota Balikpapan 2016 ditetapkan dengan tema "Penuntasan Target Kinerja RPJMD 2011-2016. Selanjutnya tema di atas dijabarkan dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Program Prioritas APBD Kota Balikpapan Tahun 2016 sebagai berikut.

Tabel 2.72
Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan RKPD Pada APBD Kota Balikpapan Tahun 2016

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1.	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			
1.	Pelatihan Tutor PAUD Non Formal	Meningkatnya kompetensi Tutor PAUD yang berdampak pada kualitas kelulusan PAUD	40	175,000,000
2.	Tutor PAUD (Bantuan Keuangan Provinsi)	Meningkatnya kreativitas Tutor PAUD	1,218	4,548,000,000
3.	Penguatan dan Peningkatan Mutu Lembaga PAUD	Terciptanya Lembaga PAUD yang mandiri	40	700,000,000
4.	Pendamping Tutor PAUD	Meningkatnya kreatifitas Tutor PAUD	958	5,130,000,000
2.	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**			
1.	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Pembangunan Lokal Belajar Kembali sehingga layak untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar	11.00	20,000,000,000
2.	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Tersedianya UKS SD dan SMP	1.00	3,000,000,000
3.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Tersedianya Perpustakaan SD dan SMP	1.00	3,000,000,000
4.	Pra Ujian Nasional SD dan SMP, Ujian Akhir Sekolah SD dan SMP, Ujian Nasional SD dan SMP Kota Balikpapan	Peserta Lulus Ujian Nasional dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi	19,800.00	1,200,000,000

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5.	Olimpiade Sains SD dan SMP	Siswa pemenang kota mengikuti lomba tingkat provinsi dan pemenang di tingkat provinsi dan pemenang di tingkat provinsi mengikuti lomba di tingkat nasional	48	300,000,000
6.	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah SD/SMP	Mengganti kondisi gedung yang rusak dan tidak layak untuk digunakan lagi karena bangunan lama / terbatas sehingga perlu pembangunan	2	3,000,000,000
7.	Penguatan metode pembelajaran (Lesson Study SD, SMP)	Meningkatnya kualitas pembelajaran di SD dan SMP	1	150,000,000
8.	Pembinaan dan pemantapan dalam penerapan kurikulum 2013	Meningkatnya pemahaman aparatur, pengawas dan TPK Kota tentang Kurikulum 2013 dan Aplikasi Kurikulum 2013 serta terlaksananya Monitoring Kurikulum 2013	2730	4,500,000,000
9.	Pelaksanaan tim pengembang kurikulum/TPK jenjang SD, SMP Kota Balikpapan	Meningkatnya pemahaman akan tugas dan fungsi TPK Tingkat Kota	100	169,379,600
10.	Penambahan kamar mandi / WC dan saluran drainase SD dan SMP Negeri	Terbangunnya fasilitas sekolah yang layak untuk digunakan sebagai sarana penunjang sekolah	2	3,000,000,000
11.	Pembinaan Gugus TK dan SD	Peningkatan daya saing kualitas sekolah mulai tingkat kota, provinsi sampai tingkat nasional	3	50,000,000
12.	Pembangunan Pagar Sekolah SD dan SMP	Meningkatnya keamanan sekolah dan kenyamanan dalam belajar	100%	3,000,000,000
13.	Pembangunan SMP Negeri 23 Balikpapan (Lanjutan)	Memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana pendidikan	100%	7,000,000,000
14.	Dana Pendamping Block Grand SD dan SMP	Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar	100%	1,000,000,000
3.	**Program Pendidikan**			

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
	Menengah			
1.	Penambahan ruang kelas sekolah	Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan bagi masyarakat	100%	18,000,000,000
2.	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Terciptanya rasa aman dan nyaman dalam proses belajar mengajar	100%	2,000,000,000
3.	Olimpiade Sains SMA	Prestasi di bidang sains hingga ke tingkat Nasional	21	296,331,750
4.	Penyelenggaraan Kompetisi Akademis dan LKS Bagi Siswa SLTA Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional	Prestasi di bidang akademik hingga tingkat Nasional	100%	287,469,000
5.	Operasional EDOTEL SMKN 4 Balikpapan	Peningkatan kemampuan siswa/siswi Jurusan Perhotelan	1	300,000,000
6.	Pembangunan Sarana Penunjang Sekolah	Meningkatnya fasilitas sarana penunjang di sekolah	100%	2,000,000,000
7.	Pembangunan dan Rehabilitasi Sekolah (Dana Pendamping Block Grant/BIS/School Grant SLTA)	Melakukan pendampingan terhadap bantuan APBD Provinsi maupun APBN yang diterima SMA dan SMK	100%	1,000,000,000
8.	Pelaksanaan Pra Ujian Nasional, Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Tingkat SLTA	Siswa/i SMA/SMK se-Kota Balikpapan	100%	341,267,500
9.	Pembinaan Siswa Berprestasi	Memacu semangat belajar siswa meraih nilai ujian terbaik	75	300,000,000
10.	Operasional Satuan Tugas Penyaluran Biaya Pendidikan Bagi Penyaluran Siswa Keluarga Miskin	Mengurangi beban masyarakat	6500	250,000,000
11.	Pelaksanaan Ujian Kompetensi Keahlian (UKK)	Siswa memiliki kompetensi keahlian prima	4000	200,513,750
12.	Pembuatan Bozem SMKN 6	Terkendalinya aliran air di area sekolah	1	1,000,000,000
13.	Lanjutan Pembangunan RKB SMKN 1	Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan bagi masyarakat	100%	10,000,000,000
14.	Pembangunan Lapangan Basket SMKN 5	Meningkatnya minat dan prestasi olahraga di SMKN 5	100%	250,000,000
15.	Pembangunan RKB dan Workshop SMKN 5	Meningkatnya daya tampung dan fasilitas sekolah	100%	10,000,000,000

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
16.	Pembangunan Masjid SMKN 5	Meningkatnya fasilitas dan kegiatan keagamaan di SMKN 5	100%	1,500,000,000
17.	Pengadaan Alat Praktek SMKN 5	Melengkapi fasilitas bengkel yang telah ada	100%	2,000,000,000
18.	Pembuatan Laboratorium Perikanan	Melengkapi fasilitas belajar siswa	100%	1,000,000,000
19.	Pengadaan Alat Praktek Pertukangan dan Mesin	Meningkatnya fasilitas belajar siswa SMKN 1	100%	1,000,000,000
20.	Pembangunan Perpustakaan SMKN 6	Meningkatnya minat baca peserta didik	100%	4,000,000,000
21.	Pembangunan RKB SMAN 6	Memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana pendidikan	100%	2,200,000,000
22.	Pembangunan Ruang Guru dan Multimedia SMAN 6	Meningkatnya fasilitas belajar serta kenyamanan bagi tenaga pendidik	100%	3,750,000,000
4.	**Program Pendidikan Non Formal**			
1.	Pelatihan Tutor Kejar Paket A,B dan C	Meningkatnya mutu tutorial Paket A, B dan C	60	200,000,000
2.	Uji Kompetensi	Keberhasilan warga masyarakat dalam ujian Tata Busana, Bahasa Inggris dan TRP	50	100,000,000
3.	Kegiatan Belajar Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Barat	-	1	593,999,500
4.	Kegiatan Belajar Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Timur	-	1	502,095,000
5.	Kegiatan Belajar Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Tengah	-	1	600,170,000
6.	Kegiatan Belajar Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Utara	-	1	621,795,000
7.	Kegiatan Belajar Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Selatan	-	1	693,003,000
8.	Lomba Dalam Rangka Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) Tingkat Kota Balikpapan	Berubahnya pengetahuan warga belajar	162	200,000,000
9.	Sosialisasi dan Lokakarya Lembaga Pendidikan Non Formal untuk Penilaian Akreditasi	Meningkatnya Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi	100%	200,000,000
10.	Jambore Pendidikan Non Formal	Meningkatnya kinerja pendidikan non formal	1	400,000,000
11.	Ujian Nasional Program Paket A,B,C dan C Kejuruaan	Keberhasilan warga belajar Paket A, B, C dan C Kejuruan	1200	250,000,000

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
12.	Pengelolaan Insentif Ustadz dan Ustadzah Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA)	Peningkatan Penambahan Insentif Ustadz/Ustadzah	2074	5,580,700,000
13.	Hari Anak Nasional (HAN) dan Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) Taman Kanak- Kanak dan KB se Kota Balikpapan	Meningkatnya kemandirian Siswa TK dan KB serta Gurunya	100%	200,000,000
5.	**Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**			
1.	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Terpenuhinya Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang bersertifikat	100%	200,000,000
2.	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	-	1	2,450,500,000
3.	Pelatihan Pengembangan Jaringan Komputer Sekolah	Meningkatnya pengembangan jaringan komputer sekolah	100%	125,814,000
4.	Pelatihan Guru Kesenian	Meningkatnya Kreativitas Guru Kesenian di Sekolah	100%	190,100,000
5.	Pelatihan Guru Olahraga	Tersedianya Guru Olahraga di Balikpapan yang bekualitas	350	156,190,000
6.	Pelatihan Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis TIK Bagi Guru	Meningkatnya Proses Pembelajaran Berbasis TIK	350	250,000,000
7.	Penilaian Kinerja dan Keprofesian Berkelanjutan	Terpenuhinya Manajemen Pendidik dan Mutu yang profesionalisme	90%	123,926,400
8.	Induksi Guru Pemula	Guru CPNS mendapatkan sertifikat Induksi Guru (pemenuhan Guru yang layak mengajar)	1	100,000,000
9.	Pelaksanaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Tingkat SMA, MA dan SMK	Meningkatnya kompetensi Guru dan Kepala Sekolah	850	745,208,750
10.	Pelaksanaan Kuis Kihajar Tingkat Kota	Terpilihnya Juara I, II dan III Kuis Kihajar Tingkat Kota dari Jenjang SD, SMP, SMA dan SMK Negeri/Swasta	9	96,590,000
11.	Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah (EDS/MPSPD)	Terciptanya Kondisi Sekolah Sesuai Dengan 8 Standar Pendidikan Nasional	40	150,000,000
12.	Pelaksanaan Forum dan Bimbingan Teknis Pengawas Sekolah	Bertambahnya Wawasan Berbasis Kinerja Bagi Pengawas Sekolah	100%	300,000,000

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
13.	Kompetensi dan Layanan Guru Bimbingan Konseling	Meningkatnya Kompetensi Guru BK dalam memberikan layanan terhadap siswa	60	282,000,000
14.	Pengembangan seni budaya dan olahraga anak didik/Pentas PAI SD,SLTP dan SLTA	Meningkatnya prestasi PAI tingkat SD, SLTP dan SLTA di sekolah	100%	179,645,000
15.	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SD, SMP dan SMK	Meningkatnya kreativitas dan potensi siswa di bidang seni	100%	479,675,000
16.	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD, SMP, SMU dan SMK	Tersedianya bibit-bibit atlit di Tingkat SD, SMP, SMA dan SMK yang berbakat dan siap dikirim ke Tingkat Propinsi	250	1,119,040,000
17.	Pembinaan Program Sekolah Sehat Berwawasan Lingkungan	Bertambahnya Sekolah Sehat hingga tingkat Provinsi dan Nasional	85%	200,000,000
18.	Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) Guru SD, SLTP dan SLTA Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional	Tersedianya Guru yang berbakat di bidang Olahraga dan siap bersaing ke Tingkat Propinsi dan Nasional	43	275,000,000
19.	Liga Pendidikan Indonesia	Meningkatnya kemampuan sekolah dalam kegiatan liga sepakbola dan meningkatnya atlit sekolah ke tingkat Propinsi/Nasional	100%	500,000,000
20.	Peringatan Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS)	Peringatan Hardiknas dijadikan momentum peningkatan kualitas pendidikan	100%	575,000,000
21.	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SLB	Adanya penghargaan terhadap prestasi Pelajar Cacat di bidang olahraga dan meningkatnya atlit cacat yang berbakat ke tingkat Propinsi maupun Nasional	85%	100,000,000
22.	Penyuluhan UKS Tingkat TK s/d SLTA Kota Balikpapan	Meningkatnya kemampuan sekolah dalam pengelolaan UKS	150	124,125,000
23.	Pelatihan Pembina dan Pengurus OSIS	Meningkatnya kegiatan ekstrakurikuler khususnya kegiatan OSIS dan meningkatnya Pengurus OSIS dalam Pembuatan Program dan Koordinasi	210	98,862,500
24.	Pelatihan dan Lomba Situs Web Jenjang SD, SMP, SMA/ SMK Negeri dan Swasta	Semua sekolah memiliki situs website	75	150,000,000

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
25.	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan Dalam Pelaksanaan Tugas dan Proses Pelayanan	Meningkatnya profesionalisme Tenaga Kependidikan	60	300,000,000
26.	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru Negeri dan Swasta)	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru Negeri dan Swasta)	400	500,000,000
27.	Pelatihan Kompetensi Pendidik/ Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Guru Bahasa Inggris	Meningkatnya Kompetensi Guru Bahasa Inggris	120	350,000,000
28.	Pekan Olahraga Pelajar (POPPROV)	Tersedianya bibit-bibit atlet tingkat SD yang berbakat	200	500,000,000
29.	Pembinaan Atlet Berprestasi	Meningkatnya atlet yang berprestasi di tingkat SD, SMP dan SMA sederajat	100%	250,000,000
30.	Pekan Olahraga SD	Tersedianya bibit atlet Tingkat SD yang berbakat	125	300,000,000
31.	Pelatihan Pengurus OSIS SMP dan SLTA	Terkelolanya Database Pendidikan yang baik dan terukur	100%	400,000,000
32.	Rekrutmen Tim Penilai Angka Kredit Periode 2017 s.d 2020	Menghasilkan Tim Penilai Angka Kredit sesuai Standar Kualifikasi untuk menjadi Tim Penilai Angka Kredit	1	300,000,000
6	**Program Pembinaan Tata Kelola Bidang Pendidikan**			
1.	Dana Pendamping Block Grant / School Grant SD-SMP	-	1	1,000,000,000
7	**Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar**			
1.	Pengadaan Kalender Pendidikan	Tersedianya panduan bagi sekolah dalam menyelenggarakan proses belajar	100%	25,000,000
2.	Pemilihan dan Penghargaan bagi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah Berprestasi	Terciptanya peningkatan prestasi bagi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	1	300,000,000
3.	Pendampingan Manajemen BOS Pusat Tingkat Kota	Pengelolaan Program BOS yang akuntabel	235	150,000,000
4.	Monitoring Pengelolaan Aset di Sekolah	Tersedianya Data Aset Dinas Pendidikan	100%	55,000,000
5.	Pembinaan Pengelola Data Sekolah	Terciptanya Data Sekolah Dikelola Dengan Baik	486	100,000,000

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
6.	Pelaporan Keuangan dan Verifikasi BOSDA/BOSPROV	Tersedianya Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Sekolah	100%	290,770,000
7.	Pengolahan Data Pokok Pendidikan Formal dan Non Formal	Tersedianya data sekolah	30	80,000,000
8.	Penilaian Akreditasi Sekolah SD s/d SLTP	Terakreditasinya Sekolah di tingkat Pendidikan	1	200,000,000
9.	Pengelolaan Jaringan Internet, Upgrade dan Website dan Pengembangan Aplikasi Sidalah	Meningkatnya Sistem Jaringan Informasi dan Pelayanan Pendidikan di Dinas Pendidikan	100%	300,000,000
10.	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Terlaksananya kenaikan pangkat dan jabatan fungsiona Dinas Pendidikan Kota Balikpapan		50,000,000
11.	Penyusunan Daftar Kebutuhan Guru	Tersusunnya Data Base Kebutuhan Guru berupa dokumen	172	25,000,000
12.	Penanganan Kasus-kasus Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Laporan penyelesaian kasus- kasus berupa dokumen	20	25,000,000
13.	Penyusunan Buku Profil Pendidikan	Meningkatnya pelayanan dan informasi pendidikan melalui Buku Profil Pendidikan	100%	35,000,000
14.	Validasi Penerima Tambahan Penghasilan Bagi Guru	Daftar Guru dan Tenaga Pendidik yang telah diverifikasi untuk mendapatkan tambahan penghasilan	100%	220,570,000
15.	Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penyaluran BOSDA / BOSDA DIKMEN	Realisasi Anggaran BOSDA/BOSDA Dikmen dilaksanakan dengan Tertib Administrasi dan Tepat Waktu	100%	125,000,000
16.	Peningkatan Kapasitas Staf Pengelola Kegiatan/Keuangan	Meningkatnya Kemampuan Peserta Bimtek Dalam Mengelola Kegiatan/Keuangan	100%	400,000,000
17.	Ekspose Hasil Verifikasi dan Validasi Laporan Bulanan Sekolah	Terciptanya data yang benar	485	250,000,000
18.	Verifikasi dan Validasi Laporan Bulanan Bagi Kepala Sekolah dan Operator Sekolah	Terciptanya data yang benar	485	300,000,000
19.	Penyusunan Renstra 2016-2021	Memiliki pedoman dalam pelaksanaan program kerja Tahun 2016-2021	1	200,000,000

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
20.	Pelaksanaan PPDB Tahun 2016	Terlaksananya PPDB sesuai dengan peraturan yang berlaku	1	400,000,000
8	**Program BOS (Kota) Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (SD)**			
1.	Biaya Operasional SDN 024 Kecamatan Balikpapan Utara	-	100%	143,800,000
2.	Biaya Operasional SDN 025 Kecamatan Balikpapan Utara	-	100%	157,595,000.00
3.	Biaya Operasional SDN 026 Kecamatan Balikpapan Utara	-	100%	124,400,000.00
4.	Biaya Operasional SDN 027 Kecamatan Balikpapan Utara	-	100%	157,700,000.00
5.	Biaya Operasional SDN 028 Kecamatan Balikpapan Utara	-	100%	153,275,000.00
6.	Biaya Operasional SDN 029 Kecamatan Balikpapan Utara	-	100%	152,144,000.00
7.	Biaya Operasional SDN 030 Kecamatan Balikpapan Utara	-	100%	352,500,000.00
8.	Biaya Operasional SDN 031 Kecamatan Balikpapan Utara	-	100%	190,600,000.00
9.	Biaya Operasional SDN 032 Kecamatan Balikpapan Utara	-	100%	241,275,000.00
10.	Biaya Operasional SDN 033 Kecamatan Balikpapan Utara	-	100%	697,200,000.00
11.	Biaya Operasional SDN 001 Kecamatan Balikpapan Barat	-	100%	655,200,000.00
12.	Biaya Operasional SDN 002 Kecamatan Balikpapan Barat	-	100%	517,400,000.00
13.	Biaya Operasional SDN 003 Kecamatan Balikpapan Barat	-	100%	102,900,000.00
14.	Biaya Operasional SDN 004 Kecamatan Balikpapan Barat	-	100%	487,100,000.00
15.	Biaya Operasional SDN 005 Kecamatan Balikpapan Barat	-	100%	344,000,000.00
16.	Biaya Operasional SDN 006 Kecamatan Balikpapan Barat	-	100%	133,300,000.00
17.	Biaya Operasional SDN 007 Kecamatan	-	100%	120,300,000.00

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
	Balikpapan Barat			
18.	Biaya Operasional SDN 008 Kecamatan Balikpapan Barat	-	100%	147,600,000.00
19.	Biaya Operasional SDN 009 Kecamatan Balikpapan Barat	-	100%	689,700,000.00
20.	Biaya Operasional SDN 010 Kecamatan Balikpapan Barat	-	100%	207,802,000.00
21.	Biaya Operasional SDN 011 Kecamatan Balikpapan Barat		100%	249,400,000.00
22.	Biaya Operasional SDN 012 Kecamatan Balikpapan Barat	-	100%	214,143,000.00
23.	Biaya Operasional SDN 013 Kecamatan Balikpapan Barat	-	100%	153,080,000.00
24.	Biaya Operasional SDN 014 Kecamatan Balikpapan Barat	-	100%	173,700,000.00
25.	Biaya Operasional SDN 015 Kecamatan Balikpapan Barat	-	100%	123,800,000.00
26.	Biaya Operasional SDN 016 Kecamatan Balikpapan Barat	-	100%	178,500,000.00
27.	Biaya Operasional SDN 017 Kecamatan Balikpapan Barat	-	100%	84,400,000.00
28.	Biaya Operasional SDN 018 Kecamatan Balikpapan Barat	-	100%	192,455,000.00
29.	Biaya Operasional SDN 019 Kecamatan Balikpapan Barat	-	100%	461,900,000.00
30.	Biaya Operasional SDN 020 Kecamatan Balikpapan Barat	-	100%	266,200,000.00
31.	Biaya Operasional SDN 021 Kecamatan Balikpapan Barat	-	100%	189,882,000.00
32.	Biaya Operasional SDN 022 Kecamatan Balikpapan Barat	-	100%	119,100,000.00
33.	Biaya Operasional SDLB Negeri Balikpapan	-	100%	245,465,000.00
34.	Biaya Operasional SDN 001 Kecamatan Balikpapan Kota	-	100%	557,700,000.00
35.	Biaya Operasional SDN 002 Kecamatan Balikpapan Kota	-	100%	139,680,000.00
36.	Biaya Operasional SDN 003 Kecamatan Balikpapan Kota	-	100%	535,200,000.00

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
37.	Biaya Operasional SDN 004 Kecamatan Balikpapan Kota	-	100%	189,502,000.00
38.	Biaya Operasional SDN 005 Kecamatan Balikpapan Kota	-	100%	491,400,000.00
39.	Biaya Operasional SDN 006 Kecamatan Balikpapan Kota	-	100%	129,800,000.00
40.	Biaya Operasional SDN 007 Kecamatan Balikpapan Kota	-	100%	178,100,000.00
41.	Biaya Operasional SDN 008 Kecamatan Balikpapan Kota	-	100%	237,640,000.00
42.	Biaya Operasional SDN 009 Kecamatan Balikpapan Kota	-	100%	131,422,000.00
43.	Biaya Operasional SDN 010 Kecamatan Balikpapan Kota	-	100%	155,500,000.00
44.	Biaya Operasional SDN 011 Kecamatan Balikpapan Kota	-	100%	223,900,000.00
45.	Biaya Operasional SDN 012 Kecamatan Balikpapan Kota	-	100%	335,700,000.00
46.	Biaya Operasional SDN 013 Kecamatan Balikpapan Kota	-	100%	577,000,000.00
47.	Biaya Operasional SDN 014 Kecamatan Balikpapan Kota	-	100%	95,900,000.00
48.	Biaya Operasional SDN 015 Kecamatan Balikpapan Kota	-	100%	122,700,000.00
9	**Program BOS (Kota) Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (SMP)**			
1.	Biaya Operasional SMP Negeri 1 Balikpapan	-	100%	957,600,000.00
2.	Biaya Operasional SMP Negeri 2 Balikpapan	-	100%	813,600,000.00
3.	Biaya Operasional SMP Negeri 3 Balikpapan	-	100%	1,029,600,000.00
4.	Biaya Operasional SMP Negeri 4 Balikpapan	-	100%	1,292,400,000.00
5.	Biaya Operasional SMP Negeri 5 Balikpapan	-	100%	1,071,000,000.00
6.	Biaya Operasional SMP Negeri 6 Balikpapan	-	100%	1,021,500,000.00
7.	Biaya Operasional SMP Negeri 7 Balikpapan	-	100%	1,264,500,000.00
8.	Biaya Operasional SMP Negeri 8 Balikpapan	-	100%	1,078,200,000.00
9.	Biaya Operasional SMP Negeri 9 Balikpapan	-	100%	1,042,200,000.00

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
10.	Biaya Operasional SMP Negeri 10 Balikpapan	-	100%	934,200,000.00
11.	Biaya Operasional SMP Negeri 11 Balikpapan	-	100%	1,004,400,000.00
12.	Biaya Operasional SMP Negeri 12 Balikpapan	-	100%	1,084,500,000.00
13.	Biaya Operasional SMP Negeri 13 Balikpapan	-	100%	616,800,000.00
14.	Biaya Operasional SMP Negeri 14 Balikpapan	-	100%	1,073,700,000.00
15.	Biaya Operasional SMP Negeri 15 Balikpapan	-	100%	619,200,000.00
16.	Biaya Operasional SMP Negeri 16 Balikpapan	-	100%	387,276,500.00
17.	Biaya Operasional SMP Negeri 17 Balikpapan	-	100%	565,200,000.00
18.	Biaya Operasional SMP Negeri 18 Balikpapan	-	100%	909,900,000.00
19.	Biaya Operasional SMP Negeri 19 Balikpapan	-	100%	541,800,000.00
20.	Biaya Operasional SMP Negeri 20 Balikpapan	-	100%	250,800,000.00
21.	Biaya Operasional SMP Negeri 21 Balikpapan	-	100%	213,835,000.00
22.	Biaya Operasional SMP Negeri 22 Balikpapan	-	100%	765,000,000.00
23.	Biaya Operasional SMPLB Negeri Balikpapan	-	100%	64,800,000.00
10	**Program BOS (Kota) Pendidikan Menengah**			
1.	Biaya Operasional SMA Negeri 1 Balikpapan	-	100%	1,147,000,000.00
2.	Biaya Operasional SMA Negeri 2 Balikpapan	-	100%	928,000,000.00
3.	Biaya Operasional SMA Negeri 3 Balikpapan	-	100%	905,000,000.00
4.	Biaya Operasional SMA Negeri 4 Balikpapan	-	100%	1,137,000,000.00
5.	Biaya Operasional SMA Negeri 5 Balikpapan	-	100%	1,029,000,000.00
6.	Biaya Operasional SMA Negeri 6 Balikpapan	-	100%	1,086,000,000.00
7.	Biaya Operasional SMA Negeri 7 Balikpapan	-	100%	943,000,000.00
8.	Biaya Operasional SMA Negeri 8 Balikpapan	-	100%	883,000,000.00
9.	Biaya Operasional SMA Negeri 9 Balikpapan	-	100%	904,480,000.00
10.	Biaya Operasional SMALB Negeri Balikpapan	-	100%	61,000,000.00
11.	Biaya Operasional SMK Negeri 1 Balikpapan	-	100%	1,936,000,000.00
12.	Biaya Operasional SMK Negeri 2 Balikpapan	-	100%	1,290,000,000.00
13.	Biaya Operasional SMK Negeri 3 Balikpapan	-	100%	1,747,000,000.00

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
14.	Biaya Operasional SMK Negeri 4 Balikpapan	-	100%	897,000,000.00
15.	Biaya Operasional SMK Negeri 5 Balikpapan	-	100%	865,000,000.00
16.	Biaya Operasional SMK Negeri 6 Balikpapan	-	100%	933,000,000
11	**Program Pengembangan Tenaga Kependidikan**			
1.	Penguatan Kompetensi Calon Kepala Sekolah	-		281,000,000.00
12	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			
1.	Pengelolaan Taman Cerdas di Kecamatan	- Terselenggaranya kegiatan perpustakaan untuk masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur	100%	33,852,000
2.	Pengelolaan Taman Cerdas di Kecamatan	-Tercapainya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan di kecamatan Balikpapan Selatan berjalan lancar - meningkatnya Pengetahuan masyarakat akan keberadaan taman cerdas kecamatan Balikpapan Selatan	100%	51,305,000.00
3.	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan masyarakat	-	-	485,000,000.00
4.	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Meningkatnya minat dan kebiasaan membaca anak serta kunjungan ke perpustakaan	100%	400,500,000.00
5.	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	-	-	1,600,000,000.00
6.	Peningkatan Layanan Perpustakaan	-	-	887,950,000.00
7.	Bimbingan teknis pengelola perpustakaan Sekolah, OPD, dan Taman Baca	-		575,500,000.00
12	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**			

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1.	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas	Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27 puskesmas, 14 pustu, UPTD Lab dan IFK	100%	14,000,000,000
2.	Pelayanan Kesehatan Gigi Anak Sekolah Dan Masyarakat Balikpapan	terwujudnya derajat kesehatan gigi dan mulut yang baik pada masyarakat serta tersedianya 1 unit dental mobile	100%	300,000,000
3.	Pembinaan Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga (TOGA)	Tersedianya produk unggulan hasil TOGA	100%	250,000,000.00
4.	Peningkatan Pengawasan Makanan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	Peningkatan Pengawasan Makanan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	-	500,000,000.00
5.	Pembayaran Klaim Visum Polres	Pembayaran Klaim Visum Polres	95%	200,000,000.00
6.	Operasional Kasus KDRT, KTP, KIA dan Trafficking di Puskesmas	-	-	300,000,000.00
7.	Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	3,325,000,000.00
8.	Penyehatan Lingkungan	-	-	1,500,000,000
9.	Pengembangan Kawasan Sehat Tanpa Rokok	-	-	500,000,000.00
13	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			
1.	Peningkatan Imunisasi	Peningkatan kekebalan masyarakat terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I)	100%	300,000,000.00
2.	Surveilance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah	Peningkatan Derajat Masyarakat	100%	400,000,000.00
3.	Pemberantasan Penyakit Kulit/Kelamin/IMS-HIV/AIDS	Kelompok resti sudah dilakukan pemeriksaan darah dan ODHA mendapatkan pengobatan serta pendampingan	100%	600,000,000.00
4.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TBC, ISPA,	Pasien sembuh dan terputusnya mata rantai penularan	100%	1,000,000,000.00

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
	KECACINGAN, DIARE dan KUSTA			
5.	Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana	Seluruh masyarakat kota Balikpapan yang beresiko KLB dan terkena bencana dapat tertangani tentang kesehatannya	100%	500,000,000.00
6.	Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Dan Zoonosis	Meningkatnya ABJ, terselenggaranya penanganan DBD secara terpadu	100%	2,500,000,000.00
14	**Program Standarisasi Dan Mutu Pelayanan Kesehatan**			
1.	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Terlaksananya kegiatan pendataan, pengumpulan dan pengolahan data	95%	500,000,000.00
2.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Tersedianya pelayanan kesehatan bagi lansia	100%	500,000,000.00
3.	Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Terjaga dan terlindunginya kesehatan masyarakat atau masyarakat mendapatkan akses pertolongan gawat darurat segera mungkin	80%	350,000,000.00
4.	Peningkatan Gizi Masyarakat	Meningkatnya derajat gizi masyarakat Kota Balikpapan	80%	2,000,000,000
5.	Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Calon Haji	Para calon jemaah haji terjamin kesehatan	100%	250,000,000
6.	Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Tenaga kerja non formal sehat	100%	400,000,000.00
7.	Penanganan Pelayanan Pasien Ketergantungan Napza	Tertanganinya pasien ketergantungan NAPZA	18000 Jiwa	349,628,500.00
8.	Manajemen Desentralisasi Kesehatan	-	-	250,000,000
15	**Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin**			
1.	Pelayanan Kesehatan Jiwa Dana Mata Untuk Masyarakat	Terwujudnya kelurahan sehat mata dan jiwa	100%	650,000,000.00

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2.	Pembayaran iuran BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PBI)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	95%	3,075,000,000.00
16	**Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya**			
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskemas	Sarana prasarana pelayanan kesehatan lebih representative	100%	200,000,000.00
2.	Rehabilitasi Berat/Sedang Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan lebih representative	100%	5,000,000,000.00
3.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus	-	-	550,000,000.00
4.	Pembangunan Puskesmas dan Laboratorium	Sarana prasarana pelayanan kesehatan lebih representative	100%	10,079,953,500.00
17	**Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan**			
1.	Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas	Meningkatnya ABJ, menurunan angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru dan menurunnya prevalensi gizi buruk	100%	4,500,000,000.00
18	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**			
1.	Peningkatan Kesehatan Ibu	Menurunnya AKI, AKB dan AKABA kota Balikpapan, menurunnya angka kejadian gizi kurang/gizi buruk dan ketersediaan logistic untuk pelayanan KIA	100%	5,000,000,000.00
19	**Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan**			
1.	Peningkatan Kualitas Tenaga Pelayanan Kesehatan Melalui Pengiriman Program Pelatihan	-	100%	2,274,100,000.00

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2.	Akreditasi Tenaga Fungsional Kesehatan	Peningkatan kinerja SDM Kesehatan disertai pengelolaan asset dinas	100%	200,000,000
3.	Pengelolaan Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan	Meningkatnya kapasitas pelayanan institusi kesehatan	100%	188,000,000.00
	Pengadaan Perbekalan Kesehatan	-	-	10,481,050,000.00
20	**Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata**			
1.	Penyusunan Amdal dan DED	Meningkatnya kinerja karywan RSKB Sayang Ibu	Dokumen AMDAL dan DED	800,000,000.00
21	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**			
1.	Promosi Rumah Sakit	Meningkatnya pelayanan kesehatan di RSKB Sayang Ibu	100%	200,000,000.00
22	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**			
1.	Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit Bersalin Sayang Ibu	Meningkatnya kinerja karyawan RSKB Sayang Ibu	100%	2,000,000,000.00
23	**Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan**			
1.	Akreditasi Rumah Sakit	Meningkatnya pelayanan kesehatan di RSKB Sayang Ibu	100%	350,000,000.00
2.	Pemeliharaan SIM Rumah Sakit	Tersediannya aplikasi SIM Rumah Sakit	100%	100,000,000.00
3.	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Meningkatnya kinerja karyawan RSKB Sayang Ibu Balikpapan	100%	1,500,000,000.00
4.	Perhitungan Angka Kredit Tenaga Fungsional	Dokumen penilaian angka kredit	100%	30,000,000.00
24	**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit BLUD RSKB Sayang Ibu**			
1.	Pelayanan Rumah Sakit BLUD Khusus Bersalin Sayang Ibu	Meningkatnya kinerja karyawan RSB Sayang Ibu	100%	9,000,000,000.00
25	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**			

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1.	Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di RSUD	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan di RSUD	80%	1,800,000,000.00
26	**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat**			
1.	Penunjang Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	Tersedianya Media Promosi Kesehatan	100%	500,000,000.00
2.	Pembuatan Media Promosi Kesehatan RS	Terpenuhinya Promosi Kesehatan RSUD	80%	350,000,000.00
27	**Program Standarisasi Dan Mutu Pelayanan Kesehatan**			
1.	Akreditasi Rumah Sakit	Terpenuhinya Persyaratan Izin RS	80%	385,000,000.00
2.	Pendampingan BLUD	RSUD Dapat Menerapkan Pola PPK BLUD	80%	150,000,000.00
3.	Pengembangan SIM Rumah Sakit	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu	80%	200,000,000.00
28	**Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata**			
1.	Pengembangan Ruang Unit Gawat Darurat (UGD)	Terlaksananya Perluasan Ruang UGD	100%	200,000,000.00
2.	Pengembangan ruang isolasi	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu	100%	200,000,000.00
3.	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	Terpenuhinya Obat Yang Bermutu dan Terjangkau	100%	5,000,000,000.00
4.	Pengadaan mebeleur rumah sakit	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan yang bermutu	100%	200,000,000.00
5.	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Tersedianya Kebutuhan Peralatan Kesehatan	100%	28,051,000,000.00
6.	Pembuatan DED Pengembangan Sarana Prasarana RSUD	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu	100%	50,000,000.00
7.	Pengadaan Tanah untuk Penataan Lingkungan dan Perluasan Rumah Sakit	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu	80%	8,000,000,000.00

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
8.	Penambahan Ruang Pengambilan Sample dan UTD Laboratorium	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu	100%	100,000,000.00
9.	Pembuatan Teralis Pengaman Gudang Farmasi	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu	100%	35,000,000.00
10.	Penambahan Pagar Pengaman di Area RS dan Incenerator	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu	100%	100,000,000.00
11.	Penambahan Talud/Bronjong Pada Area Ex Longsor	Terpenuhinya Keamanan Fasilitas RS	100%	200,000,000.00
12.	Pembangunan Rumah WTP dan Bangunan Pencucian Bahan Mentah Instalansi Gizi	Terpenuhinya Keamanan Fasilitas RS	100%	35,000,000.00
13.	Pembangunan Rumah Tangki BBM	Terpenuhinya Keamanan Fasilitas RS	100%	40,000,000.00
14.	Pembuatan Instalasi Gas Pada Area Dapur	Terpenuhinya Keamanan Fasilitas RS	100%	30,000,000.00
15.	Penambahan Sarana Pada Bangunan Laundry	Bangunan Laundry Memenuhi Persyaratan Pengendalian Infeksi	100%	100,000,000.00
16.	Pengadaan Bahan Kimia	Terpenuhinya Pelayanan di RSUD	100%	500,000,000.00
17.	Pengadaan Bahan Kemasan Untuk Obat dan Limbah	Terpenuhinya Pelayanan di RSUD	100%	200,000,000.00
18.	Pembangunan Jalan Akses Masuk Alternatif RS	Terpenuhinya Keamanan Fasilitas RS	100%	400,000,000.00
19.	Pengembangan Ruang Depo Farmasi	Terlaksananya Perluasan Ruang Depo Farmasi	100%	200,000,000.00
20.	Pengadaan ABHP Medik dan Non-Medik	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu	100%	750,000,000.00
21.	Penambahan Ruang Verifikasi	Terlaksanannya Penambahan Ruang Verifikasi	100%	200,000,000.00
22.	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	Tersedianya Pengendalian dan pengawasan Infeksi Sesuai Standar	100%	100,000,000.00
23.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit	Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang bermutu	100%	300,000,000.00

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
24.	Kalibrasi Peralatan Medik	Terlaksananya Pengendalian dan pengawasan Infeksi Sesuai Standar	100%	100,000,000.00
29	**Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan**			
1.	kemitraan pengolahan limbah rumah sakit	Terpenuhinya Pengendalian dan Pengawasan Infeksisesuai Standar	100%	200,000,000.00
2.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit	Terlaksananya pelayanan Rumah Sakit yang berkualitas	100%	1,200,000,000.00
3.	Pemantauan Mutu Pelayanan	Terlaksananya pemantauan mutu pelayanan	100%	113,000,000.00
4.	Operasional Pelayanan Penunjang Medik dan Non-Medik	Terlaksananya pemantauan mutu pelayanan	100%	1,000,000,000.00
30	**Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan**			
1.	Pendampingan Penyusunan Clinical Pathway dan Pedoman Terapi Rumah Sakit	Rumah Sakit Memiliki Dokumen Clinical Pathway dan Pedoman Terapi	80%	150,000,000.00
2.	Pelatihan / Workshop Tenaga Kesehatan dan non-Kesehatan	Terlaksananya pelatihan/workshop untuk tenaga kesehatan dan penunjang di RSUD	100%	2,500,000,000.00
3.	Operasional Pengendalian Pelayanan Rumah Sakit	Terpenuhinya Operasional Pelaksanaan Komite Medik, PPI, SPI, Tim Pengendalian Pengawasan RSUD	100%	500,000,000.00
31	**Program Pemeliharaan Kesehatan Aparatur**			
1.	Medical Check Up bagi Staf	Tersedianya Tenaga Medis dan Tenaga Penunjang Bermutu	100%	200,000,000.00
2.	Pemeliharaan dan Vaksinasi Hepatitis B	Tersedianya Tenaga Medis dan Tenaga Penunjang Bermutu	100%	200,000,000.00
32	**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat**			

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1.	Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak dan Gerakan Sayang Ibu	Meningkatnya Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak dan Gerakan Sayang Ibu	100%	8,000,000.00
33	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**			
1.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Terpilihnya posyandu bayi dan balitaterbaik juara I, II dan II	100%	45,000,000.00
2.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Pembinaan, evaluasi keluarga kader/ instusi	100%	77,000,000.00
3.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	adanya evaluasi / penilaian dan pemberian reward bayi sehat, balita sehat dan pengurus posyandu	9 pemenang	32,648,000.00
4.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Adanya evaluasi/penilaian dan pemberian reward bayi sehat dan pengurus posyandu	100%	26,150,000.00
5.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Terlaksananya pembinaan, evaluasi/penilaian dan pemberian reward bayi sehat, balita sehat dan posyandu	100%	34,380,000.00
6.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Adanya Evaluasi/ Penilaian dan Pemberiaan Reward Bayi Sehat, Balita Sehat dan Pengurus Posyandu	100%	40,225,000.00
7.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Adanya evaluasi/penilaian dan pemberian reward bayi sehat, balita sehat dan pengurus Posyandu	12 bulan	46,425,000.00
8.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Adanya evaluasi /penilaian dan pemberian reward bayi sehat, balita sehat dan pengurus posyandu	100%	15,600,000.00
9.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Meningkatnya kesehatan bayi dan balita	100%	65,000,000.00
10.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Cakupan Fasasilitas Posyandu Kelurahan	100%	43,100,000.00

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
11.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Adanya evaluasi/ penilaian dan pemberian reward bayi sehat dan pengurus posyandu	100%	28,100,000.00
12.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Pembinaan kader Posyandu, lomba Posyandu, lomba bayi dan balita sehat	100%	43,970,000.00
13.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Adanya evaluasi/penilaian dan pemberian reward bayi sehat, balita sehat dan pengurus posyandu	Rakor Posyandu 11 bulan, juara I. II, III pada kegiatan lomba-	58,980,000.00
14.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Adanya Evaluasi/Penilaian dan Pemberian Reward Bayi Sehat, Balita Sehat dan Pengurus Posyandu	100%	54,050,000.00
15.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Adanya Evaluasi/Penilaian dan Pemberian Reward Bayi Sehat, Balita Sehat dan Pengurus Posyandu	100%	36,550,000.00
16.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Adanya Peningkatan Pelayanan Posyandu	100%	25,830,000.00
17.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	adanya evaluasi/penilaian dan pembinaan reard bayi sehat,balita sehat, dan pengurus posyandu	100%	40,225,000.00
18.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Adanya Evaluasi/penilaian dan Pemberian Reward Bayi sehat,Balita Sehat dan Pengurus Posyandu	100%	42,700,000.00
19.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Adanya evaluasi/penilaian dan pemberian reward bayi dan balita sehat pembinaan pengurus Posyandu, Pelaksanaan Gertak PSN DBD	100%	55,205,000.00
20.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Adanya evaluasi penilaian dan pemberian reward balita sehat	100%	32,000,000.00

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
21.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	adanya evaluasi/penilaian dan pemberian reward bayi sehat dan pengurus posyandu	100%	27,330,000.00
22.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	100%	43,050,000.00
23.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	adanya evaluasi penilaian dan pemberian reward bayi balita sehat dan pengurus posyandu serta pembinaan kegiatan jasmani dan rohani	100%	57,920,000.00
24.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Terpilihnya posyandu, bayi dan balita terbaik tingkat Kelurahan	100%	40,410,000.00
25.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Adanya Evaluasi/ Penilaian dan pemberian reward bayi sehat, balita sehat dan pengurus poyandu	100%	28,830,000.00
26.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Adanya Evaluasi/penilaian dan pemberian reward bayi sehat, balita sehat, posyandu dan BKB	100%	34,100,000.00
27.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Adanya Evaluasi/Penilaian dan Pemberian Reward Bayi Sehat, Balita Sehat, Lomba Jumantik dan Pengurus Posyandu	100%	72,250,000.00
28.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Adanya evaluasi/penilaian dan pemberian reward bayi sehat, balita sehat, dan pengurus posyandu	100%	49,540,000.00
29.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Adanya Evaluasi /Penilaian dan Pemberian Reward bayi sehat,balita sehat dan pengurus posyandu	100%	40,930,000.00

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
30.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Adanya Penilaian / Evaluasi Dan Pemberian Reward Bayi Sehat, Balita Sehat Dan Pengurus Posyandu	100%	40,650,000.00
31.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Adanya Evaluasi/ Penilaian dan pemberian reward bayi sehat, balita sehat, dan posyandu	100%	34,344,000.00
32.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Adanya Evaluasi / Penilaian dan pemberian reward bayi sehat, balita sehat, posyandu dan BKB	100%	77,830,000.00
33.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Adanya evaluasi/penilaian dan pemberian reward bayi sehat, balita sehat dan pengurus posyandu	100%	43,132,500.00
34.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Adanya Evaluasi/Penilaian dan pemberian reward bayi sehat, balita sehat dan pengurus posyandu	100%	50,000,000.00
34	**Program Penanggulangan Banjir**			
1.	Pengendalian Banjir I	Berfungsinya Drainase Dengan Baik	100%	55,000,000,000
2.	Pengendalian Banjir II	Berfungsinya Drainase Dengan Baik	100%	12,000,000,000
3.	Pembangunan Saluran	Berfungsih Drainase Dengan Baik	100%	17,000,000,000
4.	Drainase/Gorong-Gorong	Berfungsih Drainase Dengan Baik	100%	2,500,000,000
5.	Pemeliharaan Infrastruktur	Berfungsi Drainase Dengan Baik	100%	4,000,000,000
6.	Bidang Pengairan	Berfungsinya Drainase Dengan Baik	100%	35,500,000,000
7.	Supervisi Bidang Pengairan	Berfungsinya Drainase Dengan Baik	100%	21,800,000,000
8.	Pembangunan Saluran Drainase Pemukiman	Berfungsinya Drainase Dengan Baik	100%	10,500,000,000
9.	Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Berfungsinya Drainase Dengan Baik		

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
10.	Pembangunan Jalan Inspeksi S. Batakan Kecil	-		
35	**Program Sumber Daya Manusia**			
1.	Peningkatan SDM Aparatur PU	Meningkatkan sumber daya manusia pada Dinas PU Kota Balikpapan	100%	325,000,000
2.	Pembinaan Jasa Konstruksi	Terselenggaranya Pembinaan di Bidang Jasa Konstruksi	100%	150,000,000.00
36	**Program Penelitian**			
1.	Pembuatan DED Bidang Pengairan	Berfungsinya Drainase Dengan Baik	100%	500,000,000
2.	Pembuatan DED Bidang Bina Marga	Tersedianya perencanaan jalan sebagai dasar dan kemudahan dalam pelaksanaan dan prasarana transportasi	-	1,000,000,000
3.	Perencanaan (DED) Bidang Cipta Karya	-	-	775,000,000
4.	Updating Sistem Informasi Manajemen (SIM) Bina Marga	- Berfungsinya Jalan dan Jembatan dengan Baik - Berfungsinya Drainase dengan Baik	100%	700,000,000.00
5.	Aplikasi Data ke-Puan	Tersedianya Data yang Akurat	100%	100,000,000
37	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum**			
1.	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih	-	-	1,500,000,000
2.	Pembangunan Balikpapan Islamic Center	Terbangunnya BIC	100%	100,000,000,000
3.	Pembangunan Stadion Balikpapan	Terbangunnya Stadion Balikpapan	100%	188,000,000,000
38	**Program Pembangunan Peningkatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**			
1.	Pembangunan Jalan	1. Kemudahan dalam pelaksanaan 2. Berfungsinya jalan dengan baik 3. Kelancaran arus lalu lintas	100%	8,000,000,000.00

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2.	Pembangunan Jembatan	1. Kemudahan dalam pelaksanaan 2. Berfungsinya jembatan dengan baik 3. Kelancaran arus lalu lintas	100%	8,500,000,000
3.	Pembangunan Jalan	1. Kemudahan dalam pelaksanaan 2. Berfungsinya jembatan dengan baik 3. Kelancaran arus lalu lintas	100%	35,000,000,000
4.	Supervisi Bidang Ke-Bina Marga-an	Kuantitas dan kualitas terpadu	-	2,060,000,000.00
5.	Pemeliharaan Infrastruktur Bidang Bina Marga	-Memperpanjang usia konstruksi selama 1 tahun - Meningkatkan kualitas jalan -Meningkatkan kualitas jembatan	1 tahun, 100%, 100%	2,500,000,000.00
6.	Peningkatan Trotoar Dalam Kota	1. Kemudahan dalam pelaksanaan 2. Berfungsinya trotoar dengan baik 3. Kelancaran arus lalu lintas	100%	7,500,000,000.00
7.	Pembangunan Jalan Sepinggan Baru-Transad KM 8	-	-	190,000,000,000.00
8.	Peningkatan Simpang Jalan	1. Kemudahan dalam pelaksanaan teknis 2. Berfungsinya jalan dengan baik 3. Kelancaran arus lalu lintas	100%	12,600,000,000.00
39	**Program Operasional Pemeliharaan Ke-PU-an**			
1.	Operasional Pemeliharaan Drainase Kota	Meningkatnya Kualitas Drainase Kota	80%	8,000,000,000
2.	Operasional Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	- meningkatnya kualitas Jalan - meningkatnya kualitas Jembatan	100 Titik, - Buah	4,000,000,000
40	**Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**			
1.	Pembebasan Tanah Terminal Angkutan Kota	Tersedianya lahan terminal untuk angkutan kota	90%	1,000,000,000.00
41	**Program Peningkatan Pelayanan Angkutan**			

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1.	Penyuluhan terhadap ABK Nahkoda dan Pemilik Kapal di Bawah GT.7	Terkendalinya keselamatan pelayaran di perairan Kota Balikpapan	90%	51,125,000.00
2.	Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan dan pelajar pelopor keselamatan angkutan jalan	Termotifasinya pengemudi teladan dan pelajar untuk memahami peraturan lalu lintas	-	180,000,000.00
3.	Posko Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Hari- Hari Besar Nasional dan Keagamaan	Kelancaran dan ketertiban pengguna jasa angkutan pada Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan	100%	400,000,000.00
4.	Unit Pengelola Teknis Terminal	Terlaksananya pengelolan terminal dan terpeliharanya fasilitas	100%	250,000,000.00
42	**Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan**			
1.	Peningkatan Prasarana Angkutan Umum Massal (SAUM)	-	-	300,000,000.00
2.	Pembangunan Halte Angkutan Kota	-	-	350,000,000
43	**Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas**			
1.	Peningkatan pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas	Terlaksananya kegiatan operasional	100%	30,000,000
2.	Pengadaan Alat Pendukung Pengendalian dan Operasi	-	-	600,000,000
3.	Operasi Ketupat Mahakam dan Lilin Mahakam	-	-	400,000,000
44	**Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor**			
1.	Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Tercapainya PAD dan peningkatan pelayanan masyarakat	100%	1,800,000,000
45	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Laut**			
1.	Operasional, Pemeliharaan Kapal Patroli dan Perlengkapan Lalu Lintas Laut	-	-	435,857,000.00
46	**Program Pengembangan Data dan Informasi Perhubungan**			

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1.	Penyusunan Profil dan Update Web Site Dinas Perhubungan Kota Balikpapan	Tersedianya informasi Perhubungan/data transportasi darat, laut dan udara	1 dokumen	50,000,000.00
47	**Program Pengembangan Data dan Informasi Perhubungan**			
1.	Survey Load Factor, Lintas Harian Rata-rata, Persimpangan	Tersedianya data dan informasi/angkutan dan transportasi di ruas jalan/ persimpangan di Kota Balikpapan	80%	80,000,000.00
48	**Program Pengembangan Data dan Informasi Perhubungan**			
1.	Survey Lalu Lintas Angkutan Laut	Tersedianya data dan informasi	80%	50,000,000.00
49	**Program Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Kota**			
1.	Operasi Pemeriksaan Lalu lintas (Razia) dan Pengawasan, pengendalian, monitoring dan pelaporan lalu lintas dan angkutan jalan	Meningkatnya ketertiban lalu lintas	90%	1,892,959,500.00
2.	Unit Pengelola Teknis Parkir	Tertibnya perparkiran	100%	450,000,000
50	**Program Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ**			
1.	Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Ketertiban dan keselamatan lalu lintas	90%	4,500,000,000
51	**Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas**			
1.	Pengadaan Sarana Lalu Lintas Jalan	Terlaksananya pemahaman peraturan dan kualitas SDM	90%	5,500,000,000
2.	Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Pembuatan Informasi tentang Tertib Lalu Lintas	Penyelasaian permasalahan LLAJ oleh Forum LLAJ	90%	225,000,000
52	**Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas**			
1.	Evaluasi Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Meningkatnya ketertiban lalu lintas	90%	110,000,000
53	**Program Peningkatan Pelayanan Laut**			

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1.	Operasional ,Pemeliharaan Kapal Patroli dan Perlengkapan Lalu Lintas Laut.	Terkendalinya keselamatan pelayaran di perairan Kota Balikpapan	80%	435,857,000
54	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepelabuhanan**			
1.	Pemeliharaan Fasilitas Dermaga Kp. Baru Tengah, dan Monitoring TUKS/Kepelabuhanan	Meningkatnya keselamatan dan keamanan dermaga serta kapal yang tambat/labuh	100%	79,000,000.00
55	**Program Peningkatan dan Pengawasan POS, Telekomunikasi dan Informatika**			
1.	Pengawasan dan Pengendalian Jasa Titipan dan Menara Telekomunikasi	Tertibnya pelaksanaan jasa titipan dan monitoring menara telekomunikasi	-	90,000,000.00
56	**Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan**			
1.	Study s/d DED Pengembangan Trayek/Koridor Angkutan Umum	Terpenuhinya taryek Angkutan Umum	90%	400,000,000.00
57	**Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Sistem Informasi Pelayanan Angkutan**			
1.	Sistem Informasi Manajemen Angkutan Umum (SIMAU)	Tersedianya sistem dan data pelayan angkutan umum	100%	100,000,000.00
58	**Program Penanggulangan Banjir**			
1.	Pengendalian Banjir I	Berfungsinya Drainase Dengan Baik	100%	55,000,000,000
2.	Pengendalian Banjir II	Berfungsinya Drainase Dengan Baik	100%	12,000,000,000
59	**Program Peningkatan Kualitas Perumahan Sehat**			
1.	Fasilitasi Pokja AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)	Terlaksananya AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)	100%	250,000,000
60	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum**			
1.	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih	-	-	1,500,000,000
61	**Program Penataan Struktur Industri**			

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1.	Pembangunan Jaringan Listrik, Air Bersih dan Air Limbah untuk 20 Unit Rumah	Tersedia sarana mendistribusikan listrik dan air bersih serta pembuangan air limbah yang menunjang produksi	-	950,000,000
62	**Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata**			
1.	Pengadaan Bahan Kemasan Untuk Obat dan Limbah	Terpenuhinya Pelayanan di RSUD	100%	200,000,000
2.	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	Tersedianya Pengendalian dan pengawasan Infeksi Sesuai Standar	100%	100,000,000
63	**Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan**			
1.	kemitraan pengolahan limbah rumah sakit	Terpenuhinya Pengendalian dan Pengawasan Infeksisesuai Standar	100%	200,000,000
64	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			
1.	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dan Pemberian Izin Pengelolaan Limbah B3	Terdokumentasinya hasil peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan - Terdokumentasinya Izin tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 Perusahaan	10 buku, 10 buku	150,000,000.00
2.	Pengendalian Pencemaran Air Limbah	Terkendali dan tercipta ketaatan kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran air terhadap peraturan / ketentuan lingkungan hidup	15 perusahaan	75,000,000.00
65	**Program Penataan Struktur Industri**			
1.	Pembangunan Jaringan Listrik, Air Bersih dan Air Limbah untuk 20 Unit Rumah	Tersedia sarana mendistribusikan listrik dan air bersih serta pembuangan air limbah yang menunjang produksi	100%	950,000,000.00

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
66	**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**			
1.	Penyelenggaraan Promosi Investasi	Terpromosinya potensi investasi/ penanaman modal di Kota Balikpapan	100%	2,374,000,000.00
2.	Temu Usaha dan Seminar Potensi Investasi Kota Balikpapan	Tumbuhnya minat investor dalam dan luar daerah	90%	750,000,000.00
3.	penyediaan Bahan/Materi/Media Informasi Layanan Perizinan dan Investasi	Tersedianya pengadaan sarana/media informasi layanan perizinan dan investasi	100%	103,000,000.00
67	**Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**			
1.	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	Tertibnya administrasi perizinan kegiatan penanaman modal/ investasi di Kota Balikpapan	100%	409,352,000.00
2.	Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Penanaman Modal dan Investasi di Kota Balikpapan	Terlaksananya kegiatan pengendalian dan pengawasan kegiatan Penanaman Modal	100%	969,550,000.00
68	**Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**			
1.	Masterplan pengembangan UMKM	Tersedianya dokumen tentang masterplan pengembangan UMKM	1 Dokumen	499,202,000.00
69	**Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif**			
1.	Pembinaan dan Pengembangan SDM UMKM	Meningkatnya jumlah UMKM. Meningkatnya Kwalitas Jaminan Kredit bagi UMKM	100%	200,000,000.00
70	**Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**			
1.	Pembinaan dan Temu Usaha Kemitraan Bagi UMKM di Kota Balikpapan	Meningkatnya kualitas SDM dan pengetahuan/kewirausahaan bagi UMKM dan Gakin	100%	200,000,000.00
2.	Pembinaan dan Temu Usaha Kemitraan Bagi UMKM di Kota Balikpapan	meningkatnya kualitas SDM dan pengetahuaan / kewirausahaan bagi UMKM dan gakin	150 Pelaku Usaha	173,425,000.00

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
71	**Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan**			
1.	Pendataan UMKM	Terhimpunnya data UMKM wilayah Kelurahan Teritip	100%	8,167,500.00
72	**Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**			
1.	Inventarisasi Koperasi, UMKM, dan PKL	-	-	3,318,000.00
73	**Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan**			
1.	Inventarisasi Koperasi, UMKM, dan PKL	Tersedianya informasi mengenai kegiatan perindustriaan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah.	100%	3,318,000
74	**Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri**			
1.	Peningkatan Kelancaran Distribusi Ketahanan Pangan, Stabilitas Harga dan Pengembangan Produk dalam Negeri	meningkatnya Kelancaran distribusi ketahanan pangan, stabilitas harga dan pengembangan produk dalam Negeri	100%	640,220,200.00
75	**Program Peningkatan Ketahanan Pangan**			
1.	Penguatan implementasi standar pelayanan minimal (SPM) di bidang ketahanan pangan	meningkatnya pemahaman penyusunan SPM bidang ketahanan pangan dan tersusunnya laporan SPM	20 orang dan 1 laporan	87,327,000
2.	Koordinasi Penguatan Ketahanan Pangan di Kota Balikpapan	Terlaksanya kerjasama daerah bidang ketahanan pangan dan perekonomian	2 Daerah	110,000,000

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3.	Penguatan Diiversifikasi Ketahanan Pangan dan Keamanan Pangan	meningkatnya pemahanan masyarakat tentang keamanan pangan dan pemanfaatan lahan pekarangan dan mengikuti hari ketahanan pangan nasional dan diversifikasi pangan provinsi	60 peserta dan 2 kali	164,920,500
4.	Kajian Akademis Raperda Ketahanan Pangan	tersusunnya analisa raperda ketahanan pangan	1 dokumen	50,000,000

Berdasarkan tabel program dan kegiatan RKPD Tahun 2016 diatas menggambarkan hasil penjabaran RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016. Berdasarkan penjabaran tersebut terdapat 75 Program Prioritas dan 402 Kegiatan.

2.2.8. Capaian Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2016

Capaian konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan amanat yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Adapun penjelasan tentang konsistensi terdeskripsi sebagai berikut:

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
- Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan KUA tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.

- Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.

Sejalan penjelasan diatas, bahwa konsistensi perencanaan dan penganggaran juga diatur dalam Pasal 155 Peraturan Mendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan isi sebagai berikut:

> "Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan: a) Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah; b) Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional; c) Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah; d) Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan".

Terkait dengan peraturan menteri dalam negeri tersebut, bahwa konsistensi merupakan salah suatu poin utama yang diharapkan dan diwajibkan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran. Sehubungan dengan evaluasi RKPD tahun lalu berikut ini disajikan pengukuran capaian konsistensi dokumen perencanaan.

1) Capaian Konsistensi Program RKPD terhadap APBD Tahun 2016

Untuk mengetahui konsistensi keseluruhan program pada dokumen RKPD dan APBD Tahun 2016 dibutuhkan pengamatan dan penyandingan jumlah program antar dokumen RKPD dan APBD Tahun 2016. Hal ini dilakukan sebagai evaluasi kesesuaian jumlah program pada RKPD Tahun 2016 yang dilaksanakan pada APBD Tahun 2016.

Tabel 2.73
Konsistensi Jumlah Program RKPD dan APBD Kota Balikpapan Tahun 2016

No	Urusan / Bidang Urusan	JUMLAH PROGRAM				Evaluasi Konsistensi	Konsitensi		Tingkat Capaian Konsitensi Program RKPD
		RKPD	APBD	Sesuai	Selisih		Ya	Tidak	
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13
I	**Urusan Wajib**								
1	Dinas Pendidikan	12	17	12	5	+5 Program APBD		•	58.33%
2	Dinas Kesehatan	12	13	12	1	+1 Program APBD		•	91.67%

No	Urusan / Bidang Urusan	JUMLAH PROGRAM				Evaluasi Konsistensi	Konsitensi		Tingkat Capaian Konsitensi Program RKPD
		RKPD	APBD	Sesuai	Selisih		Ya	Tidak	
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13
3	RSKB.Sayang Ibu	7	8	7	1	+1 Program APBD		•	85.71%
4	RSUD Balikpapan	10	10	10	-	Konsistensi Tercapai	•		100%
5	Dinas Pekerjaan Umum	14	14	14	-	Konsistensi Tercapai	•		100%
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	10	7	3	+3 Program APBD		•	57.14%
7	Dinas Tata Kota dan Perumahan	13	13	13	-	Konsistensi Tercapai	•		100%
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9	9	9	-	Konsistensi Tercapai	•		100%
9	Dinas Perhubungan	17	19	17	2	+2 Program APBD		•	88.24%
10	Badan Lingkungan Hidup	11	12	11	1	+1 Program APBD		•	90.91%
11	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman	9	9	9	-	Konsistensi Tercapai	•		100%
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	6	6	6	-	Konsistensi Tercapai	•		100%
13	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	14	14	14	-	Konsistensi Tercapai	•		100%
14	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	15	14	14	1	-1 Program RKPD		•	86.19%
15	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	18	18	18	-	Konsistensi Tercapai	•		100%
16	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	10	10	10	-	Konsistensi Tercapai	•		100%
17	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	11	9	9	2	-2 Program RKPD		•	59.60%
18	Satuan Polisi Pamong Praja	8	8	8	-	Konsistensi Tercapai	•		100%
19	Sekretariat Daerah	44	53	44	9	+9 Program APBD		•	79.55%

No	Urusan / Bidang Urusan	JUMLAH PROGRAM				Evaluasi Konsistensi	Konsitensi		Tingkat Capaian Konsitensi Program RKPD
		RKPD	APBD	Sesuai	Selisih		Ya	Tidak	
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13
20	Sekretariat DPRD	8	7	7	1	-1 Program RKPD		•	73.21%
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	11	10	10	1	-1 Program RKPD		•	80.91%
22	Badan Kepegawaian Daerah	7	8	7	1	+1 Program APBD		•	85.71%
23	Inspektorat	8	6	6	2	-2 Program RKPD		•	41.67%
24	Dinas Pendapatan Daerah	9	9	9	-	Konsistensi Tercapai	•		100%
25	Kec.Balikpapan Timur	19	18	18	1	-1 Program RKPD		•	89.18%
26	Kec.Balikpapan Barat	15	14	14	1	-1 Program RKPD		•	86.19%
27	Kec.Balikpapan Utara	17	16	16	1	-1 Program RKPD		•	87.87%
28	Kec.Balikpapan Tengah	15	15	15	-	Konsistensi Tercapai	•		100%
29	Kec.Balikpapan Selatan	18	18	18	-	Konsistensi Tercapai	•		100%
30	Kec.Balikpapan Kota	16	15	15	1	-1 Program RKPD		•	87.08%
31	Kel. Manggar	11	10	10	1	-1 Program RKPD		•	80.91%
32	Kel. Lamaru	10	9	9	1	-1 Program RKPD		•	78.89%
33	Kel. Teritip	11	11	11	-	Konsistensi Tercapai	•		100%
34	Kel. Manggar Baru	12	11	11	1	-1 Program RKPD		•	82.58%
35	Kel. Baru Ilir	10	10	10	-	Konsistensi Tercapai	•		100%
36	Kel. Baru Tengah	10	10	10	-	Konsistensi Tercapai	•		100%
37	Kel. Baru Ulu	10	10	10	-	Konsistensi Tercapai	•		100%
38	Kel. Kariangau	10	9	9	1	-1 Program RKPD		•	78.89%
39	Kel. Margo Mulyo	12	11	11	1	-1 Program RKPD		•	82.58%
40	Kel. Margasari	10	10	10	-	Konsistensi Tercapai	•		100%
41	Kel. Baru Ampar	11	11	11	-	Konsistensi Tercapai	•		100%
42	Kel. Gn. Samarinda	10	10	10	-	Konsistensi Tercapai	•		100%
43	Kel. Karang Joang	10	10	10	-	Konsistensi Tercapai	•		100%

No	Urusan / Bidang Urusan	JUMLAH PROGRAM				Evaluasi Konsistensi	Konsitensi		Tingkat Capaian Konsitensi Program RKPD
		RKPD	APBD	Sesuai	Selisih		Ya	Tidak	
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13
44	Kel. Muara Rapak	10	9	9	1	-1 Program RKPD		•	78.89%
45	Kel. Gn. Samarinda Baru	10	10	10	-	Konsistensi Tercapai	•		100%
46	Kel. Graha Indah	10	10	10	-	Konsistensi Tercapai	•		100%
47	Kel. Gn. Sari Ullu	10	10	10	-	Konsistensi Tercapai	•		100%
48	Kel. Gn. Sari Ilir	10	9	9	1	-1 Program RKPD		•	78.89%
49	Kel. Karang Rejo	10	11	10	1	+1 Program APBD		•	90.00%
50	Kel. Karang Jati	12	13	12	1	+1 Program APBD		•	91.67%
51	Kel. Mekar Sari	10	9	9	1	-1 Program RKPD		•	78.89%
52	Kel. Sumber Rejo	10	10	10	-	Konsistensi Tercapai	•		100%
53	Kel. Sepinggan	10	8	8	2	-2 Program RKPD		•	55.00%
54	Kel. Gn. Bahagia	10	9	9	1	-1 Program RKPD		•	78.89%
55	Kel. Sepinggan Baru	10	10	10	-	Konsistensi Tercapai	•		100%
56	Kel. Sepinggan Raya	10	7	7	3	-3 Program RKPD		•	27.14%
57	Kel. Sungai Nangka	10	9	9	1	-1 Program RKPD		•	78.89%
58	Kel. Damai Baru	10	8	8	2	-2 Program RKPD		•	55.00%
59	Kel. Damai Bahagia	10	11	10	1	+1 Program APBD		•	90.00%
60	Kel. Prapatan	11	10	10	1	-1 Program RKPD		•	80.91%
61	Kel. Telaga Sari	11	10	10	1	-1 Program RKPD		•	80.91%
62	Kel. Klandasan Ulu	10	9	9	1	-1 Program RKPD		•	78.89%
63	Kel. Klandasan Ilir	11	7	7	4	-4 Program RKPD		•	6.49%
64	Kel. Damai	10	9	9	1	-1 Program RKPD		•	78.89%
65	Kantor Arsip dan Perpustakaan	9	9	9	-	Konsistensi Tercapai	•		100%
II	**Urusan Pilihan**								
66	Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan	27	28	27	1	+1 Program APBD		•	96.30%
67	Disporabudpar	18	17	17	1	-1 Program RKPD		•	88.56%
68	Dinas Pasar	10	10	10	-	Konsistensi	•		100%

No	Urusan / Bidang Urusan	JUMLAH PROGRAM				Evaluasi Konsistensi	Konsitensi		Tingkat Capaian Konsitensi Program RKPD
		RKPD	APBD	Sesuai	Selisih		Ya	Tidak	
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13
						Tercapai			
	Jumlah	**806**	**796**	**769**	**64**	**-**	**28**	**40**	**85.99%**

Berdasarkan tabel diperoleh gambaran konsistensi jumlah program antara RKPD dan APBD sebagai berikut:

a. Terdapat 27 bidang urusan yg memiliki jumlah program yang sama antara RKPD dan APBD (kolom 6 = 0), dan 41 bidang urusan lainnya memiliki perbedaan jumlah program antara RKPD dan APBD (kolom 6 ≠ 0)
b. Rincian perbedaan jumlah program pada 41 bidang urusan tersebut adalah sebagai berikut:
   - 28 bidang urusan memiliki program dalam RKPD yang tidak terdapat dalam APBD (kolom 3 – kolom 5 ≠ 0), tetapi seluruh program dalam APBD ada dalam RKPD (kolom 4 – kolom 5 = 0)
   - Tidak terdapat (0) bidang urusan memuat program dalam RKPD sama dengan yang ada dalam APBD (kolom 3 – kolom 5 = 0) tetapi memuat program dalam APBD yg tidak ada dalam RKPD (kolom 4 – kolom 5 ≠ 0)
   - 13 bidang urusan memiliki program dalam RKPD tetapi tidak terdapat dalam APBD (kolom 3 – kolom 5 ≠ 0) dan juga memuat program dalam APBD tetapi tidak terdapat dalam RKP (kolom 4 – kolom 5 ≠ 0)
c. Jumlah keseluruhan program yang diusulkan oleh 68 SKPD pada RKPD Tahun 2016 terakumulasi atas jumlah keseluruhan program pada SKPD Kota Balikpapan sejumlah 806 program. Jumlah Program pada APBD (Perubahan) sejumlah 796 Program dengan kesesuaian program antar dokumen RKPD dan APBD sejumlah 769 Program, artinya terdapat 37 Program pada RKPD yang tidak termuat pada SKPD Kota Balikpapan. Berikut digambarkan pada hubungan RKPD dan APBD Tahun 2016.

Gambar 2.23
Irisan Konsistensi program antara RKPD dan APBD Tahun 2016

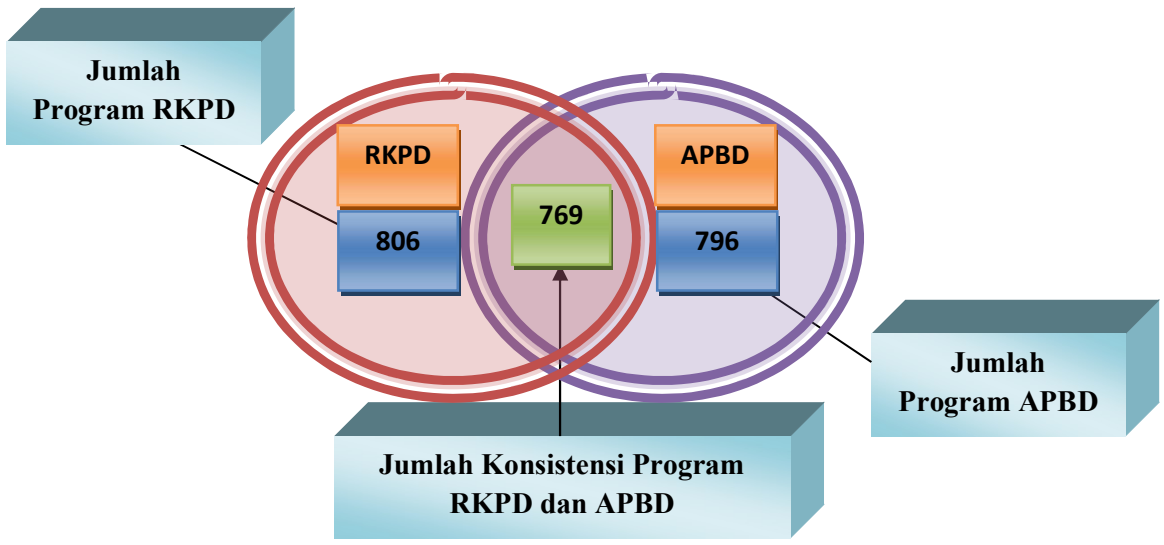

d. Selanjutnya, baris jumlah pada kolom 6, terdapat 64 program yg tidak sama antara RKPD dan APBD. Dari jumlah tersebut, 31 program ada dalam RKPD tetapi tidak ada dalam APBD (jumlah kolom 3 – jumlah kolom 5), dan 3 program yg dimuat dalam APBD tetapi tidak ada dalam RKPD (jumlah kolom 4 – jumlah kolom 5).

e. Jumlah SKPD yang memiliki jumlah program yang sama antar dokumen sebanyak 28 SKPD atau 41,18%, sedangkan jumlah SKPD yang tidak memiliki jumlah program yang sama sejumlah 41 SKPD atau 58,82%.

f. Persentase konsistensi berdasarkan jumlah program pada 68 SKPD di kolom 13. Bahwa tingkat pencapaian konsistensi terukur atas Nilai Rata-rata Sebesar 85,99%.

g. Terdapat 28 SKPD yang memenuhi tingkat capaian konsistensi program sebesar 100% sebagai berikut:

1. RSUD Balikpapan
2. Dinas Pekerjaan Umum
3. Dinas Tata Kota dan Perumahan
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan KB
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

9. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
10. Satuan Polisi Pamong Praja
11. Dinas Pendapatan Daerah
12. Kec.Balikpapan Tengah
13. Kec.Balikpapan Selatan
14. Kel. Teritip
15. Kel. Baru Ilir
16. Kel. Baru Tengah
17. Kel. Baru Ulu
18. Kel. Margasari
19. Kel. Baru Ampar
20. Kel. Gn. Samarinda
21. Kel. Karang Joang
22. Kel. Gn. Samarinda Baru
23. Kel. Graha Indah
24. Kel. Gn. Sari Ullu
25. Kel. Sumber Rejo
26. Kel. Sepinggan Baru
27. Kantor Arsip dan Perpustakaan
28. Dinas Pasar

Sedangkan untuk SKPD yang memiliki tingkat konsistensi (%) program antar Dokumen RKPD terhadap Dokumen APBD yang kurang tercapai (<100%) sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. RSKB.Sayang Ibu
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5. Dinas Perhubungan
6. Badan Lingkungan Hidup
7. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
8. Kantor Kesbang dan Politik
9. Sekretariat Daerah
10. Sekretariat DPRD
11. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
12. Badan Kepegawaian Daerah
13. Inspektorat

14. Kec.Balikpapan Timur
15. Kec.Balikpapan Barat
16. Kec.Balikpapan Utara
17. Kec.Balikpapan Kota
18. Kel. Manggar
19. Kel. Lamaru
20. Kel. Manggar Baru
21. Kel. Kariangau
22. Kel. Margo Mulyo
23. Kel. Muara Rapak
24. Kel. Gn. Sari Ilir
25. Kel. Karang Rejo
26. Kel. Karang Jati
27. Kel. Mekar Sari
28. Kel. Sepinggan
29. Kel. Gn. Bahagia
30. Kel. Sepinggan Raya
31. Kel. Sungai Nangka
32. Kel. Damai Baru
33. Kel. Damai Bahagia
34. Kel. Prapatan
35. Kel. Telaga Sari
36. Kel. Klandasan Ulu
37. Kel. Klandasan Ilir
38. Kel. Damai
39. Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
40. Disporabudpar

Berdasarkan Tabel 2.73 diatas, adapun hasil pendistribusian tingkat capaian konsistensi program RKPD sebagai berikut:

1. Tingkat capaian 91% - 100% terdapat 39 SKPD dengan predikat konsistensi “SANGAT TINGGI”.
2. Tingkat capaian 90% - 76% terdapat 24 SKPD dengan predikat konsistensi “TINGGI”.
3. Tingkat capaian 75% - 66% terdapat 2 SKPD dengan predikat konsistensi “SEDANG”.
4. Tingkat capaian 65% - 51% terdapat 3 SKPD dengan predikat konsistensi “RENDAH”.

5. Tingkat capaian 50% - 0% tidak terdapat (0) SKPD dengan predikat konsistensi “SANGAT RENDAH”.

Terkait dengan hasil pendistribusian tingkat capaian konsistensi program RKPD terhadap 68 SKPD Kota Balikpapan, berikut penyajian dalam bentuk gambar grafik histogram dibawah ini.

Grafik 2.24

Grafik Histogram Konsistensi Program APBD terhadap RKPD Tahun 2016

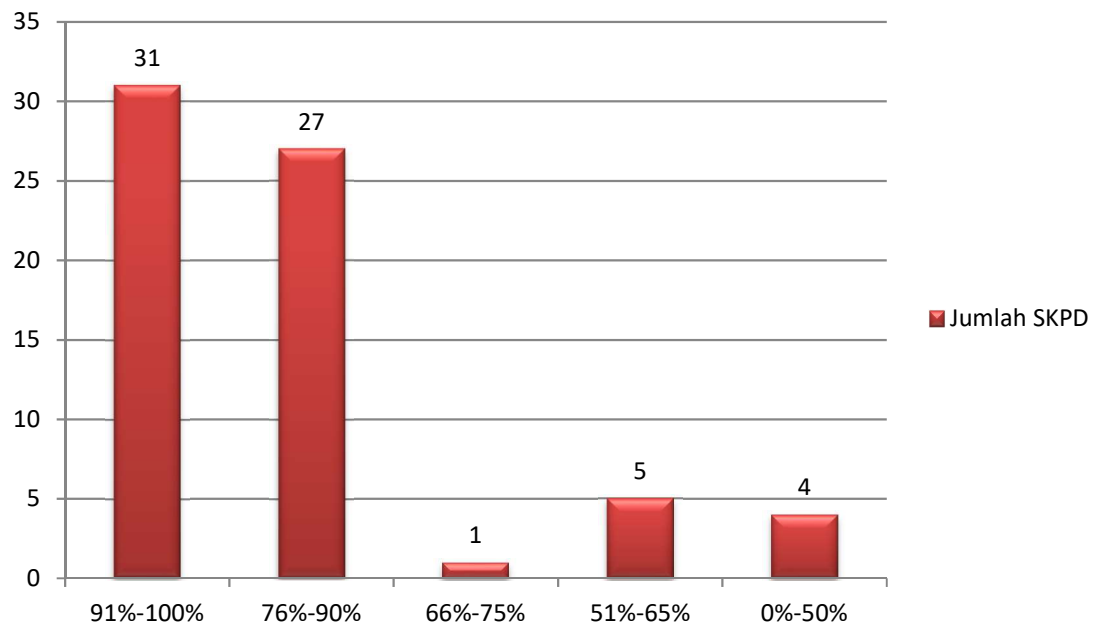

2) Evaluasi Konsistensi Kegiatan RKPD Terhadap APBD Kota Balikpapan Tahun 2016

Berdasarkan pengumpulan dan pengolahan data diperoleh perbandingan antara jumlah kegiatan, konsistensi makna indikator kegiatan, dan kesesuaian angka target kegiatan antara RKPD dengan APBD sebagai berikut:

Tabel 2.72
Konsistensi Jumlah, Indikator dan Target Kegiatan RKPD dan APBD Kota Balikpapan Tahun 2016 (Setelah Perubahan)

No	Urusan / Bidang Urusan	Jumlah Kegiatan				Konsitensi		Evaluasi Konsistensi	
		RKPD	APBD	Sesuai	Selisih	Indikator	Target	Jumlah Kegiatan	Capaian Perenc. (%)

No	Urusan / Bidang Urusan	Jumlah Kegiatan				Konsitensi		Evaluasi Konsistensi	
		RKPD	APBD	Sesuai	Selisih	Indi kator	Target	Jumlah Kegiatan	Capaian Perenc. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dinas Pendidikan	327	330	327	3	100	100	3 Kegiatan APBD Tidak Konsisten Terhadap RKPD	99,08%
2	Dinas Kesehatan	166	137	166	29	26	26	29 Kegiatan RKPD Tidak Terakomodir Pada APBD	82,53%
3	RSKB.Sayang Ibu	25	26	25	1	4	8	1 Kegiatan APBD	96,00%
4	RSUD Balikpapan	41	41	41	-	40	29	Konsistensi Dokumen RKPD Tercapai	100%
5	Dinas Pekerjaan Umum	81	87	81	6	12	29	6 Kegiatan APBD Tidak Konsisten Terhadap RKPD	92,59%
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	36	36	36	-	0	0	Konsistensi Dokumen RKPD Tercapai	100%
7	Dinas Tata Kota dan Perumahan	39	39	39	-	0	0	Konsistensi Dokumen RKPD Tercapai	100%
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	55	55	55	-	1	1	Konsistensi Dokumen RKPD Tercapai	100%
9	Dinas Perhubungan	49	48	48	1	19	28	1 Kegiatan RKPD Tidak Terakomodir Pada APBD	95,88%
10	Badan Lingkungan Hidup	58	59	58	1	2	2	1 Kegiatan APBD Tidak Konsisten Terhadap RKPD	98,28%

No	Urusan / Bidang Urusan	Jumlah Kegiatan				Konsitensi		Evaluasi Konsistensi	
		RKPD	APBD	Sesuai	Selisih	Indi kator	Target	Jumlah Kegiatan	Capaian Perenc. (%)
11	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman	31	32	31	1	0	0	1 Kegiatan APBD Tidak Konsisten Terhadap RKPD	96,77%
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	31	31	31	-	0	0	Konsistensi Dokumen RKPD Tercapai	100%
13	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perbendaharaan Perempuan dan KB	51	50	50	1	0	0	1 Kegiatan RKPD Tidak Terakomodir Pada APBD	96,04%
14	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	68	71	68	3	0	0	3 Kegiatan APBD Tidak Konsisten Terhadap RKPD	95,59%
15	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	54	54	54	-	5	5	Konsistensi Dokumen RKPD Tercapai	100%
16	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	32	32	32	-	5	5	Konsistensi Dokumen RKPD Tercapai	100%
17	Kantor Kesbang dan Politik	31	33	31	2	0	0	2 Kegiatan APBD Tidak Konsisten Terhadap RKPD	93,55%
18	Satuan Polisi Pamong Praja	29	29	29	-	0	0	Konsistensi Dokumen RKPD Tercapai	100%
19	Sekretariat Daerah	134	134	134	-	5	5	Konsistensi Dokumen RKPD	100%

No	Urusan / Bidang Urusan	Jumlah Kegiatan				Konsitensi		Evaluasi Konsistensi	
		RKPD	APBD	Sesuai	Selisih	Indi kator	Target	Jumlah Kegiatan	Capaian Perenc. (%)
								Tercapai	
20	Sekretariat DPRD	36	35	35	1	0	0	1 Kegiatan RKPD Tidak Terakomodir Pada APBD	94,37%
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	47	47	47	-	0	0	Konsistensi Dokumen RKPD Tercapai	100%
22	Badan Kepegawaian Daerah	42	43	42	1	0	0	1 Kegiatan APBD Tidak Konsisten Terhadap RKPD	97,62%
23	Inspektorat	32	32	32	-	0	0	Konsistensi Dokumen RKPD Tercapai	100%
24	Dinas Pendapatan Daerah	32	32	32	-	0	0	Konsistensi Dokumen RKPD Tercapai	100%
25	Kec.Balikpapan Timur	44	45	44	1	1	1	1 Kegiatan APBD Tidak Konsisten Terhadap RKPD	97,73%
26	Kec.Balikpapan Barat	34	35	34	1	0	0	1 Kegiatan APBD Tidak Konsisten Terhadap RKPD	97,06%
27	Kec.Balikpapan Utara	39	41	39	2	1	1	2 Kegiatan APBD Tidak Konsisten Terhadap RKPD	94,87%
28	Kec.Balikpapan Tengah	37	37	37	-	0	0	Konsistensi Dokumen RKPD Tercapai	100%
29	Kec.Balikpapan	39	39	39	-	1	1	Konsistensi Dokumen RKPD	100%

No	Urusan / Bidang Urusan	Jumlah Kegiatan				Konsitensi		Evaluasi Konsistensi	
		RKPD	APBD	Sesuai	Selisih	Indi kator	Target	Jumlah Kegiatan	Capaian Perenc. (%)
	Selatan							Tercapai	
30	Kec.Balikpapan Kota	38	38	38	-	0	0	Konsistensi Dokumen RKPD Tercapai	100%
31	Kel. Manggar	32	32	32	-	1	1	Konsistensi Dokumen RKPD Tercapai	100%
32	Kel. Lamaru	33	32	32	1	1	1	1 Kegiatan RKPD Tidak Terakomodir Pada APBD	93,84%
33	Kel. Teritip	33	33	33	-	2	2	Konsistensi Dokumen RKPD Tercapai	100.00%
34	Kel. Manggar Baru	34	33	33	1	1	1	1 Kegiatan RKPD Tidak Terakomodir Pada APBD	94,03%
35	Kel. Baru Ilir	32	32	32	-	1	1	Konsistensi Dokumen RKPD Tercapai	100%
36	Kel. Baru Tengah	33	32	32	1	1	1	1 Kegiatan RKPD Tidak Terakomodir Pada APBD	93,84%
37	Kel. Baru Ulu	31	31	31	-	1	1	Konsistensi Dokumen RKPD Tercapai	100%
38	Kel. Kariangau	32	31	31	1	1	1	1 Kegiatan RKPD Tidak Terakomodir Pada APBD	93,65%
39	Kel. Margo Mulyo	35	36	35	1	1	1	1 Kegiatan APBD Tidak Konsisten Terhadap RKPD	97.14%

No	Urusan / Bidang Urusan	Jumlah Kegiatan				Konsitensi		Evaluasi Konsistensi	
		RKPD	APBD	Sesuai	Selisih	Indi kator	Target	Jumlah Kegiatan	Capaian Perenc. (%)
40	Kel. Margasari	31	30	30	1	1	1	1 Kegiatan RKPD Tidak Terakomodir Pada APBD	93.44%
41	Kel. Batu Ampar	35	35	35	-	1	1	Konsistensi Dokumen RKPD Tercapai	100%
42	Kel. Gn. Samarinda	32	32	32	-	1	1	Konsistensi Dokumen RKPD Tercapai	100%
43	Kel. Karang Joang	31	31	31	-	1	1	Konsistensi Dokumen RKPD Tercapai	100%
44	Kel. Muara Rapak	34	34	34	-	1	1	Konsistensi Dokumen RKPD Tercapai	100%
45	Kel. Gn. Samarinda Baru	33	33	33	-	1	1	Konsistensi Dokumen RKPD Tercapai	100%
46	Kel. Graha Indah	33	33	33	-	1	1	Konsistensi Dokumen RKPD Tercapai	100%
47	Kel. Gn. Sari Ullu	30	30	30	-	1	1	Konsistensi Dokumen RKPD Tercapai	100%
48	Kel. Gn. Sari Ilir	31	32	31	1	1	1	1 Kegiatan APBD Tidak Konsisten Terhadap RKPD	96,77%
49	Kel. Karang Rejo	28	27	27	1	1	1	1 Kegiatan RKPD Tidak Terakomodir Pada APBD	92,72%
50	Kel. Karang Jati	33	33	33	-	1	1	Konsistensi Dokumen RKPD Tercapai	100%

No	Urusan / Bidang Urusan	Jumlah Kegiatan				Konsitensi		Evaluasi Konsistensi		
		RKPD	APBD	Sesuai	Selisih	Indi kator	Target	Jumlah Kegiatan		Capaian Perenc. (%)
51	Kel. Mekar Sari	32	30	30	2	1	1	2	Kegiatan RKPD Tidak Terakomodir Pada APBD	87,08%
52	Kel. Sumber Rejo	32	31	31	1	1	1	1	Kegiatan RKPD Tidak Terakomodir Pada APBD	93,65%
53	Kel. Sepinggan	33	34	33	1	1	1	1	Kegiatan APBD Tidak Konsisten Terhadap RKPD	96,97%
54	Kel. Gn. Bahagia	33	34	33	1	1	1	1	Kegiatan APBD Tidak Konsisten Terhadap RKPD	96,97%
55	Kel. Sepinggan Baru	33	32	32	1	1	1	1	Kegiatan APBD Tidak Konsisten Terhadap RKPD	93,84%
56	Kel. Sepinggan Raya	32	34	32	2	1	1	2	Kegiatan APBD Tidak Konsisten Terhadap RKPD	93,75%
57	Kel. Sungai Nangka	34	34	34	-	1	1	Konsistensi Dokumen RKPD Tercapai		100%
58	Kel. Damai Baru	31	32	31	1	1	1	1	Kegiatan APBD Tidak Konsisten Terhadap RKPD	96,77%
59	Kel. Damai Bahagia	33	33	33	-	1	1	Konsistensi Dokumen RKPD Tercapai		100%

No	Urusan / Bidang Urusan	Jumlah Kegiatan				Konsitensi		Evaluasi Konsistensi	
		RKPD	APBD	Sesuai	Selisih	Indi kator	Target	Jumlah Kegiatan	Capaian Perenc. (%)
60	Kel. Prapatan	35	35	35	-	1	1	Konsistensi Dokumen RKPD Tercapai	100%
61	Kel. Telaga Sari	34	34	34	-	2	2	Konsistensi Dokumen RKPD Tercapai	100%
62	Kel. Klandasan Ulu	34	34	34	-	1	1	Konsistensi Dokumen RKPD Tercapai	100%
63	Kel. Klandasan Ilir	33	23	23	10	1	1	10 Kegiatan RKPD Tidak Terakomodir Pada APBD	26,22%
64	Kel. Damai	34	33	33	1	1	1	1 Kegiatan RKPD Tidak Terakomodir Pada APBD	94,03%
65	Kantor Arsip dan Perpustakaan	33	33	33	-	1	1	Konsistensi Dokumen RKPD Tercapai	100%
66	Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan	71	71	71	-	0	0	Konsistensi Dokumen RKPD Tercapai	100%
67	Disporabudpar	71	72	71	1	0	0	1 Kegiatan RKPD Tidak Terakomodir Pada APBD	98,59%
68	Dinas Pasar	29	29	29	-	0	0	Konsistensi Dokumen RKPD Tercapai	100%
	Jumlah	**3.071**	**3.048**	**3.047**	**83**	**259**	**278**		**99,75%**

Berdasarkan tabel diatas, adapun hasil evaluasi sebagai berikut :

a. Terdapat 35 bidang urusan yang memiliki jumlah dan judul kegiatan yang sama antara RKPD dan APBD (kolom 6 = 0), dan 33 bidang urusan lainnya memiliki perbedaan jumlah dan judul kegiatan antara RKPD dan APBD (kolom 6 ≠ 0).

b. Rincian perbedaan kegiatan antara RKPD dan APBD pada 33 bidang urusan tersebut adalah:
   1. 14 bidang urusan memuat kegiatan dalam RKPD yang tidak ada dalam APBD (kolom 3 – kolom 5 ≠ 0), tetapi seluruh kegiatan dalam APBD ada dalam RKPD (kolom 4 – kolom 5 = 0).
   2. 19 bidang urusan memuat kegiatan dalam RKPD tetapi tidak ada dalam APBD (kolom 3 – kolom 5 ≠ 0) dan juga memuat kegiatan yang ada dalam APBD tetapi tidak ada dalam RKPD (kolom 4 – kolom 5 ≠ 0).

c. Total kegiatan RKPD adalah 3.071 (jumlah pada kolom 3) dan total kegiatan APBD adalah 3.048 (jumlah pada kolom 4). Dari jumlah kegiatan pada kedua dokumen tersebut, terdapat 3.047 kegiatan yang sama-sama ada dalam kedua dokumen (jumlah pada kolom 5). Berikut digambarkan pada hubungan RKPD dan APBD Tahun 2016.

Gambar 2.25
Irisan Konsistensi Kegiatan antara RKPD dan APBD Tahun 2016

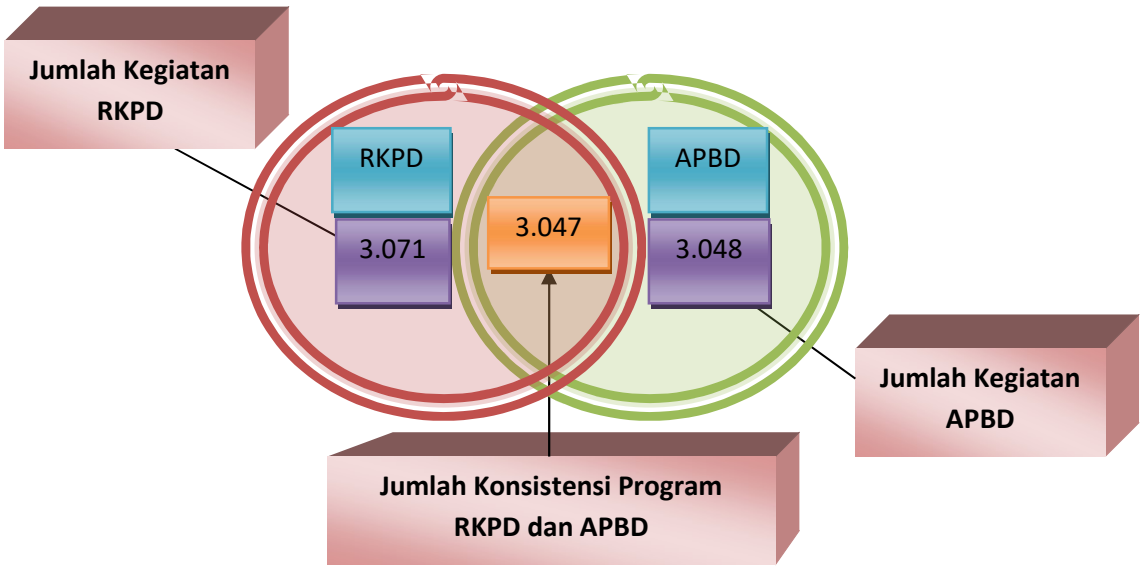

d. Selanjutnya, pada baris jumlah pada kolom 6, terdapat 83 kegiatan yang tidak sama antara RKPD dan APBD. Dari jumlah tersebut, terdiri dari 24 kegiatan yang ada dalam RKPD tetapi tidak ada dalam APBD (jumlah kolom 3 – kolom 5), dan 79 kegiatan yang ada dalam APBD tetapi tidak ada dalam RKPD (jumlah kolom 4 – kolom 5).

e. Capaian konsistensi perencanaan kegiatan APBD terhadap RKPD Kota Balikpapan sebesar 99,75% (jumlah rata-rata hitung pada kolom10).

f. Terdapat 35 SKPD yang memenuhi tingkat capaian konsistensi program sebesar 100% sebagai berikut:
   1. RSUD Kota Balikpapan
   2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
   3. Dinas Tata Kota dan Perumahan

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
7. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
8. Satuan Polisi Pamong Praja
9. Sekretariat Daerah
10. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
11. Inspektorat Kota
12. Dinas Pendapatan Daerah
13. Kec.Balikpapan Tengah
14. Kec.Balikpapan Selatan
15. Kec.Balikpapan Kota
16. Kel. Manggar
17. Kel. Teritip
18. Kel. Baru Ilir
19. Kel. Baru Ulu
20. Kel. Batu Ampar
21. Kel. Gn. Samarinda
22. Kel. Karang Joang
23. Kel. Muara Rapak
24. Kel. Gn. Samarinda Baru
25. Kel. Graha Indah
26. Kel. Gn. Sari Ullu
27. Kel. Karang Jati
28. Kel. Sungai Nangka
29. Kel. Damai Bahagia
30. Kel. Prapatan
31. Kel. Telaga Sari
32. Kel. Klandasan Ulu
33. Kantor Arsip dan Perpustakaan
34. Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan
35. Dinas Pasar

Sedangkan untuk SKPD yang memiliki tingkat konsistensi (%) kegiatan antar Dokumen RKPD terhadap Dokumen APBD yang kurang tercapai (<100%) sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan

3. RSKB Sayang Ibu
4. Dinas Pekerjaan Umum
5. Dinas Perhubungan
6. Badan Lingkungan Hidup
7. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman
8. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
9. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
10. Kantor Kesbang dan Politik
11. Sekretariat DPRD
12. Badan Kepegawaian Daerah
13. Kec.Balikpapan Timur
14. Kec.Balikpapan Barat
15. Kec.Balikpapan Utara
16. Kel. Lamaru
17. Kel. Manggar Baru
18. Kel. Baru Tengah
19. Kel. Kariangau
20. Kel. Margo Mulyo
21. Kel. Margasari
22. Kel. Gn. Sari Ilir
23. Kel. Karang Rejo
24. Kel. Mekar Sari
25. Kel. Sumber Rejo
26. Kel. Sepinggan
27. Kel. Gn. Bahagia
28. Kel. Sepinggan Baru
29. Kel. Sepinggan Raya
30. Kel. Damai Baru
31. Kel. Klandasan Ilir
32. Kel. Damai
33. Disporabudpar

g. Jumlah SKPD dengan Konsistensi Perencanaan Kegiatan pada RKPD terhadap APBD sejumlah 35 SKPD. Sedangkan untuk SKPD tidak konsisten terhadap perencanaan sejumlah 33 SKPD.

h. Berdasarkan Tabel 3.9 diatas, adapun hasil pendistribusian tingkat capaian konsistensi Kegiatan RKPD Terhadap APBD pada Kolom 10 sebagai berikut:

- Tingkat capaian 91% - 100% terdapat 65 SKPD dengan predikat konsistensi “SANGAT TINGGI”.
- Tingkat capaian 90% - 76% terdapat 2 SKPD dengan predikat konsistensi “TINGGI”.
- Tingkat capaian 75% - 66% tidak terdapat (0) SKPD dengan predikat konsistensi “SEDANG”.
- Tingkat capaian 65% - 51% tidak terdapat (0) SKPD dengan predikat konsistensi “RENDAH”.
- Tingkat capaian 50% - 0% terdapat 1 SKPD dengan predikat konsistensi “SANGAT RENDAH”.

Berdasarkan capaian konsistensi Kegiatan RKPD Terhadap APBD pada huruf a samnai dengan huruf e tersebut disajikan pada gambar grafik sebagai berikut.

Gambar 2.26
Grafik Histogram Konsistensi Kegiatan APBD terhadap RKPD Tahun 2016

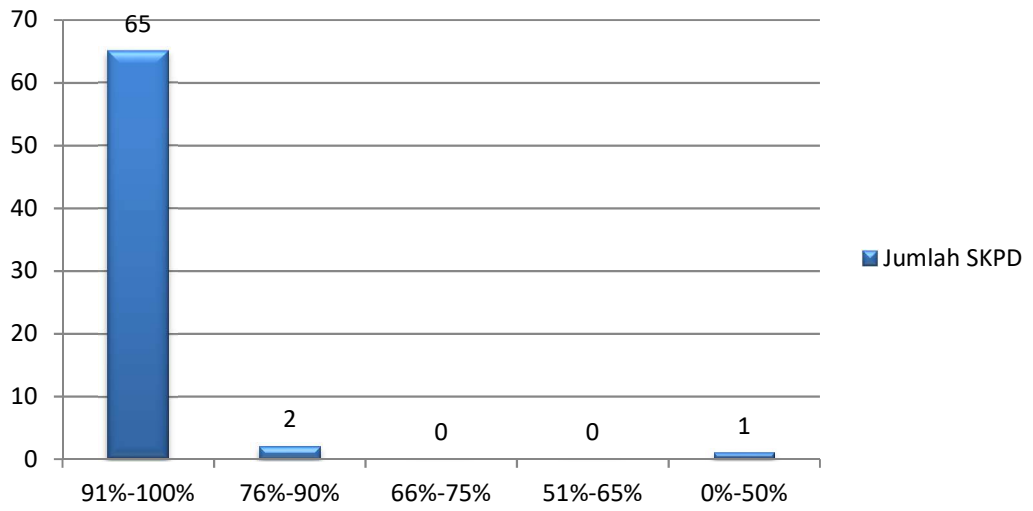

3) Konsistensi Pagu Indikatif dan Pagu Anggaran Program RKPD dengan pagu anggaran APBD

Berdasarkan data yang telah diolah dan disajikan, diperoleh perbandingan antara pagu indikatif RKPD dengan pagu anggaran APBD sebagai berikut:

Tabel 2.74
Konsistensi Pagu Indikatif dan Pagu Anggaran Program RKPD dan APBD
Kota Balikpapan Tahun 2016 Setelah Perubahan

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN	Jumlah Pagu RKPD (Rp.)	Jumlah Pagu APBD Perubahan (Rp.)	Selisih	Konsitensi	
					Ya	Tidak
I.	**Urusan Wajib**					
1	Dinas Pendidikan	261,402,362,500	196,667,508,872	(64,734,853,628)		●
2	Dinas Kesehatan	106,648,191,500	76,091,237,799	(30,556,953,701)		●
3	RSKB.Sayang Ibu	19,598,312,000	15,708,023,750	(3,890,288,250)		●
4	RSUD Kota Balikpapan	102,982,550,000	88,220,874,250	(14,761,675,750)		●
5	Dinas Pekerjaan Umum	703,034,544,394	543,945,512,458	(159,089,031,936)		●
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23,445,678,950	15,946,678,270	(7,499,000,680)		●
7	Dinas Tata Kota dan Perumahan	26,141,268,000	9,880,713,060	(16,260,554,940)		●
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	21,374,138,200	13,288,930,075	(8,085,208,125)		●
9	Dinas Perhubungan	23,797,308,000	13,201,976,680	(10,595,331,320)		●
10	Badan Lingkungan Hidup	36,729,207,250	14,214,474,219	(22,514,733,031)		●
11	Dinas Kebersihan, Pertamanan & Permakaman	85,073,164,850	72,485,130,105	(12,588,034,745)		●
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	7,679,983,000	4,017,117,730	(3,662,865,270)		●
13	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perbendaharaan Perempuan dan KB	14,004,806,000	7,065,491,260	(6,939,314,740)		●
14	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	16,935,245,186	7,577,432,700	(9,357,812,486)		●
15	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	27,821,099,425	10,842,189,907	(16,978,909,518)		●
16	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	9,324,516,300	5,169,475,400	(4,155,040,900)		●
17	Kantor Kesbang dan Politik	4,233,924,000	2,392,189,500	(1,841,734,500)		●
18	Satuan Polisi Pamong Praja	9,169,050,350	5,717,743,800	(3,451,306,550)		●
19	Sekretariat Daerah	336,340,520,010	245,521,691,877	(90,818,828,133)		●
20	Sekretariat DPRD	40,860,135,900	46,128,886,875	5,268,750,975		●
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	23,068,142,800	13,830,444,984	(9,237,697,816)		●
22	Badan Kepegawaian Daerah	26,388,122,100	12,677,040,414	(13,711,081,686)		●
23	Inspektorat	7,145,225,940	4,443,521,521	(2,701,704,419)		●
24	Dinas Pendapatan Daerah	9,710,142,350	6,170,696,420	(3,539,445,930)		●
25	Kec.Balikpapan Timur	4,552,096,150	3,808,643,400	(743,452,750)		●
26	Kec.Balikpapan Barat	3,811,870,500	2,807,936,000	(1,003,934,500)		●
27	Kec.Balikpapan Utara	3,638,514,900	2,684,015,600	(954,499,300)		●
28	Kec.Balikpapan Tengah	3,733,177,575	2,887,054,380	(846,123,195)		●
29	Kec.Balikpapan Selatan	4,018,525,025	2,910,321,575	(1,108,203,450)		●

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN	Jumlah Pagu RKPD (Rp.)	Jumlah Pagu APBD Perubahan (Rp.)	Selisih	Konsitensi	
					Ya	Tidak
30	Kec.Balikpapan Kota	4,541,568,200	3,559,841,700	(981,726,500)		●
31	Kel. Manggar	2,319,923,100	1,894,038,250	(425,884,850)		●
32	Kel. Lamaru	1,832,401,600	1,436,023,900	(396,377,700)		●
33	Kel. Teritip	1,716,950,900	1,128,898,500	(588,052,400)		●
34	Kel. Manggar Baru	1,970,947,500	1,970,947,500	-		●
35	Kel. Baru Ilir	1,961,127,600	1,552,286,100	(408,841,500)		●
36	Kel. Baru Tengah	1,840,413,000	1,510,205,500	(330,207,500)		●
37	Kel. Baru Ulu	1,560,201,110	1,292,466,610	(267,734,500)		●
38	Kel. Kariangau	1,241,705,600	803,145,600	(438,560,000)		●
39	Kel. Margo Mulyo	2,124,690,000	1,785,550,000	(339,140,000)		●
40	Kel. Margasari	1,649,904,200	1,236,844,700	(413,059,500)		●
41	Kel. Baru Ampar	2,250,475,450	1,775,480,450	(474,995,000)		●
42	Kel. Gn. Samarinda	2,061,952,500	1,915,308,500	(146,644,000)		●
43	Kel. Karang Joang	1,925,272,500	1,925,272,500	-		●
44	Kel. Muara Rapak	2,134,151,950	1,663,681,500	(470,470,450)		●
45	Kel. Gn. Samarinda Baru	1,815,546,200	1,421,285,250	(394,260,950)		●
46	Kel. Graha Indah	2,088,774,998	1,707,518,538	(381,256,460)		●
47	Kel. Gn. Sari Ullu	1,368,126,000	890,353,000	(477,773,000)		●
48	Kel. Gn. Sari Ilir	2,031,708,000	1,592,140,500	(439,567,500)		●
49	Kel. Karang Rejo	1,998,100,900	1,609,593,150	(388,507,750)		●
50	Kel. Karang Jati	1,495,467,200	912,109,400	(583,357,800)		●
51	Kel. Mekar Sari	1,924,654,850	1,513,125,350	(411,529,500)		●
52	Kel. Sumber Rejo	1,664,179,250	1,347,534,000	(316,645,250)		●
53	Kel. Sepinggan	2,193,194,300	1,746,641,800	(446,552,500)		●
54	Kel. Gn. Bahagia	1,930,559,700	1,527,729,700	(402,830,000)		●
55	Kel. Sepinggan Baru	2,166,592,500	1,645,089,600	(521,502,900)		●
56	Kel. Sepinggan Raya	1,918,422,700	1,450,071,250	(468,351,450)		●
57	Kel. Sungai Nangka	2,015,750,500	1,599,422,400	(416,328,100)		●
58	Kel. Damai Baru	1,782,988,750	1,290,981,869	(492,006,881)		●
59	Kel. Damai Bahagia	1,986,161,500	1,589,359,500	(396,802,000)		●
60	Kel. Prapatan	1,743,409,900	1,362,567,900	(380,842,000)		●
61	Kel. Telaga Sari	1,589,150,450	1,252,012,950	(337,137,500)		●
62	Kel. Klandasan Ulu	2,052,699,000	1,632,409,600	(420,289,400)		●
63	Kel. Klandasan Ilir	2,087,864,100	1,707,694,600	(380,169,500)		●
64	Kel. Damai	1,934,153,500	1,466,806,000	(467,347,500)		●
65	Kantor Arsip dan Perpustakaan	10,524,582,123	6,606,311,543	(3,918,270,580)		●
II	**Urusan Pilihan**					
66	DPKP	30,976,049,072	17,666,937,164	(13,309,111,908)		●
67	DISPORABUDPAR	28,172,220,650	11,635,645,818	(16,536,574,832)		●

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN	Jumlah Pagu RKPD (Rp.)	Jumlah Pagu APBD Perubahan (Rp.)	Selisih	Konsitensi	
					Ya	Tidak
68	DINAS PASAR	14,551,287,210	8,477,874,556	(6,073,412,654)		●
	JUMLAH	**2,115,805,151,718**	**1,545,404,159,629**	**(570,400,992,089)**		●

Berdasarkan tabel 2.74 Jumlah pagu untuk RKPD Tahun 2016 sebesar Rp.2.115.805.151.718 dan pagu APBD Perubahan Tahun 2016 sebesar Rp.1.545.404.156.629 dengan selisih sejumlah minus (-) Rp.570.400.992.089.

Konsistensi antar pagu indikatif pada RKPD dan APBD Perubahan khususnya belanja langsung 67 SKPD Kota Balikpapan Tidak Tercapai Atau dapat dikatakan nilai konsistensi Sama Dengan 0% sedangkan SKPD yang konsisten antar dokumen RKPD dan APBD-P adalah Kelurahan Manggar Baru. Berikut grafik konsistensi dan tidak konsistensi pada penganggaran antar dokumen RKPD dan APBD Tahun 2016.

Grafik 2.27
Konsistensi Anggaran RKPD terhadap APBD Kota Balikpapan Tahun 2016

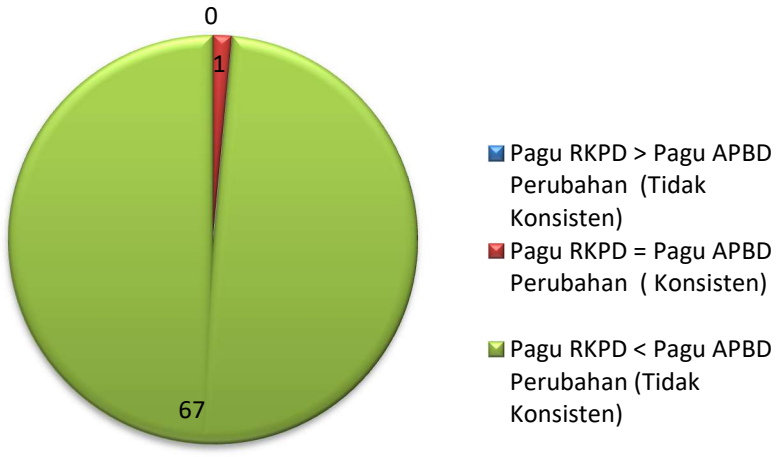

4) Konsistensi Program pada RKPD terhadap RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016

Berdasarkan dokumen RKPD Tahun 2016 jumlah Program yang dilaksanakan sejumlah 806 Program dan Program Prioritas sejumlah 75 Program. Sehubungan dengan program prioritas yang disusun pada RKPD Tahun 2016 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Balikpapan periode pelaksanaan tahun ke 5. Untuk menilai penjabaran dari RKPD Kota Balikpapan Tahun 2016 memiliki

keselarasan terhadap RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 berikut tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel 2.75
Konsistensi Jumlah Program RKPD Terhadap RPJMD Kota Balikpapan
Tahun 2011-2016

No	Urusan / Bidang Urusan	Jumlah Program				Evaluasi Konsitensi	Capaian Konsitensi (%)
		RPJMD	RKPD	Sesuai	Selisih		
I.	**URUSAN WAJIB**						
1.01.01	Dinas Pendidikan	12	12	12	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.02.01	Dinas Kesehatan	14	12	12	2	-2 Program RPJMD	86%
1.02.02	RSKB.Sayang Ibu	12	7	7	5	-2 Program RPJMD	58%
1.02.03	RSUD Balikpapan	12	10	10	2	-2 Program RPJMD	83%
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	8	14	8	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.04.01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	7	3	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.05.01	Dinas Tata Kota dan Perumahan	5	13	5	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13	9	13	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.07.07	Dinas Perhubungan	7	17	7	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.08.01	Badan Lingkungan Hidup	8	11	8	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.08.02	Dinas Kebersihan, Pertamanan & Permakaman	6	9	6	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.10.01	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	2	6	2	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.12.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan KB	11	14	11	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.14.01	Dinas Tenaga Kerja & Sosial	9	15	9	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.15.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan & Koperasi	14	18	14	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.16.01	Badan Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu	8	10	8	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.09.02	Kantor Kesbang & Politik	8	11	5	3	-3 Program RPJMD	63%
1.19.02	Satuan Polisi Pamong Praja	7	8	5	2	-1 Program RPJMD	71%

No	Urusan / Bidang Urusan	Jumlah Program				Evaluasi Konsitensi	Capaian Konsitensi (%)
		RPJMD	RKPD	Sesuai	Selisih		
1.19.03	Sekretariat Daerah	23	44	23	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.19.04	Sekretariat Dewan	1	8	1	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.20.05	Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah	2	11	2	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.20.06	Badan Kepegawaian Daerah	3	7	3	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.20.07	Inspektorat	2	8	2	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.20.08	Dinas Pendapatan Daerah	3	9	3	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.20.09	Kec.Balikpapan Timur	2	19	2	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.20.10	Kec.Balikpapan Barat	2	15	2	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.20.11	Kec.Balikpapan Utara	2	17	2	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.20.12	Kec.Balikpapan Tengah	2	15	2	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.20.13	Kec.Balikpapan Selatan	2	18	2	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.20.14	Kec.Balikpapan Kota	2	16	2	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.20.15	Kel. Manggar	2	11	2	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.20.16	Kel. Lamaru	2	10	2	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.20.17	Kel. Teritip	2	11	2	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.20.18	Kel. Manggar Baru	2	12	2	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.20.19	Kel. Baru Ilir	2	10	2	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.20.20	Kel. Baru Tengah	2	10	2	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.20.21	Kel. Baru Ulu	2	10	2	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.20.22	Kel. Kariangau	2	10	2	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.20.23	Kel. Margo Mulyo	2	12	2	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.20.24	Kel. Margasari	2	10	2	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.20.25	Kel. Baru Ampar	2	11	2	0	Konsistensi Tercapai	100%

No	Urusan / Bidang Urusan	Jumlah Program				Evaluasi Konsitensi	Capaian Konsitensi (%)
		RPJMD	RKPD	Sesuai	Selisih		
1.20.26	Kel. Gn. Samarinda	2	10	2	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.20.27	Kel. Karang Joang	2	10	2	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.20.28	Kel. Muara Rapak	2	10	2	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.20.29	Kel. Gn. Samarinda Baru	2	10	2	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.20.30	Kel. Graha Indah	2	10	2	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.20.31	Kel. Gn. Sari Ullu	2	10	2	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.20.32	Kel. Gn. Sari Ilir	2	10	2	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.20.32	Kel. Karang Rejo	2	10	2	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.20.33	Kel. Karang Jati	2	12	2	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.20.34	Kel. Mekar Sari	2	10	2	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.20.35	Kel. Sumber Rejo	2	10	2	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.20.36	Kel. Sepinggan	2	10	2	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.20.37	Kel. Gn. Bahagia	2	10	2	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.20.38	Kel. Sepinggan Baru	2	10	2	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.20.39	Kel. Sepinggan Raya	2	10	2	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.20.40	Kel. Sungai Nangka	2	10	2	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.20.41	Kel. Damai Baru	2	10	2	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.20.42	Kel. Damai Bahagia	2	10	2	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.20.43	Kel. Prapatan	2	11	2	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.20.44	Kel. Telaga Sari	2	11	2	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.20.45	Kel. Klandasan Ulu	2	10	2	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.20.46	Kel. Klandasan Ilir	2	11	2	0	Konsistensi Tercapai	100%
1.20.47	Kel. Damai	2	10	2	0	Konsistensi Tercapai	100%

No	Urusan / Bidang Urusan	Jumlah Program				Evaluasi Konsitensi	Capaian Konsitensi (%)
		RPJMD	RKPD	Sesuai	Selisih		
1.20.48	Kantor Arsip & Perpustakaan	2	9	2	0	Konsistensi Tercapai	100%
II	**URUSAN PILIHAN**						
2.01.01	Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan	11	27	11	0	Konsistensi Tercapai	100%
2.04.01	Disporabudpar	11	18	11	0	Konsistensi Tercapai	100%
2.06.01	Dinas Pasar	4	10	4	0	Konsistensi Tercapai	100%
	JUMLAH	**301**	**806**	**287**	**14**		**97.96%**

Berdasarkan tabel diperoleh gambaran konsistensi jumlah program antara RKPD terhadap RPJMD, diuraikan sebagai berikut :

1. Terdapat 63 bidang urusan yg memiliki jumlah program yg sama antara RKPD dan RPJMD (kolom 6 = 0), dan 5 bidang urusan lainnya memiliki perbedaan jumlah program antara RKPD dan RPJMD (kolom 6 ≠ 0)
2. Rincian perbedaan jumlah program pada 5 bidang urusan tersebut adalah sebagai berikut :

   5 bidang urusan memiliki program dalam RPJMD yang tidak terdapat dalam RKPD (kolom 3 – kolom 5 ≠ 0), tetapi seluruh program dalam RKPD ada dalam RPJMD (kolom 4 – kolom 5 = 0)
3. Jumlah keseluruhan program yang diusulkan oleh SKPD pada RKPD Tahun 2016 terakumulasi atas jumlah keseluruhan program pada SKPD Kota Balikpapan sejumlah 806 program. Jumlah Program pada RPJMD sejumlah 301 Program dengan kesesuaian program antar dokumen RKPD dan APBD sejumlah 287 Program, artinya terdapat 14 Program pada RPJMD yang tidak termuat pada RKPD Kota Balikpapan. Berikut digambarkan pada hubungan RKPD dan APBD Tahun 2016.

Gambar 2.28
Irisan Konsistensi program antara RKPD dan RPJMD Tahun 2016

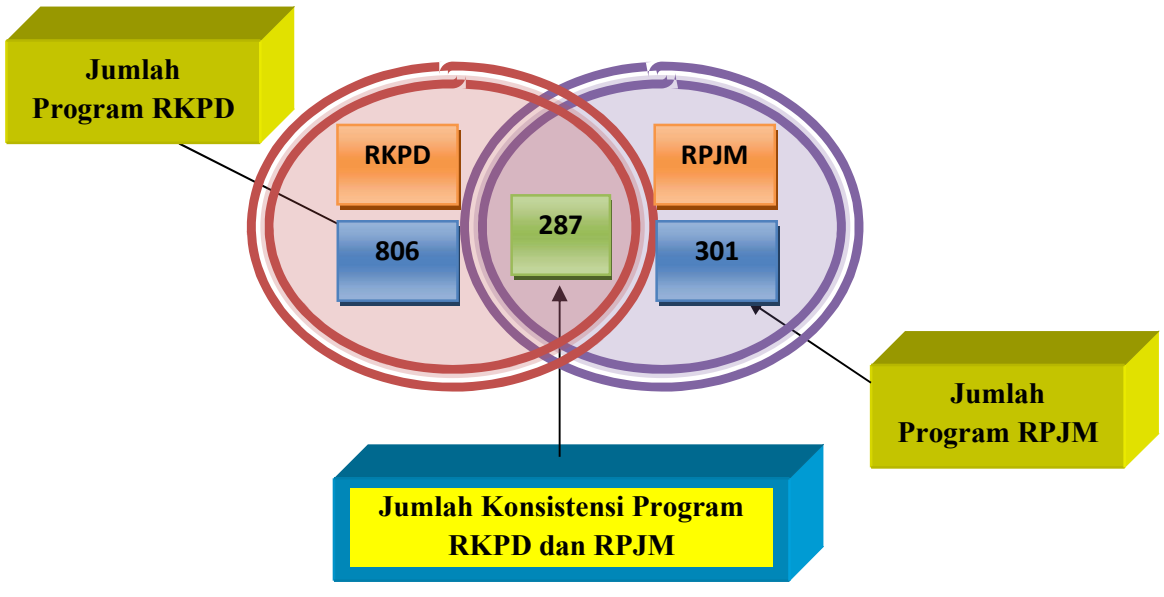

4. Selanjutnya, baris jumlah pada kolom 6, terdapat 5 program yg tidak sama antara RKPD dan APBD. Dari jumlah tersebut, 5 program ada dalam RKPD tetapi tidak ada dalam APBD (jumlah kolom 3 – jumlah kolom 5).
5. Jumlah SKPD yang memiliki jumlah program yang sama antar dokumen sebanyak 63 SKPD atau 92,65%, sedangkan jumlah SKPD yang tidak memiliki jumlah program yang sama sejumlah 5 SKPD atau 7,35%.
6. Terdapat 63 SKPD yang memenuhi tingkat capaian konsistensi program anatar RKPD terhadap RPJMD sebesar 100% sebagai berikut:

Kode	Perangkat Daerah
1.01.01	Dinas Pendidikan
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum
1.04.01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01	Dinas Tata Kota dan Perumahan
1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.07.07	Dinas Perhubungan
1.08.01	Badan Lingkungan Hidup
1.08.02	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman
1.10.01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.12.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan KB
1.14.01	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

Kode	Perangkat Daerah
1.15.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
1.16.01	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
1.19.03	Sekretariat Daerah
1.19.04	Sekretariat Dewan
1.20.05	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.20.06	Badan Kepegawaian Daerah
1.20.07	Inspektorat
1.20.08	Dinas Pendapatan Daerah
1.20.09	Kec.Balikpapan Timur
1.20.10	Kec.Balikpapan Barat
1.20.11	Kec.Balikpapan Utara
1.20.12	Kec.Balikpapan Tengah
1.20.13	Kec.Balikpapan Selatan
1.20.14	Kec.Balikpapan Kota
1.20.15	Kel. Manggar
1.20.16	Kel. Lamaru
1.20.17	Kel. Teritip
1.20.18	Kel. Manggar Baru
1.20.19	Kel. Baru Ilir
1.20.20	Kel. Baru Tengah
1.20.21	Kel. Baru Ulu
1.20.22	Kel. Kariangau
1.20.23	Kel. Margo Mulyo
1.20.24	Kel. Margasari
1.20.25	Kel. Baru Ampar
1.20.26	Kel. Gn. Samarinda
1.20.27	Kel. Karang Joang
1.20.28	Kel. Muara Rapak
1.20.29	Kel. Gn. Samarinda Baru
1.20.30	Kel. Graha Indah
1.20.31	Kel. Gn. Sari Ullu
1.20.32	Kel. Gn. Sari Ilir
1.20.32	Kel. Karang Rejo
1.20.33	Kel. Karang Jati
1.20.34	Kel. Mekar Sari
1.20.35	Kel. Sumber Rejo
1.20.36	Kel. Sepinggan

Kode	Perangkat Daerah
1.20.37	Kel. Gn. Bahagia
1.20.38	Kel. Sepinggan Baru
1.20.39	Kel. Sepinggan Raya
1.20.40	Kel. Sungai Nangka
1.20.41	Kel. Damai Baru
1.20.42	Kel. Damai Bahagia
1.20.43	Kel. Prapatan
1.20.44	Kel. Telaga Sari
1.20.45	Kel. Klandasan Ulu
1.20.46	Kel. Klandasan Ilir
1.20.47	Kel. Damai
1.20.48	Kantor Arsip dan Perpustakaan
2.01.01	Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
2.04.01	Disporabudpar
2.06.01	Dinas Pasar

Sedangkan untuk SKPD yang memiliki tingkat konsistensi (%) program antar Dokumen RKPD terhadap Dokumen APBD yang kurang tercapai (<100%) sebagai berikut:

Kode	Perangkat Daerah
1.02.01	Dinas Kesehatan
1.02.02	RSKB.Sayang Ibu
1.02.03	RSUD Balikpapan
1.09.02	Kantor Kesbang & Politik
1.19.02	Satuan Polisi Pamong Praja

7. Berdasarkan Tabel 2.74 diatas, adapun hasil pendistribusian tingkat capaian konsistensi program RKPD sebagai berikut:
   a. Tingkat capaian 91% - 100% terdapat 63 SKPD dengan predikat konsistensi “SANGAT TINGGI”.
   b. Tingkat capaian 90% - 76% terdapat 2 SKPD dengan predikat konsistensi “TINGGI”.
   c. Tingkat capaian 75% - 66% terdapat 1 SKPD dengan predikat konsistensi “SEDANG”.
   d. Tingkat capaian 65% - 51% terdapat 2 SKPD dengan predikat konsistensi “RENDAH”.

e. Tingkat capaian 50% - 0% tidak terdapat (0) SKPD dengan predikat konsistensi “SANGAT RENDAH”.

Terkait dengan hasil pendistribusian tingkat capaian konsistensi program RKPD terhadap 68 SKPD Kota Balikpapan, berikut penyajian dalam bentuk gambar grafik histogram dibawah ini.

Gambar 2.29
Grafik Histogram Konsistensi Program RKPD terhadap RPJMD Tahun 2016

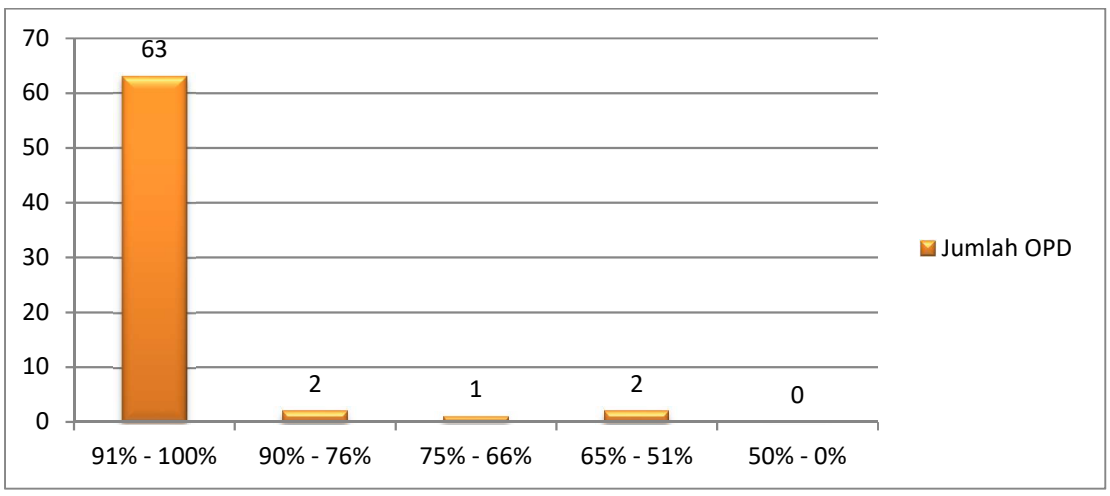

Berdasarkan gambar grafik diatas menunjukan, bahwa RKPD tahun 2016 pada SKPD telah menjabarkan RPJMD dengan tingkat capaian predikat “Sangat Tinggi” atau dengan capaian konsistensi terukur sebesar 92,65%. Hal ini dapat dikatakan penjabaran RKPD terhadap RPJMD pada periode ke 5 memiliki ekspektasi perencanaan yang terarah atau RKPD telah berpedoman pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016. Terkait dengan capaian tersebut menunjukan pula adanya konsistensi antara program prioritas yang dituangkan pada RKPD Tahun 2016 telah dapat menjabarkan RPJMD Kota Balikpapan yang telah berakhir masanya pada tahun tersebut.

Sebagai catatan evaluasi RKPD pada RPJMD yang akan disusun pada tahun 2016 sebagai berikut:

- Penetapan Program pada RPJMD Kota Balikpapan dapat tergambar atas tujuan dan sasaran yang terukur pada tiap-tiap periode atau tahun RKPD.
- Program yang ditetapkan pada RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021 harus memiliki indikator sasaran yang SMART dan dapat dipedomani oleh tiap kegiatan yang memiliki hubungan secara langsung dalam pencapaian tiap-tiap Misi RPJMD.
- Konsistensi jumlah Program yang dilaksanakan pada RKPD dapat selaras dengan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021.

2.2.9. Capaian Program Prioritas Pembangunan RKPD Berdasarkan Penjabaran RPJMD Tahun 2016

Berdasarkan hasil monitoring data capaian sampai dengan akhir tahun 2016 program prioritas RKPD Kota Balikpapan Tahun 2016, adapun Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Prioritas pada RKPD disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.76
Konsistensi Jumlah Program RKPD Terhadap RPJMD Kota Balikpapan
Tahun 2011-2016

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9
				WAJIB							
1	01			**Pendidikan**							
1	01	15		**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	**APK PAUD/TK/ Sederajat**	**55.24%**	**55.24%**	**55.24%**	**55.24%**	**100%**	Dinas Pendidikan
					Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah PAUD/TK	**41.80%**	**41.80%**	**41.80%**	**41.80%**	**100%**	Dinas Pendidikan
1	01	15	057	Pelatihan Tutor PAUD Non Formal	Meningkatnya kompetensi Tutor PAUD yang berdampak pada kualitas kelulusan PAUD	300	240	60	60	100%	Dinas Pendidikan
1	01	15	069	Tutor PAUD (Bantuan Keuangan Provinsi)	Meningkatnya kreativitas Tutor PAUD	5270	4216	1054	1054	100%	Dinas Pendidikan
1	01	15	074	Penguatan dan Peningkatan Mutu Lembaga PAUD	Terciptanya Lembaga PAUD yang mandiri	1205	964	241	241	100%	Dinas Pendidikan
1	01	15	077	Pendamping Tutor PAUD	Meningkatnya kreatifitas Tutor PAUD	4750	3800	950	950	100%	Dinas Pendidikan
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100.00%	
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR						100.00%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5		6	7	8=(7/6)*100%	9
1	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		**Persentase SD/MI/Sederajat berbasis IPTEK**	**6.60%**	6.60%	6.60%	6.60%	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	16				**Persentase SMP/MTs/Sederajat berbasis IPTEK**	**19.44%**	19.44%	19.44%	19.44%	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	16				**Persentase SD/MI/Sederajat berbasis IMTAQ**	**57.62%**	57.62%	57.62%	57.62%	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	16				**Persentase SMP/MTs/Sederajat berbasis IMTAQ**	**40.00%**	40.00%	40.00%	40.00%	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	16				**APK SD/MI/Sederajat**	**112.65 %**	109.80 %	112.65%	112.65%	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	16				**APK SMP/MTs/Sederajat**	**103.38 %**	92.56%	103.38%	103.38%	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	16				**APM SD/MI/ Sederajat**	**96.39%**	97.52%	96.39%	96.39%	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	16				**APM SMP/MTs/ Sederajat**	**86.59%**	76.97%	86.59%	86.59%	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	16				**APS SD/MI/ Sederajat**	**93.37%**	93.37%	93.37%	93.37%	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	16				**APS SMP/MTs/ Sederajat**	**84.29%**	84.29%	84.29%	84.29%	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	16				**Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI**	**0.02%**	0.02%	0.02%	0.02%	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	16				**Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs**	**0.20%**	0.20%	0.20%	0.20%	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	16				**Angka Kelulusan (AL) SD/MI**	**100.00 %**	100.00 %	100.00%	100.00%	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	16				**Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs**	**100.00 %**	100.00 %	100.00%	100.00%	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	16				**Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs**	**101.84 %**	101.84 %	101.84%	101.84%	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	16				**Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA**	**96.30%**	96.30%	96.30%	96.30%	100.00%	Dinas Pendidikan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5		6	7	8=(7/6)*100%	9
1	01	16				**Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah SD/MI/ Sederajat**	**26.81%**	26.81%	26.81%	26.81%	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	16				**Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah SMP/MTs/ Sederajat**	**20.57%**	20.57%	20.57%	20.57%	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	16				**Persentase bangunan SD/MI kondisi bangunan baik**	**10.10%**	10.10%	10.10%	10.10%	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	16				**Persentase bangunanSMP/MTs kondisi bangunan baik**	**25.00%**	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	16	003	Penambahan Ruang Kelas Sekolah		Pembangunan Lokal Belajar Kembali sehingga layak untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar	51	45	6	6	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	16	010	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah		Tersedianya UKS SD dan SMP	43	24	19	19	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	16	0.12	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Tersedianya Perpustakaan SD dan SMP	32	30	4	2	50.00%	Dinas Pendidikan
1	01	16	082	Pra Ujian Nasional SD dan SMP, Ujian Akhir Sekolah SD dan SMP, Ujian Nasional SD dan SMP Kota Balikpapan		Peserta Lulus Ujian Nasional dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi	105000	84000	21000	21000	100.00%	Dinas Pendidikan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5		6	7	8=(7/6)*100%	9
1	01	16	083	Olimpiade Sains SD dan SMP		Siswa pemenang kota mengikuti lomba tingkat provinsi dan pemenang di tingkat provinsi dan pemenang di tingkat provinsi mengikuti lomba di tingkat nasional	128	80	48	48	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	16	097	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah SD/SMP		Mengganti kondisi gedung yang rusak dan tidak layak untuk digunakan lagi karena bangunan lama / terbatas sehingga perlu pembangunan	115	100	15	15	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	16	103	Penguatan metode pembelajaran (Lesson Study SD, SMP)		Meningkatnya kualitas pembelajaran di SD dan SMP	6	5	1	1	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	16	105	Pembinaan dan pemantapan dalam penerapan kurikulum 2013		Meningkatnya pemahaman aparatur, pengawas dan TPK Kota tentang Kurikulum 2013 dan Aplikasi Kurikulum 2013 serta terlaksananya Monitoring Kurikulum 2013	7750	6000	1750	1750	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	16	107	Pelaksanaan tim pengembang kurikulum/TPK jenjang SD, SMP Kota Balikpapan		Meningkatnya pemahaman akan tugas dan fungsi TPK Tingkat Kota	4	4	2	0	0.00%	Dinas Pendidikan
1	01	16		Penambahan kamar mandi / WC dan saluran drainase SD dan SMP Negeri		Terbangunnya fasilitas sekolah yang layak untuk digunakan sebagai sarana penunjang sekolah	50	50	0	0	0.00%	Dinas Pendidikan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5		6	7	8=(7/6)*100%	9
1	01	16		Pembinaan Gugus TK dan SD		Peningkatan daya saing kualitas sekolah mulai tingkat kota, provinsi sampai tingkat nasional	200	200	0	0	0.00%	Dinas Pendidikan
1	01	16	129	Pembangunan Pagar Sekolah SD dan SMP		Meningkatnya keamanan sekolah dan kenyamanan dalam belajar	127	100	27	27	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	16	130	Pembangunan SMP Negeri 23 Balikpapan (Lanjutan)		Memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana pendidikan	6	3	3	3	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	16		Dana Pendamping Block Grand SD dan SMP		Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar	0	0	0	0	0.00%	Dinas Pendidikan
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM							67.86%	
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR							100.00%	
1	01	17		**Program Pendidikan Menengah**		**Persentase SMA/SMK/MA /Sederajat berbasis IPTEK**	**86.67 %**	86.67%	86.67%	86.67%	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	17				**Persentase MA/SMK/MA Sederajat berbasis IMTAQ**	**59.32 %**	59.32%	59.32%	59.32%	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	17				**APK SMA/SMK/MA/ Sederajat**	**83.17 %**	95.76%	83.17%	83.17%	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	17				**APM SMA/SMK/MA/ Sederajat**	**67.38 %**	67.81%	67.38%	67.38%	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	17				**APS SMA/SMK/MA/ Sederajat**	**78.03 %**	78.03%	78.03%	78.03%	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	17				**Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA**	**0.06 %**	0.06%	0.06%	0.06%	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	17				**Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA**	**100.00%**	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Dinas Pendidikan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5		6	7	8=(7/6)*100%	9
1	01	17				Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA/ Sederajat	17.52 %	17.52%	17.52%	17.52%	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	17				Persentase bangunan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	26.31 %	26.31%	26.31%	26.31%	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	17	003	Penambahan ruang kelas sekolah		Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan bagi masyarakat	5	4	1	1	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	17	041	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah		Terciptanya rasa aman dan nyaman dalam proses belajar mengajar	30	24	6	6	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	17	074	Olimpiade Sains SMA		Prestasi di bidang sains hingga ke tingkat Nasional	6	5	1	1	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	17	086	Penyelenggaraan Kompetisi Akademis dan LKS Bagi Siswa SLTA Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional		Prestasi di bidang akademik hingga tingkat Nasional	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	17	087	Operasional EDOTEL SMKN 4 Balikpapan		Peningkatan kemampuan siswa/siswi Jurusan Perhotelan	5	4	1	1	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	17	091	Pembangunan Sarana Penunjang Sekolah		Meningkatnya fasilitas sarana penunjang di sekolah	45	36	9	9	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	17	092	Pembangunan dan Rehabilitasi Sekolah (Dana Pendamping Block Grant/BIS/School Grant SLTA)		Melakukan pendampingan terhadap bantuan APBD Provinsi maupun APBN yang diterima SMA dan SMK	5	4	1	1	100.00%	Dinas Pendidikan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5		6	7	8=(7/6)*100%	9
1	01	17	094	Pelaksanaan Pra Ujian Nasional, Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Tingkat SLTA		Siswa/i SMA/SMK se-Kota Balikpapan	15	12	3	3	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	17	101	Pembinaan Siswa Berprestasi		Memacu semangat belajar siswa meraih nilai ujian terbaik	405	324	81	81	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	17		Operasional Satuan Tugas Penyaluran Biaya Pendidikan Bagi Penyaluran Siswa Keluarga Miskin		Mengurangi beban masyarakat	5	5	0	0	0.00%	Dinas Pendidikan
1	01	17	115	Pelaksanaan Ujian Kompetensi Keahlian (UKK)		Siswa memiliki kompetensi keahlian prima	6	5	1	1	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	17		Pembuatan Bozem SMKN 6		Terkendalinya aliran air di area sekolah	0	0	0	0	0.00%	Dinas Pendidikan
1	01	17		Lanjutan Pembangunan RKB SMKN 1		Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan bagi masyarakat	0	0	0	0	0.00%	Dinas Pendidikan
1	01	17		Pembangunan Lapangan Basket SMKN 5		Meningkatnya minat dan prestasi olahraga di SMKN 5	0	0	0	0	0.00%	Dinas Pendidikan
1	01	17		Pembangunan RKB dan Workshop SMKN 5		Meningkatnya daya tampung dan fasilitas sekolah	0	0	0	0	0.00%	Dinas Pendidikan
1	01	17		Pembangunan Masjid SMKN 5		Meningkatnya fasilitas dan kegiatan keagamaan di SMKN 5	0	0	0	0	0.00%	Dinas Pendidikan
1	01	17		Pengadaan Alat Praktek SMKN 5		Melengkapi fasilitas bengkel yang telah ada	0	0	0	0	0.00%	Dinas Pendidikan
1	01	17		Pembuatan Laboratorium Perikanan		Melengkapi fasilitas belajar siswa	0	0	0	0	0.00%	Dinas Pendidikan
1	01	17		Pengadaan Alat Praktek Pertukangan dan Mesin		Meningkatnya fasilitas belajar siswa SMKN 1	0	0	0	0	0.00%	Dinas Pendidikan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5		6	7	8=(7/6)*100%	9
1	01	17		Pembangunan Perpustakaan SMKN 6		Meningkatnya minat baca peserta didik	0	0	0	0	0.00%	Dinas Pendidikan
1	01	17		Pembangunan RKB SMAN 6		Memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana pendidikan	0	0	0	0	0.00%	Dinas Pendidikan
1	01	17		Pembangunan Ruang Guru dan Multimedia SMAN 6		Meningkatnya fasilitas belajar serta kenyamanan bagi tenaga pendidik	0	0	0	0	0.00%	Dinas Pendidikan
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM							45.45%	
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR							100.00%	
1	01	18		**Program Pendidikan Non Formal**		**Angka Melek Huruf Penduduk Usia > 15 tahun**	**99.88 %**	**99.26%**	**99.88%**	**99.88%**	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	18	014	Pelatihan Tutor Kejar Paket A,B dan C		Meningkatnya mutu tutorial Paket A, B dan C	300	240	60	60	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	18	016	Uji Kompetensi		Keberhasilan warga masyarakat dalam ujian Tata Busana, Bahasa Inggris dan TRP	250	200	50	50	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	18	025	Kegiatan Belajar Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Barat		Meningkatkan minat belajar mengajar Paket A, B dan C	550	440	110	110	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	18	026	Kegiatan Belajar Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Timur		Meningkatkan minat belajar mengajar Paket A, B dan C	7000	7000	0	0	0.00%	Dinas Pendidikan
1	01	18	027	Kegiatan Belajar Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Tengah		Meningkatkan minat belajar mengajar Paket A, B dan C	1350	1350	0	0	0.00%	Dinas Pendidikan
1	01	18	028	Kegiatan Belajar Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Utara		Meningkatkan minat belajar mengajar Paket A, B dan C	0	0	0	0	0.00%	Dinas Pendidikan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5		6	7	8=(7/6)*100%	9
1	01	18	029	Kegiatan Belajar Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Selatan		Meningkatkan minat belajar mengajar Paket A, B dan C	0	0	0	0	0.00%	Dinas Pendidikan
1	01	18	031	Lomba Dalam Rangka Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) Tingkat Kota Balikpapan		Berubahnya pengetahuan warga belajar	1000	800	200	200	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	18	032	Sosialisasi dan Lokakarya Lembaga Pendidikan Non Formal untuk Penilaian Akreditasi		Meningkatnya Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi	400	400	100	0	0.00%	Dinas Pendidikan
1	01	18	034	Jambore Pendidikan Non Formal		Meningkatnya kinerja pendidikan non formal	5	4	1	1	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	18	035	Ujian Nasional Program Paket A,B,C dan C Kejuruaan		Keberhasilan warga belajar Paket A, B, C dan C Kejuruan	6000	4800	1200	1200	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	18	038	Pengelolaan Insentif Ustadz dan Ustadzah Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA)		Peningkatan Penambahan Insentif Ustadz/Ustadzah	10074	8000	2074	2074	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	18	039	Hari Anak Nasional (HAN) dan Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) Taman Kanak- Kanak dan KB se Kota Balikpapan		Meningkatnya kemandirian Siswa TK dan KB serta Gurunya	6000	6000	1500	0	0.00%	Dinas Pendidikan
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM							53.85%	
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR							100.00%	
1	01	20		**Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**		**Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV**						Dinas Pendidikan
						SD/MI/ Sederajat	**2848**	-	2848	2848	100.00%	Dinas Pendidikan
						SMP/MTs/ Sederajat	**526**	-	526	526	100.00%	Dinas Pendidikan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5		6	7	8=(7/6)*100%	9
						SMA/SMK/MA/ Sederajat	**1285**	-	1285	1285	100.00%	Dinas Pendidikan
						Rasio guru/murid per kelas rata-rata	**0**					Dinas Pendidikan
						PAUD/TK	**0.1111111**	0.11111111	0.111111111	0.11111111	100.00%	Dinas Pendidikan
						SD/MI/Sederajat	**1:27**	1:27	1:27	1:27	100.00%	Dinas Pendidikan
						SMP/MTs/ Sederajat	**1:18**	1:18	1:18	1:18	100.00%	Dinas Pendidikan
						SMA/SMK/MA/ Sederajat	**1:14**	1:14	1:14	1:14	100.00%	Dinas Pendidikan
1	0 1	2 0	00 1	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Terpenuhinya Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang bersertifikat	3250	2800		450	450	100.00%	Dinas Pendidikan
1	0 1	2 0	00 7	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	-	1777	1400		377	377	100.00%	Dinas Pendidikan
1	0 1	2 0	01 7	Pelatihan Pengembangan Jaringan Komputer Sekolah	Meningkatnya pengembangan jaringan komputer sekolah	600	480		120	120	100.00%	Dinas Pendidikan
1	0 1	2 0	01 8	Pelatihan Guru Kesenian	Meningkatnya Kreativitas Guru Kesenian di Sekolah	5	4		1	1	100.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	0 1	2 0	02 0	Pelatihan Guru Olahraga	Tersedianya Guru Olahraga di Balikpapan yang bekualitas	1100	880		220	220	100.00%	Dinas Pendidikan
1	0 1	2 0	02 3	Pelatihan Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis TIK Bagi Guru	Meningkatnya Proses Pembelajaran Berbasis TIK	480	400		80	80	100.00%	Dinas Pendidikan
1	0 1	2 0	02 9	Penilaian Kinerja dan Keprofesian Berkelanjutan	Terpenuhinya Manajemen Pendidik dan Mutu yang profesionalisme	750	600		150	150	100.00%	Dinas Pendidikan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5		6	7	8=(7/6)*100%	9
1	01	20		Induksi Guru Pemula		Guru CPNS mendapatkan sertifikat Induksi Guru (pemenuhan Guru yang layak mengajar)	0	0	0	0	0.00%	Dinas Pendidikan
1	01	20		Pelaksanaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Tingkat SMA, MA dan SMK		Meningkatnya kompetensi Guru dan Kepala Sekolah	0	0	0	0	0.00%	Dinas Pendidikan
1	01	20	037	Pelaksanaan Kuis Kihajar Tingkat Kota		Terpilihnya Juara I, II dan III Kuis Kihajar Tingkat Kota dari Jenjang SD, SMP, SMA dan SMK Negeri/Swasta	5	4	1	1	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	20	038	Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah (EDS/MPSPD)		Terciptanya Kondisi Sekolah Sesuai Dengan 8 Standar Pendidikan Nasional	615	492	123	123	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	20	040	Pelaksanaan Forum dan Bimbingan Teknis Pengawas Sekolah		Bertambahnya Wawasan Berbasis Kinerja Bagi Pengawas Sekolah	4.75	4	75%	75%	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	20		Kompetensi dan Layanan Guru Bimbingan Konseling		Meningkatnya Kompetensi Guru BK dalam memberikan layanan terhadap siswa	0	0	0		0.00%	Dinas Pendidikan
1	01	20	044	Pengembangan seni budaya dan olahraga anak didik/Pentas PAI SD,SLTP dan SLTA		Meningkatnya prestasi PAI tingkat SD, SLTP dan SLTA di sekolah	5	4	1	1	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	20	045	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SD, SMP dan SMK		Meningkatnya kreativitas dan potensi siswa di bidang seni	5	4	1	1	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	20	046	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD, SMP, SMU dan SMK		Tersedianya bibit-bibit atlit di Tingkat SD, SMP, SMA dan SMK yang berbakat dan siap dikirim ke Tingkat Propinsi	1900	1520	380	380	100.00%	Dinas Pendidikan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5		6	7	8=(7/6)*100%	9
1	01	20	047	Pembinaan Program Sekolah Sehat Berwawasan Lingkungan		Bertambahnya Sekolah Sehat hingga tingkat Provinsi dan Nasional	120	96	24	24	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	20	048	Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) Guru SD, SLTP dan SLTA Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional		Tersedianya Guru yang berbakat di bidang Olahraga dan siap bersaing ke Tingkat Propinsi dan Nasional	5	4	1	1	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	20	050	Liga Pendidikan Indonesia		Meningkatnya kemampuan sekolah dalam kegiatan liga sepakbola dan meningkatnya atlit sekolah ke tingkat Propinsi/Nasional	5	4	1	1	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	20	051	Peringatan Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS)		Peringatan Hardiknas dijadikan momentum peningkatan kualitas pendidikan	5	4	1	1	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	20	052	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SLB		Adanya penghargaan terhadap prestasi Pelajar Cacat di bidang olahraga dan meningkatnya atlit cacat yang berbakat ke tingkat Propinsi maupun Nasional	5	4	1	1	100.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	20	053	Penyuluhan UKS Tingkat TK s/d SLTA Kota Balikpapan		Meningkatnya kemampuan sekolah dalam pengelolaan UKS	15	12	3	3	100.00%	Dinas Pendidikan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5		6	7	8=(7/6)*100%	9
1	01	20		Pelatihan Pembina dan Pengurus OSIS		Meningkatnya kegiatan ekstrakurikuler khususnya kegiatan OSIS dan meningkatnya Pengurus OSIS dalam Pembuatan Program dan Koordinasi	0	0	0	0	0.00%	Dinas Pendidikan
1	01	20	060	Pelatihan dan Lomba Situs Web Jenjang SD, SMP, SMA/ SMK Negeri dan Swasta		Semua sekolah memiliki situs website	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	20		Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan Dalam Pelaksanaan Tugas dan Proses Pelayanan		Meningkatnya profesionalisme Tenaga Kependidikan	0	0	0	0	0.00%	Dinas Pendidikan
1	01	20		Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru Negeri dan Swasta)		Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru Negeri dan Swasta)	0	0	0	0	0.00%	Dinas Pendidikan
1	01	20		Pelatihan Kompetensi Pendidik/ Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Guru Bahasa Inggris		Meningkatnya Kompetensi Guru Bahasa Inggris	0	0	0	0	0.00%	Dinas Pendidikan
1	01	20	064	Pekan Olahraga Pelajar (POPPROV)		Tersedianya bibit-bibit atlet tingkat SD yang berbakat	1100	880	220	220	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	20	065	Pembinaan Atlet Berprestasi		Meningkatnya atlet yang berprestasi di tingkat SD, SMP dan SMA sederajat	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	20	066	Pekan Olahraga SD		Tersedianya bibit atlet Tingkat SD yang berbakat	5	4	1	1	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	20	067	Pelatihan Pengurus OSIS SMP dan SLTA		Terkelolanya Database Pendidikan yang baik dan terukur	1750	1400	350	350	100.00%	Dinas Pendidikan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5		6	7	8=(7/6)*100%	9
1	01	20		Rekrutmen Tim Penilai Angka Kredit Periode 2017 s.d 2020		Menghasilkan Tim Penilai Angka Kredit sesuai Standar Kualifikasi untuk menjadi Tim Penilai Angka Kredit	0	0	0	0	0.00%	Dinas Pendidikan
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM							75.00%	
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR							100.00%	
1	01	23		**Program Pembinaan Tata Kelola Bidang Pendidikan**		***TIDAK TERDAPAT INDIKATOR PROGRAM***						Dinas Pendidikan
1	01	23	004	Dana Pendamping Block Grant / School Grant SD-SMP		-	20	16	4	4	100.00%	Dinas Pendidikan
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM							100.00%	
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR							100.00%	
1	01	25		**Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar**		***TIDAK TERDAPAT INDIKATOR PROGRAM***						Dinas Pendidikan
1	01	25	002	Pengadaan Kalender Pendidikan		Tersedianya panduan bagi sekolah dalam menyelenggarakan proses belajar	3250	2600	650	650	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	25	004	Pemilihan dan Penghargaan bagi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah Berprestasi		Terciptanya peningkatan prestasi bagi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	375	300	75	75	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	25	010	Pendampingan Manajemen BOS Pusat Tingkat Kota		Pengelolaan Program BOS yang akuntabel	5	4	1	1	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	25	013	Monitoring Pengelolaan Aset di Sekolah		Tersedianya Data Aset Dinas Pendidikan	900	720	180	180	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	25		Pembinaan Pengelola Data Sekolah		Terciptanya Data Sekolah Dikelola Dengan Baik	0	0	0	0	0.00%	Dinas Pendidikan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5		6	7	8=(7/6)*100%	9
1	01	25	015	Pelaporan Keuangan dan Verifikasi BOSDA/BOSPROV		Tersedianya Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Sekolah	30	24	6	6	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	25	024	Pengolahan Data Pokok Pendidikan Formal dan Non Formal		Tersedianya data sekolah	4550	3640	910	910	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	25	028	Penilaian Akreditasi Sekolah SD s/d SLTP		Terakreditasinya Sekolah di tingkat Pendidikan	15	12	3	3	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	25	029	Pengelolaan Jaringan Internet, Upgrade dan Website dan Pengembangan Aplikasi Sidalah		Meningkatnya Sistem Jaringan Informasi dan Pelayanan Pendidikan di Dinas Pendidikan	5	4	1	1	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	25	031	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional		Terlaksananya kenaikan pangkat dan jabatan fungsiona Dinas Pendidikan Kota Balikpapan	2000	1600	400	400	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	25	032	Penyusunan Daftar Kebutuhan Guru		Tersusunnya Data Base Kebutuhan Guru berupa dokumen	865	692	173	173	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	25	033	Penanganan Kasus-kasus Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Laporan penyelesaian kasus- kasus berupa dokumen	40	32	8	8	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	25	036	Penyusunan Buku Profil Pendidikan		Meningkatnya pelayanan dan informasi pendidikan melalui Buku Profil Pendidikan	175	140	35	35	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	25	039	Validasi Penerima Tambahan Penghasilan Bagi Guru		Daftar Guru dan Tenaga Pendidik yang telah diverifikasi untuk mendapatkan tambahan penghasilan	30	24	6	6	100.00%	Dinas Pendidikan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5		6	7	8=(7/6)*100%	9
1	01	25		Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penyaluran BOSDA / BOSDA DIKMEN		Realisasi Anggaran BOSDA/BOSDA Dikmen dilaksanakan dengan Tertib Administrasi dan Tepat Waktu	4	4	0	0	0.00%	Dinas Pendidikan
1	01	25	046	Peningkatan Kapasitas Staf Pengelola Kegiatan/Keuangan		Meningkatnya Kemampuan Peserta Bimtek Dalam Mengelola Kegiatan/Keuangan	5	4	1	1	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	25		Ekspose Hasil Verifikasi dan Validasi Laporan Bulanan Sekolah		Terciptanya data yang benar	4	4	0	0	0.00%	Dinas Pendidikan
1	01	25	051	Verifikasi dan Validasi Laporan Bulanan Bagi Kepala Sekolah dan Operator Sekolah		Terciptanya data yang benar	5	4	1	1	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	25		Penyusunan Renstra 2016- 2021		Memiliki pedoman dalam pelaksanaan program kerja Tahun 2016-2021	1	1	1	0	0.00%	Dinas Pendidikan
1	01	25	054	Pelaksanaan PPDB Tahun 2016		Terlaksananya PPDB sesuai dengan peraturan yang berlaku	5	4	1	1	100.00%	Dinas Pendidikan
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM							80.00%	
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR							80.00%	
1	01	31		**Program BOS (Kota) Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (SD)**		***TIDAK TERDAPAT INDIKATOR PROGRAM***						Dinas Pendidikan
1	01	31	105	Biaya Operasional SDN 024 Kecamatan Balikpapan Utara		Jumlah jenis pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Dasar	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5		6	7	8=(7/6)*100%	9
1	01	31	106	Biaya Operasional SDN 025 Kecamatan Balikpapan Utara		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Dasar	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	31	107	Biaya Operasional SDN 026 Kecamatan Balikpapan Utara		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Dasar	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	31	108	Biaya Operasional SDN 027 Kecamatan Balikpapan Utara		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Dasar	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	31	109	Biaya Operasional SDN 028 Kecamatan Balikpapan Utara		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Dasar	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	31	110	Biaya Operasional SDN 029 Kecamatan Balikpapan Utara		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Dasar	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	31	111	Biaya Operasional SDN 030 Kecamatan Balikpapan Utara		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Dasar	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	31	112	Biaya Operasional SDN 031 Kecamatan Balikpapan Utara		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Dasar	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	31	113	Biaya Operasional SDN 032 Kecamatan Balikpapan Utara		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Dasar	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5		6	7	8=(7/6)*100%	9
1	01	31	114	Biaya Operasional SDN 033 Kecamatan Balikpapan Utara		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Dasar	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	31	115	Biaya Operasional SDN 001 Kecamatan Balikpapan Barat		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Dasar	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	31	116	Biaya Operasional SDN 002 Kecamatan Balikpapan Barat		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Dasar	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	31	117	Biaya Operasional SDN 003 Kecamatan Balikpapan Barat		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Dasar	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	31	118	Biaya Operasional SDN 004 Kecamatan Balikpapan Barat		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Dasar	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	31	119	Biaya Operasional SDN 005 Kecamatan Balikpapan Barat		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Dasar	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	31	120	Biaya Operasional SDN 006 Kecamatan Balikpapan Barat		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Dasar	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	31	121	Biaya Operasional SDN 007 Kecamatan Balikpapan Barat		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Dasar	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5		6	7	8=(7/6)*100%	9
1	01	31	122	Biaya Operasional SDN 008 Kecamatan Balikpapan Barat		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Dasar	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	31	123	Biaya Operasional SDN 009 Kecamatan Balikpapan Barat		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Dasar	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	31	124	Biaya Operasional SDN 010 Kecamatan Balikpapan Barat		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Dasar	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	31	125	Biaya Operasional SDN 011 Kecamatan Balikpapan Barat		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Dasar	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	31	126	Biaya Operasional SDN 012 Kecamatan Balikpapan Barat		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Dasar	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	31	127	Biaya Operasional SDN 013 Kecamatan Balikpapan Barat		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Dasar	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	31	128	Biaya Operasional SDN 014 Kecamatan Balikpapan Barat		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Dasar	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	31	129	Biaya Operasional SDN 015 Kecamatan Balikpapan Barat		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Dasar	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5		6	7	8=(7/6)*100%	9
1	01	31	130	Biaya Operasional SDN 016 Kecamatan Balikpapan Barat		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Dasar	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	31	131	Biaya Operasional SDN 017 Kecamatan Balikpapan Barat		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Dasar	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	31	132	Biaya Operasional SDN 018 Kecamatan Balikpapan Barat		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Dasar	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	31	133	Biaya Operasional SDN 019 Kecamatan Balikpapan Barat		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Dasar	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	31	134	Biaya Operasional SDN 020 Kecamatan Balikpapan Barat		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Dasar	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	31	135	Biaya Operasional SDN 021 Kecamatan Balikpapan Barat		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Dasar	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	31	136	Biaya Operasional SDN 022 Kecamatan Balikpapan Barat		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Dasar	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	31	137	Biaya Operasional SDLB Negeri Balikpapan		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Dasar	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5		6	7	8=(7/6)*100%	9
1	01	31	139	Biaya Operasional SDN 001 Kecamatan Balikpapan Kota		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Dasar	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	31	140	Biaya Operasional SDN 002 Kecamatan Balikpapan Kota		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Dasar	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	31	141	Biaya Operasional SDN 003 Kecamatan Balikpapan Kota		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Dasar	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	31	142	Biaya Operasional SDN 004 Kecamatan Balikpapan Kota		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Dasar	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	31	143	Biaya Operasional SDN 005 Kecamatan Balikpapan Kota		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Dasar	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	31	144	Biaya Operasional SDN 006 Kecamatan Balikpapan Kota		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Dasar	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	31	145	Biaya Operasional SDN 007 Kecamatan Balikpapan Kota		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Dasar	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	31	146	Biaya Operasional SDN 008 Kecamatan Balikpapan Kota		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Dasar	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5		6	7	8=(7/6)*100%	9
1	01	31	147	Biaya Operasional SDN 009 Kecamatan Balikpapan Kota		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Dasar	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	31	148	Biaya Operasional SDN 010 Kecamatan Balikpapan Kota		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Dasar	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	31	149	Biaya Operasional SDN 011 Kecamatan Balikpapan Kota		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Dasar	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	31	150	Biaya Operasional SDN 012 Kecamatan Balikpapan Kota		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Dasar	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	31	151	Biaya Operasional SDN 013 Kecamatan Balikpapan Kota		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Dasar	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	31	152	Biaya Operasional SDN 014 Kecamatan Balikpapan Kota		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Dasar	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	31	153	Biaya Operasional SDN 015 Kecamatan Balikpapan Kota		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Dasar	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM							100.00%	
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR							100.00%	
1	01	32		**Program BOS (Kota) Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (SMP)**		***TIDAK TERDAPAT INDIKATOR PROGRAM***						Dinas Pendidikan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5		6	7	8=(7/6)*100%	9
1	01	32		Biaya Operasional SMP Negeri 1 Balikpapan		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Menengah Pertama	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	32		Biaya Operasional SMP Negeri 2 Balikpapan		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Menengah Pertama	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	32		Biaya Operasional SMP Negeri 3 Balikpapan		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Menengah Pertama	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	32		Biaya Operasional SMP Negeri 4 Balikpapan		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Menengah Pertama	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	32		Biaya Operasional SMP Negeri 5 Balikpapan		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Menengah Pertama	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	32		Biaya Operasional SMP Negeri 6 Balikpapan		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Menengah Pertama	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	32		Biaya Operasional SMP Negeri 7 Balikpapan		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Menengah Pertama	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	32		Biaya Operasional SMP Negeri 8 Balikpapan		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Menengah Pertama	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5		6	7	8=(7/6)*100%	9
1	01	32		Biaya Operasional SMP Negeri 9 Balikpapan		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Menengah Pertama	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	32		Biaya Operasional SMP Negeri 10 Balikpapan		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Menengah Pertama	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	32		Biaya Operasional SMP Negeri 11 Balikpapan		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Menengah Pertama	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	32		Biaya Operasional SMP Negeri 12 Balikpapan		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Menengah Pertama	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	32		Biaya Operasional SMP Negeri 13 Balikpapan		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Menengah Pertama	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	32		Biaya Operasional SMP Negeri 14 Balikpapan		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Menengah Pertama	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	32		Biaya Operasional SMP Negeri 15 Balikpapan		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Menengah Pertama	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	32		Biaya Operasional SMP Negeri 16 Balikpapan		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Menengah Pertama	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5		6	7	8=(7/6)*100%	9
1	01	32		Biaya Operasional SMP Negeri 17 Balikpapan		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Menengah Pertama	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	32		Biaya Operasional SMP Negeri 18 Balikpapan		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Menengah Pertama	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	32		Biaya Operasional SMP Negeri 19 Balikpapan		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Menengah Pertama	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	32		Biaya Operasional SMP Negeri 20 Balikpapan		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Menengah Pertama	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	32		Biaya Operasional SMP Negeri 21 Balikpapan		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Menengah Pertama	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	32		Biaya Operasional SMP Negeri 22 Balikpapan		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Menengah Pertama	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	32		Biaya Operasional SMPLB Negeri Balikpapan		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Menengah Pertama	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM							100.00%	
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR							100.00%	
1	01	33		**Program BOS (Kota) Pendidikan Menengah**		***TIDAK TERDAPAT INDIKATOR PROGRAM***						Dinas Pendidikan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5		6	7	8=(7/6)*100%	9
1	01	33		Biaya Operasional SMA Negeri 1 Balikpapan		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Menengah Atas	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	33		Biaya Operasional SMA Negeri 2 Balikpapan		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Menengah Atas	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	33		Biaya Operasional SMA Negeri 3 Balikpapan		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Menengah Atas	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	33		Biaya Operasional SMA Negeri 4 Balikpapan		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Menengah Atas	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	33		Biaya Operasional SMA Negeri 5 Balikpapan		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Menengah Atas	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	33		Biaya Operasional SMA Negeri 6 Balikpapan		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Menengah Atas	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	33		Biaya Operasional SMA Negeri 7 Balikpapan		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Menengah Atas	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	33		Biaya Operasional SMA Negeri 8 Balikpapan		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Menengah Atas	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	33		Biaya Operasional SMA Negeri 9 Balikpapan		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Menengah Atas	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	33		Biaya Operasional SMALB Negeri Balikpapan		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Menengah Atas	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5		6	7	8=(7/6)*100%	9
1	01	33		Biaya Operasional SMK Negeri 1 Balikpapan		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Menengah Atas	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	33		Biaya Operasional SMK Negeri 2 Balikpapan		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Menengah Atas	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	33		Biaya Operasional SMK Negeri 3 Balikpapan		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Menengah Atas	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	33		Biaya Operasional SMK Negeri 4 Balikpapan		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Menengah Atas	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	33		Biaya Operasional SMK Negeri 5 Balikpapan		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Menengah Atas	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
1	01	33		Biaya Operasional SMK Negeri 6 Balikpapan		Jumlah pembiayaan operasional BOS pada Sekolah Menengah Atas	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM							100.00%	
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR							100.00%	
1	01	38		**Program Pengembangan Tenaga Kependidikan**		***TIDAK TERDAPAT INDIKATOR PROGRAM***						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	38		Penguatan Kompetensi Calon Kepala Sekolah		Jumlah Calon Kepala Sekolah	10	8	2	2	100.00%	Dinas Pendidikan
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM							100.00%	
				Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		Meningkatnya jumlah kunjungan, anggota perpustakaan dan budaya baca	262624	131312	58000	131312	226.40%	Kantor Arsip dan Perpustakaan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5		6	7	8=(7/6)*100%	9
				Pengelolaan Taman Cerdas di Kecamatan		- Terselenggaranya kegiatan perpustakaan untuk masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur	5	4	1	1	100.00%	Kantor Arisp dan Perpustakaan
				Pengelolaan Taman Cerdas di Kecamatan		-Tercapainya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan di kecamatan Balikpapan Selatan berjalan lancar - meningkatnya Pengetahuan masyarakat akan keberadaan taman cerdas kecamatan Balikpapan Selatan	5	4	1	1	100.00%	Kantor Arisp dan Perpustakaan
				Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan masyarakat		-	120	60	60	60	100.00%	Kantor Arsip dan Perpustakaan
				Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca		Meningkatnya minat dan kebiasaan membaca anak serta kunjungan ke perpustakaan	5	4	1	1	100.00%	Kantor Arsip dan Perpustakaan
				Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah		Jumlah bahan pustaka	51310	22000	29310	29310	100.00%	Kantor Arsip dan Perpustakaan
				Peningkatan Layanan Perpustakaan		-	120	60	60	60	100.00%	Kantor Arsip dan Perpustakaan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5		6	7	8=(7/6)*100%	9
				Bimbingan teknis pengelola perpustakaan Sekolah, SKPD, dan Taman Baca		-	5	4	1	1	100.00%	Kantor Arsip dan Perpustakaan
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM							100.00%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9
				Program Upaya Kesehatan Masyarakat	**Angka Kesakitan**	98.11%	98.11%	98.11%	98.11%	100%	Dinkes
				Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas	Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27 puskesmas, 14 pustu, UPTD Lab dan IFK	205	167	41	41	100%	Dinkes
				Pelayanan Kesehatan Gigi Anak Sekolah Dan Masyarakat Balikpapan	terwujudnya derajat kesehatan gigi dan mulut yang baik pada masyarakat serta tersedianya 1 unit dental mobile	4	3	1	1	100%	Dinkes
				Pembinaan Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga (TOGA)	Tersedianya produk unggulan hasil TOGA	1	1	1	1	100%	Dinkes

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9
				Peningkatan Pengawasan Makanan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	Peningkatan Pengawasan Makanan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	5	4	1	1	100%	Dinkes
				Pembayaran Klaim Visum Polres	Pembayaran Klaim Visum Polres	5	4	1	1	100%	Dinkes
				Operasional Kasus KDRT, KTP, KIA dan Trafficking di Puskesmas	-	5	4	1	1	100%	Dinkes
				Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	5	4	1	1	100%	Dinkes
				Penyehatan Lingkungan	-	5	4	1	1	100%	Dinkes
				Pengembangan Kawasan Sehat Tanpa Rokok	-	5	4	1	1	100%	Dinkes
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	**Prevalensi HIV dan AIDS**	0.03	0.03	0.03	0.03	100%	Dinkes
					Angka Kejadian DBD per 100.000 penduduk	348,46/ 100.000	348,46/ 100.000	348,46/ 100.000	348,46/ 100.000	100%	Dinkes
					Prevalensi TBC	122,3/ 100.000	122,3/ 100.000	122,3/ 100.000	122,3/ 100.000	100%	Dinkes
				Peningkatan Imunisasi	Peningkatan kekebalan masyarakat terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I)	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				Surveilance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah	Peningkatan Derajat Masyarakat	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9
				Pemberantasan Penyakit Kulit/Kelamin/IMS-HIV/AIDS	Kelompok resti sudah dilakukan pemeriksaan darah dan ODHA mendapatkan pengobatan serta pendampingan	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TBC, ISPA, KECACINGAN, DIARE dan KUSTA	Pasien sembuh dan terputusnya mata rantai penularan	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana	Seluruh masyarakat kota Balikpapan yang beresiko KLB dan terkena bencana dapat tertangani tentang kesehatannya	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Dan Zoonosis	Meningkatnya ABJ, terselenggaranya penanganan DBD secara terpadu	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100.00%	
				Program Standarisasi Dan Mutu Pelayanan Kesehatan							Dinkes
				Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Terlaksananya kegiatan pendataan, pengumpulan dan pengolahan data	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Tersedianya pelayanan kesehatan bagi lansia	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9
				Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Terjaga dan terlindunginya kesehatan masyarakat atau masyarakat mendapatkan akses pertolongan gawat darurat segera mungkin	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				Peningkatan Gizi Masyarakat	Meningkatnya derajat gizi masyarakat Kota Balikpapan	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Calon Haji	Para calon jemaah haji terjamin kesehatan	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Tenaga kerja non formal sehat	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				Penanganan Pelayanan Pasien Ketergantungan Napza	Tertanganinya pasien ketergantungan NAPZA	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				Manajemen Desentralisasi Kesehatan	-	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100%	
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR						100%	
				Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin							Dinkes
				Pelayanan Kesehatan Jiwa Dana Mata Untuk Masyarakat	Terwujudnya kelurahan sehat mata dan jiwa	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				Pembayaran iuran BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PBI)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9
				Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya							Dinkes
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskemas	Sarana prasarana pelayanan kesehatan lebih representatif	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				Rehabilitasi Berat/Sedang Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan lebih representatif	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus	-	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				Pembangunan Puskesmas dan Laboratorium	Sarana prasarana pelayanan kesehatan lebih representatif	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100%	
				Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan							Dinkes

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9
				Pelaksanaan Upaya Preventif & Promotif Kesehatan di Puskesmas	Meningkatnya ABJ, menurunan angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru dan menurunnya prevalensi gizi buruk	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100%	
				Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Proporsi Kelahiran yang dibantu tenaga kesehatan terlatih	92.80%	92.80%	92.80%	92.80%	100%	Dinkes
					AKB	6/1.000 KH	6/1.000 KH	6/1.000 KH	6/1.000 KH	100%	
					AKABA	7/1.000 KH	7/1.000 KH	7/1.000 KH	7/1.000 KH	100%	
					AKI	72/100.000 KH	72/100.000 KH	72/100.000 KH	72/100.000 KH	100%	
				Peningkatan Kesehatan Ibu	Menurunnya AKI, AKB dan AKABA kota Balikpapan, menurunnya angka kejadian gizi kurang/gizi buruk dan ketersediaan logistic untuk pelayanan KIA	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100%	
				Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan							Dinkes
				Peningkatan Kualitas Tenaga Pelayanan Kesehatan Melalui Pengiriman Program Pelatihan	-	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9
				Akreditasi Tenaga Fungsional Kesehatan	Peningkatan kinerja SDM Kesehatan disertai pengelolaan asset dinas	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				Pengelolaan Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan	Meningkatnya kapasitas pelayanan institusi kesehatan	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				Pengadaan Perbekalan Kesehatan	-	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100%	
				Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru- paru/rumah sakit mata							Dinkes
				Penyusunan Amdal dan DED	Meningkatnya kinerja karywan RSKB Sayang Ibu	100%	80%	20%	20%	100.00%	RSKB Sayang Ibu
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100.00%	
				Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak							RSKB Sayang Ibu
				Promosi Rumah Sakit	Meningkatnya pelayanan kesehatan di RSKB Sayang Ibu	RSKB Sayang Ibu	80%	20%	20%	100%	RSKB Sayang Ibu
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9
				Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Proporsi Kelahiran yang dibantu tenaga kesehatan terlatih	92.08%	92.80%	92.80%	92.80%	100%	Dinkes
					AKB	0.00%	6/1.000 KH	6/1.000 KH	6/1.000 KH	100%	
					AKABA	0.00%	7/1.000 KH	7/1.000 KH	7/1.000 KH	100%	
					AKI	0.00%	72/100.000 KH	72/100.000 KH	72/100.000 KH	100%	
				Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit Bersalin Sayang Ibu	Meningkatnya kinerja karyawan RSKB Sayang Ibu	100%	80%	20%	20%	100%	RSKB Sayang Ibu
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100%	
				Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan							RSKB Sayang Ibu
				Akreditasi Rumah Sakit	Meningkatnya pelayanan kesehatan di RSKB Sayang Ibu	100%	80%	20%	20%	100.00%	Dinkes
				Pemeliharaan SIM Rumah Sakit	Tersediannya aplikasi SIM Rumah Sakit	100%	80%	20%	20%	100.00%	Dinkes
				Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Meningkatnya kinerja karyawan RSKB Sayang Ibu Balikpapan	100%	80%	20%	20%	100.00%	Dinkes
				Perhitungan Angka Kredit Tenaga Fungsional	Dokumen penilaian angka kredit	100%	80%	20%	20%	100.00%	Dinkes
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100.00%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9
				Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit BLUD RSKB Sayang Ibu							RSKB Sayang Ibu
				Pelayanan Rumah Sakit BLUD Khusus Bersalin Sayang Ibu	Meningkatnya kinerja karyawan RSB Sayang Ibu	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100%	
				Program Upaya Kesehatan Masyarakat	**Angka Kesakitan**	98.11%	98.11%	98.11%	98.11%	100%	RSUD
				Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di RSUD	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan di RSUD	100%	80%	20%	20%	100%	RSUD
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100%	
				Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat							RSUD
				Penunjang Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	Tersedianya Media Promosi Kesehatan	100%	80%	20%	20%	100%	RSUD
				Pembuatan Media Promosi Kesehatan RS	Terpenuhinya Promosi Kesehatan RSUD	100%	80%	20%	20%	100%	RSUD
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100%	
				Program Standarisasi Dan Mutu Pelayanan Kesehatan							RSUD
				Akreditasi Rumah Sakit	Terpenuhinya Persyaratan Izin RS	100%	80%	20%	20%	100%	RSUD
				Pendampingan BLUD	RSUD Dapat Menerapkan Pola PPK BLUD	100%	80%	20%	20%	100%	RSUD

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9
				Pengembangan SIM Rumah Sakit	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu	100%	80%	20%	20%	100%	RSUD
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100%	
				Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata							RSUD
				Pengembangan Ruang Unit Gawat Darurat (UGD)	Terlaksananya Perluasan Ruang UGD	100%	80%	20%	20%	100%	RSUD
				Pengembangan ruang isolasi	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu	100%	80%	20%	20%	100%	RSUD
				Pengadaan obat-obatan rumah sakit	Terpenuhinya Obat Yang Bermutu dan Terjangkau	100%	80%	20%	20%	100%	RSUD
				Pengadaan mebeleur rumah sakit	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan yang bermutu	100%	80%	20%	20%	100%	RSUD
				Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Tersedianya Kebutuhan Peralatan Kesehatan	100%	80%	20%	20%	100%	RSUD
				Pembuatan DED Pengembangan Sarana Prasarana RSUD	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu	100%	80%	20%	20%	100%	RSUD
				Pengadaan Tanah untuk Penataan Lingkungan dan Perluasan Rumah Sakit	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu	100%	80%	20%	20%	100%	RSUD

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9
				Penambahan Ruang Pengambilan Sample dan UTD Laboratorium	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu	100%	80%	20%	20%	100%	RSUD
				Pembuatan Teralis Pengaman Gudang Farmasi	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu	100%	80%	20%	20%	100%	RSUD
				Penambahan Pagar Pengaman di Area RS dan Incenerator	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu	100%	80%	20%	20%	100%	RSUD
				Penambahan Talud/Bronjong Pada Area Ex Longsor	Terpenuhinya Keamanan Fasilitas RS	100%	80%	20%	20%	100%	RSUD
				Pembangunan Rumah WTP dan Bangunan Pencucian Bahan Mentah Instalansi Gizi	Terpenuhinya Keamanan Fasilitas RS	100%	80%	20%	20%	100%	RSUD
				Pembangunan Rumah Tangki BBM	Terpenuhinya Keamanan Fasilitas RS	100%	80%	20%	20%	100%	RSUD
				Pembuatan Instalasi Gas Pada Area Dapur	Terpenuhinya Keamanan Fasilitas RS	100%	80%	20%	20%	100%	RSUD
				Penambahan Sarana Pada Bangunan Laundry	Bangunan Laundry Memenuhi Persyaratan Pengendalian Infeksi	100%	80%	20%	20%	100%	RSUD
				Pengadaan Bahan Kimia	Terpenuhinya Pelayanan di RSUD	100%	80%	20%	20%	100%	RSUD
				Pengadaan Bahan Kemasan Untuk Obat dan Limbah	Terpenuhinya Pelayanan di RSUD	100%	80%	20%	20%	100%	RSUD
				Pembangunan Jalan Akses Masuk Alternatif RS	Terpenuhinya Keamanan Fasilitas RS	100%	80%	20%	20%	100%	RSUD

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9
				Pengembangan Ruang Depo Farmasi	Terlaksananya Perluasan Ruang Depo Farmasi	100%	80%	20%	20%	100%	RSUD
				Pengadaan ABHP Medik dan Non-Medik	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu	100%	80%	20%	20%	100%	RSUD
				Penambahan Ruang Verifikasi	Terlaksanannya Penambahan Ruang Verifikasi	100%	80%	20%	20%	100%	RSUD
				Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	Tersedianya Pengendalian dan pengawasan Infeksi Sesuai Standar	100%	80%	20%	20%	100%	RSUD
				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit	Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang bermutu	100%	80%	20%	20%	100%	RSUD
				Kalibrasi Peralatan Medik	100%	100%	80%	20%	20%	100%	RSUD
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100%	
				Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan							RSUD
				kemitraan pengolahan limbah rumah sakit	Terpenuhinya Pengendalian dan Pengawasan Infeksisesuai Standar	100%	80%	20%	20%	100%	RSUD
				Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit	Terlaksananya pelayanan Rumah Sakit yang berkualitas	100%	80%	20%	20%	100%	RSUD
				Pemantauan Mutu Pelayanan	Terlaksananya pemantauan mutu pelayanan	100%	80%	20%	20%	100%	RSUD

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9
				Operasional Pelayanan Penunjang Medik dan Non- Medik	Terlaksananya pemantauan mutu pelayanan	100%	80%	20%	20%	100%	RSUD
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100%	
				Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan							RSUD
				Pendampingan Penyusunan Clinical Pathway dan Pedoman Terapi Rumah Sakit	Rumah Sakit Memiliki Dokumen Clinical Pathway dan Pedoman Terapi	100%	80%	20%	20%	100%	RSUD
				Pelatihan / Workshop Tenaga Kesehatan dan non-Kesehatan	Terlaksananya pelatihan/workshop untuk tenaga kesehatan dan penunjang di RSUD	100%	80%	20%	20%	100%	RSUD
				Operasional Pengendalian Pelayanan Rumah Sakit	Terpenuhinya Operasional Pelaksanaan Komite Medik, PPI, SPI, Tim Pengendalian Pengawasan RSUD	100%	80%	20%	20%	100%	RSUD
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100%	
				Program Pemeliharaan Kesehatan Aparatur							RSUD
				Medical Check Up bagi Staf	Tersedianya Tenaga Medis dan Tenaga Penunjang Bermutu	100%	80%	20%	20%	100%	RSUD
				Pemeliharaan dan Vaksinasi Hepatitis B	Tersedianya Tenaga Medis dan Tenaga Penunjang Bermutu	100%	80%	20%	20%	100%	RSUD
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100%	
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9
				Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat							Dinkes
				Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak dan Gerakan Sayang Ibu	Meningkatnya Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak dan Gerakan Sayang Ibu	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100%	
				Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita							Dinkes
				Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Terpilihnya posyandu bayi dan balitaterbaik juara I, II dan II	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Pembinaan, evaluasi keluarga kader/ instusi	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	adanya evaluasi / penilaian dan pemberian reward bayi sehat, balita sehat dan pengurus posyandu	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Adanya evaluasi/penilaian dan pemberian reward bayi sehat dan pengurus posyandu	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Terlaksananya pembinaan, evaluasi/penilaian dan pemberian reward bayi sehat, balita sehat dan posyandu	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9
				Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Ad0anya Evaluasi/ Penilaian dan Pemberiaan Reward Bayi Sehat, Balita Sehat dan Pengurus Posyandu	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Adanya evaluasi/penilaian dan pemberian reward bayi sehat, balita sehat dan pengurus Posyandu	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Adanya evaluasi /penilaian dan pemberian reward bayi sehat, balita sehat dan pengurus posyandu	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Meningkatnya kesehatan bayi dan balita	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Cakupan Fasasilitas Posyandu Kelurahan	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Adanya evaluasi/ penilaian dan pemberian reward bayi sehat dan pengurus posyandu	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Pembinaan kader Posyandu, lomba Posyandu, lomba bayi dan balita sehat	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9
				Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Adanya evaluasi/penilaian dan pemberian reward bayi sehat, balita sehat dan pengurus posyandu	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Adanya Evaluasi/Penilaian dan Pemberian Reward Bayi Sehat, Balita Sehat dan Pengurus Posyandu	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Adanya Evaluasi/Penilaian dan Pemberian Reward Bayi Sehat, Balita Sehat dan Pengurus Posyandu	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Adanya Peningkatan Pelayanan Posyandu	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	adanya evaluasi/penilaian dan pembinaan reard bayi sehat,balita sehat, dan pengurus posyandu	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Adanya Evaluasi/penilaian dan Pemberian Reward Bayi sehat,Balita Sehat dan Pengurus Posyandu	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9
				Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Adanya evaluasi/penilaian dan pemberian reward bayi dan balita sehat pembinaan pengurus Posyandu, Pelaksanaan Gertak PSN DBD	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Adanya evaluasi penilaian dan pemberian reward balita sehat	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	adanya evaluasi/penilaian dan pemberian reward bayi sehat dan pengurus posyandu	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	adanya evaluasi penilaian dan pemberian reward bayi balita sehat dan pengurus posyandu serta pembinaan kegiatan jasmani dan rohani	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Terpilihnya posyandu, bayi dan balita terbaik tingkat Kelurahan	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Adanya Evaluasi/ Penilaian dan pemberian reward bayi sehat, balita sehat dan pengurus poyandu	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9
				Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Adanya Evaluasi/penilaian dan pemberian reward bayi sehat, balita sehat, posyandu dan BKB	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Adanya Evaluasi/Penilaian dan Pemberian Reward Bayi Sehat, Balita Sehat, Lomba Jumantik dan Pengurus Posyandu	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Adanya evaluasi/penilaian dan pemberian reward bayi sehat, balita sehat, dan pengurus posyandu	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Adanya Evaluasi /Penilaian dan Pemberian Reward bayi sehat,balita sehat dan pengurus posyandu	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Adanya Penilaian / Evaluasi Dan Pemberian Reward Bayi Sehat, Balita Sehat Dan Pengurus Posyandu	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Adanya Evaluasi/ Penilaian dan pemberian reward bayi sehat, balita sehat, dan posyandu	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9
				Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Adanya Evaluasi / Penilaian dan pemberian reward bayi sehat, balita sehat, posyandu dan BKB	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Adanya evaluasi/penilaian dan pemberian reward bayi sehat, balita sehat dan pengurus posyandu	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Adanya Evaluasi/Penilaian dan pemberian reward bayi sehat, balita sehat dan pengurus posyandu	100%	80%	20%	20%	100%	Dinkes
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9
				Program Penanggulangan Banjir	**Menurunnya Titik Banjir di 47 titik menjadi 35 titik**	47	12	12	12	100.00 %	DPU

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)* 100%	9
				Pengendalian Banjir I	Jumlah bendali pengendali banjir	2	2	1	1	100.00 %	DPU
				Pengendalian Banjir II	Jumlah Panjang sungai yang di normalisasi	3000	2000	1000	1000	100.00 %	DPU
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	**Presentase Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik dari 44,09% (68899 m') menjadi 47,86% (74790 m') dihitung atas panjang drainase akhir tahun 2016 sebesar 156269 m')**	150378	150378	150378	150378	100.00 %	DPU
				Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Panjang saluran drainase	156269	2000	156269	156269	100.00 %	DPU
				Pembangunan Saluran Drainase Pemukiman	Panjang saluran drainase	15000	10000	5000	5000	100.00 %	DPU
				Pemeliharaan Infrastruktur	Panjang saluran drainase yang dipelihara	5	4	1	1	100.00 %	DPU
				Bidang Pengairan	Berfungsinya Drainase Dengan Baik	156269	2000	156269	156269	100.00 %	DPU
				Supervisi Bidang Pengairan	Berfungsinya Drainase Dengan Baik	5	4	1	1	100.00 %	DPU
				Pembangunan Saluran Drainase Pemukiman	Berfungsinya Drainase Dengan Baik	150378	150378	150378	150378	100.00 %	DPU
				Pembangunan Jalan Inspeksi S. Batakan Kecil	-	1	1	1	1	100.00 %	DPU
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100.00	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)* 100%	9
										%	
				Program Sumber Daya Manusia							DPU
				Peningkatan SDM Aparatur PU	Meningkatkan sumber daya manusia pada Dinas PU Kota Balikpapan	5	4	1	1	100.00%	DPU
				Pembinaan Jasa Konstruksi	Terselenggaranya Pembinaan di Bidang Jasa Konstruksi	4	3	1	1	100.00%	DPU
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM		100.00%	
				Program Penelitian							DPU
				Pembuatan DED Bidang Pengairan	Berfungsinya Drainase Dengan Baik	100%	80%	20%	20%	100.00 %	DPU
				Pembuatan DED Bidang Bina Marga	Tersedianya perencanaan jalan sebagai dasar dan kemudahan dalam pelaksanaan dan prasarana transportasi	100%	80%	20%	20%	100.00 %	DPU
				Perencanaan (DED) Bidang Cipta Karya	-	100%	80%	20%	20%	100.00 %	DPU
				Updating Sistem Informasi Manajemen (SIM) Bina Marga	Berfungsinya Jalan dan Jembatan dengan Baik - Berfungsinya Drainase dengan Baik	100%	80%	20%	20%	100.00 %	DPU
				Aplikasi Data ke-Puan	Tersedianya Data yang Akurat	100%	80%	20%	20%	100.00 %	DPU
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM		100.00 %	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)* 100%	9
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum							DPU
				Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih	-	100%	80%	20%	20%	100.00 %	DPU
				Pembangunan Balikpapan Islamic Center	Terbangunnya BIC	1	1	1	1	100.00 %	DPU
				Pembangunan Stadion Balikpapan	Terbangunnya Stadion Balikpapan	1	1	1	1	100.00 %	DPU
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100.00 %	
				Program Pembangunan Peningkatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	**Indeks Aksesibilitas Kawasan Perkotaan**	1.436	1.436	1.436	1.436	100.00 %	DPU
					Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang tersedia	1	1	1	1	100.00 %	
				Pembangunan Jalan	1. Kemudahan dalam pelaksanaan 2. Berfungsinya jalan dengan baik 3. Kelancaran arus lalu lintas	100%	80%	20%	20%	100.00 %	DPU
				Pembangunan Jembatan	1. Kemudahan dalam pelaksanaan 2. Berfungsinya jembatan dengan baik 3. Kelancaran arus lalu lintas	100%	80%	20%	20%	100.00 %	DPU

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)* 100%	9
				Pembangunan Jalan	1. Kemudahan dalam pelaksanaan 2. Berfungsinya jembatan dengan baik 3. Kelancaran arus lalu lintas	100%	80%	20%	20%	100.00 %	DPU
				Supervisi Bidang Ke-Bina Marga-an	Kuantitas dan kualitas terpadu	100%	80%	20%	20%	100.00 %	DPU
				Pemeliharaan Infrastruktur Bidang Bina Marga	-Memperpanjang usia konstruksi selama 1 tahun - Meningkatkan kualitas jalan - Meningkatkan kualitas jembatan	100%	80%	20%	20%	100.00 %	DPU
				Peningkatan Trotoar Dalam Kota	1. Kemudahan dalam pelaksanaan 2. Berfungsinya trotoar dengan baik 3. Kelancaran arus lalu lintas	100%	80%	20%	20%	100.00 %	DPU
				Pembangunan Jalan Sepinggan Baru-Transad KM 8	-			1	1	100.00 %	DPU
				Peningkatan Simpang Jalan	1. Kemudahan dalam pelaksanaan teknis 2. Berfungsinya jalan dengan baik 3. Kelancaran arus lalu lintas	100%	80%	20%	20%	100.00 %	DPU
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100.00 %	
				Program Operasional Pemeliharaan Ke-PU-an							DPU

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)* 100%	9
				Operasional Pemeliharaan Drainase Kota	Meningkatnya Kualitas Drainase Kota	100%	80%	20%	20%	100.00 %	DPU
				Operasional Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-meningkatnya kualitas Jalan - meningkatnya kualitas Jembatan	100%	80%	20%	20%	100.00 %	DPU
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100.00 %	
				Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan							Dishub
				Pembebasan Tanah Terminal Angkutan Kota	Tersedianya lahan terminal untuk angkutan kota	1	1	1	1	100.00 %	Dishub
				Program Peningkatan Pelayanan Angkutan							Dishub
				Penyuluhan terhadap ABK Nahkoda dan Pemilik Kapal di Bawah GT.7	Terkendalinya keselamatan pelayaran di perairan Kota Balikpapan	100%	80%	20%	20%	100.00 %	Dishub
				Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan dan pelajar pelopor keselamatan angkutan jalan	Termotifasinya pengemudi teladan dan pelajar untuk memahami peraturan lalu lintas	100%	80%	20%	20%	100.00 %	Dishub
				Posko Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Hari- Hari Besar Nasional dan Keagamaan	Kelancaran dan ketertiban pengguna jasa angkutan pada Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan	100%	80%	20%	20%	100.00 %	Dishub

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)* 100%	9
				Unit Pengelola Teknis Terminal	Terlaksananya pengelolan terminal dan terpeliharanya fasilitas	5	4	1	1	100.00 %	Dishub
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100.00 %	
				Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan							Dishub
				Peningkatan Prasarana Angkutan Umum Massal (SAUM)	-	100%	80%	20%	20%	100.00 %	Dishub
				Pembangunan Halte Angkutan Kota	-	90%	60%	20%	20%	100.00 %	Dishub
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100.00 %	
				Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas							Dishub
				Peningkatan pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas	Terlaksananya kegiatan operasional	100%	80%	20%	20%	100.00 %	Dishub
				Pengadaan Alat Pendukung Pengendalian dan Operasi	-	100%	80%	20%	20%	100.00 %	Dishub
				Operasi Ketupat Mahakam & Lilin Mahakam	-	100%	80%	20%	20%	100.00 %	Dishub
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100.00 %	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)* 100%	9
				Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor							Dishub
				Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Tercapainya PAD dan peningkatan pelayanan masyarakat	90%	65%	25%	25%	100.00 %	Dishub
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100.00 %	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Laut							Dishub
				Operasional, Pemeliharaan Kapal Patroli dan Perlengkapan Lalu Lintas Laut	-	100%	80%	20%	20%	100.00 %	Dishub
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100.00 %	
				Program Pengembangan Data dan Informasi Perhubungan							Dishub
				Penyusunan Profil dan Update Web Site Dinas Perhubungan Kota Balikpapan	Tersedianya informasi Perhubungan/data transportasi darat, laut dan udara	5 Buku	4	1	1	100.00 %	Dishub
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100.00 %	
				Program Pengembangan Data dan Informasi Perhubungan							Dishub

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)* 100%	9
				Survey Load Factor, Lintas Harian Rata-rata, Persimpangan	Tersedianya data dan informasi/angkutan dan transportasi di ruas jalan/persimpangan di Kota Balikpapan	90%	70%	20%	20%	100.00 %	Dishub
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100.00 %	
				Program Pengembangan Data dan Informasi Perhubungan							Dishub
				Survey Lalu Lintas Angkutan Laut	Tersedianya data dan informasi	1 Dokumen		1	1	100.00 %	Dishub
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100.00 %	
				Program Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Kota							Dishub
				Operasi Pemeriksaan Lalu lintas (Razia) dan Pengawasan, pengendalian, monitoring dan pelaporan lalu lintas dan angkutan jalan	Meningkatnya ketertiban lalu lintas	100%	80%	20%	20%	100.00 %	Dishub
				Unit Pengelola Teknis Parkir	Tertibnya perparkiran	100%	80%	20%	20%	100.00 %	Dishub
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100.00 %	
				Program Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ							Dishub

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)* 100%	9
				Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Ketertiban dan keselamatan lalu lintas	90%	80%	20%	20%	100.00 %	Dishub
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100.00 %	
				Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas							Dishub
				Pengadaan Sarana Lalu Lintas Jalan	Terlaksananya pemahaman peraturan dan kualitas SDM	100%	80%	20%	20%	100.00 %	Dishub
				Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Pembuatan Informasi tentang Tertib Lalu Lintas	Penyelasaian permasalahan LLAJ oleh Forum LLAJ	100%	80%	20%	20%	100.00 %	Dishub
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100.00 %	
				Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas							Dishub
				Evaluasi Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Meningkatnya ketertiban lalu lintas	100%	80%	20%	20%	100.00 %	Dishub
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100.00 %	
				Program Peningkatan Pelayanan Laut							Dishub
				Operasional ,Pemeliharaan Kapal Patroli dan Perlengkapan Lalu Lintas Laut.	Terkendalinya keselamatan pelayaran di perairan Kota Balikpapan	100%	80%	20%	20%	100.00 %	Dishub
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100.00 %	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)* 100%	9
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepelabuhanan							Dishub
				Pemeliharaan Fasilitas Dermaga Kp. Baru Tengah, dan Monitoring TUKS/Kepelabuhanan	Meningkatnya keselamatan dan keamanan dermaga serta kapal yang tambat/labuh	5	4	1	1	100.00 %	Dishub
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100.00 %	
				Program Peningkatan dan Pengawasan POS, Telekomunikasi dan Informatika							Dishub
				Pengawasan dan Pengendalian Jasa Titipan dan Menara Telekomunikasi	Tertibnya pelaksanaan jasa titipan dan monitoring menara telekomunikasi	100%	80%	20%	20%	100.00 %	Dishub
				Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan							Dishub
				Study s/d DED Pengembangan Trayek/Koridor Angkutan Umum	Terpenuhinya taryek Angkutan Umum	1	0	1	1	100.00 %	Dishub
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100.00 %	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)* 100%	9
				Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Sistem Informasi Pelayanan Angkutan							Dishub
				Sistem Informasi Manajemen Angkutan Umum (SIMAU)	Tersedianya sistem dan data pelayan angkutan umum	1	1	1	1	100.00 %	Dishub
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100.00 %	
				Program Peningkatan Kualitas Perumahan Sehat							
				Fasilitasi Pokja AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)	Terlaksananya AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)	1	1	1	1	100.00 %	DTKP
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100.00 %	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum							
				Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih	-	100%	80%	20%	20%	100.00 %	DTKP
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100.00 %	
				Program Penataan Struktur Industri							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)* 100%	9
	Pembangunan Jaringan Listrik, Air Bersih dan Air Limbah untuk 20 Unit Rumah	Tersedia sarana mendistribusikan listrik dan air bersih serta pembuangan air limbah yang menunjang produksi	100%	80%	20%	20%	100.00 %	DTKP
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100.00 %	
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru- paru/rumah sakit mata							
	Pengadaan Bahan Kemasan Untuk Obat dan Limbah	Terpenuhinya Pelayanan di RSUD	100%	80%	20%	20%	100.00 %	RSUD
	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	Tersedianya Pengendalian dan pengawasan Infeksi Sesuai Standar	100%	80%	20%	20%	100.00 %	RSUD
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100.00 %	
	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan							
	kemitraan pengolahan limbah rumah sakit	Terpenuhinya Pengendalian dan Pengawasan Infeksisesuai Standar	100%	80%	20%	20%	100.00 %	RSUD
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100.00 %	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)* 100%	9
				Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup							
				Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dan Pemberian Izin Pengelolaan Limbah B3	- Terdokumentasinya hasil peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan - Terdokumentasinya Izin tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 Perusahaan	5	4	1	1	100.00 %	BLH
				Pengendalian Pencemaran Air Limbah	Terkendali dan tercipta ketaatan kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran air terhadap peraturan / ketentuan lingkungan hidup	100%	80%	20%	20%	100.00 %	BLH
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100.00 %	
				Program Penataan Struktur Industri							
				Pembangunan Jaringan Listrik, Air Bersih dan Air Limbah untuk 20 Unit Rumah	Tersedia sarana mendistribusikan listrik dan air bersih serta pembuangan air limbah yang menunjang produksi	20	0	20	20	100.00 %	BLH
				Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi							

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)* 100%	9
				Penyelenggaraan Promosi Investasi	Terpromosinya potensi investasi/penanaman modal di Kota Balikpapan	100%	80%	20%	20%	100.00 %	BPMP2T
				Temu Usaha dan Seminar Potensi Investasi Kota Balikpapan	Tumbuhnya minat investor dalam dan luar daerah	100%	80%	20%	20%	100.00 %	BPMP2T
				penyediaan Bahan/Materi/Media Informasi Layanan Perizinan dan Investasi	Tersedianya pengadaan sarana/media informasi layanan perizinan dan investasi	100%	80%	20%	20%	100.00 %	BPMP2T
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100.00 %	
				Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi							
				Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	Tertibnya administrasi perizinan kegiatan penanaman modal/investasi di Kota Balikpapan	100%	80%	20%	20%	100.00 %	BPMP2T
				Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Penanaman Modal dan Investasi di Kota Balikpapan	Terlaksananya kegiatan pengendalian dan pengawasan kegiatan Penanaman Modal	100%	80%	20%	20%	100.00 %	BPMP2T
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100.00 %	
				Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi							

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)* 100%	9
				Masterplan pengembangan UMKM	Tersedianya dokumen tentang masterplan pengembangan UMKM	1	0	1	1	100.00 %	Disperindagkop
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100.00 %	
				Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif							
				Pembinaan dan Pengembangan SDM UMKM	Meningkatnya jumlah UMKM. Meningkatnya Kwalitas Jaminan Kredit bagi UMKM	100%	80%	20%	20%	100.00 %	Disperindagkop
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100.00 %	
				Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah							
				Pembinaan dan Temu Usaha Kemitraan Bagi UMKM di Kota Balikpapan	Meningkatnya kualitas SDM dan pengetahuan/kewirausahaan bagi UMKM dan Gakin	320.00	160.00	80.00	80.00	100.00 %	Disperindagkop
				Pembinaan dan Temu Usaha Kemitraan Bagi UMKM di Kota Balikpapan	meningkatnya kualitas SDM dan pengetahuaan / kewirausahaan bagi UMKM dan gakin	320.00	160.00	80.00	80.00	100.00 %	Disperindagkop

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)* 100%	9
					meningkatnya kualitas SDM dan pengetahuaan / kewirausahaan bagi UMKM dan gakin	100%	80%	20%	20%	100.00 %	Disperindagkop
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100.00 %	
				Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan							
				Pendataan UMKM	Terhimpunnya data UMKM wilayah Kelurahan Teritip	1		1	1	100.00 %	Disperindagkop
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100.00 %	
				Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah							
				Inventarisasi Koperasi, UMKM, dan PKL	-	15000	12000	3000	3000	100.00 %	Disperindagkop
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100.00 %	
				Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan							

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)* 100%	9
				Inventarisasi Koperasi, UMKM, dan PKL	Tersedianya informasi mengenai kegiatan perindustriaan, kepariwisataan,perkoperasia n, usaha kecil menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah.	15000	12000	3000	3000	100.00 %	Disperindagkop
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100.00 %	
				Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri							Disperindagkop
				Peningkatan Kelancaran Distribusi Ketahanan Pangan, Stabilitas Harga dan Pengembangan Produk dalam Negeri	meningkatnya Kelancaran distribusi ketahanan pangan, stabilitas harga dan pengembangan produk dalam Negeri	100%	80%	20%	20%	100.00 %	Disperindagkop
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100.00 %	
				Program Peningkatan Ketahanan Pangan							Sekretariat Daerah
				Penguatan implementasi standar pelayanan minimal (SPM) di bidang ketahanan pangan	meningkatnya pemahaman penyusunan SPM bidang ketahanan pangan dan tersusunnya laporan SPM	100%	80%	20%	20%	100.00 %	Sekretariat Daerah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2016 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD tahun 2016	Realisasi RKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)* 100%	9
				Koordinasi Penguatan Ketahanan Pangan di Kota Balikpapan	Terlaksanya kerjasama daerah bidang ketahanan pangan dan perekonomian	100%	80%	20%	20%	100.00 %	Sekretariat Daerah
				Penguatan Diiversifikasi Ketahanan Pangan dan Keamanan Pangan	meningkatnya pemahanan masyarakat tentang keamanan pangan dan pemanfaatan lahan pekarangan dan mengikuti hari ketahanan pangan nasional dan diversifikasi pangan provinsi	100%	80%	20%	20%	100.00 %	Sekretariat Daerah
				Kajian Akademis Raperda Ketahanan Pangan	tersusunnya analisa raperda ketahanan pangan	1 Dokumen		1	1	100.00 %	Sekretariat Daerah
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM						100.00 %	

2.2.10. Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan 2011 Sampai dengan 2016

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota ke dalam strategi Pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Walikota, dan arah kebijakan keuangan Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025.

RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 ditetapkan pada tanggal 13 Desember 2011, dengan pelaksanaan RKPD tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Mengingat RKPD Kota Balikpapan Tahun 2014 sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 telah ditetapkan terlebih dahulu, mengandung konsekuensi antara lain sebagai berikut:

a. Target dan pagu indikatif program dalam RKPD Tahun 2014 menjadi target dan pagu indikatif program pada tahun Ketiga pelaksanaan RPJMD Tahun 2011-2016.

b. Target dan pagu indikatif kegiatan dalam RKPD Tahun 2014 menjadi target dan pagu indikatif kegiatan pada tahun Ketiga pelaksanaan Renstra SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.

Catatan ini perlu mendapat perhatian dalam pengendalian dan evaluasi RPJMD maupun Renstra SKPD, mengingat berdasarkan analisis terhadap Renstra SKPD, ditemukan bahwa pagu indikatif Renstra SKPD untuk tahun 2014 tidak sesuai dengan RPJMD.

Realisasi anggaran RPJMD merupakan akumulasi realisasi anggaran tahunan dalam RKPD selama 5 tahun. Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD dapat diwujudkan.

Realisasi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016 sesuai dengan hasil RKPD Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.77 Realisasi Tingkat Capaian RPJMD Terhadap Realisasi APBD Kota Balikpapan sampai dengan Tahun 2016

No.	Nama SKPD	Pagu Indikatif (RPJMD)	Realisasi Anggaran Sampai dengan 2016	Tingkat Capian Kinerja RPJMD Tahun 2016	
		Rp.	Rp.	K (%)	Rp.(%)
1	2	3		5	6
1	**Urusan Wajib**				
1.01.01	Dinas Pendidikan	514.509.722.929	569,390,136,119.00	93.89%	98.23%
1.02.01	Dinas Kesehatan	201.950.423.729	405,558,774,833.05	93.51%	184.64%
1.02.02	RSKB Sayang Ibu		36,259,688,882.41	107.05%	13.81%
1.02.03	RSUD Balikpapan	-	25,373,090,831.61	5.28%	5.89%
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	1.250.132.011.164	2,076,171,036,543.94	84.93%	127.18%

No.	Nama SKPD	Pagu Indikatif (RPJMD)	Realisasi Anggaran Sampai dengan 2016	Tingkat Capian Kinerja RPJMD Tahun 2016	
		Rp.	Rp.	K (%)	Rp.(%)
1.04.01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	70.320.390.064	51,438,096,819.00	101.62%	55.04%
1.05.01	Dinas Tata Kota dan Perumahan	163.984.462.956	67,143,158,596.00	103.72%	38.63%
1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	40.826.963.333	54,115,321,250.00	103.54%	104.33%
1.07.01	Dinas Perhubungan	237.479.995.416	47,713,056,976.00	105.05%	16.38%
1.08.01	Badan Lingkungan Hidup	174.738.140.586	51,185,967,659.00	100.07%	25.72%
1.08.02	Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Permakaman	142.657.058.663	305,165,906,865.00	107.04%	172.15%
1.10.01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	18.925.335.607	26,495,419,755.00	106.86%	114.65%
1.12.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan KB	10.584.853.269	27,504,478,023.00	104.54%	192.53%
1.14.01	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	21.768.905.770	21,874,051,775.00	96.87%	77.59%
1.15.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	32.838.600.000	39,735,154,741.00	101.52%	103.47%
1.16.01	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	21.504.850.000	19,885,828,946.00	102.83%	74.24%
1.19.01	Kantor Kesbang dan Politik	20.489.568.559	12,462,860,419.00	94.86%	53.03%
1.19.02	Satuan Polisi Pamong Praja	30.734.352.839	18,383,582,496.00	96.69%	47.61%
1.20.03	Sekretariat Daerah	135.738.341.977	901,358,253,573.00	87.23%	512.22%
1.20.04	Sekretariat DPRD	73.000.000.000	103,176,660,191.50	88.26%	134.34%
1.20.05	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	488.805.585.079	48,003,744,584.00	96.67%	8.61%
1.20.06	Badan Kepegawaian Daerah	68.827.860.600	46,237,689,015.00	105.39%	58.02%
1.20.07	Inspektorat	14.703.642.350	18,147,274,183.00	105.87%	102.45%
1.20.08	Dinas Pendapatan Daerah	83.812.045.090	32,032,234,777.00	104.01%	34.81%
1.20.09	Kec. Balikpapan Timur	6.500.000.000	7,226,343,070.00	107.43%	78.47%
1.20.10	Kec. Balikpapan Barat	6.500.000.000	7,736,257,302.00	109.49%	92.74%
1.20.11	Kec. Balikpapan Utara	6.500.000.000	6,799,756,140.00	110.73%	83.55%
1.20.12	Kec. Balikpapan Tengah	6.500.000.000	7,184,741,770.00	111.49%	78.35%
1.20.13	Kec. Balikpapan Selatan	6.500.000.000	7,776,620,393.00	108.31%	94.48%
1.20.14	Kec. Balikpapan Kota	5.500.000.000	6,393,716,453.00	74.46%	84.01%
1.20.15	Kelurahan Manggar	5.000.000.000	3,722,981,828.00	96.05%	73.52%
1.20.16	Kelurahan Lamaru	5.000.000.000	3,523,199,766.00	100.52%	59.98%
1.20.17	Kelurahan Teritip	5.000.000.000	3,395,632,947.00	104.40%	55.46%
1.20.18	Kelurahan Manggar Baru	5.000.000.000	3,819,239,692.00	105.40%	67.36%
1.20.19	Kelurahan Baru Ilir	5.000.000.000	4,334,316,648.00	107.65%	74.14%
1.20.20	Kelurahan Baru Tengah	5.000.000.000	3,680,469,417.00	107.04%	60.31%
1.20.21	Kelurahan Baru Ulu	5.000.000.000	826,848,962.69	111.02%	68.86%
1.20.22	Kelurahan Kariangau	5.000.000.000	2,665,655,306.00	109.15%	43.46%
1.20.23	Kelurahan Margo Mulyo	5.000.000.000	3,761,118,741.00	127.38%	65.96%
1.20.24	Kelurahan Margasari	5.000.000.000	3,707,363,235.00	107.88%	63.77%

No.	Nama SKPD	Pagu Indikatif (RPJMD)	Realisasi Anggaran Sampai dengan 2016	Tingkat Capian Kinerja RPJMD Tahun 2016	
		Rp.	Rp.	K (%)	Rp.(%)
1.20.25	Kelurahan Batu Ampar	5.000.000.000	4,185,345,301.00	99.82%	71.99%
1.20.26	Kel. Gunung Samarinda	5.000.000.000	4,365,715,008.00	108.26%	74.08%
1.20.27	Kelurahan Karang Joang	5.000.000.000	4,387,302,735.00	101.11%	69.01%
1.20.28	Kelurahan Muara Rapak	5.000.000.000	4,646,745,268.00	107.98%	76.55%
1.20.29	Kel. Gn. Samarinda Baru	4.500.000.000	2,845,258,581.00	74.41%	49.17%
1.20.30	Kelurahan Graha Indah	4.500.000.000	3,238,508,403.00	68.33%	61.07%
1.20.31	Kelurahan Gunung Sari Ulu	5.000.000.000	2,635,435,269.00	101.72%	43.85%
1.20.32	Kelurahan Gunung Sari Ilir	5.000.000.000	4,621,725,957.00	106.13%	74.28%
1.20.33	Kelurahan Karang Rejo	5.000.000.000	4,804,106,505.00	109.59%	80.58%
1.20.34	Kelurahan Karang Jati	5.000.000.000	3,459,884,952.00	108.60%	58.33%
1.20.35	Kelurahan Mekar Sari	5.000.000.000	3,295,712,637.00	94.10%	52.73%
1.20.36	Kelurahan Sumber Rejo	5.000.000.000	3,517,858,975.00	95.47%	57.73%
1.20.37	Kelurahan Sepinggan	5.000.000.000	3,805,197,415.00	94.88%	74.97%
1.20.38	Kelurahan Gunung Bahagia	5.000.000.000	4,043,313,224.00	97.35%	75.44%
1.20.39	Kelurahan Sepinggan Baru	4.500.000.000	3,645,156,936.00	77.25%	56.59%
1.20.40	Kelurahan Sepinggan Raya	4.500.000.000	3,275,625,559.00	77.46%	53.62%
1.20.41	Kelurahan Sungai Nangka	4.500.000.000	3,533,722,265.00	77.88%	55.49%
1.20.42	Kelurahan Damai Baru	4.500.000.000	2,679,505,818.00	75.50%	44.47%
1.20.43	Kelurahan Damai Bahagia	4.500.000.000	3,035,398,887.00	68.94%	53.36%
1.20.44	Kelurahan Prapatan	4.500.000.000	3,599,566,554.00	103.45%	64.62%
1.20.45	Kelurahan Telaga Sari	5.000.000.000	3,096,485,503.00	94.29%	54.76%
1.20.46	Kelurahan Klandasan Ulu	5.000.000.000	4,399,792,301.00	109.43%	72.16%
1.20.47	Kelurahan Klandasan Ilir	5.000.000.000	4,286,479,014.00	108.95%	73.74%
1.20.48	Kelurahan Damai	5.000.000.000	3,077,423,434.00	90.09%	59.96%
1.24.01	Kantor Arsip dan Perpustakaan	26.948.031.224	26,059,981,087.00	109.23%	83.65%
2	**Urusan Pilihan**				
2.01.01	DPKP	43.220.000.000	57,032,155,053.00	104.77%	123.26%
2.04.01	Disporabudpar	731.876.173.548	56,687,246,816.00	105.67%	6.88%
2.06.01	Dinas Pasar	42.292.000.000	24,106,311,781.00	100.34%	56.53%
JUMLAH		**4.866.669.314.752**	**5,333,732,690,762.20**	**98.04%**	**77.63%**

Sumber data : hasil monitoring pembangunan

Tabel di atas Berdasarkan laporan hasil evaluasi Renja SKPD Kota Balikpapan Tahun 2016, realisasi anggaran RPJMD sampai dengan Semester II Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Menggambarkan bahwa total pagu indikatif seluruh program dalam RPJMD Tahun 2011-2016 adalah Rp. 4.866.669.314.752,- dengan realisasi sampai dengan tahun 2016 sejumlah Rp.5.333.732.690.762 atau 109,60%. Untuk tingkat capaian kinerja RPJMD Kota Balikpapan ditinjau dari pelaksanaan APBD Kota Balikpapan pada Tahun 2016 Semester II diperoleh

tingkat rata-rata capaian kinerja sebesar 98,04% dan realisasi anggaran 77,63%.

5.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah terus saja menjadi sorotan publik. Masyarakat yang semakin cerdas kini banyak mempersoalkan kebijakan pembangunan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Permasalahan pembangunan daerah merupakan "gap expectation" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Berikut ini disajikan permasalahan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan:
   - Standar sumber daya, sarana prasarana dan proses pendidikan perlu ditingkatkan.
   - Peningkatan mutu sekolah belum optimal (pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, Sertifikasi ISO)
   - Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan perlu ditingkatkan.
   - Tingkat ketersediaan *database* pendidikan masih perlu ditingkatkan, termasuk *database* terpilah berdasarkan gender.
   - Masih ada sekolah yang menerapkan double shift dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, terutama pada sekolah-sekolah yang diminati masyarakat.
2. Kesehatan:
   - Akses seluruh lapisan masyarakat terhadap tingkat pelayanan kesehatan yang bermutu perlu ditingkatkan.
   - Rasio tenaga medis terhadap satuan penduduk perlu ditingkatkan.
   - Masih kurangnya Puskesmas Pembantu sebanyak 17 unit dalam periode 2015-2020 berdasarkan Standar SNI 03-1733-2004, yaitu 1 Pustu = 30.000 Penduduk.
   - Masih relatif tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) yaitu 14 kasus (124/100.000 KH) dengan perhitungan jumlah kelahiran hidup di kota Balikpapan sebanyak 11.312 KH tahun 2014 (LAKIP Kota Balikpapan 2014).
   - PHBS masyarakat perlu ditingkatkan.
   - Belum tersedianya ruang laktasi dan ruangan khusus untuk santun lansia pada seluruh Puskesmas karena keterbatasan ruangan dan lahan pada setiap pembangunan Puskesmas.
   - Koneksi jaringan internet Puskesmas ke jaringan internet Pemerintah Kota perlu ditingkatkan.

- Peran serta segenap *stakeholder* terhadap peningkatan kesehatan belum optimal.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
   - Penyediaan sumber air baku belum memadai untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.
   - Belum optimalnya penyediaan infrastruktur air minum, air limbah, drainase dan persampahan.
   - Prasarana pengendali banjir masih perlu ditingkatkan karena titik banjir masih mencapai 42 titik (LAKIP Kota Balikpapan 2014).
   - Kemantapan dan kondisi jalan perlu dijaga dan lebih ditingkatkan, termasuk pengembangan akses jalan untuk dilewati kontainer dengan ukuran lebih dari 20 ft.
   - Peningkatan kapasitas ruas jalan dan kapasitas simpang belum optimal.
   - Kepastian hukum akan penggunaan ruang perlu dioptimalkan.
   - Pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang kota dan kesadaran masyarakat terhadap rencana tata ruang yang berlaku masih perlu ditingkatkan.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:
   - Penataan dan penyediaan hunian vertikal serta permukiman yang layak dengan akses sanitasi yang memadai perlu lebih ditingkatkan.
   - Masih ada kawasan permukiman kumuh.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat:
   - Pemeliharaan kerukunan perlu selalu ditingkatkan.
   - Jumlah kelompok siskamling aktif perlu dipertahankan.
   - Jumlah kelurahan sadar hukum perlu ditingkatkan.
   - Penegakan Perda dan Peraturan Walikota perlu ditingkatkan.
   - Sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan bencana perlu ditingkatkan.

6. Sosial:
   - Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial belum optimal.
   - Kerjasama Pemerintah Kota Balikpapan dengan stakeholders dalam memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial perlu ditingkatkan.
   - Ketiadaan panti sosial dan rehabilitasi yang dikelola Pemerintah Kota Balikpapan dalam rangka pelayanan dan perlindungan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (catatan: Perlu mencermati peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, karena dalam Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Subbidang Rehabilitasi Sosial, kewenangan Daerah Kabupaten/Kota diatur sebagai berikut: “Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban

penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human ImmunodeficiencyVirus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum").

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja:
   - Tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi.
   - Keterampilan dan kecakapan tenaga kerja yang sesuai dengan sektor ekonomi yang membutuhkannya masih perlu ditingkatkan untuk mendukung daya saing daerah.
   - Standarisasi dan sertifikasi mutu, kompetensi serta keahlian tenaga kerja sesuai SKKNI dan/atau standar internasional belum dimiliki semua tenaga kerja.
   - Kualitas lembaga pelatihan kerja perlu ditingkatkan agar dapat mencapai dan menerapkanKerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
   - Database tenaga kerja perlu ditingkatkan (misalnya: per sektor PDRB, yang belum dan sudah bersertifikasi)
2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak:
   - Capaian Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender perlu ditingkatkan.
   - Upaya untuk menekan pengaruh negatif globalisasi terhadap anak dan remaja perlu ditingkatkan.
   - Partisipasi perempuan dalam tenaga kerja perlu ditingkatkan.
   - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga dalam rangka kesetaraan gender perlu ditingkatkan.
   - Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat kota perlu dioptimalkan.
3. Pangan:
   - Pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi perlu ditingkatkan.
   - Pemantauan distribusi, harga, dan akses pangan masyarakat perlu lebih dioptimalkan.
4. Pertanahan:
   - Perencanaan penggunaan tanah hamparan serta inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong perlu dioptimalkan sesuai peruntukan berdasarkan rencana tata ruang.
   - Belum optimalnya akselerasi pembebasan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum.
5. Lingkungan Hidup:
   - Koordinasi pengawasan bagi setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan belum optimal.
   - Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup perlu ditingkatkan.
   - Penyediaan ruang terbuka hijau perlu ditingkatkan.

- Kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri perlu ditingkatkan.
- Pengembangan IPAL komunal dan prasarana air limbah individual pada kawasan permukiman perlu ditingkatkan.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
   - Kurangnya pemahaman sebagian masyarakat akan pentingnya kepemilikan akte kelahiran.
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
   - Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan, RW dan RT perlu ditingkatkan.
   - Inovasi dan pemanfaatan TTG perlu ditingkatkan.
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:
   - Laju pertumbuhan penduduk (WNI) cenderung meningkat.
   - Migrasi netto cenderung meningkat.
   - Jumlah peserta KB baru perlu ditingkatkan.
   - Bina Keluarga Balita Mandiri, cakupan PUS peserta KB serta anggota Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Remaja ber-KB perlu ditingkatkan.
   - Masih terdapatnya perkawinan usia muda. Upaya untuk menekan perkawinan usia muda perlu ditingkatkan, karena menikah pada usia remaja (15-19 tahun) mempunyai berbagai risiko fisik, psikis dan finansial (Data Profile Kependudukan 2014: Dari 1000 penduduk Balikpapan usia 15+ terdapat 601 orang berstatus kawin. Artinya, lebih dari separuh penduduk usia 15 tahun keatas sudah menikah).
9. Perhubungan:
   - Pengembangan sarana angkutan umum massal yang efektif, efisien dan terintegrasi belum optimal.
   - Sistem perparkiran off street berupa pelataran parkir dan gedung parkir belum optimal.
   - Penurunan jumlah Angkutan Kota belum optimal.
10. Komunikasi dan Informatika:
    - Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) belum optimal.
    - Pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dalam pelaksanaan e-Goverment untuk meningkatkan pelayanan publik mendukung Balikpapan Cyber City belum optimal.
    - Pengelolaan informasi dan komunikasi publik sebagai bagian keterbukaan informasi perlu ditingkatkan.
11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah:
    - Penguatan modal koperasi perlu ditingkatkan sehingga tidak hanya bergantung pada simpanan anggota.
    - Partisipasi anggota koperasi masih perlu ditingkatkan.
    - Jumlah SDM pembina koperasi perlu ditingkatkan.
    - Ketersediaanbahan baku industri yang tersedia di Kota Balikpapan masih terbatas.
    - Inovasi produk masih rendah sehingga produk mudah ditiru oleh pelaku UMKM lain.

- Sarana produksi cenderung tradisional dan tempat usaha cenderung memanfaatkan tempat tinggal.
- Keterbatasan informasi peluang pasar dalam dan luar negeri karena UMKM masih belum optimal memanfaatkan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
- Keterbatasan permodalan serta terbatasnya akses ke lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan bank karena aspek legalitas usaha.
- Produk unggulan UMKM perlu ditingkatkan.

12. Penanaman Modal:
    - Kepastian hukum bagi investor perlu ditingkatkan, terutama berkenaan dengan kepastian peruntukan lahan.
    - Sistem informasi manajemen pelayanan perizinan dan investasi belum memadai.
    - Pelibatan stakeholders dalam pembahasan regulasi yang dapat menghambat investasi dan mempercepat proses pelayanan perizinan (Standar Pelayanan) belum optimal.
13. Kepemudaan dan Olah Raga:
    - Semangat kewirausahaan dan pendidikan karakter pemuda perlu ditingkatkan.
    - Peran serta pemuda dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba belum optimal.
    - Standar mutu organisasi kepemudaan perlu ditingkatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - Pembinaan olahraga prestasi perlu ditingkatkan.
    - Peran serta masyarakat dalam olah raga rekreasi perlu ditingkatkan.
14. Statistik:
    - Ketersediaan data statistik daerah yang terpadu, up to date, valid dan komprehensif perlu ditingkatkan.
    - Ketersediaan data terpilah berdasarkan gender perlu ditingkatkan.
15. Persandian:
    Kebijakan keamanan dan pengamanan informasi yang belum terintegrasi dan terkoordinasi dalam kebijakan pemerintahan.
16. Kebudayaan:
    - SDM Kesenian perlu ditingkatkan.
    - Sarana pemasaran produk seni budaya daerah belum opmtimal.
    - Pengelolaan keragaman budaya dan seni yang berciri khas Kota Balikpapan belum optimal.
17. Perpustakaan:
    - Minat baca masyarakat masih perlu ditingkatkan.
    - Peningkatan SDM pengelola perpustakaan belum optimal.
18. Kearsipan.
    - Ketersediaan SDM pengelola kearsipan yang handal dan profesional perlu ditingkatkan.
    - Kualitas pelayanan informasi kearsipan masih perlu ditingkatkan.

- Budaya tertib arsip di jajaran aparatur pemerintah daerah dan masyarakat perlu ditingkatkan.

Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Perikanan:
   - Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan perlu ditingkatkan.
   - Penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perikanan budidaya perlu ditingkatkan.
   - Produksi budidaya perikanan perlu ditingkatkan.
2. Pariwisata:
   - Kualitas daya tarik obyek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kota Balikpapan masih perlu ditingkatkan.
   - Belum optimalnya pendayagunaan seluruh potensi wisata.
   - Standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata masih minim.
   - Sertifikasi kompetensi tenaga kerja bidang pariwisata belum optimal.
   - Belum tersedianya data asal negara wisatawan mancanegara.
3. Pertanian:
   - Pengembangan produk unggulan pepaya mini belum optimal.
   - Semakin menyempitnya kepemilikan lahan petani karena meningkatnya rumah tangga petani dan meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian sehingga dominasi kepemilikan lahan petani khususnya sawah hanya < 0,5 hektar. Pemilikan lahan yang sempit mengakibatkan skala usaha yang tidak efisien dan rentan dalam kemandirian pangan karena lebih bersifat subsisten.
   - Munculnya fenomena aging farmer, tenaga kerja pertanian didominasi oleh tenaga kerja tua sedangkan tenaga kerja muda dan berpendidikan semakin enggan bekerja di sektor pertanian.
   - Terbatasnya infrastruktur pertanian sehingga mengakibatkan masih rendahnya produktivitas tanaman dan rendahnya produktivitas sektor pertanian.
   - Rendahnya transfer teknologi sehingga sulit dan lamban untuk meningkatkan produktivitas.
   - Lambannya perkembangan mekanisasi baik pra maupun pasca panen.
   - Lemahnya kinerja kelembagaan petani dan perilaku petani yang masih berusahatani sendiri serta pendidikan dan keterampilan yang rendah.
   - Langkanya dokumen kepemilikan lahan.
   - Terbatasnya modal kerja dan kesulitan mengakses dana perbankan karena tidak terpenuhi persyaratan agunan.
4. Kehutanan:
   - Ketersediaan dan kelestarian Taman Hutan Raya perlu ditingkatkan.
5. Energi dan Sumber Daya Mineral:
   - Keterbatasan daya listrik untuk memenuhi seluruh kebutuhan sehingga koordinasi dan kerjasama penyediaan daya listrik perlu ditingkatkan.
   - Pengembangan energi terbarukan sebagai sumber energi belum optimal, misalnya PLTS skala mikro.
6. Perdagangan:

- Perkembangan kawasan perdagangan yang berwawasan lingkungan belum optimal.
- Jumlah sarana perdagangan masih perlu ditingkatkan seiring dengan pertumbuhan penduduk.
- Ekspor bersih perdagangan masih perlu ditingkatkan.
- Belum valid dan up to date ketersediaan data mengenai jenis, jumlah/banyaknya, nilai dan tujuan negara ekspor.
- Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB perlu ditingkatkan.

7. Perindustrian:
   - Perkembangan kawasan industri yang berwawasan lingkungan belum optimal.
   - Pengembangan kawasan industri dalam rangka meningkatkan daya saing industri perlu ditingkatkan.
   - Daya saing produk IKM dan kemitraan IKM dengan industri besar masih perlu ditingkatkan.
   - Belum optimalnya pengembangan industri pengolahan yang mengolah bahan mentah menjadi produk turunan dengan nilai tambah tinggi.
   - Kontribusi sektor industri terhadap PDRB perlu ditingkatkan.

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH TAHUN 2018

Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, pembagian pendapatan masyarakat yang merata, meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah, serta mengusahakan terjadinya pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder atau tersier. Dan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi tersebut mutlak diperlukan perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang tepat, agar pembangunan yang dilaksanakan bisa tepat waktu dan tepat sasaran sehingga dapat memaksimalkan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial yang merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja, maka melalui kerangka ekonomi makro daerah dapat memberikan gambaran kondisi ekonomi makro serta tantangan dan prospek perekonomian guna penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah guna mencapai pembangunan ekonomi dimaksud.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi merupakan bagian yang integral dari proses yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat hal ini dapat terwujud bila pertumbuhan ekonomi berlangsung secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, dalam sub bab ini diuraikan kondisi ekonomi, perkembangan, perkiraan, serta risiko perlambatan ekonomi yang dihadapi Kota Balikpapan dalam tahun 2018, dimana kondisi perekonomian Kota Balikpapan sangat dipengaruhi oleh perekonomian nasional dan regional provinsi Kalimantan Timur

3.1.1. Perekonomian Nasional

Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2017 akan pulih dan tumbuh 2,7 persen. Hal ini menciptakan peluang kebangkitan ekonomi, khususnya untuk negara-negara berkembang di dunia, tak terkecuali Indonesia. Pertumbuhan ekonomi global yang lebih tinggi tahun ini dinilai bisa membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, dari sisi ekspor, membaiknya harga komoditas juga akan berakibat pada peningkatan permintaan global, khususnya komoditas energi

seperti minyak dunia. Peningkatan harga komoditas energi juga akan mendorong pertumbuhan investasi ke sektor energi yang sempat negatif pada beberapa tahun terakhir.

Peningkatan harga komoditas energi juga akan meningkatkan daya beli kelompok masyarakat yang pendapatannya bergantung pada sektor energi, seperti minyak, gas dan batu bara. Selain itu, pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih cepat juga berpeluang meningkatkan permintaan global terhadap komoditas ekspor non-energi Indonesia, seperti produk tekstil. Walaupun dari sisi eksternal, risiko terbesar bagi perekonomian Indonesia yang memasuki fase pemulihan diperkirakan masih berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Amerika Serikat (AS). Perlambatan ekonomi RRT yang terjadi sejak akhir tahun lalu diperkirakan masih akan terjadi selama beberapa waktu ke depan. Sebagai negara importir terbesar kedua di dunia, perlambatan ekonomi di RRT tidak hanya merugikan mitra dagangnya secara langsung namun juga menyebabkan penurunan permintaan dunia secara keseluruhan, yang akhirnya dapat berujung pada perlambatan ekonomi global. Kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah RRT di tengah kondisi global yang melemah, serta sejauh mana kebijakan tersebut akan efektif mengurangi perlambatan ekonomi tersebut, perlu dipantau oleh Pemerintah Indonesia agar dapat menyusun kebijakan antisipasi yang tepat. Secara umum berdasarkan kondisi ekonomi global ada beberapa hal yang berpengaruh terhadap prospek perekonomian nasional diantaranya:

1. Pemulihan moderat perekonomian ekonomi global pada tahun mendatang dengan laju pertumbuhan pada tahun 2017 dan tahun 2018 masing-masing diprediksi 2,7% dan 2,9%.
2. Tingkat pertumbuhan pada tahun 2017 lebih cepat daripada perkiraan pertumbuhan 2,3 % pada tahun 2016, namun 0,1 persentase poin lebih rendah dari proyeksi yang dibuat pada tahun 2016, dengan mengaitkan sedikit percepatan dalam pertumbuhan terhadap perbaikan di negara-negara *emerging market* dan negara-negara berkembang, karena diharapkan berkurangnya *"headwinds"* (situasi yang membuat pertumbuhan lebih sulit), terutama untuk menguatkan harga-harga komoditas.
3. Bank dunia memperkirakan negara-negara *emerging market* dan negara-negara berkembang tumbuh 4,2 % pada tahun 2017 dan 4,6% pada tahun 2018, meningkat dari 3,4 % pada tahun 2016. Ekonomi negara-negara tersebut diperkirakan akan memberikan kontribusi 1,6% terhadap

pertumbuhan global pada tahun 2017, atau sekitar 60% dari pertumbuhan global untuk pertama kalinya sejak tahun 2013.

4. Pertumbuhan ekonomi di RRT diproyeksi bertahan pada kisaran 6,5% untuk tahun 2017 dan untuk tahun 2018 sebesar 6,3%. Ekonomi RRT akan melanjutkan pertumbuhan yang berkelanjutan karena negara tersebut sedang melakukan *"rebalancing"* (penyeimbangan kembali) dari manufaktur ke jasa-jasa, meskipun muncul kembali kekhawatiran untuk pasar properti.
5. Berbeda dengan pertumbuhan relatif ringan yang terlihat di negara-negara emerging market, negara-negara maju akan terus tumbuh tidak terlalu bagus di tahun-tahun mendatang. Negara-negara maju terus menderita oleh lemahnya pertumbuhan yang mendasari dan inflasi rendah, sementara ketidakpastian tentang arah kebijakan ke depan juga meningkat

Di tengah prediksi kemajuan ekonomi global yang mampu meningkat di tahun 2017 sebagai titik cerah setelah ekonomi global mengalami performa terburuknya di tahun 2016. Maka rancangan awal kerangka makro ekonomi tahun 2018 disusun dengan asumsi terjadi perbaikan pada pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan dunia adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 diprediksi tumbuh pada range 5,4 – 6,1%. Pondasi ekonomi yang kuat dan harga komoditas yang lebih tinggi dipandang bakal mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun yang harus diperhatikan adalah neraca pembayaran atau *balance of payment* yang bisa tetap positif dengan adanya kondisi tersebut. Adapun konsumsi swasta terpantau ada sedikit perbaikan yang sebagiannya merupakan efek perbaikan harga komoditas. Sementara itu, konsumsi pemerintah dipandang tidak akan terlalu banyak meningkat. Daya dorongnya adalah pada investasi belanja, namun besarannya dalam keseluruhan investasi tidak terlalu besar.
2. Laju inflasi diperkirakan berada pada kisaran 3,5 + 1, dengan asumsi harga minyak yang lebih tinggi dapat berdampak positif terhadap penerimaan, namun dapat berdampak juga pada kenaikan inflasi.
3. Target pertumbuhan investasi di tahun 2018 diproyeksi sebesar 6,3 – 8,0% dengan total kebutuhan investasi pada tahun 2018 sebesar Rp.5.240 triliun. Sumber-sumber investasi pada tahun 2018, sebagian besar harus berasal dari swasta dan badan usaha milik Negara karena investasi tidak hanya tergantung pada investasi pemerintah disebabkan kapasitas fiskal yang terbatas.

4. Penerimaan dari sisi impor diproyeksi tumbuh 3,2 – 4,0%, impor akan tumbuh lebih cepat dari ekspor seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan permintaan domestik.
5. Penerimaan dari sisi ekspor diproyeksi tumbuh 2,8 – 3,8%. Kinerja ekspor masih terbatas seiring dengan lemahnya ekonomi global dan stagnannya harga komoditas, namun ekspor jasa akan meningkat terutama didorong oleh pertumbuhan ekonomi dan permintaan domestik.
6. Pada sisi penerimaan basis pajak pada tahun 2018 diupayakan meningkat cukup signifikan dari tahun 2017 dengan adanya peningkatan basis pajak dari tax amnesty, dengan rasio perpajakan terhadap PDB mencapai sekitar 11,0%.
7. Pada sisi belanja, belanja Negara diharapkan meningkat menjadi sekitar 15,2% yang diarahkan pada sektor produktif (termasuk belanja daerah) dengan menjaga defisit anggaran pada kisaran 2,2%.
8. Konsumsi pemerintah diproyeksi 3,3 – 4,1%, konsumsi LNPRT diproyeksi 8,5 – 8,7% dengan konsumsi RT diproyeksi 5,2- 5,4%.
9. Nilai tukar (USD/IDR) berada pada range 13.600 – 13.900.
10. ICP (USD/Barrel) pada titik 55.
11. Lifting minyak diproyeksi sebesar 800 ribu barrel/hari.
12. Lifting gas sebesar 1.200 BOE/hari.

Di tengah asumsi terjadi perbaikan pada pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018, Indonesia tetap dihadapkan pada tantangan baik yang bersumber dari internal maupun eksternal, yaitu:

1. Tantangan internal/domestik

   Di sisi domestik, perekonomian Indonesia ke depan juga masih dihadapkan dengan berbagai tantangan permasalahan struktural domestik yang belum terselesaikan secara menyeluruh. Tantangan struktural yang pertama adalah pencapaian ketahanan pangan, energi, dan air sebagai faktor input utama yang diperlukan dalam proses transformasi menuju industrialisasi. Di sektor pangan, jumlah dan kapasitas produksi pangan yang semakin terbatas tidak diimbangi oleh peningkatan produktivitas dan teknologi yang mencukupi. Di sisi lain, permintaan pangan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan tingginya ketergantungan terhadap bahan pangan pokok beras akibat minimnya diversifikasi pangan.
2. Tantangan eksternal

Tantangan yang berasal dari sisi eksternal yaitu ketidakpastian kebijakan Amerika Serikat (AS) di bawah komando Presiden Donald Trump. Selain itu, ada juga faktor eksternal lainnya yakni kondisi geopolitik dan memanasnya isu keamanan disejumlah kawasan di dunia akan memberikan risiko penurunan atau *downside risk* yang signifikan termasuk perubahan besar dalam kebijakan perdagangan di antara negara-negara maju.

Untuk mengantisipasi hal tersebut diatas serta mendorong pertumbuhan sesuai target di tahun 2018 perlu kerja keras dan langkah konkrit yang diupayakan melalui penajaman program prioritas, sehingga setiap program akan mendorong produktivitas serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi, adapun upaya yang dilakukan pemerintah melalui 2 hal sebagai berikut:

1. Investasi Pemerintah secara selektif
   a. Ruang untuk peningkatan terbatas, tetapi tetap dijaga dengan merealokasi belanja non produktif ke belanja investasi;
   b. Fokus pada proyek yang mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta, yaitu pada infrastruktur listrik dan infrastruktur transportasi dan logistik (pelabuhan, pergudangan dan jalan).
2. Fasilitasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
   a. Peningkatan investasi swasta;
      - Perlu fokus untuk menghapuskan hambatan berkembangnya swasta di 6 sektor utama (industri pengolahan nonmigas, pertanian, perdagangan, konstruksi, informasi telekomunikasi dan jasa keuangan);
      - Deregulasi peraturan investasi di daerah;
      - Fasilitasi masalah investasi (RTRW, infrastruktur, penguatan data potensi investasi, penyelesaian pengaduan masalah investasi);
      - Pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi;
      - Perbaikan iklim ketenagakerjaan : penyempurnaan Undang-Undang ketenagakerjaan (harmonisasi Undang-Undang 13/2003 dengan SJSN)
   b. Menjaga daya beli masyarakat;
   c. Reformasi struktural.

Sementara itu Pemerintah akan terus memperkuat stimulus fiskal untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi yang tercipta serta

meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Pemerintah juga terus mempercepat reformasi struktural untuk mendukung terciptanya modal dasar pembangunan yang kuat berupa infrastruktur yang berkualitas dan merata, sumberdaya manusia yang berkeahlian tinggi dan iklim investasi yang kondusif.

Guna mendukung hal tersebut maka Rencana Kerja Pemerintah tahun 2018 mengangkat tema "Memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan" melalui kebijakan peningkatan kualitas *money follow program* dengan pendekatan holistik, tematik, integratif dan spasial serta memprioritaskan belanja pemerintah untuk pencapaian sasaran prioritas nasional. Prioritas nasional yang mendukung tema RKP tahun 2018 yakni Pengembangan dunia usaha dan pariwisata dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kontribusi sektor pariwisata, peningkatan daya saing tiga kawasan pariwisata dan peningkatan kesiapan destinasi wisata prioritas lainnya.
2. Percepatan pengembangan lima kawasan ekonomi khusus (KEK) berbasis potensi ekonomi wilayah.
3. Percepatan pembangunan kawasan industri (KI) di luar Jawa berdasarkan keunggulan wilayah.
4. Pembenahan iklim investasi di pusat dan daerah.
5. Penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya didorong oleh peningkatan iklim ketenagakerjaan dan hubungan industrial.
6. Pengembangan keahlian tenaga kerja.
7. Peningkatan populasi dan daya saing industri dan penguatan pertumbuhan ekonomi kreatif.
8. Peningkatan perdagangan luar negeri.

3.1.2. Kondisi Ekonomi Daerah

Secara umum kondisi perekonomian Kota Balikpapan pada tahun 2016 dan proyeksi tahun 2017 secara singkat dapat disampaikan sebagai berikut.

1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pergerakan ekonomi di sektor tersier seperti konstruksi, perdagangan dan transportasi masih memberi kontribusi yang besar dan positif yang

tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Balikpapan Atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2016 sebesar Rp. 75,221 Trilyun dan diproyeksi meningkat pada tahun 2017 sebesar Rp.76,673 Trilyun. Sementara itu pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan pada tahun 2016 sebesar 1,56% dan pada tahun 2017 diproyeksi meningkat pada kisaran 1,9 – 2,5%. Pertumbuhan ekonomi yang mulai merangkak naik pada tahun 2017 diasumsikan karena adanya efek positif pemulihan ekonomi global yang ditandai dengan mulai membaiknya harga komoditas, ditambah lagi dengan adanya perluasan kilang Pertamina yang secara langsung memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui serapan tenaga kerja dan kegiatan ekonomi yang diakibatkan oleh perluasan pembangunan kilang tersebut yang diproyeksi selesai pada tahun 2019.

2) Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Fluktuasi inflasi pada suatu daerah dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Walaupun tingkat pertumbuhan tinggi namun tingkat inflasi juga tingga maka akan dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Inflasi yang tidak stabil juga akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menyebabkan perlambatan ekonomi. Mengingat pentingnya peran inflasi terhadap kondisi sosial-ekonomi daerah, menjadikan indikator ini digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan keuangan Kota Balikpapan.

Tingkat inflasi Kota Balikpapan di tahun 2016 sebesar 4,13% lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi pada tahun 2015 sebesar 6,26%. Sementara itu tingkat inflasi untuk tahun 2017 tetap dijaga pada angka 5%±1. Laju inflasi sejak awal tahun hingga April tahun 2017 cukup terkendali sebesar 0,71%. Hal ini dikarenakan perbaikan permintaan yang didasarkan pada basis produksi (supply) lebih rendah dari kapasitas maksimalnya atau kesenjangan output yang negatif masih besar, sehingga dorongan dari sisi permintaan dari inflasi masih tetap lemah. Selain itu ekspektasi inflasi yang terjaga rendah merupakan bagian dari kredibilitas kebijakan pemerintah Kota Balikpapan dan BI dalam pengendalian inflasi di Kota Balikpapan.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kota Balikpapan serta mempertimbangkan pengaruh kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka indikator makro ekonomi kota Balikpapan diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel. 3.1
Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kota Balikpapan

Indikator	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Pertumbuhan Ekonomi	1,56	1,93	2,14
PDRB ADHK	Rp.70.970.965,26 juta	Rp.72.340.704,89 juta	73.888.795,97 juta
Inflasi	5 ± 1	5 ± 1	4 ± 1

- Pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2018 diprediksi akan tumbuh sebesar 2,14%, didasari oleh asumsi pertumbuhan nasional yang berada pada range 5,4 -6,1%.
- PDRB Kota Balikpapan Tahun 2018 diproyeksi meningkat menjadi 73,88 trilyun didasari oleh asumsi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan sumbangan sub sektor jasa perdagangan, kontruksi dan transportasi yang diproyeksi meningkat pada tahun 2018.
- Laju inflasi Kota Balikpapan pada tahun 2018 dijaga pada level 4 +1 dengan asumsi laju inflasi nasional yang lebih rendah di angka 3,5% +1. Inflasi di kota Balikpapan diperkitakan masih dipengaruhi oleh andil *volatile food* dan adanya ekspektasi inflasi yang terjaga rendah sebagai bagian dari kredibilitas kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi di kota Balikpapan selain adanya faktor harga komoditas yang mulai merangkak naik.

Memperhatikan proyeksi indikator ekonomi kota Balikpapan, maka terdapat tantangan yang harus dihadapi perekonomian kota Balikpapan meliputi:

a. Masih dominannya sektor industi pengolahan (migas) di Balikpapan yang akan menopang stabilnya pertumbuhan ekonomi Balikpapan pada tahun 2018.
b. Banyaknya rencana investasi yang berbentuk konstruksi infrastruktur di Balikpapan dan sekitarnya yang diharapkan menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi belum maksimal hasilnya.
c. Sudah saatnya Balikpapan lepas dari ketergantungannya yang sangat kuat pada sektor pertambangan di Kalimantan Timur.

d. Hadirnya investasi di Balikpapan baik pada infrastruktur konektivitas maupun energi (program 35.000 MW dan rencana penambahan kapasitas kilang) mendorong sektor utama lainnya di Balikpapan seperti konstruksi dan perdagangan diharapkan mampu mendukung transformasi struktur ekonomi.
e. Dalam jangka panjang, hilirisasi industri diharapkan mampu hadir setelah semakin lengkapnya infrastruktur (konektivita dan energi) yang mendukung kawasan industri di Balikpapan yang telah disiapkan.

Selain tantangan, beberapa hal yang diharapkan akan mendukung prospek perekonomian Kota Balikpapan di tahun 2018 antara lain:

a. Pemerintah Pusat menjadikan kota Balikpapan sebagai kawasan Pusat Logistik Berikat migas Indonesia;
b. Kawasan Industri Kariangau.

Berlokasi di utara Balikpapan tepatnya di Kelurahan Kariangau Luas area wilayah 2.189,93 hektare berdasarkan RTRW Balikpapan tahun 2012. Dan dapat diakses melalui jalur laut (teluk Balikpapan) dan jalur darat (km.13 Balikpapan-Samarinda) dalam beberapa tahun terakhir semakin menggeliat pembangunannya dan diharapkan kedepannya mampu menjadi tulang punggung kota Balikpapan sebagai kota industri.

Stadion Batakan Balikpapan, Stadion ini akan menjadi Home Base klub sepakbola kota Balikpapan, dan berkapasitas 40.000 penonton, dan juga sesuai dengan standar FIFA.

Bandara International Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Bandara megah dan modern ini baru saja mendapat predikat sebagai bandara terbaik ke 6 di dunia dan terbaik di Indonesia tahun 2016 dalam hal layanan penumpang, berdasarkan survei *Airport Service Quality* yang dilakukan oleh *Airport Council International.*

Perluasan Kilang Minyak Pertamina, Seiring tujuan pemerintah pusat untuk menjaga ketahanan energi dengan menambah cadangan minyak dan gas (migas) dalam negeri. Maka Pertamina melakukan pengembangan kapasitas produksi kilang Balikpapan dari semula 260 ribu barel per hari, bakal dinaikkan menjadi 360 ribu barel per hari mulai 2019 mendatang. Hal tersebut akan mengurangi *cost of production,* sehingga dapat menekan harga minyak di tingkat masyarakat.

Rencana Pembangunan Jembatan Penajam – Melawai Balikpapan, Jembatan yang akan menghubungan kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara (pantai Nipah-nipah Penajam – Pantai Melawai Balikpapan) ini direncanakan akan memulai proyek di tahun 2017. Selama ini transportasi Balikpapan-Penajam selalu dilayani oleh kapal Feri yang membuat mobilitas menjadi terhambat.

Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Pembangunan TOL Balikpapan – Samarinda, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda merupakan jalan tol yang akan menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kota Samarinda. Pada tanggal 12 Januari 2011, proyek pembangunan jalan tol sepanjang 99,02 km dimulai. Proyek ini dibangun dengan skema pembiayaan *public private partnership* (PPP).

Rencana pembangunan Coastal Road, Pada tahun 2012, Pemerintah Kota Balikpapan telah membentuk Badan Percepatan Pembangunan dan Pengelolahan Coastal Road, Kawasan sepanjang Jalan Jendral Sudirman ini, diprediksi akan menjadi kawasan bisnis yang paling menjanjikan di Indonesia Tengah/Timur. Kota Balikpapan tengah bersiap menjadi *waterfont* city pertama di kalimantan. Pemerintah kota Balikpapan menawarkan proyek reklamasi pantai sepanjang area Klandasan. Investasi yang di tawarkan kepada calon investor adalah sebagai pengembangan, sekaligus pengelola coastal road.

Perluasan Pelabuhan Semayang, PT Pelindo IV Cabang Balikpapan akan mereklamasi areal laut seluas 4,5 Ha di sekitar Pelabuhan Semayang untuk menambah luasan pelabuhan tersebut. Untuk reklamasi, Pelindo telah menganggarkan dana sekitar Rp120 miliar. Dari rencana yang sudah dibuat, Pelindo akan membangun empat bagian pelabuhan, yakni area parkir, area *supply base* sebagai segmen bisnis baru, area kuliner untuk pedagang-pedagang di pelabuhan, dan area *car terminal* untuk kendaraan baru dari Pulau Jawa.

Dengan memperhatikan tantangan dan daya dukung yang ada di Kota Balikpapan serta arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 maka kerangka perekonomian daerah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan cara meningkatkan nilai tambah produksi industri dan peningkatan kualitas serta kuantitas UMKM dan koperasi yang mandiri;

b. Menciptakan kemudahan dan pengembangan berinvestasi melalui peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global;
c. Pengembangan ekowisata, dengan mengembangan destinasi dan kelembagaan industri wisata yang berwawasan lingkungan;
d. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Yang Berwawasan Lingkungan (*Green Economy*);
e. Peningkatan Ketersediaan Infrastuktur Yang Berorientasi pada Konsep Hijau (*Green City*).

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.

Otonomi daerah yang telah digulirkan melalui undang-undang pemerintahan daerah sebenarnya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan aktifitas lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di dalam era otonomi daerah, pemerintah pusat telah melimpahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah. Konsekuensi dari pelimpahan kewenangan tersebut diikuti oleh pelimpahan pembiayaan melalui dana transfer. Dengan adanya dana transfer seperti Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH, dll), pemerintah daerah diharapkan mampu menjalankan bidang-bidang kewenangan yang diberikan.

Disisi lainnya, dana transfer yang diberikan kepada daerah, nampaknya masih belum mampu mendukung pemerintah daerah di dalam menjalankan kewenangan yang diberikan. Program-program pembangunan kurang berjalan secara optimal karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena sebagian APBD pemerintah daerah hanya untuk belanja pegawai (gaji), sehingga pemerintah daerah kurang leluasa di dalam mengkreasi program-program pembangunan sebagai akibat keterbatasan pembiayaan.

Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pengelolaan pendapatan daerah telah dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga telah dijadikan acuan untuk menggali potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Terkait dengan manajemen keuangan daerah, dalam perencanaan pembangunan keuangan daerah ke depan setidaknya ada dua hal krusial yang mendesak untuk dikelola dan dikembangkan secara profesional. Pertama, sistem informasi manajemen keuangan. Sistem ini diharapkan mampu memberikan informasi secara cepat mengenai kinerja keuangan daerah seperti kegiatan apa saja yang sudah terlaksana, apa hasil dan manfaatnya bagi masyarakat dalam jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu, sistem ini juga diperkirakan dapat mempercepat proses perhitungan dan laporan pertanggungjawaban anggaran oleh Pemerintah Daerah. Kedua, pengelolaan aset-aset daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah berdasarkan potensi yang dimiliki. Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan tetap mengedepankan kebijakan untuk tidak membebani masyarakat.

2) Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana perimbangan terdiri dari:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak;
b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
c. Dana Alokasi Umum;
d. Dana Alokasi Khusus;

Kebijakan yang ditempuh sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah;
b. Meningkatkan upaya penggalangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN/PHLN (khususnya DAK dan Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana/DISP) dan APBD.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2018 diasumsikan mencapai proporsi sebesar 16,5% yang merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian serta bantuan keuangan dari provinsi ataupun dari dana hibah dan dana darurat. Upaya peningkatannya antara lain:

a. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;

b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

3.2.2. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiyaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun berikutnya. Pembiayaan daerah merupakan trasaksi keuangan yang dimanfaatkan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam penganggaran, pembiayaan daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2018 meliputi:

a. Apabila APBD surplus, maka dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan;
b. Apabila APBD defisit, maka memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja tetapi jika sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit maka ditutupi dengan dana pinjaman dan atau transfer penarikan dana cadangan daerah.

2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2018 adalah setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal BUMD dilaksanakan setelah mempertimbangkan hasil kajian serta ditindaklanjuti dengan upaya revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD serta pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan. Dengan penyertaan modal yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat.

SILPA tahun 2016 diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SILPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 6% dari total APBD. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential management), profesional dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dalam kerangka kebijakan otonomi daerah, maka terkait dengan efektifitas belanja daerah dapat menjadi salah satu tolak ukur utama terhadap keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, terutama sejauh mana

kebijakan desentralisasi yang dikelola oleh pemerintah daerah mampu mendorong tercapai tujuan nasional dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan umum di daerah. Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Balikpapan. Urusan pemerintahan itu terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Balikpapan menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, SKPD, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Arah kebijakan belanja dipilah dalam belanja langsung dan tidak langsung sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung

   Belanja tidak langsung yang terdiri atas belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja subsidi dan belanja tidak terduga menyesuaikan dengan kebutuhan nyata seperti kenaikan gaji PNS dan diberikan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah.

2. Belanja Langsung

   Belanja hanya diperuntukkan untuk hal-hal yang benar-benar menjadi prioritas dan difokuskan pada implementasi program dan kegiatan yang mendesak serta didasarkan pada arah dan kebijakan umum serta strategi dan prioritas APBD yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengelolaan belanja daerah yang efisien dan efektif haruslah menjadi fokus agar tercapainya siklus anggaran yang tepat waktu termasuk cakupan rencana kerja dari dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Belanja Daerah tidak hanya menggambarkan kebijakan umum pemerintah daerah tetapi juga mencakup detail program yang komprehensif dalam hal estimasi pembiayaannya dan penetapan mekanisme penyaluran serta administrasi dana tersisa (SILPA) yang dikaitkan dengan perubahan rencana kerja agar penyesuaian antara APBD dan realisasi anggaran dapat menghilangkan pemborosan pengeluaran dan juga untuk menjaga keberlanjutan dari suatu program pembangunan.

Analisis belanja dilakukan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana belanja daerah dengan tujuan untuk

memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

3.3. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berpedoman pada prinsip perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka kebijakan penetapan besaran pagu belanja daerah dirumuskan dan disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari setiap program yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan dan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program. Oleh karena itu, mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang tersedia setiap tahun, diharapkan program-program yang dibiayai akan memberi dampak posistif dan daya ungkit yang siginifikan dalam memecahkan berbagai permasalahan pembangunan di Kota Balikpapan. Terkait dengan hal terebut diatas, maka perlu dilakukan analisis proyeksi terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk tahun 2018.

3.3.1. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah

1) Realisasi Pendapatan Tahun 2016

Target Pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI pada Tahun Anggaran 2016 sebagaimana yang tertuang dalam APBD ditargetkan sebesar Rp. 2.234.750.897.269,22 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.993.392.160.506,29 atau mencapai sebesar 89,20%. Adapun rincian target rencana dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Komposisi Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2016
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

No	Komposisi Pendapatan	Pendapatan Tahun 2016 Setelah Perubahan (Rp.)		
		Target	Realisasi	%
1	Pendapatan Asli Daerah	555.970.991.413,11	560.364.263.457,29	100,79%
2	Dana Perimbangan	1.265.362.336.883,11	1.066.561.649.134,00	84,29%

3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	413.417.569.000,00	366.466.247.915,00	88,64%
	Jumlah	**2,234,750,897,296.22**	**1,993,392,160,506.29**	**89.20%**

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan tabel 3.2 mengambarkan kondisi pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2016 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Target rencana Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 setelah perubahan sejumlah Rp555.970.991.413,11. Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 560,364,263,457.29. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target menunjukan peningkatan dari target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 100,79% atau dengan kenaikan pendapatan dari target sejumlah Rp.4.393.272.044,18 atau +0,79%.
b. Target rencana Dana Perimbangan tahun 2016 setelah perubahan sejumlah Rp1.265.362.336.883,11. Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan Dana Perimbangan sejumlah Rp.1.066.561.649.134,00. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target menunjukan penurunan dari target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 84,29% atau dengan penurunan pendapatan dari target sejumlah Rp.198.800.687.749,11 atau -15,71%.
c. Target Rencana Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2016 setelah perubahan sejumlah Rp413.417.569.000,00. Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan Rencana Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp366.466.247.915,00. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target menunjukan penurunan dari target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 88,68% atau dengan penurunan pendapatan dari target sejumlah Rp.46.951.321.085,00 atau -11,36%.

Berdasarkan penjelasan komposisi pendapatan pada tahun anggaran 2016, digambarkan pula sumber pendapatan dari masing-masing komposisi pendapatan sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat

penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) besar atau kecil dapat menjadi suatu argumentasi untuk menilai peran dan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan rumah tangganya sendiri (self-supporting). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari: (1) Hasil Pajak Daerah; (2) Hasil Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; serta (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Adapun perincian PAD Kota Balikpapan pada Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Komponen Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

No	Komponen Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Tahun 2016 Setelah Perubahan (Rp.)		
		Target	Realisasi	%
1.	Hasil Pajak Daerah	393.608.000.000,00	406.074.718.580,65	103,17%
2.	Hasil Retribusi Daerah	51.300.972.013,00	46.623.947.221,79	90,88%
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	15.084.723.650,00	15.051.835.627,69	99,78%
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	95.977.295.750,00	92.613.762.027,16	96,50%
	Jumlah	**555.970.991.413,00**	**560.364.263.457,29**	**100,79%**

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan Tabel 3.3 mengambarkan kondisi pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2016 dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Target rencana Hasil Pajak Daerah (HPD) tahun 2016 setelah perubahan sejumlah Rp393.608.000.000,00. Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan Hasil Pajak Daerah sejumlah Rp406.074.718.580,65. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target menunjukan peningkatan dari target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 103,17% atau dengan kenaikan pendapatan dari target sejumlah Rp.12.446.718.580,65 atau +3,17%.
b) Target rencana Hasil Retribusi Daerah (HRD) tahun 2016 setelah perubahan sejumlah Rp51.300.972.013,00. Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan Hasil Retribusi Daerah sejumlah

Rp46.623.947.221,79. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target menunjukan penurunan dari target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 90,88% atau dengan penurunan pendapatan dari target sejumlah Rp.4.667.024.791,21 atau -9,21%.

c) Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tahun 2016 setelah perubahan sejumlah Rp15.084.723.650,00. Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp15.051.835.627,69. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target dengan capaian kinerja sebesar 99,78% atau dengan penurunan pendapatan dari target sejumlah Rp.32.888.022,31 atau -0,22%.
d) Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dipisahkan tahun 2016 setelah perubahan sejumlah Rp95.977.295.750,00. Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 92.613.762.027,16. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target dengan capaian kinerja sebesar 96,50% atau dengan penurunan pendapatan dari target sejumlah Rp.3.363.533.722,84 atau -3,50%.

Sebagaimana penjelasan atas komponen tergambar pencapaian 4 (empat) komponen sumber penerimaan Pendapatan Asli daerah Tahun 2016. Dari 4 (empat) Komponen tersebut, Hasil Pajak Daerah memberikan kontribusi melampaui dari target yang direncanakan, sedangkan untuk 3 (tiga) komponen PAD yaitu Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menunjukan kontribusi pendapatan untuk masing-masing komponen kurang tercapai atas target yang direncanakan. Hambatan terhadap pencapaiaan target PAD tahun 20016 yaitu:

a) Dana Perimbangan dari pusat yang menurun drastis sehingga berdampak pada rendahnya kemampuan belanja pemerintah;
b) Banyak wajib pajak yang belum terdata dan sejumlah wajib pajak yang terdata belum menyampaikan setoran pajaknya;
c) Meningkatnya harga bahan kebutuhan pokok sehingga daya beli masyarakat menurun. Hal ini memberikan pengaruh besar terhadap pencapaian target PAD;

d) Konsumsi rumah tangga dan sejumlah investasi dibidang minerba mengalami penurunan.

Sejalan kurang tercapainya target tersebut Pemerintah Kota berupaya dengan tidak lanjut:

a) Memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui perbaikan metode dan inovasi pungutan pajak daerah;
b) Menggali kembali sejumlah potensi pajak daerah yang belum atau kurang berfungsi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
c) Meningkatkan kinerja SDM Aparatur Pemerintahan yang berhubungan langsung terhadap pengelolaan pajak daerah;
d) Meningkatkan kinerja pembangunan ekonomi pada 17 (tujuh belas) sektor lapangan usaha.

- Dana Perimbangan

Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana perimbangan ini terdiri atas: (1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; (2) Dan Alokasi Umum; dan (3) Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2016 direncanakan sebesar Rp1.265.362.336.883,11 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.1.732.656.277.123,00 atau mencapai target sebesar 136,04% sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI.

Adapun perincian penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Perincian Dana Perimbangan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2016
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

No	Komponen Dana Perimbangan	Penerimaan Tahun 2016 Setelah Perubahan (Rp.)		
		Target	**Realisasi**	**%**
1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	786,934,783,883.11	600,652,277,913.00	76.33%
2	Dana Alokasi Umum	391,898,857,000.00	391,898,857,000.00	100.0%
3	Dana Alokasi Khusus	86,528,696,000.00	74,010,514,221.00	85.53%

	Jumlah	**1,265,362,336,883.11**	**1,066,561,649,134.00**	84.29%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan tabel 3.3. mengambarkan kondisi pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2016 dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Target rencana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak tahun 2016 setelah perubahan sejumlah Rp. 786.934.783.883,11. Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan Hasil Pajak Daerah sejumlah Rp. 600.652.277.913,00. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target menunjukan peningkatan dari target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 76,30% atau dengan penurunan pendapatan dari target sejumlah Rp.186.282.505.970,11 atau -23,17 %. Penurunan dana perimbangan yang sangat drastis disebabkan menurunnya pemasukan pajak dan merosotnya sektor migas. Sehingga berimbas pada likuiditas APBD Balikpapan.
b) Target rencana Dana Alokasi Umum tahun 2016 setelah perubahan sejumlah Rp391.898,857.000,00. Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan Dana Alokasi Umum sejumlah Rp391.898.857.000,00. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target menunjukan sama dengan dari target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 100,00%.
c) Target Dana Alokasi Khusus tahun 2016 setelah perubahan sejumlah Rp. 86.528.696.000,00. Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 74,010,514,221.00. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target dengan capaian kinerja sebesar 85,53% atau dengan penurunan pendapatan dari target sejumlah Rp.12.518.181.779 atau -15,17%.

- Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan Pemerintah Kota Balikpapan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas: (1) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (2) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; dan (3) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2016 direncanakan sebesar Rp.

95.977.295.750,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 92.613.762.027,16 atau mencapai 96,50%, sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI.

Dari tabel proyeksi pendapatan selama kurun waktu tahun 2016 - 2017, sumber pembiayaan APBD Kota Balikpapan masih didominasi oleh sumber dana perimbangan. Akan tetapi kontribusi tersebut cenderung mengalami penurunan, yakni sebesar 59% pada tahun 2016 dan meningkat pada tahun 2017 sebesar 48%. Sementara itu Dana Perimbangan pada tahun 2018 diasumsikan mencapai proporsi sebesar 52,3%.

Tabel. 3.3
Proyeksi target pendapatan s/d tahun 2018

Uraian	2017	2018
	Target	Target
1.PENDAPATAN	2,003,266,466,100.00	1,848,826,884,828
a. PENDAPATAN ASLI DAERAH	613,458,483,101	576,532,327,828
- Pajak Daerah	419,000,000,000	419,660,051,982
- Retribusi Daerah	68,015,943,947	63,872,275,846
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	26,462,712,245	20,000,000,000
- Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	99,979,826,908	73,000,000,000
b.DANAPERIMBANG-AN	966,830,705,000	966,898,857,000
- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	480,808,641,000	575,000,000,000
- Dana Alokasi Umum	396,100,197,000	391,898,857,000
- Dana Alokasi Khusus	89,921,867,000	
c. LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	286,287,341,000	305,395,700,000
- Pendapatan Hibah	3,000,000,000	-
- Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah	191,805,202,000	180,000,000,000
- Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	91,482,139,000	125,395,700,000
- Bantuan Keuangan Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-

Sumber data : Bappeda Litbang Kota Balikpapan

Terlihat pada tabel diatas peranan PAD terhadap APBD masih tergolong kecil dibandingkan dana perimbangan yaitu berkisar antara 31,2%. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2018 diproyeksi senilai Rp.576.532.327.828 dengan total pendapatan daerah diproyeksi sebesar Rp.1.848.826.884.828,00 atau menurun kurang lebih 7,7% dibandingkan tahun 2017. Terdapat beberapa alternatif sebagai upaya untuk meningkatkan PAD yaitu Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

a) mengoptimalkan penerimaan daerah dengan cara membenahi manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi

penerimaan, dan mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai kebutuhan daerah;

b) membuat *database* dan pemetaan data tentang potensi pendataan daerah sebagai data dasar penghitungan PAD;
c) menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pungutannya dan *less distortive* terhadap perekonomian;
d) pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
e) meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan SKPD penghasil;
f) mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
g) meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
h) meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.
i) Melakukan Migrasi Sistem Pelayanan dari Sistem yang lama ke SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak). SISMIOP merupakan Sistem Aplikasi yang telah dipakai oleh Dirjen Pajak dalam mengelola PBB sampai tahun 2012 (tahun pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah). Kedepannya SISMIOP ini dapat dikembangkan dari saat ini berbasis dekstop menjadi berbasis web. Sehingga Wajib Pajak Dapat mengakses datanya melalui web secara online;
j) Workshop Penilaian Individu Objek Khusus bekerjasama dengan Kanwil DJP Kaltim. Objek Khusus berbeda Objek PBB yang ditetapkan secara Massal. Dari sisi nilai pemanfaatannya secara ekonomis membuat NJOP objek khusus lebih tinggi dari NJOP PBB yang ditetapkan. Serta mengadakan workshop penilaian objek khusus antara lain terhadap objek Apartemen/Hotel, Kilang Pertamina, Mall, Menara BTS, Bandara, Pelabuhan, Pabrik, Gudang/workshop, SPBU, Kantor dan Rumah Sakit;
k) Melakukan kegiatan pemetaan 3 Dimensi dengan melakukan survey objek pajak PBB di sebagian wilayah kota Balikpapan, yaitu Kecamatan Balikpapan Tengah, Balikpapan Selatan dan Balikpapan Kota (21 Kelurahan). Melakukan Updating peta ZNT (Zona Nilai Tanah) karena selama kurun waktu kurang lebih 10 tahun peta tersebut belum pernah diperbaharui;

l) Melakukan penyusunan Rancangan Perubahan Perda Kota Balikpapan tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pokok perubahan yang diajukan diantaranya mengenai penurunan tarif pengenaan pajak PBB-P2 terkait rencana kenaikan NJOP Bumi sesuai harga pasar untuk keperluan BPHTB;
m) Melaksanakan Pelayanan Administrasi proses pendaftaran objek PBB-P2 se-Kota Balikpapan dengan target percepatan penyelesaian 3 bulan menjadi 1 bulan yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mengoptimalkan pajak sesuai SPPT PBB-P2, dan menekan biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk transportasi dan lain-lain;
n) Melakukan pemeriksaan atas omzet yang diperoleh wajib pajak pada saat kegiatan penungguan berlangsung dan melaksanakan pendataan fasilitas obyek pajak (uji petik) untuk pajak parkir, pajak hiburan, pajak hotel dan pajak restoran.

3.3.2. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah dan Belanja Mengikat

APBD menunjukkan alokasi belanja untuk melaksanakan program/kegiatan dan sumber-sumber pendapatan, serta pembiayaan yang digunakan untuk mendanainya. Program/kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor. Komponen yang mengindikasikan aktivitas dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Belanja Daerah. Komponen ini merupakan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja yang pengeluarannya disesuaikan dengan kemampuan dan potensi fiskal daerah.

Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan.

Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2016, secara makro dilandasi atas pemahaman efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran Belanja Daerah yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016.

Kebijakan Belanja Daerah secara deskriptif dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut: (1) Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, (2) Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Daerah Pemerintah Kota Balikpapan pada Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp. 2.459.6542.377.868,20 dan dapat direalisasikan Rp. 2.115.731.275.788,83 atau mencapai 86,02%, sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI yang perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Komposisi Belanja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2016
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2016 Setelah Perubahan		
		Belanja Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Belanja Tidak Langsung	926.068.788.360,00	852.431.100.615,53	92,05
2	Belanja Langsung	1.533.573.589.508,00	1.263.300.175.173,30	82,38
	Total Belanja	**2.459.6542.377.868,20**	**2.115.731.275.788,83**	**86,02**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2016

Jika dilihat dari komposisi Belanja Daerah pada tabel 3.4, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Belanja tidak langsung memberikan kontribusi sebesar Rp852.431.100.615,53 atau 40,29% (hasil perbandingan realisasi belanja tidak langsung terhadap total realisasi belanja tidak langsung). Untuk Capaian kinerja dari target terhadap realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar 92,25%.
2. Belanja langsung memberikan kontribusi sebesar Rp.1.263.300.175.173,30 atau 59,71% (hasil perbandingan realisasi belanja langsung terhadap total realisasi belanja langsung). Untuk Capaian kinerja dari target terhadap realisasi Belanja Langsung sebesar 82,38%.

Sedangkan BL memberikan kontribusi sebesar 33,03% dengan realisasi belanja Kota Balikpapan di tahun 2016 sejumlah Rp.746,786,765,969.83 atau 97,99% dari total BTL sebesar 762,081,307,310.00 dan sisanya sejumlah 15.294.541.340,17 atau 2,01% disumbangkan oleh belanja langsung. Adapun anggaran dan realisasi masing-masing Belanja untuk Tahun Anggaran 2016, dapat diuraikan sebagai berikut:

- Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp.926.068.788.360,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 852.431.100.615,53 atau 97,99%, sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Perincian Belanja Tidak Langsung Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2016
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2016 SETELAH PERUBAHAN		
		Anggaran Belanja Tidak Langsung	Realisasi BTL	%
1	**Belanja Pegawai**	753.750.743.360,00	706.693.499.418,53	93,76
2	**Belanja Hibah**	155.433.045.000,00	142.574.661.901,00	91,73
3	**Belanja Bantuan Sosial**	7.500.000.000,00	433.522.400,00	5,78
4	**Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kab /Kota**	1.058.000.000,00	998.806.796,00	92,06
5	**Belanja Tidak Terduga**	7.500.000.000,00	930.610.100,00	12,41
	JUMLAH	**926.068.788.360,00**	**852.431.100.615,53**	**92,05**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2016

a) Belanja Pegawai

Belanja ini pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp. 753.750.743.360,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp706.693.499.418,53 atau 93,76 %, sebelum dilakukan audit oleh BPK RI. Belanja ini digunakan untuk pembayaran gaji pegawai dan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

b) Belanja Hibah

Belanja Hibah pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp155.433.045.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 142.574.661.901,00 atau 91,73%, sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI. Belanja ini diberikan kepada lembaga, kelompok, atau organisasi kemasyarakatan.

c) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp. 7.500.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp433.522.400,00 atau 5,78%, sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI. Belanja ini digunakan untuk Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

d) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik pada Tahun 2016 dianggarkan Rp1.058.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp998.806.796,00 atau 92,06 % sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI.

e) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp. 7.500.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp.930.610.100,00 atau 12,41% sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI.

- Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja Langsung pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp.1.533.573.589.508,20 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.263.300.175.173,30 atau 82,38% sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI. Belanja ini merupakan belanja yang dianggarkan terkait dengan program dan kegiatan berdasarkan sumber dari APBD Kota Balikpapan.

Adapun perincian Belanja Langsung pada tahun anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6
Perincian Belanja Langsung Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2016 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2016 Setelah Perubahan		
		Anggaran Belanja Langsung	Realisasi Belanja Langsung	%
1	Belanja Pegawai	273.008.258.235,00	252.011.341.630,63	92,31
2	Belanja Barang dan Jasa	511.485.758.723,20	447.028.996.171,13	87.40
3	Belanja Modal	749.079.572.550,00	564.259.837.371,54	75,33
	JUMLAH	**1.533.573.589.508,20**	**1.263.300.175.173,30**	**82,38**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2016

Proyeksi Pendapatan dan Belanja Tahun 2018

Berdasarkan penjelasan terhadap Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 maka pada tahun 2018 disusun belanja wajib yang tergambar pada tabel dibawah ini.

Tabel. 3.7
Proyeksi Belanja Daerah Wajib dan Mengikat Tahun 2018

NO	URAIAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018
1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**742.014.461.850**	**759.941.537.571**
	Belanja Pegawai	701.657.828.850	719.199.274.571
	Belanja Pimpinan dan Anggota DPR serta KDH/WKDH	4.742.263.000	4.742.263.000
	Hibah Wajib (BOS Swasta)	35.614.370.000	36.000.000.000
2	**BELANJA LANGSUNG**	**225.819.101.925**	**300.296.607.961**
	Belanja Jasa Kantor	77.558.365.836	79.497.324.982
	Belanja Sewa	4.248.927.000	5.034.747.574
	Belanja Kebutuhan Operasional Kantor	10.989.790.639	11.264.535.405
	BOS SD dan SMP	51.020.150.200	52.000.000.000
	Operasional Kesehatan	12.508.466.900	13.000.000.000
	BLUD (RSUD, RSKB, Puskesmas, JKN Puskesmas)	51.993.401.350	52.000.000.000
	Kesepakatan Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	0	41.500.000.000
	Pemeliharaan Infrastruktur (Gedung, Jalan dan Drainase)	17.500.000.000	17.500.000.000
	SPAM Teritip (Lahan Embung Aji Raden dan Pipa Distribusi)	-	70.000.000.000
	JUMLAH BELANJA MENGIKAT	**967.833.563.775**	**1.101.738.145.532**

Sumber : Bappeda Litbang Kota Balikpapan

Selain belanja wajib yang tergambar pada Tabel 3.7 tersebut disusun pula proyeksi neraca keuangan daerah Kota Balikpapan pada tahun anggaran 2018.

Tabel 3.8
Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2018

NOMOR URUT	URAIAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018
4.	**PENDAPATAN**	**1,907,649,857,101.00**	**1,564,026,497,600.00**
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**613,458,483,101.00**	**570,000,000,000.00**
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	419,000,000,000.00	415,000,000,000.00
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	68,015,943,947.85	65,000,000,000.00
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26,462,712,245.00	10,000,000,000.00
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	99,979,826,908.15	80,000,000,000.00
4.2.	**DANA PERIMBANGAN**	**966,831,533,000.00**	**746,100,197,000.00**
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	480,808,691,000.00	350,000,000,000.00
4.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	396,100,197,000.00	396,100,197,000.00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	89,922,645,000.00	-
4.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**327,359,841,000.00**	**247,926,300,600.00**
4.3.1.	Pendapatan Hibah	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	191,805,202,000.00	153,444,161,600.00
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	91,482,139,000.00	91,482,139,000.00
4.3.5.	Bantuan Keuangan	41,072,500,000.00	-
	JUMLAH PENDAPATAN	**1,907,649,857,101.00**	**1,564,026,497,600.00**

Sumber : Bappeda Litbang Kota Balikpapan

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada RKPD tahun 2018 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target janji dan Visi dan Misi yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2016 - 2021. Selain itu dokumen ini juga mencakup kebijakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

Penyusunan bab ini dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah serta proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Substansi dokumen RKPD tahun 2018 mendasarkan dan memperhatikan:

1. Arah Kebijakan Pemerintah Pusat yang dijabarkan dalam 9 prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) sebagaimana yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
2. Arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dijabarkan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018;
3. Arah kebijakan RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021 guna tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan tahun kedua (2018);
4. Konsistensi antara kebijakan pusat, Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Balikpapan sebagai upaya penyelesaian target-target pembangunan nasional maupun daerah;
5. Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kota Balikpapan yang sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan segera pada tahun 2018.

Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2018. Selain itu, prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2018 juga diarahkan untuk menjamin terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2016 - 2021. Selanjutnya, penentuan

prioritas dan sasaran pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2018 juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Tujuan pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah.

Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi 9 agenda Prioritas (Nawa Cita), yaitu:

Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;

Cita 2 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;

Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

Cita 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;

Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;

Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan

Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selanjutnya keterkaitan antara dimensi pembangunan dengan Nawa Cita dapat dijelaskan oleh Gambar 4.1 berikut:

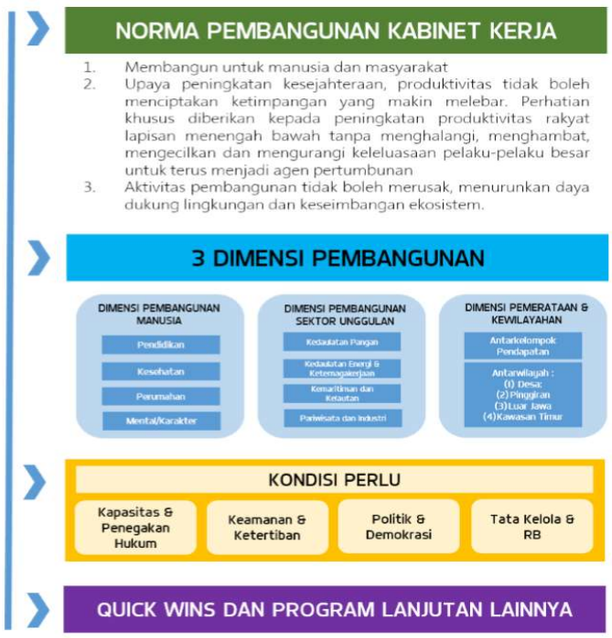

Gambar 4.1. Strategi Pembangunan Nasional

Selanjutnya Nawa Cita tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 yang terdiri dari empat bagian utama yakni: (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi perlu agar pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program *quickwins*. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu dari strategi pembangunan memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015 - 2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah.

Tabel. 4.1.

Kesesuaian Program Prioritas Kota Balikpapan dengan RKP 2018

Program Prioritas Kota Balikpapan	Program Prioritas Pemerintah berdasarkan RKP 2018
• Upaya Kesehatan Masyarakat • Lingkungan Sehat Perumahan	• Penguatan Upaya Promotif dan Preventif: Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
• Peningkatan Kualitas, Kuantitas SDM serta Sarana dan Prasarana Kesehatan	• Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
• Keluarga Berencana	• Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
• Pendidikan Dasar • Pendidikan Menengah	• Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif
• Pengembangan Perumahan	• Fasilitasi Penyediaan Hunian Layak Baru
• Lingkungan Sehat Perumahan	• Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hunian dan Penataan Kawasan Permukiman (termasuk kawasan kumuh)

• Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	• Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi
• Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	• Peningkatan Ketersediaan Air Baku
• Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	• Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi
• Peningkatan Ketahanan Pangan	• Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
• Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	• Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat
• Penataan Struktur Industri	• Industri Perikanan dan Hasil Laut • Pengembangan Kawasan Industri
• Pembangunan Jalan dan Jembatan • Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	• Pembangunan dan Pengembangan Jalan Untuk Aksesibilitas dan Daya Saing Wilayah

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

Penajaman arah kebijakan (prioritas dan sasaran) untuk tahun 2018 ini memperkuat sinkronisasi positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional sekaligus akan mempercepat pencapaian target jika dilaksanakan secara utuh dan optimal. Penajaman arah kebijakan ini juga harus diturunkan melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan dengan tetap menyesuaikan kebijakan nasional. Oleh karena itu, perlu adanya review terhadap kelayakan, penambahan atau perluasan maupun penghapusan program dan kegiatan untuk mengoptimalkan pembangunan daerah.

Tabel 4.2.
Penajaman Program Prioritas Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018

URAIAN	RPJMD 2013-2018	FOKUS RKPD 2018
PRIORITAS PEMBANGUNAN	12	6
PROGRAM PRIORITAS	119	29

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 dengan Prioritas Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018
dengan Prioritas Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2018

No	Provinsi Kalimantan Timur	Kota Balikpapan
1	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	Peningkatan kualitas dan kuantitas akses layanan pendidikan (berbasis IPTEK dan IMTAQ) 12 Tahun

		yang terjangkau
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Aksesibilitas, kualitas dan manajemen pelayanan kesehatan
3	Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Peningkatan Produktifitas, kompetensi tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
4	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	Pengembangan potensi ekonomi lokal
5	Agribisnis	-
6	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar	Mewujudkan pemerataan infrastruktur yang berkualitas

Tahun 2018 merupakan tahun kelima dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Adapun tema pembangunan pada tahun 2018 tersebut adalah "Penguatan Ekonomi Masyarakat Menuju Kesejahteraan yang adil dan merata".

Gambar 4.2. Tema Pembangunan Tahunan Provinsi Kalimantan Timur

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Balikpapan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2016 - 2021, dengan Visi:

"MEWUJUDKAN BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI DAN BERKELANJUTAN MENUJU MADINATUL IMAN".

Sebagaimana visi tersebut dirumuskanlah misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021. Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki *critical point* dalam penyusunan RPJMD. Hal ini mengingat bilamana visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif ke dalam tujuan dan sasaran, maka program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih akan mengalami kesulitan dalam operasionalisasinya ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan dan sasaran merupakan dampak keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja, maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih juga menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Hasil perumusan tujuan pembangunan Kota Balikpapan tahun 2016-2021 dan keterkaitannya dengan misi pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Tujuan Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2016-2021

NO	MISI	NO	TUJUAN
1	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;	1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual dan berdaya saing
		2	Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani secara berkelanjutan

		3	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas melalui pengembangan partisipasi yang menyeluruh dan berkesinambungan
2	Mewujudkan kota layak huni yang berwawasan lingkungan;	4	Meningkatkan kualitas kota yang berwawasan lingkungan
3	Meningkatkan infrastruktur kota yang representatif;	5	Meningkatkan pelayanan infrastruktur
4	Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif;	6	Menggerakkan sendi-sendi perekonomian masyarakat
		7	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau
5	Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.	8	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik dan penyediaan layanan publik yang prima

Penjabaran terhadap masing-masing tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual dan berdaya saing.

   Sumber daya manusia menjadi komponen utama dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus penentu keberhasilan pembangunan daerah. SDM yang berkualitas tidak hanya cerdas intelektual, namun juga harus cerdas emosional dan cerdas spiritual sehingga kombinasi ketiga kecerdasan tersebut akan menghasilkan SDM yang berdaya saing dan membentuk *smart people* atau masyarakat cerdas. Sektor pembangunan yang paling berpengaruh terhadap sumber daya manusia adalah pendidikan. Pembangunan pendidikan Kota Balikpapan pada tahun 2017 diperluas pada konsep pendidikan berbasis IPTEK dan berlandaskan IMTAQ yang diarahkan pada Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal berbasis IPTEK dan Berlandaskan IMTAQ, Perluasan subsidi pendidikan bagi seluruh peserta didik usia sekolah, peningkatan kualitas dan kuantitas Tenaga Pendidik serta Tenaga Kependidikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas SARPRAS Pendidikan. Pendidikan non formal berbasis IPTEK dan berlandaskan IMTAQ akan diwujudkan melalui upaya pemenuhan kebutuhan sarana prasarana belajar berbasis IT di beberapa sekolah dan penerapan muatan lokal yang berbasis IMTAQ di semua jenjang pendidikan di Kota Balikpapan, pemberian insentif guru PAUD dan insentif ustadz/ustadzah. Perluasan subsidi pendidikan bagi seluruh peserta didik diharapkan memperluas akses pendidikan untuk semua penduduk umur sekolah terutama keluarga kurang mampu melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin, Beasiswa Stimulan Pendidikan dan Hibah bantuan pembangunan sarana prasarana sekolah swasta. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga

kependidikan dilaksanakan melalui kualifikasi guru, sertifikasi guru serta pelatihan pengelolaan anggaran dan manajemen sekolah bagi tenaga kependidikan.

Sasaran dari tujuan diatas adalah meningkatnya kualitas pendidikan. Target dari sasaran ini yang akan dicapai pada RKPD 2018 yaitu:

1. Rata-rata Lama Sekolah ditargetkan 10,47 tahun dari pencapaian baseline tahun 2015 adalah 10,43 tahun. Artinya Capaian kinerja kualitas pendidikan terhadap visi dan misi ke-1 pada indikator Rata-Rata Lama Sekolah ditargetkan memberikan pengaruh peningkatan (+) sebesar 0,04 tahun pada Tahun 2018. Diharapkan pada tahun 2018 seluruh usia sekolah di Kota Balikpapan dapat sampai pada tingkat pendidikan menengah yang mendukung program pendidikan 12 tahun sebagai Program Prioritas Provinsi Kalimantan Timur.
2. Angka Harapan Lama Sekolah ditargetkan 13,93 tahun dari pencapaian baseline tahun 2015 adalah 13,73 tahun. Artinya Capaian kinerja kualitas pendidikan terhadap visi dan misi ke-1 pada indikator Angka Harapan Lama Sekolah diharapkan memberi pengaruh peningkatan (+) sebesar 0,20 tahun pada tahun 2018. Target pencapaian pada tahun 2021 ini akan mendukung peningkatan IPM Kota Balikpapan.

Terkait capaian sasaran kualitas pendidikan pada Indikator Sasaran Rata-rata Lama Sekolah dengan peningkatan sebesar 0,04 tahun dan Indikator Sasaran Angka Harapan Lama Sekolah dengan peningkatan sebesar 0,20 tahun. Target dan capaian setiap strategi adalah sebagai berikut:

Strategi Pengembangan Pola Pendidikan berbasis IPTEK dan IMTAQ.

Strategi Pengembangan Pola Pendidikan berbasis IPTEK dan berlandaskan IMTAQ merupakan cara pengembangan pendidikan 12 tahun secara berjenjang bagi siswa disetiap sekolah untuk mampu menyerap IPTEK dan mengimplemantasikan IMTAQ secara tuntas. Sejalan hal tersebut, pola Pendidikan berbasis IPTEK dan berlandaskan IMTAQ memiliki maksud menciptakan sumber daya manusia yang memiliki ilmu dan teknologi yang mampu mewujudkan kreatifitas dan inovasi yang berkelanjutan dengan didasarkan atas nilai keimanan dan budi pekerti luhur dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi Peningkatan Akses Layanan Pendidikan (berbasis TIK) 12 Tahun yang Terjangkau.

Strategi peningkatan akses layanan pendidikan (berbasis TIK) 12 Tahun yang terjangkau merupakan cara pemerintah kota untuk mencapai sasaran kualitas pendidikan seperti hanya strategi mengembangkan pola pendidikan berbasis IPTEK dan berlandaskan IMTAQ. Strategi ini memiliki penekanan pada akses layanan pendidikan dalam ruang lingkup Teknologi Informasi dan Komunikasi (disingkat “TIK”) yang diarahkan untuk e-pembelajaran dan e-administrasi.

Berdasarkan hal diatas, bahwa strategi peningkatan akses layanan pendidikan (berbasis TIK) 12 Tahun yang terjangkau sangat penting untuk diimplementasikan secara luas jejaringnya dalam menghubungkan semua satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan dan semua kantor pemerintahan yang menangani bidang pendidikan baik di pusat maupun di daerah.

Strategi Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan.

Strategi peningkatan mutu pendidikan merupakan strategi yang berkelanjutan dengan tujuan memperbaiki mutu pendidikan pada tiap periode waktu perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Sehubungan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tersebut perlu direncanakan secara baik dan tepat sasaran agar penyelenggaraan bukan semata-mata bersifat *input oriented* yang bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan (sekolah) akan dapat menghasilkan *output* (keluaran) yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Ternyata strategi *input-output* kurang dapat memberikan perbaikan yang signifikan pada mutu penyelenggaraan pendidikan karena tidak berfungsi sepenuhnya di lembaga pendidikan (sekolah), melainkan hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan industri.

b. Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani secara berkelanjutan

Salah satu sektor yang sangat berpengaruh dalam mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas intelektual, cerdas emosional dan cerdas spiritual dan berdaya saing adalah faktor kesehatan. Masyarakat yang sehat jasmani sangat mendukung pembentukan manusia cerdas intelektual, sedangkan cerdas emosional dan cerdas spiritual membutuhkan jiwa yang sehat.

Sasaran tujuan tersebut adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Kesehatan masyarakat yang berkelanjutan diharapkan tercapai melalui strategi peningkatan aksesibilitas, kualitas dan manajemen pelayanan kesehatan dengan rumusan operasional akan dilakukan dengan peningkatan upaya promotif dan preventif melalui lembaga dan pengelola kesehatan masyarakat, peningkatan manajemen layanan kesehatan di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan dan optimalisasi regulasi pelayanan kesehatan. Peningkatan aksesibilitas dimaksudkan untuk kemudahan seluruh lapisan masyarakat mengakses layanan kesehatan tanpa diskriminasi. Kualitas pelayanan kesehatan difokuskan ketersediaan dan profesionalisme sumber daya manusia serta sarana prasarana kesehatan. Manajemen pelayanan kesehatan diharapkan masyarakat semakin pasti dan mudah untuk mendapatkan layanan kesehatan yang cepat, tanggap, akurat dan nyaman.

Sasaran dari tujuan mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani secara berkelanjutan adalah meningkatkan derajat kesehatan dengan target yang akan dicapai pada RKPD Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Usia Harapan Hidup ditargetkan 73,97 tahun dari pencapaian indikator sasaran *baseline* tahun 2015 adalah 73,95 tahun. Artinya Capaian Sasaran Kinerja Derajat Kesehatan terhadap visi dan misi ke-1 pada indikator Angka Usia Harapan Hidup diharapkan memberi pengaruh peningkatan (+) sebesar 0,02 tahun pada Tahun 2018.
2. Angka Kematian Bayi (AKB) ditargetkan 4 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2018 dari pencapaian *baseline* tahun 2015 adalah 6 per 1000 kelahiran hidup. Artinya capaian sasaran terhadap visi dan misi ke-1 pada indikator Angka Kematian Bayi diharapkan memberi pengaruh penurunan (-) sebesar 2 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2018.
3. Angka Kematian Ibu (AKI) ditargetkan 69 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2018 dari pencapaian *baseline* tahun 2015 adalah 72 jiwa per 100.000 kelahiran hidup. Artinya Capaian Sasaran Kinerja Derajat Kesehatan terhadap visi dan misi ke-1 pada indikator Angka Kematian Ibu (AKI) diharapkan memberikan pengaruh penurunan (-) sebesar 3 jiwa per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2018.

Strategi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkelanjutan adalah Pengembangan Pola Hidup Sehat dan Peningkatan Aksesibilitas, kualitas dan manajemen pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Berbagai permasalahan penting antara lain disparitas status kesehatan; beban ganda penyakit; kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan; perlindungan masyarakat di bidang obat dan makanan; serta perilaku hidup bersih dan sehat. Beberapa masalah penting lainnya yang perlu ditangani segera adalah peningkatan akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan, penanganan masalah gizi buruk, penanggulangan wabah penyakit menular, pelayanan kesehatan di daerah bencana, dan pemenuhan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan.

Langkah-langkah yang telah ditempuh adalah peningkatan akses kesehatan terutama bagi penduduk miskin melalui pelayanan kesehatan gratis; peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular termasuk polio dan flu burung; peningkatan kualitas, keterjangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar; peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; penjaminan mutu, keamanan dan khasiat obat dan makanan; penanganan kesehatan di daerah bencana; serta peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Sehubungan dengan strategi aksesibilitas kesehatan, Pemerintah Kota bersama jajarannya dalam hal ini tanggungjawab berada pada Dinas Kesehatan berusaha mengembangkan dan mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Balikpapan seperti pelaksanaan jamkesda, JPK-PNS, Jaminan kesehatan bagi keluarga miskin dan kurang mampu.

Sejalan dengan hal tersebut, pelayanan kesehatan masyarakat memerlukan pengaturan yang baik, agar tujuan tiap kegiatan atau program itu tercapai dengan baik. Proses pengaturan kegiatan ilmiah atau ilmu seni tentang bagaimana menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif serta rasional untuk mencapai tujuan ini disebut manajemen, sedangkan untuk mengatur kegiatan-kegiatan atau pelayanan kesehatan masyarakat disebut "Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat". Pelayanan kesehatan yang diberikan adalah pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, rehabilitasi medik dan pelayanan keperawatan. Pelayanan yang dilakukan di rumah sakit meliputi : gawat darurat, rawat jalan dan rawat inap, sedangkan di Pukesmas hanya pelayanan; gawat darurat (kearah pertolongan pertama) dan rawat jalan.

Sejalan dengan reformasi dibidang kesehatan melalui Paradigma Sehat, pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun di Puskesmas lebih difokuskan pada upaya promosi kesehatan (promotif) dan pencegahan (preventif) dengan tidak mengabaikan upaya kuratif-rehabilitatif. Selain itu, pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas bukan hanya kepada individu (pasien), tetapi juga keluarga dan masyarakat, sehingga pelayanan kesehatan yang dilakukan merupakan pelayanan kesehatan yang paripurna (komprehensif dan holistik).

Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah Kota Balikpapan menyusun strategi Peningkatan Aksesibilitas, kualitas dan manajemen pelayanan kesehatan yang dirumuskan dalam rumusan operasional berdasarkan strategi tersebut yaitu:

- Peningkatan upaya promotif dan preventif melalui lembaga dan pengelola kesehatan masyarakat difokuskan pada pelayanan puskesmas dan tenaga kesehatan yang ada di masyarakat termasuk kelompok perempuan.
- Peningkatan manajemen layanan kesehatan di tingkat FKTP dan Rujukan harus ditingkatkan sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan dapat dilayani dengan cepat, tanggap, akurat dan nyaman.
- Optimalisasi regulasi Pelayanan Kesehatan sangat diperlukan untuk kepastian dan kenyamanan layanan.

c. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas melalui pengembangan partisipasi yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Kesejahteraan masyarakat secara harfiah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemenuhan sandang, pangan dan papan. Untuk dapat memenuhi sandang, pangan dan papan, masyarakat harus mempunyai penghasilan yang diperoleh dari usaha dan pekerjaan. Selain itu pemerataan kesejahteraan akan sangat berpengaruh terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang akhirnya berpengaruh pada kualitas

kehidupan masyarakat. Pengembangan partisipasi yang menyeluruh dan berkesinambungan diarahkan pada semakin tingginya kesadaran seluruh unsur masyarakat bahwa untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas dibutuhkan peran masyarakat luas dan bukan hanya tanggungjawab pemerintah. Masyarakat harus memiliki daya juang tinggi dan pantang menyerah untuk selalu berusaha memenuhi kebutuhan kehidupan dengan mengedepankan nilai-nilai spiritual. Lembaga-lembaga masyarakat berperan aktif membangun masyarakat untuk mampu membantu sesamanya. Dunia usaha meningkatkan rasa solidaritas dan penghargaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Upaya pembentukan karakter tersebut harus dilakukan menyeluruh dan berkesinambungan sehingga terwujud Kota Balikpapan yang madani.

Sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah menurunnya jumlah pengangguran serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Penurunan jumlah pengangguran menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat usia kerja yang bekerja dan berusaha sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup yang berarti mendukung kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan difokuskan pada pengendalian kependudukan, penurunan tingkat kemiskinan dan kesetaraan gender.

Sasaran dari tujuan mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat yang berkualitas melalui pengembangan partisipasi yang menyeluruh dan berkesinambungan, adalah menurunnya jumlah pengangguran dan meningkatkan kualitas hidup kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Target sasaran menurunnya pengangguran yang akan dicapai pada RKPD 2018 adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditargetkan 5,30 % pada tahun 2018 dari pencapaian *baseline* Indikator Sasaran tahun 2016 adalah 5,95 %. Artinya capaian kinerja pada tahun 2018 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 0,65 %. Terkait hal ini Pemerintah Kota Balikpapan perlu mengambil langkah preventif dan bekerja keras untuk meningkatkan investasi dalam rangka perluasan lapangan kerja. Untuk mengantisipasi peningkatan TPT dibutuhkan dan arah kebijakan.

Strategi untuk menurunkan jumlah pengangguran dalam RKPD Tahun 2018 adalah meningkatkan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Peningkatan produktivitas kerja sangat penting dalam kondisi semakin banyaknya pengurangan tenaga kerja di beberapa sektor terutama pertambangan sehingga tenaga kerja yang ada dituntut mengoptimalkan hasil produksi.

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan untuk menjamin perusahaan memperhatikan karyawan melalui lingkungan kerja yang baik, memberikan pelatihan yang cukup, optimalisasi mesin dan peralatan kerja, dan mendukung kesejahteraan karyawan dan yang terpenting adalah penetapan kebijakan pengupahan yang melindungi baik pekerja maupun dunia usaha.

Peningkatan kompetensi ketenagakerjaan diarahkan baik pada pekerja maupun yang belum bekerja dengan target menghasilkan tenaga kerja yang kompeten baik dari segi ketrampilan, skill, bahasa dan perilaku. Peningkatan kompetensi pekerja diarahkan pada perusahaan tempat bekerja, pelatihan usaha-usaha masyarakat, pelatihan tenaga kerja dan kerjasama antar dunia usaha. Sedangkan untuk yang belum bekerja, harus dilakukan pemetaan tenaga kerja yang selanjutnya dilakukan tindakan lanjutan yaitu pelatihan tenaga kerja untuk seluruh lapisan masyarakat, penempatan tenaga kerja, kerjasama dengan dunia usaha dan kegiatan magang.

Perluasan kesempatan kerja merupakan langkah yang sangat penting dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran. Upaya perluasan kesempatan kerja berkaitan erat pertumbuhan investasi usaha. Investasi usaha akan memperhatikan kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Untuk mendukung upaya tersebut maka upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan antara lain pemetaan lapangan kerja dan pemetaan tenaga kerja harus dilakukan dalam rangka sinkronisasi antara upaya penyediaan lapangan usaha baru.

Pembinaan usaha kecil masyarakat harus ditingkatkan agar mampu menyerap tenaga kerja, pembinaan untuk mengembangkan jiwa usaha masyarakat sehingga masyarakat mampu berinovasi dalam menciptakan usaha baru. Selain itu, Pemerintah Kota menyelenggarakan *Job Marketing Fair* untuk memfasilitasi antara dunia usaha dan pencari kerja.

d. Meningkatkan kualitas kota yang berwawasan lingkungan

Pola pembangunan perkotaan yang berwawasan lingkungan ialah konsep yang harus ditempuh melalui proses jangka panjang. Sebab kota merupakan arena kegiatan manusia yang serba kompleks melibatkan berbagai aspek aktivitas. Baik aspek manusianya, sumber daya alam dan buatan manusia. Oleh karenanya, pembangunan perkotaan dampak lingkungan yang ditimbulkan merusak ekosistem perkotaan.

Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup.

Pembangunan yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu adanya saling keterkaitan beberapa sektor, antara lain lingkungan dan masyarakat serta kemanfaatan dan pembangunan. Pembangunan akan selalu berkaitan dan saling berinteraksi dengan lingkungan hidup. Interaksi tersebut dapat bersifat positif atau negatif. Pengetahuan dan informasi tentang berbagai interaksi tersebut sangat diperlukan dalam pembangunan berwawasan lingkungan.

Adapun ciri-ciri pembangunan berwawasan lingkungan antara lain:

1. Menjamin pemerataan dan keadilan.
2. Menghargai keanekaragaman hayati.
3. Menggunakan pendekatan integratif.
4. Menggunakan pandangan jangka panjang.

Pembangunan berwawasan lingkungan sangat diperlukan mengingat daya dukung alam ternyata semakin tidak seimbang dengan laju tuntutan perkembangan pemenuhan kebutuhan hidup. Namun perkembangan yang dicapai manusia karena majunya derap pembangunan itu membawa dampak negatif bagi lingkungan yakni rusaknya lingkungan karena pembangunan yang lebih cenderung berorientasi ekonomis. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup. Dengan pembangunan yang terus menerus diharapkan kita tetap mempertahankan aspek-aspek pemeliharaan dan pelestarian lingkungan sehingga akan tercipta Ruang Terbuka Hijau yang ideal yaitu sekitar 40% dari luas wilayah.

Tujuan meningkatkan kualitas kota yang berwawasan lingkungan memiliki korelasi secara langsung pada pencapaian keberhasilan misi ke-2 RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021 yang terukur atas indikator meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup. Pada tahun 2018 target capaian indikator tersebut adalah59,50 dari baseline pada tahun 2015 sebesar 58,58.

Adapun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Strategi Mewujudkan Tata Ruang Wilayah yang Efisien, Berkelanjutan

Strategi Mewujudkan Tata Ruang Wilayah yang Efisien, Berkelanjutan merupakan upaya Pemerintah Kota untuk mencapai sasaran meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Tata ruang wilayah yang efisien dan berkelanjutan mempunyai arti bahwa penataan ruang wilayah dilaksanakan secara tepat, cermat, berdaya guna, dan hasil guna sesuai dengan arah pemanfaan ruang yang telah ditetapkan, serta menjamin kelestarian dan kelangsungan lingkungan untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Agar poin efisien dan berkelanjutan dapat tercapai, maka strategi ini memiliki penekanan pada memperkuat dokumen rencana tata ruang sebagai pedoman pembangunan dan pengendalian pemanfaatan ruang, menyediakan data dan informasi spasial daerah yang terintegrasi, dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengendalian pemanfaatan ruang serta kesiagaan dan pencegahan bahaya bencana dan kebakaran.

Pada strategi Perwujudan Tata Ruang Wilayah yang Efisien dan Berkelanjutan terdapat indikator kinerja program mengacu pada RPJMD Tahun 2016-2021 yaitu indikator tersedianya Peraturan Daerah untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta Insentif dan Disinsentif dimana ditargetkan penyelesaian Peraturan Daerah tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Balikpapan sebagai salah satu perangkat dalam rangka pengendalian pemanfaataan ruang.

Sedangkan untuk indikator persentase penertiban pemanfaatan ruang berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2015 (periode IV RPJMD 2011-2016) telah memenuhi target capaiannya yang akan terus ditingkatkan sampai dengan tahun 2021.

Strategi mewujudkan *clean air, clean water, clean land*

Strategi tersebut merupakan upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik untuk masyarakat demi tercapainya sebuah kota yang layak huni dan berkelanjutan. Berbagai permasalahan lingkungan telah banyak terjadi karena berbagai pihak tidak memikirkan dampak yang terjadi akibat kegiatan-kegiatan yang mengeksploitasi lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat dan pengawasan serta pengendalian yang ketat agar mencegah terjadinya perusakan lingkungan. Selain itu juga diperlukan penegakan hukum bagi perusak lingkungan agar memberikan sebuah efek jera dan pengrusakan lingkungan tidak kembali terjadi.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat adalah melalui kemudahan masyarakat dalam akses data dan informasi mengenai SDA dan Lingkungan Hidup. Keterbukaan akses data dan informasi ini juga akan mampu meningkatkan peran masyarakat untuk ikut dalam pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan serta penggalian inovasi masyarakat terkait cara pengelolaan lingkungan. Selanjutnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pengawas dan pengendali kerusakan lingkungan akan berkontribusi pada upaya pencegahan kerusakan lingkungan terutama dalam hal respon dan tindakan terhadap pengaduan masyarakat.

Strategi mewujudkan *clean air, clean water, clean land* yang didukung melalui arah kebijakan penurunan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan dengan kebijakan umum Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Peningkatan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan Lingkungan, Peningkatan Kualitas Pengelolaan Persampahan.

e. Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur

Tujuan meningkatkan pelayanan infrastruktur dengan sasaran terwujudnya infrastruktur yang handal diukur dengan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar pada RKPD tahun 2018 ditargetkan meningkat menjadi 76,00 dari baseline pada tahun 2014 sebesar 73,40 atau dalam kategori baik. Mengingat tidak adanya hasil survei kepuasan infrastruktur di Kota Balikpapan pada Tahun 2015, maka sebagai baseline digunakan hasil penilaian *Most Livable City Index* oleh Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) untuk Kota Balikpapan pada tahun 2014 yaitu pada aspek persepsi masyarakat terhadap ketersedian sarana dan prasarana dengan indeks kenyamanan sebesar 73,40.

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran umpan balik untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna infrastruktur atas pembangunan infrastruktur di Kota Balikpapan. Indeks pengukuran infrastruktur secara agregat yang merupakan penjumlahan

dari masing-masing infrastruktur setelah dibobot (S (Total Index type A + B + C+D+E)/n) dapat dikelompokkan skala penilaian berikut ini:

Tabel 4. 4
Asumsi Penilaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

ASUMSI PENILAIAN INDEKS KEPUASAN LAYANAN INFRASTRUKTUR (IKLI)			
NILAI INDEKS	RENTANG NILAI		KETERANGAN
1	0 - 10	0 - 20	Buruk
2	11 - 20		
3	21 - 30	21 - 40	Sedang
4	31 - 40		
5	41 - 50	41 - 60	Cukup
6	51 -60		
7	61 - 70	61 - 80	Baik
8	71 - 80		
9	81 - 90	81 - 100	Baik Sekali
10	91 - 100		

Adapun strategi dalam meningkatkan pelayanan infrastruktur yaitu dengan mewujudkan pemerataan infrastruktur yang berkualitas. Pemerataan infrastruktur melalui pembangunan infrastruktur menjadi aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan wilayah sekaligus roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya. Pembangunan infratruktur yang dimaksudkan adalah jalan dan transportasi yang akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor terkait sebagai multiplier dan pada akhirnya memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya mewujudkan pemerataan infrastruktur yang berkualitas harus didukung dengan upaya pengembangan data dan informasi infrastruktur melalui pemanfaatan teknologi dan komunikasi. Dengan adanya data dan informasi yang valid mampu memberikan data yang akurat terkait kondisi pemerataan pembangunan infrastruktur. Selain itu juga diperlukan penguatan dalam prosedur percepatan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur. Hal ini dimaksudkan agar infrastruktur yang memerlukan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur dapat ditangani dengan segera. Selanjutnya juga dalam rangka mewujudkan infrastruktur yang berkualitas juga diperlukan sosialisasi kepada pengguna dalam hal keselataman dan ketertiban.

f. Menggerakkan sendi-sendi perekonomian masyarakat

Salah satu tujuan dari misi 4 adalah menggerakkan sendi-sendi Perekonomian Masyarakat. Perkembangan perekonomian kota sangat tergantung pada pergerakan ekonomi masyarakat. Oleh karenanya Pemerintah perlu mendorong kegiatan ekonomi masyarakat dengan menciptakan kreatifitas yang dapat menimbulkan nilai tambah bagi usaha masyarakat. Kreatifitas usaha yang tercipta dalam konsep ekonomi kreatif,

yakni mengembangkan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan daya inovasi dan kreasi masyarakat melalui pemanfaatan sumber-sumber potensial masyarakat dan sumber daya alam yang terbarukan. Peningkatan aktifitas sendi ekonomi masyarakat dapat menjadi dasar peningkatan pendapatan masyarakat sehingga berdampak pada terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat. Selain itu perlu didorong upaya diversifikasi ekonomi kreatif sehingga dapat pula membentuk dan mewujudkan *branding* perekonomian sebagai identitas yang khas kota Balikpapan.

Sendi-sendi perekonomian masyarakat diharapkan dapat bersinergi, yakni merupakan wujud dari keterkaitan antara hulu dan hilir aktifitas ekonomi, sehingga perekonomian yang ada saling mendukung dan pada akhirnya akan dapat menambah nilai jual ekonomi itu sendiri. Untuk meningkatkan kreatifitas ekonomi masyarakat diperlukan peningkatan SDM yang berjiwa *entrepreneur*, berdaya saing dan kreatif. Dengan SDM berjiwa *entrepreneur*, berdaya saing dan kreatif akan dapat menghasilkan produk-produk yang mampu bersaing dalam menghadapi pasar bebas Asean atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), sehingga dengan demikian perekonomian dapat berkembang yang pada akhirnya diharapkan *output* secara makro adalah terciptanya pemerataan pendapatan masyarakat Kota Balikpapan.

Sasaran dari tujuan diatas adalah meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat. Target dari sasaran tersebut yang akan dicapai pada RKPD 2018 yaitu:

1. Peningkatan PDRB perkapita yang ditargetkan sebesar Rp143,33 Juta dari pencapaian *baseline* tahun 2015 adalah Rp122,46 Juta. Artinya, capaian kinerja PDRB Perkapita pada tahun 2021 ditargetkan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi PDRB Perkapita semakin baik pula tingkat perekonomian. Dengan adanya penambahan *output* dari produksi barang dan jasa. Namun demikian, ukuran ini belum dapat menggambarkan kenyataan karena harus pula dilihat dari jumlah penduduk miskin dan pengangguran, sehingga belum sepenuhnya mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk yang tergambar dari indeks Gini Ratio. PDRB Perkapita yang meningkat pada tahun 2018 menunjukkan nilai tambah yang bisa diciptakan oleh penduduk Kota Balikpapan sebagai akibat adanya aktifitas produksi menurut harga berlaku yang memperlihatkan trend yang positif.
2. Indeks Gini Ratio pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 0,33 dari pencapaian *baseline* tahun 2015 yaitu sebesar 0,34. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kota Balikpapan masih tergolong kategori sedang. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya diupayakan adanya penurunan indeks gini ratio sesuai dengan target, sehingga komposisi yang menikmati pemerataan pendapatan adalah golongan bawah dan menengah.

Terkait capaian Sasaran meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat pada Indikator peningkatan PDRB perkapita dengan peningkatan menjadi Rp20,87 Juta dan Indikator Sasaran Penurunan

Indeks Gini dengan indeks 0,01 untuk pencapaian 2 indikator tersebut, digunakan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Strategi Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi.

Strategi Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi didasarkan pada pendekatan Penguatan SDM dan IPTEK pelaku usaha, mempersiapkan sarana prasarana, meningkatkan kemandirian koperasi, menjadikan UMKM mandiri, Pengembangan kawasan/sentra industri. Diharapkan dengan pendekatan tersebut dapat tercipta kualitas dan kuantitas produk, diversifikasi usaha, usaha kreatif, usaha yang berdaya saing sehingga dapat meningkatan nilai jual produk yang dapat diterima di pasar bebas yang pada akhirnya pergerakan ekonomi masyarakat dapat tumbuh.

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam Strategi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi antara lain, melalui:

- Program peningkatan kemampuan teknologi industri. Diharapkan setiap pelaku usaha IKM mampu menerapkan teknologi industri yang dapat mendukung penciptaan efisiensi dan peningkatan nilai produksi.
- Program pengembangan industri kecil dan menengah. Diharapkan program tersebut akan didukung dengan kegiatan-kegiatan yang outputnya meningkatkan jumlah IKM yang berkualitas dan menghasilkan produk yang berkualitas pula.
- Program penataan struktur industri. Diharapkan akan mewujudkan industri yang terpadu berwawasan lingkungan, meningkatan nilai tambah produksi lokal, dan meningkatkan jumlah usaha di kawasan dan sentra Industri yang beroperasi (Kawasan Industri Kariangau, Sentra Industri Kecil Somber dan Sentra Industri Kecil Teritip).
- Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah UMKM yang bermitra dengan perusahaan.
- Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi, diharapkan dapat meningkatkan jumlah koperasi aktif sebagai penggerak perekonomian masyarakat.
- Program penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif. Diharapkan dampak program tersebut mampu meningkatkan jumlah kredit UMKM dari Bank sebagai modal pengembangan berusaha dan bergeraknya investasi.
- Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Diharapkan program ini mampu menciptakan jumlah pengurus/pengawas/pengelola koperasi yang berkualitas guna menggerakkan, menjalankan dan mengembangkan koperasi tersebut.

Strategi Meningkatkan kelancaran distribusi dan pengamanan perdagangan

meningkatkan kelancaran distribusi dan pengamanan perdagangan didasarkan pada pendekatan memperkuat sarana prasarana jaringan distribusi, menyiapkan regulasi dalam rangka stabilisasi harga, mengembangkan kapasitas dan kualitas logistik perdagangan dan sarana

distribusi, pengembangan kelembagaan dan pelaku usaha distribusi perdagangan, dan meningkatkan kualitas keamanan barang.

Di Kota Balikpapan 95% kebutuhan barang dipenuhi dari luar kota Balikpapan yang berarti sangat tinggi ketergantungannya dari daerah lain. Diharapkan dengan pendekatan tersebut Kota Balikpapan dapat menjaga stabilitas harga dan menjaga ketersediaan stok barang guna mencukupi kebutuhan barang dan keterjaminan keamanan suatu barang kebutuhan masyarakat di Kota Balikpapan.

Langkah-langkah yang akan ditempuh melalui strategi meningkatkan kelancaran distribusi dan pengamanan perdagangan, antara lain adalah:

- Program Peningkatan Ketahanan Pangan, diharapkan setiap pelaku usaha IKM mampu menerapkan teknologi industri yang dapat mendukung menciptakan efisiensi dan peningkatan nilai produksi.
- Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Diharapkan kedua program tersebut dapat mewujudkan strategi untuk menjaga stabilitas harga dan kebutuhan pangan serta meningkatkan keamanan pangan di Kota Balikpapan.
- Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. Program tersebut diharapkan dapat menambah niliai produk yang akan diekspor yang nanti dapat memberi kontribusi perkembangan perekonomian di Kota Balikpapan.
- Program Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri, diharapkan akan meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memiliki usaha dengan produk terstandarisasi dan terciptanya perlindungan bagi konsumen dengan upaya meningkatan kegiatan tera ulang terhadap alat ukur wajib tera.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar. Dengan program ini diharapkan tercipta pasar yang berkualitas dan tertata serta meningkatkan jumlah pedagang yang berusaha didalam pasar.
- Program Peningkatan Kebersihan, Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan Pasar, diharapkan pasar rakyat dapat mewujudkan kondisi pasar yang bersih, nyaman dan mendukung salah satu kriteria penilaian adipura serta mampu bersaingan dengan toko swalayan.

g. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau

Pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan produksi akan menghasilkan perbaikan ekonomi, tetapi berimplikasi lain terhadap sosial dan lingkungan misalnya meningkatnya emisi gas rumah kaca, berkurangnya areal hutan serta musnahnya berbagai spesies dan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu meningkatkan pertumbuhan produksi dengan penerapan ekonomi hijau diharapkan akan menghasilkan perekonomian yang rendah karbon (tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan), hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial.

Sasaran dari tujuan diatas adalah Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan. Target dari sasaran ini yang akan dicapai pada RKPD 2018 yaitu meningkatkan nilai PDRB non migas adalah Rp27,25 trilyun dari pencapaian baseline tahun 2015 yaitu Rp. 40,21 trilyun.

Strategi dalam rangka pencapaian target kinerja pada RKPD 2018 adalah sebagai berikut:

Strategi Pengembangan Ekowisata

Posisi Kota Balikpapan sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur menjadi salah satu peluang yang menjadikan Kota Balikpapan semakin banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik regional, nasional maupun internasional. Untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, perlu dilakukan langkah-langkah pengembangan, peningkatan dan promosi destinasi wisata di Kota Balikpapan. Bentuk promosi yang digunakan bisa berbentuk brosur, souvenir, website ataupun mengikuti even-even yang ada baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu upaya yang perlu terus ditingkatkan adalah dengan melakukan kerjasama dengan para pelaku usaha pendukung pariwisata seperti perhotelan, rumah makan, kafe, travel agen dan usaha-usaha lainnya. Semua usaha diatas bila berjalan dengan baik pada akhirnya akan berimplikasi langsung terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata.

Strategi Menciptakan dan Mengembangkan Kemudahan Berinvestasi

Strategi Menciptakan dan mengembangkan kemudahan berinvestasi didasarkan pada pendekatan dan cara menerapkan regulasi kemudahan investasi, membangun iklim investasi daerah yang kondusif, dan reformasi kebijakan peizinan investasi melalui pelayan terpadu satu pintu. Pendekatan tersebut nanti akan berdampak pada meningkatkan rencana dan realisasi investasi yang akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan PDRB Perkapita di Kota Balikpapan

Strategi Meningkatkan Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan.

Pertanian dan pangan merupakan hal yang sangat penting dan strategis bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Dengan merujuk permasalahan dan pentingnya menjaga pertanian menuju kemandirian pangan, Pemerintah Kota Balikpapan melakukan pengembangan pertanian melalui intensifikasi dan diversifikasi pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah dan perluasan produksi dengan memanfaatkan potensi geografis wilayah dan sumber daya manusia yang terintegrasi dan sinergis dalam sektor pertanian. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan Tahun 2012-2032, kawasan peruntukan pertanian terdapat di Kelurahan Manggar, Kelurahan Lamaru, dan Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur seluas kurang lebih 325 ha yang meliputi kawasan sawah lestari seluas 130 ha dan kawasan potensi pertanian seluas 195 ha. Kawasan peruntukan pertanian tanaman hortikultura terdapat di sebagian Kelurahan Manggar, Kelurahan Lamaru, dan Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur dengan luas 1,591 ha. Kawasan peruntukan perkebunan terdapat di sebagian Kelurahan Manggar, Kelurahan Lamaru,

dan Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur seluas 2.045 ha. Kawasan peruntukan peternakan di sebagian Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur dengan luas 100 ha.

Kawasan peruntukan perikanan meliputi kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan perikanan budidaya, dan kawasan peruntukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdiri dari daerah penangkapan ikan 0-2 mil seluas 7.642 ha dan daerah penangkapan ikan > 2 mil dengan luas 27.896 ha yang berada di sepanjang laut dan pesisir Kecamatan Balikpapan Timur. Kawasan peruntukan perikanan budidaya seluas 579 ha yang terdiri dari revitalisasi kawasan perikanan budidaya darat di sekitar Sungai Somber, Sungai Manggar, dan pesisir Kelurahan Teritip seluas 545 ha, sementara kawasan perikanan budidaya laut terletak di wilayah laut dan pesisir Pantai Manggar hingga Sungai Aji Raden seluas 1.804 ha.

Strategi Meningkatkan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan.

Energi telah menjadi kebutuhan dasar yang memainkan peran penting dalam perkembangan perekonomian nasional dan global. Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap energi fosil yang berasal dari impor untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya. Sementara penggunaan sumber energi baru terbarukan hanya sekitar 6% dan selebihnya yaitu sekitar 94% berasal dari energi fosil. *(sumber Kementerian ESDM-RI).*

Potensi bioenergi (limbah pertanian, kotoran hewan, sampah kota, biomassa) yang tersedia di seluruh Indonesia sangat prospektif untuk dikembangkan baik sebagai listrik dan non listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan energi. Namun demikian sebagian besar pembangkit listrik tenaga berdasarkan fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berlebih. Oleh karena itu langkah yang dapat ditempuh Pemerintah Kota Balikpapan adalah memaksimalkan penggunaan energi baru terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomiannya.

Potensi energi baru terbarukan yang dapat dikembangkan di Kota Balikpapan yaitu:

- Biomassa;
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya;
- Pembangkit Listrik Tenaga Angin;

Penggunaan energi biomassa adalah pilihan prioritas yang memiliki nilai kelayakan investasi yang paling ekonomis diantara alternatif yang lainnya. Selain itu, bahan baku utamanya (sampah organik) yang mudah didapat dan sejak tahun 2012 penggunaan gas methane telah dikembangkan untuk melayani kebutuhan listrik warga di sekitar lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah Manggar. Pada tahun 2015 telah dilakukan kajian Teknis Pengelolaan Sampah Pasar Pandansari dimana sampah yang dihasilkan oleh Pasar Pandansari memiliki peluang untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku biogas yang dapat dikonversi menjadi listrik.

h. Terselenggaranya tatakelola pemerintahan yang baik dan penyediaan layanan publik yang prima

Dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, maka penyelenggaraan pemerintah harus dilaksanakan dengan keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum. Dengan adanya keadilan yang diberlakukan dalam setiap penegakan hukum, maka hal ini akan mampu membuka pikiran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjamin kelancaran, serta keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam mewujudkan *good governance* diperlukan peran masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat yang mempunyai hak untuk mencari, memperoleh,dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan masyarakat berpartisipasi aktif maka segala hal/tindakan yang berindikasi negatif dapat dicegah atau diatasi.

Pengembangan pelayanan publik yang prima harus diawali dengan adanya fungsi dasar yang harus dimiliki organisasi yaitu pemasaran, operasional dan finansial. Atas fungsi dasar tersebut dikembangkan *core skill* yang saling terkait dengan fungsi-fungsi yang lain. Beberapa substansi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, di mana hal ini sudah biasa dilakukan adalah sebagai berikut:

1. *Core sklills,* pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki perangkat birokrasi baik menyangkut profesionalisme individu maupun kolektif untuk mengantisipasi perubahan teknologi dan pasar secara kompetitif;
2. *Echnicians,* adalah kemampuan birokrat untuk menguasai aspek teknis secara professional di bidang pekerjaan sehingga menunjukkan kinerja yang penuh rasa tanggung jawab (responsibility);
3. *Management*: kemampuan birokrat untuk dapat mengelola pekerjaan secara professional baik menyangkut kinerja individual, kinerja tim maupun aspek managerial dan leadership;
4. *Business knowledge*, tuntutan terhadap pemahaman pengetahuan bisnis khususnya menyangkut nilai-nilai keuntungan (*privit making*) yang perlu diadopsi ke sektor publik dengan tidak mengabaikan aspek pemerataan dan keadilan;
5. *Skill,* keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh setiap aparatur khususnya menyangkut bidang pekerjaanya, termasuk penyesuaian terhadap proses perubahan;
6. *Habits,* membiasakan bekerja secara profesional dengan tidak mengabaikan aspek etika dan moral sehingga akan tercipta kultur kinerja yang kondusif;
7. *Cohesion,* membisakan bekerja secara sistemik atau keterpaduan antara berbagai komponen yang terlihat dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama;
8. *Collective Experience,* menjadikan pengalaman individu atau kelompok tentang keberhasilan atau kegagalan dalam bekerja sebagai pengalaman bersama;

9. *Knowledge of environment*, menyadari terjadinya perubahan setiap saat dalam suatu lingkungan sehingga pengetahuan tentang lingkungan untuk mengantisipasi perubahan sangat diperlukan;
10. *Technology,* diperlukan penguasaan teknologi sebagaimana persyaratan penting karena menguasai teknologi dapat diibaratkan menguasai dunia dan perubahan.

Selanjutnya dalam mewujudkan *tata kelola pemerintahan yang baik dan penyediaan layanan publik yang prima* diperlukan inovasi dalam pemanfaatan teknologi guna mendukung penataan kelembagaan, pengembangan aparatur, sistem pengawasan, serta pemeriksaan yang efektif.

Sasaran dari tujuan diatas adalah Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Target dari sasaran ini yang akan dicapai pada RPJMD 2016-2021 yaitu:

- Opini Laporan Keuangan di targetkan WTP pada tahun 2018 atau sama dengan posisi pada tahun 2015 yaitu WTP. Dalam pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien dan taat azas;
- Indeks persepsi korupsi ditargetkan 6,70 pada Tahun 2018 dengan posisi pada tahun 2015 sebesar 6.62%.
- Survey Kepuasan Masyarakat ditargetkan mencapai 79,76 pada tahun 2018 atau meningkat sebanyak 0,40 dari tahun 2015 sebesar 79.36.
- Indek Profesionalitas ASN dkitargetkan meningkat 2 angka pada tahun 2018 menjadi 84 poin dari tahun 2015 sebesar 82**.

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018

Penentuan prioritas pembangunan daerah tahun 2018 dilakukan dengan mempertimbangkan dan mendasarkan empat hal sebagai berikut:

a. Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2016 yang menunjukkan berbagai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh masyarakat Kota Balikpapan yang bersifat mendesak dan harus segera diatasi pada tahun 2018;
b. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dijabarkan dalam sembilan (9) agenda pembangunan (NAWA CITA) sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah dan 6 Prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Tmur sebagaimana yang tertuang pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018;
c. Arah kebijakan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 guna tercapainya visi dan misi Wali Kota Balikpapan sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan tahun 2018.

Prioritas pembangunan merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Prioritas

pembangunan harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan prioritas pembangunan atau strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder pembangunan daerah dan penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (strategic objective). Melalui parameter tersebut, dapat diidentifikasi indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya "berpikir strategik" dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (learning process).

Berdasarkan tabel tersebut dan telaah yang dilakukan selama proses penyusunan RKPD Kota Balikpapan 2018 baik melalui *focus group discusion*, konsultasi publik maupun musrenbang RKPD, Pemerintah Kota Balikpapan telah merumuskan strategi pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas akses layanan pendidikan (berbasis IPTEK dan IMTAQ) 12 Tahun yang terjangkau;
2. Peningkatan Aksesibilitas, kualitas dan manajemen pelayanan kesehatan;
3. Peningkatan Produktifitas, kompetensi tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
4. Percepatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
5. Peningkatan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak, serta kesetaraan gender;
6. Mewujudkan ruang kota yang berkualitas dan berkelanjutan;
7. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman berkelanjutan;
8. Pengembangan kehidupan masyarakat yang harmonis, berkarakter dan berkebudayaan serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan;
9. Mewujudkan pemerataan infrastruktur yang berkualitas;
10. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
11. Pengembangan potensi ekonomi lokal;

12. Pengelolaan Keuangan, aset dan manajemen Pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan taat azas dalam mendukung Pelayanan Publik Berstandar Internasional.

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas akses layanan pendidikan (berbasis IPTEK dan IMTAQ) 12 Tahun yang terjangkau;

   Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan karakter manusia yang sangat berperan dalam membentuk kualitas manusia secara normatif. Dengan sistem pendidikan yang berbasis IPTEK dan IMTAQ diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM yang mampu bersaing baik secara nasional maupun internasional. Tujuan utama bidang pendidikan yakni peningkatan kualitas dan kuantitas Akses Layanan Pendidikan secara merata. Selain itu, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang melek huruf dan kesadaran akan pentingnya informasi dan ilmu pengetahuan harus terus digalakkan. Kesadaran akan pentingnya pendidikan berimbas pada peningkatan. Dalam keterkaitannya dengan pembangunan, meningkatnya prioritas bidang pendidikan yakni rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah akan menstimulasi peningkatan indeks pembangunan manusia Kota Balikpapan.

2. Peningkatan Aksesibilitas, kualitas dan manajemen pelayanan kesehatan;

   Pembangunan di bidang kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan peningkatan aksestabilitas, kualitas dan manajemen pelayanan di bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan angka harapan hidup bagi masyarakat serta mampu menekan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Balikpapan.

3. Peningkatan Produktifitas, kompetensi tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;

   Peningkatan Produktifitas, Kompeteni Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dapat memberi dampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat Kota Balikpapan. Diperlukan sinergitas antara Pemerintah Kota Balikpapan dan Perusahaan yang berinvestasi di Kota Balikpapan dalam peningkatan dan perluasan kesempatan kerja dalam

rangka menurunkan angka pengangguran dengan cara membuka lapangan usaha secara efektif dan efisien.

Kondisi daerah yang kondusif dan penyederhanaan proses perizinan sangat berpengaruh terhadap perluasan kesempatan kerja. Selain kondisi daerah yang memadai, sumber daya manusia daerah juga mempengaruhi dalam penyerapan tenaga kerja.

4. Percepatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

   Strategi dalam percepatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat Kota Balikpapan. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun sosial sehingga diharapkan dapat mendorong kemandirian masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraannya.

   Upaya untuk mempercepat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat diarahkan dalam rangka penanggulangan kemiskinan terpadu, percepatan penanganan PMKS dan pengendalian penduduk.

5. Peningkatan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak, serta kesetaraan gender;

   Peningkatan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. Masih adanya kesenjangan aksesibilitas dalam berbagai bidang mengakibatkan peran perempuan menjadi lemah dan berdampak kepada meningkatnya kekerasan terhadap perempuan baik yang terjadi di lingkungan domestik maupun masyarakat. Selain itu masih ditemukan regulasi maupun kebijakan yang belum berpihak pada kepentingan perempuan.

   Peningkatan kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan bahwa belum ada komitmen yang kuat antara Pemerintah Kota dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan anak yang dapat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan sosial masyarakat.

   Peningkatan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender perlu diarahkan untuk mendorong adanya perubahan

nilai-nilai yang ada dalam keluarga maupun masyarakat sehingga dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya, tanpa kehilangan kodratnya sebagai wanita, untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan. Selain itu memperkuat peran keluarga dan mengedukasi masyarakat untuk ikut melindungi hak-hak anak diharapkan berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup anak.

6. Mewujudkan ruang kota yang berkualitas dan berkelanjutan;

   Sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional dan pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan menunjukkan perkembangan pembangunan yang cukup pesat. Dalam konteks penyelenggaraan penataan ruang di daerah, saat ini Kota Balikpapan sebagai suatu daerah otonom sudah memiliki suatu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yaitu RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 dimana pelaksanaannya telah berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. RTRW Kota Balikpapan telah mengalokasikan ruang dengan memperhitungkan kemampuan lahan dan keseimbangan lingkungan di Kota Balikpapan.

   Penataan ruang merupakan instrumen penting untuk mewujudkan ruang kota yang berkualitas dan berkelanjutan. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk memastikan terlaksananya perencanaan tata ruang secara terpadu dan menyeluruh; terwujudnya tertib pemanfaatan ruang; serta terselenggaranya pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, hal yang penting untuk perlu dilaksanakan adalah menyiapkan dokumen rencana tata ruang, melaksanakan rencana tata ruang melalui program dan kegiatan serta melakukan pengendalian pemanfaatan ruang melalu perangkat peraturan zonasi, insentif dan disinsentif, perizinan dan pemberlakuan sanksi.

7. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman berkelanjutan;

   Untuk mewujudkan Balikpapan Nyaman Dihuni, selain kondisi lingkungan dan ruang kota yang berkualitas, hal lainnya yang sangat penting adalah kualitas lingkungan permukiman. Lingkungan permukiman adalah bagian wilayah kota sebagai wadah hunian yang meliputi segala sarana dan prasarana yang menunjang kehidupan yang

menjadi satu kesatuan dengan tempat tinggal. Kelengkapan dan kualitas sarana dan prasarana ini kemudian dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan lingkungan.

Sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman merupakan persyaratan kelayakan lingkungan permukiman yang dapat menjadi indikator kekumuhan suatu kawasan yang meliputi jalan lingkungan, drainase lingkungan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air bersih/minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, dan mitigasi bencana dan kebakaran, hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) yang antara lain adalah memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkesinambungan atas air dan sanitasi untuk semua orang dan membuat kota dan pemukiman manusia terbuka, aman, tahan lama, serta berkesinambungan.

8. Pengembangan kehidupan masyarakat yang harmonis, berkarakter dan berkebudayaan serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan;

   Pengembangan kehidupan masyarakat yang harmonis, berkarakter dan berkebudayaan merupakan syarat utama bagi keberlangsungan proses pembangunan. Kehidupan masyarakat yang harmonis, berkarakter dan berkebudayaan menunjukkan bahwa masyarakat Kota Balikpapan memiliki toleransi yang tinggi, memiliki komitmen yang kuat untuk bersama-sama menjaga kondusifitas kota serta memiliki semangat yang tinggi untuk menjaga adat istiadat dan budaya Indonesia. Tujuan dan sasaran pembangunan kota tidak akan tercapai tanpa partisipasi masyakat.

9. Mewujudkan pemerataan infrastruktur yang berkualitas;

   Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi wilayah tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur khususnya infrastruktur jalan dan transportasi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya.

   Pemerataan pembangunan infrastruktur diharapkan menjadi penghubung pusat-pusat pertumbuhan dan kegiatan perekonomian serta

pendukung pengembangan wilayah. Infrastruktur yang berkualitas juga diharapkan mampu melayani seluruh elemen masyarakat sehingga terwujudnya infrastruktur yang handal. Selain itu, infrastruktur yang berkualitas juga diharapkan mampu menjawab permasalahan Kota Balikpapan yang ada akibat rendahnya kualitas infrastruktur seperti kemacetan dan banjir serta tingginya angka inflasi.

10. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, dimaksudkan untuk menggerakkan sendi-sendi perekonomian masyarakat, menggali potensi-potensi kemandirian dan pengembangan ekonomi rakyat melalui penguatan sumber daya manusia dan penerapan teknologi bagi pelaku usaha, mempersiapkan sarana prasarana, mendorong UMKM yang mandiri, memperkuat sarana prasarana jaringan distribusi, menyiapkan regulasi dalam rangka stabilisasi harga, mengembangkan kapasitas dan kualitas logistik perdagangan dan sarana distribusi, dan Meningkatkan kualitas keamanan barang.

Arah kebijakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi adalah meningkatkan nilai tambah produksi Industri dan peningkatan kualitas serta kuantitas UMKM dan koperasi yang mandiri. Implementasi terhadap arah kebijakan meningkatkan nilai tambah produksi industri dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya pelaku industri kecil menengah (IKM) dan revitalisasi serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis kearifan lokal. Sedangkan implementasi terhadap arah kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas UMKM serta koperasi yang mandiri dilakukan melalui dua hal yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia UMKM dan koperasi serta penguatan kelembagaan UMKM dan koperasi.

11. Pengembangan potensi ekonomi lokal;

Pengembangan potensi ekonomi lokal dapat dicapai melalui peningkatan promosi wisata, menjalin kerjasama dengan asosiasi pariwisata yang lebih beragam, mengembangkan sarana prasarana pendukung wisata, menerapkan regulasi kemudahan investasi, membangun iklim investasi daerah yang kondusif, reformasi kebijakan perizinan investasi melalui pelayan terpadu satu pintu, intensifikasi dan diversifikasi pertanian dan mengembangkan potensi sumber energi alternatif.

Kebijakan yang akan ditempuh untuk dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal adalah dengan pengembangan kawasan industri pariwisata yang berwawasan lingkungan, peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global, meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas dan peningkatan serta pengembangan energi baru terbarukan.

12. Pengelolaan Keuangan, aset dan manajemen Pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan taat azas dalam mendukung Pelayanan Publik Berstandar Internasional;

    Komponen strategi pengelolaan keuangan, aset dan manajemen pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan taat azas dalam mendukung pelayanan publik berstandar internasional meliputi:

    a. Peningkatan sarana prasarana, dan manajemen pengelolaan keuangan daerah;
    b. Pemetaan aset kota, peningkatan sistem manajemen pengelolaan aset;
    c. Peningkatan kelembagaan, regulasi, SDM, dan SARPRAS pelayanan publik dan pengintegrasian sistem manajemen di seluruh SKPD (pengembangan smart city);
    d. Penataan ulang pegawai sesuai kompetensi, kualifikasi dan kinerja;
    e. Harmonisasi produk hukum daerah;
    f. Sinkronisasi dalam rangka peningkatan kualitas dan konsistensi dokumen perencanaan daerah dan SKPD.

    Arah kebijakan yang ditempuh untuk peningkatan sarana prasarana, dan manajemen pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dan optimalisasi manajemen aset.

    Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dilakukan melalui perbaikan sistem dan manajemen pengelolaan keuangan serta peningkatan pengawasan internal. Sedangkan implementasi kebijakan optimalisasi manajemen aset dilakukan melalui peningkatan pengamanan dan pengelolaan aset daerah.

Seluruh prioritas pembangunan kota tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi program prioritas pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2018 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.
Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Balikpapan

Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja	Target 2018	Program Prioritas
1	Peningkatan kualitas dan kuantitas akses layanan pendidikan (berbasis IPTEK dan IMTAQ) 12 Tahun yang terjangkau	Angka Melek Huruf Penduduk usia >15 tahun	99.38%	Program Pendidikan Non Formal
		Jumlah Kunjungan Perpustakaan (orang)	160.000	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
		APK PAUD/TK/ Sederajat	76,00%	Program Pendidikan Anak Usia Dini
		Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah PAUD/TK	40.50%	
		Persentase SD/MI/Sederajat berbasis IPTEK	6.60%	Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
		Persentase SMP/MTs/Sederajat berbasis IPTEK	20.83%	
		Persentase SD/MI/Sederajat berbasis IMTAQ	100%	
		Persentase SMP/MTs/Sederajat berbasis IMTAQ	100%	
		APK SD/MI/Sederajat	93.10%	
		APK SMP/MTs/Sederajat	84.10%	
		APM SD/MI/ Sederajat	97.37%	
		APM SMP/MTs/ Sederajat	88.50%	
		APS SD/MI/ Sederajat	95.37%	
		APS SMP/MTs/ Sederajat	86.29%	
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.02%	

		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.18%	
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%	
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	104.60%	
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	99.02%	
		Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah SD/MI/ Sederajat	26.81%	
		Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah SMP/MTs/ Sederajat	20.57%	
		Persentase bangunan SD/MI kondisi bangunan baik	11.15%	
		Persentase bangunan SMP/MTs kondisi bangunan baik	37.90%	
		Persentase SMA/SMK/MA Sederajat berbasis IPTEK	88.00%	Program Pendidikan Menengah
		Persentase SMA/SMK/MA Sederajat berbasis IMTAQ	79.00%	
		APK SMA/SMK/MA/ Sederajat	78.10%	
		APM SMA/SMK/MA/ Sederajat	69.38%	
		APS SMA/SMK/MA/ Sederajat	80.03%	
		Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0.05%	
		Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100%	
		Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA/ Sederajat	17.52%	
		Persentase bangunan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	29.86%	

		Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		SD/MI/ Sederajat	86.64%	
		SMP/MTs/ Sederajat	94.49%	
		SMA/SMK/MA/ Sederajat	94.18%	
		Rasio guru/murid per kelas rata-rata		
		PAUD/TK	1 : 100	
		SD/MI/Sederajat	1:25	
		SMP/MTs/Sederajat	1 : 18	
		SMA/SMK/MA/ Sederajat	1 : 14	
2	Peningkatan Aksesibilitas, kualitas dan manajemen pelayanan kesehatan	Angka Kesakitan	98.25%	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
		Proporsi Kelahiran yang dibantu tenaga kesehatan terlatih	98%	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
		AKB	4/1.000 KH	
		AKABA	5/1.000 KH	
		AKI	69/100.000 KH	
		Prevalensi HIV dan AIDS	< 1	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
		Angka Kejadian DBD per 100.000 penduduk	275/ 100.000	
		Prevalensi TBC	125/ 100.000	
		Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Nasional	75%	Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas SDM serta Sarana dan Prasarana Kesehatan
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	70%	

		Persentase Rumah Sakit yang terkareditasi nasional	65%	
		Persentase Pemenuhan SDM RS	75%	
3	Peningkatan Produktifitas, kompetensi tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kerja	100%	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Persentase Pencari Kerja yang difasilitasi Magang di perusahaan	53%	
		Persentase Calon Wirausaha yang mendapatkan Pembinaan	40%	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
		Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	25%	
		Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan dengan Perjanjian Bersama	50%	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
4	Percepatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	66%	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
		Persentase Peserta didik Keluarga Miskin penerima beasiswa	100%	
		Persentase PMKS miskin yang terlayani	100%	
		Rumah Tidak Layak Huni	1,030	
		Persentase PMKS yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	79.00%	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
		Persentase PSKS yang telah dibina	50.35%	Program Pemberdayaaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
		Persentase Pelayanan Masyarakat miskin penerima RASKIN	100%	Penanggulangan Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan
		Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR)	66.50%	Program Keluarga Berencana
		Proporsi Wanita Usia Subur dalam Status Kawin Yang Tidak Menggunakan KB (Unmet Need)	12.05%	
		Peningkatan Persentase Kelompok Kegiatan (POKTAN) dan pendukung program KKBPK	80.39%	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

		Peningkatan Jumlah Kelompok Remaja Pendukung Program KKBPK (PIK R/M)	44	Program Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja)
5	Peningkatan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak, serta kesetaraan gender	Persentase Penyelesaian Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan	72.28%	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
		Persentase Penyelesaian Penanganan Korban Kekerasan terhadap Anak	62.96%	
		Peringkatan dan Penguatan Gugus Tugas KLA (Strata KLA)	Pratama	Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak
6	Mewujudkan ruang kota yang berkualitas dan berkelanjutan	Perda Tata Ruang (1 RTRW, 1 RDTR, 1 Insentif & Disentif)	-	Program Perencanaan Tata Ruang
		Persentase penertiban pemanfaatan ruang	98.2%	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
		Indeks Tutupan Lahan	48,17	Program Perlindungan dan Konversi Sumber Daya Alam
		Peningkatan Indeks Pencemaran Udara	92.34	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
		Peningkatan Indeks Pencemaran Air	41.80	
		Persentase Jumlah DAS yang dipantau kualitas mutunya (total DAS 42)	62.00%	
		Persentase Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan	100%	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
		Persentase Informasi Lingkungan yang mudah diakses	100%	
		Persentase Sekolah Adiwiyata	53.41%	
		Persentase pengangkutan sampah ke TPA	62.41%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
		Persentase pengolahan sampah di sumber	22.80%	
7	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman berkelanjutan	Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	272 Ha	Program Lingkungan Sehat Perumahan
		Menurunnya Backlog Perumahan	90078 unit	Program Pengembangan Perumahan
		Kapasitas Air Baku	1,500	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku

		Cakupan Layanan Air Minum	79.00%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
		Cakupan Layanan Air Limbah	94%	
		Tingkat waktu tanggap	90.41%	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bencana dan Bahaya Kebakaran
		Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	75%	
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Dampak Bencana	100%	Program Sarana dan Prasarana Logistik
		Cakupan Pemulihan Perumahan Rusak Berat dan Roboh	65%	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
8	Pengembangan kehidupan masyarakat yang harmonis, berkarakter dan berkebudayaan serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase poskamling aktif	63,61%	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
		Penurunan Angka Kriminalitas	19,5%	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
		Rasio Petugas Linmas	4%	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
		Angka Partisipasi dalam Pemilihan Umum	62%	
		Penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba	3.2	Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
		Peningkatan jumlah pemuda berprestasi (orang)	46	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
		Peningkatan prestasi olahraga (jumlah medali)	30 Provinsi, 31 Nasional	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olah raga	91.07%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
		Peningkatan prestasi di bidang seni, budaya dan keagamaan	6	Program Pengelolaan Keanekaragaman Budaya
		Cagar Budaya yang dilindungi	118 buah	Program Pelestarian Cagar Budaya

		Persentase potensi peningkatan nilai Swadaya Masyarakat Dalam kegiatan Pembangunan di Kelurahan	6%	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan
		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklajuti	100%	Program Penelitian dan Pengembangan
9	Mewujudkan pemerataan infrastruktur yang berkualitas	Indeks Aksesibilitas Kawasan Perkotaan	1.450	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
		Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang tersedia	1 unit	
		Persentase penyediaan terminal angkutan penumpang dan barang	33%	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
		Persentase Pembangunan Koridor SAUM	16.67%	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
		Persentase Kemantapan Jalan	79.65%	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
		Persentase penyediaan rambu jalan	32.30%	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
		Persentase penyediaan ATCS	68.00%	
		Menurunnya Titik Banjir	46	Program Pengendalian Banjir
		Persentase Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik	45.03%	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
		Persentase Panjang Trotoar yang telah memenuhi standar	7.98%	Program Pembangunan Pedestrian Kota
		Rasio Penyediaan Jalur Sepeda	8.95%	Program Keselamatan Pengguna Jalan
		Persentase Zebra Cross dan pita penggaduh untuk zona aman sekolah	27.78%	
		Persentase Pengujian Kendaraan Bermotor	65%	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
		Pembangunan PJU	12539	Program Penerangan Jalan Umum
		Peningkatan Kualitas PJU (Lampu LED)	52.59%	

		Kantor pemerintah dalam kondisi baik	80.65%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10	Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase IKM menerapkan teknologi industri	19%	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
		Pertumbuhan IKM	0,6%	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
		Persentase pembentukan kawasan dan sentra industri yang berwawasan lingkungan (KIK, SIKS & SIKT)		Program Penataan Struktur Industri
		• Persentase industri eksisting terhadap perizinan industri di KIK	25%	
		• Persentase industri eksisting terhadap siteplan SIKS	70%	
		• Persentase industri eksisting terhadap siteplan SIKT	10%	
		persentase industri yang menggunakan bahan baku lokal	7%	
		jumlah UMKM yang bermitra dengan perusahaan	135 UMKM	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
		Persentase Jumlah Koperasi aktif	79.2%	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi
		Persentase kredit UMKM terhadap seluruh jumlah kreditdi Bank	36.30%	Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil Menengah Yang Kondusif
		Jumlah Pengurus/pengawas/pengelola Koperasi bersertifikat	60	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
		skor Pola Pangan Harapan (PPH)	84%	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
		Laju Inflasi	5 (+- 1)	Program Pengendalian Inflasi
		Nilai eksport bersih (juta dollar)	2.220,75	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
		Cakupan unit usaha dagang	110	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
		Persentase pelaku usaha yang menjual produk sesuai standar	32%	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
		Persentase Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) ulang	66,71%	

		Persentase pasar berklasifikasi A	11%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar
		Nilai pasar terhadap penilaian adipura	72	Program Peningkatan Kebersihan, Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan Pasar
11	Pengembangan potensi ekonomi lokal	Jumlah kunjungan wisatawan	2,345,002	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
		Peningkatan event Pariwisatan dan Budaya	14 Event (luar 4; Dalam 10)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Budaya
		Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan	32 destinasi	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
		Meningkatnya potensi obyek wisata unggulan di kota Balikpapan	8 obyek wisata	Program Pembinaan dan Pengembangan Obyek Wisata
		Jumlah asosiasi yang bermitra	7 asosiasi	Program pengembangan kemitraan
		Rencana investasi (Triliun)	5.52	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
		Jumlah Tingkat Kepatuhan Perizinan penanaman modal	130	Program Pengawasan, Pengendalian Investasi dan Perizinan
		Persentase rencana investor PMA terhadap PMDN swasta nasional	10%	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
		SKM pelayanan perizinan	88,6	Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan
		Persentase jumlah Pelayanan Perizinan yang terintegrasi secara online	23%	Program Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan
		Jumlah peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura (ton)	1,137	Program Peningkatan Produksi Pertanian
		Jumlah peningkatan produksi tanaman perkebunan (ton)	290.56	Program Peningkatan Produksi Perkebunan
		Jumlah peningkatan produksi ternak (ton)	5,948.92	Program Peningkatan Produksi Peternakan
		Jumlah peningkatan produksi perikanan (ton)	383.4	Peningkatan Produksi Perikanan
12	Pengelolaan Keuangan, aset dan manajemen Pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan taat azas	persentase proses penyelesaian RKA/DPA	100%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Persentase PAD terhadap APBD	22%	

	dalam mendukung Pelayanan Publik Berstandar Internasional	Total pendapatan daerah	1,848 Trilyun	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Persentase perangkat daerah dengan realisasi anggaran di atas 85%	88.89%	Program Pengelolaan Keuangan Perbendaharaan
		persentase Jumlah bidang tanah pemerintah yang bersertifikat	39.72%	Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil pemeriksaan/ Pengawasan	83%	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
		Jumlah perangkat daerah yang nilai evaluasi SAKIP "baik"	8 Perangkat Daerah	
		Aplikasi yang terintegrasi dengan SIPKD	1.00	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
		persentase aparatur yang memperoleh pengembangan karir	28%	Program Manajemen Pengembangan Karir ASN
		persentase penyelesaian penanganan kasus pelanggaran disiplin pns	100%	Program Peningkatan Disiplin dan Kesejahteraan ASN
		persentase fasilitasi pelayanan kesejahteraan aparatur	40%	
		Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan menjadi produk hukum daerah	30%	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
		Persentase Publik Hearing yang dilaksanakan	80%	
		Persentase Ketepatan agenda sidang	100%	
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan SIKD	15%	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
		Presentase perangkat daerah yang arsipnya telah terdata dan tertata	20%	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
		Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100%	Program Penataan Administrasi Kependudukan
		Cakupan Penerbitan KTP-el	95%	
		Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	82.5%	
		Cakupan penerbitan akta kematian	95%	

		cakupan kepemilikan kartu identitas anak	70%	
		Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Masyarakat	75%	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
		Persentase Program Legislasi daerah yang di harmonisasi	10%	Program Penataan peraturan perundang-undangan
		Persentase Perkara yang Ditangani	100%	Program Bantuan Hukum
		Persentase data yang tersedia berdasarkan urusan pada UU No.23 Tahun 2014	100%	Program Pengembangan Data/Informasi
		Persentase keselarasan dokumen RKPD dengan RPJMD Kota Balikpapan	100%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase Capaian Kinerja RKPD	92%	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh Perangakt Daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.

Suatu program prioritas pada prinsipnya dibagi menjadi:

1. Program Prioritas I:
   Merupakan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2018 sesuai dengan pentahapan tema RPJMD atau program unggulan Wali Kota.
2. Program Prioritas II:
   Merupakan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2018 serta indikatornya.
3. Program Prioritas III:
   Merupakan prioritas program ditingkat Perangkat Daerah yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah.

Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada program prioritas pembangunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021, dimana prioritas program tersebut telah menggambarkan target indikator capaian kinerja beserta pagu indikatif selama 5 (lima) tahun. Program prioritas pembangunan daerah RPJMD oleh Perangkat Daerah dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah, masing-masing program diuraikan kedalam kegiatan disertai pagunya.

Selanjutnya apabila terjadi perhitungan kapasitas keuangan daerah tahun rencana yang berbeda dengan perhitungan RPJMD maka atas kelebihan/kekurangan dana pagu tersebut dialokasikan untuk program/kegiatan alternatif dan program kegiatan baru. Suatu program kegiatan baru yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada renstra Perangkat Daerah dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
2. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran Perangkat Daerah;

3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah;
4. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun RKPD, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan rencana penggunaan kapasitas ril anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan.
2. Menentukan keluaran/output setiap kegiatan.
3. Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program.
4. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya.

Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah.

Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk rancangan awal RKPD, disampaikan ke Perangkat Daerah sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan Perangkat Daerah juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. Program, capaian kinerja, beserta pagu indikatifnya, yang mengacu pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 sebagaimana yang tercantum pada lampiran RKPD Tahun 2018 ini.

BAB VI
PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2018 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 yang memuat visi dan misi, kebijakan umum dan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa RKPD Kota/Kabupaten merupakan pedoman untuk penyusunan rancangan APBD tahun berikutnya.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah ini, disusun sebagai konsekuensi dari pemberlakuan peraturan dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, untuk implementasinya diperlukan koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Kota dan partisipasi masyarakat serta seluruh pelaku pembangunan (stake holder) melalui Forum Perangkat Daerah dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan.

Dokumen RKPD Kota Balikpapan ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Disamping itu, usulan kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain pembiayaannya diusulkan ke APBD Pemerintah Kota Balikpapan, juga diusulkan ke APBD Provinsi Kalimantan Timur dan ke Pemerintah Pusat melalui APBN.

Keberhasilan pembangunan di Kota Balikpapan selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Kota Balikpapan juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita-cita masyarakat Kota Balikpapan sesuai visi dan misi yang

tertuang dalam dokumen perencanaan dapat terwujud sesuai waktu yang telah ditentukan.

Dokumen RKPD Kota Balikpapan menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan APBD yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun 2018 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2018. Adapun Kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. RKPD Kota Balikpapan Tahun 2018, tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Perangkat Daerah dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program-program RKPD Kota Balikpapan Tahun 2018 dengan sebaik-baiknya.
3. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan tahun 2018, RKPD ini juga disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan, APBD Provinsi Kalimantan Timur maupun dari APBN, maka setiap Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2018 sebagai penjabaran dari Rencana Starategis Perangkat Daerah (Renstra – PD).
5. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui Forum Perangkat Daerah serta forum penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.

6. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan. Program tersebut direncanakan berdasarkan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat diharapkan dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan di Kota Balikpapan.

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE
NIP 196108061990031004